



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - neraca;
 - laporan arus kas;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- pendapatan sebesar Rp911.076.883.278,80 (sembilan ratus sebelas miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh rupiah);
- belanja sebesar Rp939.371.337.181,35 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu koma tiga puluh lima rupiah);
- defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp(28.294.453.902,55) (minus dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua koma lima puluh lima rupiah);
- pembiayaan terdiri atas:
 - penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.206.985.982,71 (tujuh puluh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah).

2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp41.912.532.080,16 (empat puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.400.759.579,20 (tujuh miliar empat ratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp918.477.642.858,00 (sembilan ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 2. realisasi pendapatan sebesar Rp911.076.883.278,80 (sembilan ratus sebelas miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh rupiah);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp49.313.291.658,65 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan koma enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp988.684.628.840,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 2. realisasi belanja sebesar Rp939.371.337.181,35 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu koma tiga puluh lima rupiah);
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(41.912.532.079,45) (minus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan sebesar Rp70.206.985.982,00 (tujuh puluh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 2. realisasi surplus/defisit sebesar Rp28.294.453.902,55 (dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua koma lima puluh lima rupiah).

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp0,71 (nol koma tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp70.206.985.982,00 (tujuh puluh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 - 2. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.206.985.982,71 (tujuh puluh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - 2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2022 terdiri atas:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.474.613.185.317,86 (dua triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas koma delapan puluh enam rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp16.553.933.658,25 (enam belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma dua puluh lima rupiah);
- c. jumlah ekuitas Rp2.458.059.251.659,61 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan koma enam puluh satu rupiah).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun 2022 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp70.506.119.337,98 (tujuh puluh miliar lima ratus enam juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp103.454.916.292,31 (seratus tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh satu);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp(131.749.370.194,86) (minus seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh empat koma delapan puluh enam rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp(175.869.794,27) (minus seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah);
- f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.035.795.641,16 (empat puluh dua miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu koma enam belas rupiah).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

- a. pendapatan sebesar Rp950.705.159.058,95 (sembilan ratus lima puluh miliar tujuh ratus lima juta seratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan koma sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp99.380.281.349,72 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua rupiah);
 - 2. pendapatan transfer sebesar Rp788.731.551.572,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp62.593.326.137,23 (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah).
- b. beban terdiri dari:
 - 1. beban operasi sebesar Rp956.651.404.718,46 (sembilan ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu tujuh ratus delapan belas koma empat puluh enam rupiah);
 - 2. defisit operasi sebesar Rp(5.946.245.659,51) (minus lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah);
 - 3. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp945.393.931,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - 4. pos luar biasa sebesar Rp336.162.297,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- c. defisit laporan operasional sebesar Rp(5.337.014.025,51) (minus lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat belas ribu dua puluh lima koma lima puluh satu rupiah).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp70.206.985.982,71 (tujuh puluh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp70.206.985.982,71 (tujuh puluh miliar dua ratus enam juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah);
- c. subtotal (a-b) Rp 0,00 (nol rupiah);
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp41.912.532.080,16 (empat puluh satu miliar Sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah);
- e. subtotal (c+d) Rp41.912.532.080,16 (empat puluh satu miliar Sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah);
- f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp41.912.532.080,16 (empat puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.488.069.809.561,05 (dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu koma nol lima rupiah);
- b. defisit laporan operasional Rp(5.337.014.025,51) (minus lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat belas ribu dua puluh lima koma lima puluh satu rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut :
 1. dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp(24.673.943.875,93) (minus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh tiga rupiah);
- d. ekuitas akhir sebesar Rp2.458.059.251.659,61 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan koma enam puluh satu rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat Neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah terdiri atas; iktisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah; iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juni 2023


BUPATI DHARMASRAYA,
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR...³
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/31/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR.106

D A F T A R I S I

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
LAMPIRAN I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
LAMPIRAN I.1	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN ORGANISASI	1
LAMPIRAN 1.2	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	16
LAMPIRAN 1.3	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1	URUSAN WAJIB	
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.01.01	PENDIDIKAN	
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN	18
1.01.02.	KESEHATAN	
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	24
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	31
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM	
1. 01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	32
1.01.04.	PEKERJAAN UMUM	
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	38
1.01.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.01.05.01.	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	42
1.01.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
1.01.06.	SOSIAL	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	48
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
2.03.	PANGAN	
2.03.01.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	54
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	
2.05.01.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	57
2.06	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	61
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	63
2.02.09	PERHUBUNGAN	
2.02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	66
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	69
2.11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.11.01.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	72
2.12	DINAS PENANAMAN MODAL	
2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	76
2.16	KEBUDAYAAN	
2.16.01.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	79

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
2.17	PERPUSTAKAAN	
2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	84
3	URUSAN PILIHAN	
3.03	PERTANIAN	
3.03.01.01	DINAS PERTANIAN	87
3.08	TRANSMIGRASI	
3.08.01.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	91
4.	PENUNJANG URUSAN	
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	94
4.01.01.02	SEKERTARIAT DPRD	100
4.01.01.03	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	103
4.01.01.04	BADAN KEUANGAN DAERAH	106
4.01.01.05	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	111
4.01.01.06	INSPEKTORAT KABUPATEN	114
4.01.01.07	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	117
4.01.01.08	KECAMATAN SITIUNG	120
4.01.01.09	KECAMATAN KOTO BARU	123
4.01.01.10	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	126

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
4.01.01.11	KECAMATAN IX KOTO	129
4.01.01.12	KECAMATAN TIMPEH	131
4.01.01.13	KECAMATAN KOTO SALAK	133
4.01.01.14	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	135
4.01.01.15	KECAMATAN KOTO BESAR	137
4.01.01.16	KECAMATAN PADANG LAWEH	140
4.01.01.17	KECAMATAN TIUMANG	142
4.01.01.18	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	144
LAMPIRAN 1.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	148
LAMPIRAN II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	241
LAMPIRAN III	LAPORAN OPERASIONAL□	242
LAMPIRAN IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	244
LAMPIRAN V	NERACA	245
LAMPIRAN VI	LAPORAN ARUS KAS	248
LAMPIRAN VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN□	251
LAMPIRAN VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH□	597
LAMPIRAN IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	598
LAMPIRAN X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	599

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
LAMPIRAN XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	601
LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	602
LAMPIRAN XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP□	603
LAMPIRAN XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	604
LAMPIRAN XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA□	605
LAMPIRAN XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH□	606
LAMPIRAN XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK□	607
LAMPIRAN XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG□	608
LAMPIRAN XIX	DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	609
LAMPIRAN XX	IKTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI ATAS	
LAMPIRAN XX.1	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	610
LAMPIRAN XX.2	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH	611

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022					
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	918.477.642.858,00	911.076.883.278,80	12.953.860.420,80	99,19
4 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	61.453.271.400,00	63.927.945.457,00	2.474.674.057,00	104,03
4 . 1.01	Pendidikan	45.750.000,00	63.058.000,00	17.308.000,00	137,83
4 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN	45.750.000,00	63.058.000,00	17.308.000,00	137,83
4 . 1.02	Kesehatan	59.872.243.000,00	63.105.420.257,00	3.233.177.257,00	105,40
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	9.859.743.000,00	8.787.815.094,00	(1.071.927.906,00)	89,13
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02	RSUD SUNGAI DAREH	50.012.500.000,00	54.317.605.163,00	4.305.105.163,00	108,61
4 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.330.000.000,00	526.738.000,00	(803.262.000,00)	39,60
4 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.330.000.000,00	526.738.000,00	(803.262.000,00)	39,60
4 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	205.278.400,00	232.729.200,00	27.450.800,00	113,37
4 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	205.278.400,00	232.729.200,00	27.450.800,00	113,37
4 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.975.000.000,00	1.640.241.700,00	(334.758.300,00)	83,05
4 . 2.03	Pangan	265.000.000,00	131.550.000,00	(133.450.000,00)	49,64
4 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	265.000.000,00	131.550.000,00	(133.450.000,00)	49,64
4 . 2.05	Lingkungan Hidup	110.000.000,00	156.483.000,00	46.483.000,00	142,26
4 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	110.000.000,00	156.483.000,00	46.483.000,00	142,26
4 . 2.09	Perhubungan	350.000.000,00	244.052.000,00	(105.948.000,00)	69,73
4 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15	DINAS PERHUBUNGAN	350.000.000,00	244.052.000,00	(105.948.000,00)	69,73
4 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00	336.625.000,00	(163.375.000,00)	67,33
4 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	500.000.000,00	336.625.000,00	(163.375.000,00)	67,33
4 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.000.000,00	148.644.000,00	(1.356.000,00)	99,10

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	150.000.000,00	148.644.000,00	(1.356.000,00)	99,10
4 . 2.12	Penanaman Modal	600.000.000,00	622.887.700,00	22.887.700,00	103,81
4 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	600.000.000,00	622.887.700,00	22.887.700,00	103,81
4 . 3	Urusan Pilihan	145.480.000,00	125.156.950,00	(20.323.050,00)	86,03
4 . 3.03	Pertanian	131.500.000,00	112.417.250,00	(19.082.750,00)	85,49
4 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01	DINAS PERTANIAN	131.500.000,00	112.417.250,00	(19.082.750,00)	85,49
4 . 3.08	Transmigrasi	13.980.000,00	12.739.700,00	(1.240.300,00)	91,13
4 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	13.980.000,00	12.739.700,00	(1.240.300,00)	91,13
4 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	854.903.891.458,00	845.383.539.171,80	(9.520.352.286,20)	98,89
4 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	854.903.891.458,00	845.383.539.171,80	(9.520.352.286,20)	98,89
4 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	277,00
4 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	854.877.771.458,00	845.340.443.571,80	(9.537.327.886,20)	98,88
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	166,67
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN SITIUNG	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN KOTO BARU	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	3.500.000,00	4.685.600,00	1.185.600,00	133,87
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN TIMPEH	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	0,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN KOTO SALAK	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.08	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.09	KECAMATAN KOTO BESAR	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.10	KECAMATAN PADANG LAWEH	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.11	KECAMATAN TIUMANG	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00
5	BELANJA DAERAH	988.684.628.840,00	939.371.337.181,35	(49.313.291.658,65)	95,01
5 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	641.020.142.335,00	600.265.043.796,32	40.755.098.538,68	93,64
5 . 1.01	Pendidikan	271.628.179.365,00	261.276.606.880,49	10.351.572.484,51	96,19
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN	271.628.179.365,00	261.276.606.880,49	10.351.572.484,51	96,19
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	246.404.451.716,00	236.811.036.687,56	9.593.415.028,44	96,11
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	200.647.412.742,00	193.339.905.067,00	7.307.507.675,00	96,36
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.179.738.974,00	35.115.095.148,56	2.064.643.825,44	94,45

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	8.577.300.000,00	8.356.036.472,00	221.263.528,00	97,42
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	25.223.727.649,00	24.465.570.192,93	758.157.456,07	96,99
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.546.171.349,00	11.481.304.608,00	64.866.741,00	99,44
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.774.853.924,00	11.083.063.208,93	691.790.715,07	94,12
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.902.702.376,00	1.901.202.376,00	1.500.000,00	99,92
5 . 1.02	Kesehatan	203.011.327.881,00	192.290.226.860,11	10.721.101.020,89	94,72
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	113.672.685.220,00	107.081.225.887,11	6.591.459.332,89	94,20
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	103.320.542.330,00	97.418.777.118,74	5.901.765.211,26	94,29
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	58.940.923.811,00	57.494.220.178,44	1.446.703.632,56	97,55
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.379.618.519,00	39.924.556.940,30	4.455.061.578,70	89,96
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	10.352.142.890,00	9.662.448.768,37	689.694.121,63	93,34
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.678.547.618,00	7.102.814.632,00	575.732.986,00	92,50
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.127.199.272,00	2.047.688.492,00	79.510.780,00	96,26
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	546.396.000,00	511.945.644,37	34.450.355,63	93,69
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02	RSUD SUNGAI DAREH	89.338.642.661,00	85.209.000.973,00	4.129.641.688,00	95,38
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	71.407.722.435,00	68.016.091.478,00	3.391.630.957,00	95,25
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	35.115.819.129,00	34.291.193.110,00	824.626.019,00	97,65
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.291.903.306,00	33.724.898.368,00	2.567.004.938,00	92,93
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2	BELANJA MODAL	17.930.920.226,00	17.192.909.495,00	738.010.731,00	95,88
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.345.920.226,00	16.801.404.296,00	544.515.930,00	96,86
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	391.505.199,00	(391.505.199,00)	0,00
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	585.000.000,00	0,00	585.000.000,00	0,00
5 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.087.483.749,00	102.698.219.050,32	12.389.264.698,68	89,23
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.087.483.749,00	102.698.219.050,32	12.389.264.698,68	89,23
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	54.529.344.513,00	52.475.995.249,00	2.053.349.264,00	96,23
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.977.469.000,00	4.591.941.379,00	385.527.621,00	92,25

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.551.875.513,00	47.884.053.870,00	1.667.821.643,00	96,63
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	60.558.139.236,00	50.222.223.801,32	10.335.915.434,68	82,93
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.622.700.000,00	1.050.250.000,00	572.450.000,00	64,72
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.417.549.536,00	1.460.134.280,00	4.957.415.256,00	22,75
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.517.889.700,00	47.711.839.521,32	4.806.050.178,68	90,85
5 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.181.493.710,00	11.603.874.556,40	577.619.153,60	95,26
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.181.493.710,00	11.603.874.556,40	577.619.153,60	95,26
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	12.057.001.710,00	11.484.685.556,40	572.316.153,60	95,25
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.820.025.000,00	1.589.988.107,00	230.036.893,00	87,36
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.236.976.710,00	9.894.697.449,40	342.279.260,60	96,66
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	124.492.000,00	119.189.000,00	5.303.000,00	95,74
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.500.000,00	73.510.000,00	1.990.000,00	97,36
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.992.000,00	45.679.000,00	3.313.000,00	93,24
5 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	34.854.286.020,00	28.253.491.338,00	6.600.794.682,00	81,06
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	7.725.032.180,00	7.580.689.112,00	144.343.068,00	98,13
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	7.716.532.180,00	7.572.189.112,00	144.343.068,00	98,13
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.449.533.000,00	2.350.979.995,00	98.553.005,00	95,98
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.266.999.180,00	5.221.209.117,00	45.790.063,00	99,13
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27.129.253.840,00	20.672.802.226,00	6.456.451.614,00	76,20
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	2.575.083.840,00	2.525.606.616,00	49.477.224,00	98,08
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	827.758.072,00	783.298.564,00	44.459.508,00	94,63
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.747.325.768,00	1.742.308.052,00	5.017.716,00	99,71
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2	BELANJA MODAL	24.554.170.000,00	18.147.195.610,00	6.406.974.390,00	73,91
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.170.000,00	54.170.000,00	0,00	100,00
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.500.000.000,00	18.093.025.610,00	6.406.974.390,00	73,85

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 1.06	Sosial	4.257.371.610,00	4.142.625.111,00	114.746.499,00	97,30
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.257.371.610,00	4.142.625.111,00	114.746.499,00	97,30
				0,00	#DIV/0!
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.257.371.610,00	4.142.625.111,00	114.746.499,00	97,30
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.285.110.000,00	2.184.040.881,00	101.069.119,00	95,58
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.922.261.610,00	1.908.584.230,00	13.677.380,00	99,29
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	66.175.009.779,00	63.627.833.247,17	2.547.176.531,83	96,15
5 . 2.01	Tenaga Kerja	179.078.850,00	171.947.473,00	7.131.377,00	96,02
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	179.078.850,00	171.947.473,00	7.131.377,00	96,02
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	179.078.850,00	171.947.473,00	7.131.377,00	96,02
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.078.850,00	171.947.473,00	7.131.377,00	96,02
5 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.118.333.400,00	979.095.259,00	139.238.141,00	87,55
5 . 2.02 . 1-06.2-08.2-14.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.118.333.400,00	979.095.259,00	139.238.141,00	87,55
5 . 2.02 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.118.333.400,00	979.095.259,00	139.238.141,00	87,55
5 . 2.02 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.118.333.400,00	979.095.259,00	139.238.141,00	87,55
5 . 2.03	Pangan	4.796.928.910,00	4.688.295.358,00	108.633.552,00	97,74
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	4.796.928.910,00	4.688.295.358,00	108.633.552,00	97,74
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.796.028.910,00	4.687.395.358,00	108.633.552,00	97,73
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.694.092.000,00	2.600.696.121,00	93.395.879,00	96,53
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.756.936.910,00	1.741.699.237,00	15.237.673,00	99,13
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5 . 2.04	Pertanahan	132.863.000,00	128.304.200,00	4.558.800,00	96,57
5 . 2.04 . 1-04.2-10.0-00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	132.863.000,00	128.304.200,00	4.558.800,00	96,57
5 . 2.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	132.863.000,00	128.304.200,00	4.558.800,00	96,57

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.863.000,00	128.304.200,00	4.558.800,00	96,57
5 . 2.05	Lingkungan Hidup	4.247.203.510,00	4.103.491.875,00	143.711.635,00	96,62
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.247.203.510,00	4.103.491.875,00	143.711.635,00	96,62
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.159.269.260,00	4.023.791.875,00	135.477.385,00	96,74
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.952.640.000,00	1.863.050.875,00	89.589.125,00	95,41
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.206.629.260,00	2.160.741.000,00	45.888.260,00	97,92
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	87.934.250,00	79.700.000,00	8.234.250,00	90,64
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.934.250,00	79.700.000,00	8.234.250,00	90,64
5 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.688.452.740,00	4.600.670.094,00	87.782.646,00	98,13
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.688.452.740,00	4.600.670.094,00	87.782.646,00	98,13
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.202.302.740,00	4.115.864.094,00	86.438.646,00	97,94
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.474.187.000,00	2.394.457.101,00	79.729.899,00	96,78
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.728.115.740,00	1.721.406.993,00	6.708.747,00	99,61
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	486.150.000,00	484.806.000,00	1.344.000,00	99,72
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467.400.000,00	466.056.000,00	1.344.000,00	99,71
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.984.991.179,00	8.856.791.917,00	128.199.262,00	98,57
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.984.991.179,00	8.856.791.917,00	128.199.262,00	98,57
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	8.940.891.179,00	8.812.691.917,00	128.199.262,00	98,57
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.500.246.751,00	2.426.821.584,00	73.425.167,00	97,06
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.440.644.428,00	6.385.870.333,00	54.774.095,00	99,15
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.688.809.900,00	4.210.000.617,19	478.809.282,81	89,79
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.688.809.900,00	4.210.000.617,19	478.809.282,81	89,79
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.643.809.900,00	3.167.058.492,00	476.751.408,00	86,92

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 2	BELANJA MODAL	1.045.000.000,00	1.042.942.125,19	2.057.874,81	99,80
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.045.000.000,00	1.042.942.125,19	2.057.874,81	99,80
5 . 2.09	Perhubungan	6.735.082.450,00	6.294.529.509,00	440.552.941,00	93,46
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15	DINAS PERHUBUNGAN	6.735.082.450,00	6.294.529.509,00	440.552.941,00	93,46
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 1	BELANJA OPERASI	6.474.338.970,00	6.039.222.029,00	435.116.941,00	93,28
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.377.425.000,00	2.283.301.653,00	94.123.347,00	96,04
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.096.913.970,00	3.755.920.376,00	340.993.594,00	91,68
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 2	BELANJA MODAL	260.743.480,00	255.307.480,00	5.436.000,00	97,92
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.218.480,00	118.888.480,00	4.330.000,00	96,49
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	137.525.000,00	136.419.000,00	1.106.000,00	99,20
5 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	7.181.530.140,00	7.044.742.320,00	136.787.820,00	98,10
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.181.530.140,00	7.044.742.320,00	136.787.820,00	98,10
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	6.566.530.140,00	6.430.241.320,00	136.288.820,00	97,92
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.057.852.000,00	2.011.804.551,00	46.047.449,00	97,76
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.508.678.140,00	4.418.436.769,00	90.241.371,00	98,00
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2	BELANJA MODAL	615.000.000,00	614.501.000,00	499.000,00	99,92
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	615.000.000,00	614.501.000,00	499.000,00	99,92
5 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.793.633.330,00	3.683.437.594,00	110.195.736,00	97,10
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	3.793.633.330,00	3.683.437.594,00	110.195.736,00	97,10
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.793.633.330,00	3.683.437.594,00	110.195.736,00	97,10
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.980.286.000,00	1.917.727.565,00	62.558.435,00	96,84
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.813.347.330,00	1.765.710.029,00	47.637.301,00	97,37
5 . 2.12	Penanaman Modal	4.447.925.258,00	4.366.566.311,00	81.358.947,00	98,17
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.447.925.258,00	4.366.566.311,00	81.358.947,00	98,17
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.266.575.258,00	4.186.259.611,00	80.315.647,00	98,12

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.865.167.000,00	1.805.419.989,00	59.747.011,00	96,80
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.401.408.258,00	2.380.839.622,00	20.568.636,00	99,14
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	181.350.000,00	180.306.700,00	1.043.300,00	99,42
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.350.000,00	158.456.700,00	893.300,00	99,44
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.000.000,00	21.850.000,00	150.000,00	99,32
5 . 2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.586.910.550,00	2.531.270.046,00	55.640.504,00	97,85
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.586.910.550,00	2.531.270.046,00	55.640.504,00	97,85
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1	BELANJA OPERASI	2.584.710.550,00	2.529.070.046,00	55.640.504,00	97,85
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00	55,56
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.478.410.550,00	2.426.347.646,00	52.062.904,00	97,90
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.222.400,00	777.600,00	99,22
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2	BELANJA MODAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
5 . 2.14	Statistik	110.181.000,00	110.090.000,00	91.000,00	99,92
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	110.181.000,00	110.090.000,00	91.000,00	99,92
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	110.181.000,00	110.090.000,00	91.000,00	99,92
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.181.000,00	110.090.000,00	91.000,00	99,92
5 . 2.15	Persandian	40.012.200,00	39.603.000,00	409.200,00	98,98
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.012.200,00	39.603.000,00	409.200,00	98,98
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	40.012.200,00	39.603.000,00	409.200,00	98,98
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.012.200,00	39.603.000,00	409.200,00	98,98
5 . 2.16	Kebudayaan	9.001.820.032,00	8.629.652.663,98	372.167.368,02	95,87
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	9.001.820.032,00	8.629.652.663,98	372.167.368,02	95,87
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1	BELANJA OPERASI	8.866.340.032,00	8.495.087.643,98	371.252.388,02	95,81
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.333.111.000,00	2.155.736.347,00	177.374.653,00	92,40
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.753.229.032,00	5.609.351.296,98	143.877.735,02	97,50

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	780.000.000,00	730.000.000,00	50.000.000,00	93,59
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2	BELANJA MODAL	135.480.000,00	134.565.020,00	914.980,00	99,32
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.880.000,00	132.059.020,00	820.980,00	99,38
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.600.000,00	2.506.000,00	94.000,00	96,38
5 . 2.17	Perpustakaan	3.358.284.680,00	3.106.848.676,00	251.436.004,00	92,51
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.358.284.680,00	3.106.848.676,00	251.436.004,00	92,51
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.240.349.680,00	2.997.817.676,00	242.532.004,00	92,52
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.486.046.000,00	2.253.559.390,00	232.486.610,00	90,65
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	754.303.680,00	744.258.286,00	10.045.394,00	98,67
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	117.935.000,00	109.031.000,00	8.904.000,00	92,45
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.935.000,00	109.031.000,00	8.904.000,00	92,45
5 . 2.18	Kearsipan	82.968.650,00	82.496.334,00	472.316,00	99,43
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	82.968.650,00	82.496.334,00	472.316,00	99,43
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	82.968.650,00	82.496.334,00	472.316,00	99,43
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.968.650,00	82.496.334,00	472.316,00	99,43
5 . 3	Urusan Pilihan	25.477.517.375,00	24.977.951.917,57	499.565.457,43	98,04
5 . 3.01	Kelautan dan Perikanan	595.942.800,00	563.112.900,00	32.829.900,00	94,49
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	595.942.800,00	563.112.900,00	32.829.900,00	94,49
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	595.942.800,00	563.112.900,00	32.829.900,00	94,49
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.942.800,00	563.112.900,00	32.829.900,00	94,49
5 . 3.02	Pariwisata	392.775.000,00	388.051.071,00	4.723.929,00	98,80
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	392.775.000,00	388.051.071,00	4.723.929,00	98,80
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1	BELANJA OPERASI	392.775.000,00	388.051.071,00	4.723.929,00	98,80
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	392.775.000,00	388.051.071,00	4.723.929,00	98,80
5 . 3.03	Pertanian	20.011.708.490,00	19.669.334.761,57	342.373.728,43	98,29
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01	DINAS PERTANIAN	20.011.708.490,00	19.669.334.761,57	342.373.728,43	98,29
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	19.843.867.770,00	19.501.820.846,52	342.046.923,48	98,28
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.443.788.000,00	11.183.690.452,00	260.097.548,00	97,73

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.079.770,00	8.318.130.394,52	81.949.375,48	99,02
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	167.840.720,00	167.513.915,05	326.804,95	99,81
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.625.000,00	140.575.000,00	50.000,00	99,96
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.215.720,00	26.938.915,05	276.804,95	98,98
5 . 3.06	Perdagangan	149.923.325,00	147.415.142,00	2.508.183,00	98,33
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	149.923.325,00	147.415.142,00	2.508.183,00	98,33
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1	BELANJA OPERASI	149.923.325,00	147.415.142,00	2.508.183,00	98,33
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.923.325,00	147.415.142,00	2.508.183,00	98,33
5 . 3.07	Perindustrian	883.398.800,00	845.309.000,00	38.089.800,00	95,69
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	883.398.800,00	845.309.000,00	38.089.800,00	95,69
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1	BELANJA OPERASI	883.398.800,00	845.309.000,00	38.089.800,00	95,69
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	883.398.800,00	845.309.000,00	38.089.800,00	95,69
5 . 3.08	Transmigrasi	3.443.768.960,00	3.364.729.043,00	79.039.917,00	97,70
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.443.768.960,00	3.364.729.043,00	79.039.917,00	97,70
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.413.640.960,00	3.336.101.043,00	77.539.917,00	97,73
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.608.990.000,00	2.542.674.380,00	66.315.620,00	97,46
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	804.650.960,00	793.426.663,00	11.224.297,00	98,61
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	30.128.000,00	28.628.000,00	1.500.000,00	95,02
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.128.000,00	28.628.000,00	1.500.000,00	95,02
5 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	256.011.959.351,00	250.500.508.220,29	5.511.451.130,71	97,85
5 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	46.240.134.766,00	93.575.650.387,29	(47.335.515.621,29)	202,37
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	46.240.134.766,00	45.819.862.387,29	420.272.378,71	99,09
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	38.315.739.766,00	37.995.407.887,29	320.331.878,71	99,16
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.788.816.000,00	7.573.370.986,00	215.445.014,00	97,23
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.626.923.766,00	29.522.145.032,29	104.778.733,71	99,65
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	900.000.000,00	899.891.869,00	108.131,00	99,99

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	7.924.395.000,00	7.824.454.500,00	99.940.500,00	98,74
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.875.270.000,00	7.775.329.500,00	99.940.500,00	98,73
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.125.000,00	49.125.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00	47.755.788.000,00	(47.755.788.000,00)	0,00
5 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4	BELANJA TRANSFER	0,00	47.755.788.000,00	(47.755.788.000,00)	0,00
5 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	47.755.788.000,00	(47.755.788.000,00)	0,00
5 . 4.02	Pengawasan	7.619.324.550,00	7.427.311.467,00	192.013.083,00	97,48
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01	INSPEKTORAT KABUPATEN	7.619.324.550,00	7.427.311.467,00	192.013.083,00	97,48
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	6.991.334.550,00	6.820.675.558,00	170.658.992,00	97,56
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.527.417.000,00	3.434.458.642,00	92.958.358,00	97,36
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.463.917.550,00	3.386.216.916,00	77.700.634,00	97,76
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	627.990.000,00	606.635.909,00	21.354.091,00	96,60
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	627.990.000,00	606.635.909,00	21.354.091,00	96,60
5 . 4.03	Perencanaan	4.988.748.360,00	4.852.477.515,00	136.270.845,00	97,27
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.988.748.360,00	4.852.477.515,00	136.270.845,00	97,27
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.696.048.360,00	4.559.926.164,00	136.122.196,00	97,10
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.153.052.000,00	2.086.007.971,00	67.044.029,00	96,89
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.542.996.360,00	2.473.918.193,00	69.078.167,00	97,28
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	292.700.000,00	292.551.351,00	148.649,00	99,95
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.700.000,00	292.551.351,00	148.649,00	99,95
5 . 4.04	Keuangan	124.606.521.627,00	123.344.226.999,00	1.262.294.628,00	98,99
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	124.606.521.627,00	123.344.226.999,00	1.262.294.628,00	98,99
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	12.796.709.814,00	12.218.261.226,00	578.448.588,00	95,48
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.580.805.974,00	5.253.509.306,00	327.296.668,00	94,14
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.215.903.840,00	6.964.751.920,00	251.151.920,00	96,52
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	719.410.000,00	706.079.000,00	13.331.000,00	98,15
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.410.000,00	519.759.000,00	9.651.000,00	98,18
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000,00	186.320.000,00	3.680.000,00	98,06

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4	BELANJA TRANSFER	110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	589.677.337,00	99,47
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	3.249.217.813,00	2.659.549.476,00	589.668.337,00	81,85
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	9.000,00	100,00
5 . 4.05	Kepegawaian	5.025.780.612,00	4.840.122.389,00	185.658.223,00	96,31
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.025.780.612,00	4.840.122.389,00	185.658.223,00	96,31
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.865.480.612,00	4.691.912.389,00	173.568.223,00	96,43
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.944.346.000,00	2.860.130.734,00	84.215.266,00	97,14
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.921.134.612,00	1.831.781.655,00	89.352.957,00	95,35
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	160.300.000,00	148.210.000,00	12.090.000,00	92,46
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.300.000,00	148.210.000,00	12.090.000,00	92,46
5 . 4.06	Pendidikan dan Pelatihan	941.506.100,00	882.685.022,00	58.821.078,00	93,75
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	941.506.100,00	882.685.022,00	58.821.078,00	93,75
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	941.506.100,00	882.685.022,00	58.821.078,00	93,75
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	941.506.100,00	882.685.022,00	58.821.078,00	93,75
5 . 4.07	Penelitian dan Pengembangan	334.356.000,00	324.821.300,00	9.534.700,00	97,15
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	334.356.000,00	324.821.300,00	9.534.700,00	97,15
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	334.356.000,00	324.821.300,00	9.534.700,00	97,15
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.356.000,00	324.821.300,00	9.534.700,00	97,15
5 . 4.08	Sekretariat DPRD	46.257.950.605,00	43.624.240.804,00	2.633.709.801,00	94,31
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DPRD	46.257.950.605,00	43.624.240.804,00	2.633.709.801,00	94,31
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	46.127.650.605,00	43.496.535.804,00	2.631.114.801,00	94,30
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	13.207.058.000,00	12.830.178.017,00	376.879.983,00	97,15
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.920.592.605,00	30.666.357.787,00	2.254.234.818,00	93,15

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	130.300.000,00	127.705.000,00	2.595.000,00	98,01
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.300.000,00	127.705.000,00	2.595.000,00	98,01
5 . 4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	17.342.523.711,00	16.787.883.048,00	554.640.663,00	96,80
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	2.061.138.347,00	1.995.519.985,00	65.618.362,00	96,82
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	2.061.138.347,00	1.995.519.985,00	65.618.362,00	96,82
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.653.582.000,00	1.597.716.110,00	55.865.890,00	96,62
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	407.556.347,00	397.803.875,00	9.752.472,00	97,61
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN SITIUNG	1.796.344.380,00	1.754.263.701,00	42.080.679,00	97,66
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	1.772.244.380,00	1.730.163.701,00	42.080.679,00	97,63
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.461.181.000,00	1.419.719.684,00	41.461.316,00	97,16
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.063.380,00	310.444.017,00	619.363,00	99,80
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 2	BELANJA MODAL	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN KOTO BARU	2.074.155.460,00	2.021.261.386,00	52.894.074,00	97,45
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1	BELANJA OPERASI	2.054.155.460,00	2.001.261.386,00	52.894.074,00	97,43
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.501.419.000,00	1.453.963.632,00	47.455.368,00	96,84
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	552.736.460,00	547.297.754,00	5.438.706,00	99,02
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1.499.504.577,00	1.463.282.395,00	36.222.182,00	97,58
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1	BELANJA OPERASI	1.499.504.577,00	1.463.282.395,00	36.222.182,00	97,58
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.221.167.000,00	1.185.458.091,00	35.708.909,00	97,08
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.337.577,00	277.824.304,00	513.273,00	99,82
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	1.452.226.960,00	1.401.394.556,00	50.832.404,00	96,50
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1	BELANJA OPERASI	1.438.226.960,00	1.387.394.556,00	50.832.404,00	96,47
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.162.522.000,00	1.119.240.137,00	43.281.863,00	96,28
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.704.960,00	268.154.419,00	7.550.541,00	97,26

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN TIMPEH	1.345.846.660,00	1.308.587.784,00	37.258.876,00	97,23
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1	BELANJA OPERASI	1.334.246.660,00	1.297.071.659,00	37.175.001,00	97,21
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.048.263.000,00	1.014.620.229,00	33.642.771,00	96,79
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.983.660,00	282.451.430,00	3.532.230,00	98,76
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 2	BELANJA MODAL	11.600.000,00	11.516.125,00	83.875,00	99,28
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.600.000,00	11.516.125,00	83.875,00	99,28
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN KOTO SALAK	1.290.701.020,00	1.248.475.717,00	42.225.303,00	96,73
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.07 . 1	BELANJA OPERASI	1.290.701.020,00	1.248.475.717,00	42.225.303,00	96,73
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.07 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.007.736.000,00	970.776.092,00	36.959.908,00	96,33
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.07 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.965.020,00	277.699.625,00	5.265.395,00	98,14
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	1.195.964.850,00	1.105.406.643,00	90.558.207,00	92,43
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1	BELANJA OPERASI	1.171.814.850,00	1.081.256.643,00	90.558.207,00	92,27
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1 . 1	Belanja Pegawai	873.334.000,00	784.161.336,00	89.172.664,00	89,79
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.480.850,00	297.095.307,00	1.385.543,00	99,54
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 2	BELANJA MODAL	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09	KECAMATAN KOTO BESAR	1.843.494.717,00	1.777.365.598,00	66.129.119,00	96,41
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1	BELANJA OPERASI	1.843.494.717,00	1.777.365.598,00	66.129.119,00	96,41
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.548.462.000,00	1.482.672.579,00	65.789.421,00	95,75
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.032.717,00	294.693.019,00	339.698,00	99,88
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10	KECAMATAN PADANG LAWEH	1.196.875.440,00	1.159.564.716,00	37.310.724,00	96,88
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1	BELANJA OPERASI	1.196.875.440,00	1.159.564.716,00	37.310.724,00	96,88
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 1	Belanja Pegawai	888.370.000,00	851.908.176,00	36.461.824,00	95,90
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.505.440,00	307.656.540,00	848.900,00	99,72
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11	KECAMATAN TIUMANG	1.586.271.300,00	1.552.760.567,00	33.510.733,00	97,89
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1	BELANJA OPERASI	1.586.271.300,00	1.552.760.567,00	33.510.733,00	97,89

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.273.692.000,00	1.241.041.441,00	32.650.559,00	97,44
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.579.300,00	311.719.126,00	860.174,00	99,72
5 . 4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.655.113.020,00	2.596.877.289,00	58.235.731,00	97,81
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.655.113.020,00	2.596.877.289,00	58.235.731,00	97,81
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	2.625.678.020,00	2.567.442.289,00	58.235.731,00	97,78
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	856.262.000,00	821.942.118,00	34.319.882,00	95,99
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	971.025.140,00	948.609.291,00	22.415.849,00	97,69
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	798.390.880,00	796.890.880,00	1.500.000,00	99,81
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	29.435.000,00	29.435.000,00	0,00	100,00
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.435.000,00	29.435.000,00	0,00	100,00
6 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	0,71	100,00
6 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	0,71	100,00

 **BUPATI DHARMASRAYA,**

SUTAN RISKA



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	918.477.642.858,00	911.076.883.278,80	(7.400.759.579,20)	99,19
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.415.369.674,00	108.010.790.645,80	2.595.420.971,80	102,46
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	22.776.715.953,00	21.634.156.143,46	(1.142.559.809,54)	94,98
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	3.873.808.400,00	2.759.700.350,00	(1.114.108.050,00)	71,24
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	0,00	100,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.440.779.485,00	79.292.868.316,34	4.852.088.831,34	106,52
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	797.437.653.184,00	786.486.021.026,00	(10.951.632.158,00)	98,63
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	682.282.210.000,00	673.570.378.483,00	(8.711.831.517,00)	98,72
4.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.305.076.000,00	29.385.211.834,00	7.080.135.834,00	131,74
4.2.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.606.168.000,00	472.528.368.549,00	-77.799.451,00	99,98
4.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	187.370.966.000,00	171.656.798.100,00	(15.714.167.900,00)	91,61
4.2.2.	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	54.283.677.000,00	54.283.677.000,00	0,00	100,00
4.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2.	Dana Penyesuaian	54.283.677.000,00	54.283.677.000,00	0,00	100,00
4.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	60.871.766.184,00	58.631.965.543,00	(2.239.800.641,00)	96,32
4.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.871.766.184,00	58.631.965.543,00	(2.239.800.641,00)	96,32
4.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	955.451.607,00	106,12
4.3.1.	Pendapatan Hibah	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	955.451.607,00	106,12
4.3.3.	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	918.477.642.858,00	911.076.883.278,80	(7.400.759.579,20)	99,19
5.	BELANJA DAERAH	988.684.628.840,00	939.371.337.181,35	49.313.291.658,65	95,01
5.1.	BELANJA OPERASI	725.688.993.576,00	696.160.075.415,49	29.528.918.160,51	95,93
5.1.1.	Belanja Pegawai	393.543.166.479,00	380.048.882.570,44	13.494.283.908,56	96,57
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.595.136.217,00	304.834.151.224,05	15.760.984.992,95	95,08
5.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Belanja Hibah	11.550.690.880,00	11.277.041.621,00	273.649.259,00	97,63
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	BELANJA MODAL	151.905.233.451,00	132.791.374.992,86	19.113.858.458,14	87,42
5.2.1.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Peralatan dan mesin	49.984.934.923,00	48.052.940.621,00	1.931.994.302,00	96,13
5.2.3.	Gedung dan Bangunan	21.484.719.732,00	15.750.482.106,12	5.734.237.625,88	73,31
5.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	77.611.351.420,00	66.363.505.690,74	11.247.845.729,26	85,51
5.2.5.	Aset Tetap lainnya	2.824.227.376,00	2.624.446.575,00	199.780.801,00	92,93

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04
	JUMLAH BELANJA	878.044.227.027,00	829.320.612.705,35	48.723.614.321,65	94,45
5.4	TRANSFER	110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	589.677.337,00	99,47
5.4.1.	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	292.550.157,00	99,47
5.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.825.328.297,00	2.384.214.550,00	441.113.747,00	84,39
5.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	423.889.516,00	275.334.926,00	(148.554.590,00)	64,95
5.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	(9.000,00)	100,00
5.4.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	988.684.628.840,00	939.371.337.181,35	49.313.291.658,65	95,01
	SURPLUS/(DEFISIT)	(70.206.985.982,00)	(28.294.453.902,55)	(41.912.532.079,45)	40,30
6.	PEMBIAYAAN	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	0,71	100,00
6.1.	PENERIMAAN DAERAH	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	0,71	100,00
6.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	0,71	100,00
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	0,71	100,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI		41.912.532.080,16	(41.912.532.080,16)	
	Koreksi SILPA				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)SETELAH KOREKSI		41.912.532.080,16	(41.912.532.080,16)	

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		Pendidikan				
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	45.750.000,00	63.058.000,00	17.308.000,00	137,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.750.000,00	63.058.000,00	17.308.000,00	137,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	45.750.000,00	63.058.000,00	17.308.000,00	137,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	271.628.179.365,00	261.276.606.880,49	10.351.572.484,51	96,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Program	0,00	166.200.000,00	(166.200.000,00)		
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	0,00	166.200.000,00	(166.200.000,00)		
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	166.200.000,00	(166.200.000,00)		
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.210.000,00	288.985.000,00	225.000,00	99,92	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	289.210.000,00	288.985.000,00	225.000,00	99,92	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.210.000,00	288.985.000,00	225.000,00	99,92	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	199.597.462.742,00	192.363.005.067,00	7.234.457.675,00	96,38	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	199.597.462.742,00	192.363.005.067,00	7.234.457.675,00	96,38	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	199.597.462.742,00	192.363.005.067,00	7.234.457.675,00	96,38	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	673.704.152,00	655.296.294,00	18.407.858,00	97,27	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	110.989.500,00	99.548.400,00	11.441.100,00	89,69	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.989.500,00	99.548.400,00	11.441.100,00	89,69	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	123.727.452,00	123.716.800,00	10.652,00	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.727.452,00	123.716.800,00	10.652,00	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	64.504.250,00	58.977.520,00	5.526.730,00	91,43	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.504.250,00	58.977.520,00	5.526.730,00	91,43	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	80.750.000,00	79.500.000,00	1.250.000,00	98,45	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.750.000,00	79.500.000,00	1.250.000,00	98,45	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	124.490.000,00	124.490.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.490.000,00	124.490.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.242.950,00	169.063.574,00	179.376,00	99,89	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.242.950,00	169.063.574,00	179.376,00	99,89	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.728.311.520,00	7.272.292.443,00	456.019.077,00	94,10	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	134.172.933,00	15.827.067,00	89,45	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	134.172.933,00	15.827.067,00	89,45	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	34.567.200,00	432.800,00	98,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.567.200,00	432.800,00	98,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.543.311.520,00	7.103.552.310,00	439.759.210,00	94,17	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.049.950.000,00	976.900.000,00	73.050.000,00	93,04	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.493.361.520,00	6.126.652.310,00	366.709.210,00	94,35	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.500.000,00	268.077.781,99	7.422.218,01	97,31	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.500.000,00	70.475.100,00	7.024.900,00	90,94	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	70.475.100,00	7.024.900,00	90,94	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.000.000,00	197.602.681,99	397.318,01	99,80	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 09 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	197.602.681,99	397.318,01	99,80	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.172.739.593,00	20.512.681.553,57	660.058.039,43	96,88	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	100.000.000,00	99.614.070,05	385.929,95	99,61	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.614.070,05	385.929,95	99,61	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	124.400.000,00	123.735.698,52	664.301,48	99,47	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.400.000,00	123.735.698,52	664.301,48	99,47	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 14	Pengadaan Mebel Sekolah	7.646.000,00	7.305.000,00	341.000,00	95,54	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.646.000,00	7.305.000,00	341.000,00	95,54	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	356.250.000,00	356.055.000,00	195.000,00	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	356.250.000,00	356.055.000,00	195.000,00	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12.158.000,00	12.158.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.158.000,00	12.158.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	17.500.000,00	17.290.000,00	210.000,00	98,80	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.290.000,00	210.000,00	98,80	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.872.000,00	9.822.000,00	50.000,00	99,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.872.000,00	9.822.000,00	50.000,00	99,49	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	25.555.500,00	25.455.400,00	100.100,00	99,61	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.555.500,00	25.455.400,00	100.100,00	99,61	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4.622.000,00	4.572.000,00	50.000,00	98,92	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.622.000,00	4.572.000,00	50.000,00	98,92	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.514.736.093,00	19.856.674.385,00	658.061.708,00	96,79	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.800.336.093,00	17.142.274.385,00	658.061.708,00	96,30	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	2.714.400.000,00	2.714.400.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.533.763.595,00	9.155.016.498,00	378.747.097,00	96,03	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	176.310.000,00	175.885.000,00	425.000,00	99,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.310.000,00	175.885.000,00	425.000,00	99,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 36 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.500.000,00	6.830.000,00	670.000,00	91,07	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 38 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.830.000,00	670.000,00	91,07	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.842.500,00	20.817.500,00	7.025.000,00	74,77	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.842.500,00	20.817.500,00	7.025.000,00	74,77	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.801.999.095,00	8.431.371.998,00	370.627.097,00	95,79	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.278.399.095,00	7.992.835.526,00	285.563.569,00	96,55	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	523.600.000,00	438.536.472,00	85.063.528,00	83,75	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.262.078.814,00	5.267.203.150,00	994.875.664,00	84,11	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	809.231.850,00	807.547.050,00	1.684.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	809.231.850,00	807.547.050,00	1.684.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 11	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</i>	5.104.122.614,00	4.117.910.000,00	986.212.614,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	852.522.614,00	2.510.000,00	850.012.614,00	0,29	...
	Belanja Hibah	4.251.600.000,00	4.115.400.000,00	136.200.000,00	96,80	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12	<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</i>	261.250.000,00	260.150.000,00	1.100.000,00	99,58	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.250.000,00	260.150.000,00	1.100.000,00	99,58	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 15	<i>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD</i>	9.872.000,00	9.467.000,00	405.000,00	95,90	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.872.000,00	9.467.000,00	405.000,00	95,90	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 16	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</i>	19.418.000,00	18.288.000,00	1.130.000,00	94,18	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 16 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.418.000,00	18.288.000,00	1.130.000,00	94,18	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 17	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	54.904.350,00	53.841.100,00	1.063.250,00	98,06	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.904.350,00	53.841.100,00	1.063.250,00	98,06	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	793.812.000,00	784.422.000,00	9.390.000,00	98,82	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 12	<i>Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</i>	761.926.000,00	761.926.000,00	0,00	100,00	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.226.000,00	174.226.000,00	0,00	100,00	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 12 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	587.700.000,00	587.700.000,00	0,00	100,00	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 14	<i>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	12.544.000,00	12.454.000,00	90.000,00	99,28	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.544.000,00	12.454.000,00	90.000,00	99,28	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 15	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	19.342.000,00	10.042.000,00	9.300.000,00	51,92	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.342.000,00	10.042.000,00	9.300.000,00	51,92	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 19	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	23.039.300,00	23.028.900,00	10.400,00	99,95	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 19 . 01	<i>Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	23.039.300,00	23.028.900,00	10.400,00	99,95	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.039.300,00	23.028.900,00	10.400,00	99,95	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 21	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.830.000,00	54.828.000,00	2.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 21 . 01	<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	54.830.000,00	54.828.000,00	2.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.830.000,00	54.828.000,00	2.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.505.000,00	123.020.000,00	485.000,00	99,61	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	123.505.000,00	123.020.000,00	485.000,00	99,61	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.505.000,00	123.020.000,00	485.000,00	99,61	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	70.922.800,00	9.077.200,00	88,65	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 07 . 01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	80.000.000,00	70.922.800,00	9.077.200,00	88,65	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	70.922.800,00	9.077.200,00	88,65	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.120.251.673,00	16.619.251.846,05	500.999.826,95	97,07	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 02	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	210.599.936,00	210.370.898,96	229.037,04	99,89	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.599.936,00	210.370.898,96	229.037,04	99,89	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 03	<i>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</i>	1.346.779.414,00	1.230.024.100,00	116.755.314,00	91,33	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.841.000,00	98.841.000,00	0,00	100,00	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.247.938.414,00	1.131.183.100,00	116.755.314,00	90,64	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 04	<i>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	913.077.080,00	825.217.500,00	87.859.580,00	90,38	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.920.000,00	62.920.000,00	0,00	100,00	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.157.080,00	762.297.500,00	87.859.580,00	89,67	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 05	<i>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</i>	1.299.282.513,00	1.185.111.700,00	114.170.813,00	91,21	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.048.800,00	91.993.000,00	55.800,00	99,94	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.207.233.713,00	1.093.118.700,00	114.115.013,00	90,55	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	998.827.197,00	923.811.246,09	75.015.950,91	92,49	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	998.827.197,00	923.811.246,09	75.015.950,91	92,49	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 14	<i>Pengadaan Mebel Sekolah</i>	30.000.000,00	28.971.000,00	1.029.000,00	96,57	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	28.971.000,00	1.029.000,00	96,57	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 181	<i>Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar</i>	2.811.465.669,00	2.712.547.870,00	98.917.799,00	96,48	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 181 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.042.400,00	214.104.000,00	6.938.400,00	96,86	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 181 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.590.423.269,00	2.498.443.870,00	91.979.399,00	96,45	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 22	<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>	5.168.375.000,00	5.162.852.667,00	5.522.333,00	99,89	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.168.375.000,00	5.162.852.667,00	5.522.333,00	99,89	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	4.341.844.864,00	4.340.344.864,00	1.500.000,00	99,97	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.807.315.346,00	2.807.315.346,00	0,00	100,00	-
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.534.529.518,00	1.533.029.518,00	1.500.000,00	99,90	...
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.526.245.392,00	6.405.419.638,88	120.825.753,12	98,15	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 04	<i>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	790.047.150,00	759.582.130,00	30.465.020,00	96,14	...

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.740.000,00	120.039.000,00	10.701.000,00	91,82	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	659.307.150,00	639.543.130,00	19.764.020,00	97,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 05	<i>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</i>	523.462.183,00	503.918.850,00	19.543.333,00	96,27	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.253.714,00	45.229.914,00	23.800,00	99,95	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	478.208.469,00	458.688.936,00	19.519.533,00	95,92	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 06	<i>Pembangunan Laboratorium</i>	2.355.918.048,00	2.290.611.600,00	65.306.448,00	97,23	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.881.600,00	187.616.000,00	5.265.600,00	97,27	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.163.036.448,00	2.102.995.600,00	60.040.848,00	97,22	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	510.000.000,00	506.875.471,88	3.124.528,12	99,39	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	87.942.000,00	2.058.000,00	97,71	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	420.000.000,00	418.933.471,88	1.066.528,12	99,75	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 35	<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>	678.913.200,00	676.526.776,00	2.386.424,00	99,65	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	678.913.200,00	676.526.776,00	2.386.424,00	99,65	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	1.667.904.811,00	1.667.904.811,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.318.544.089,00	1.318.544.089,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	349.360.722,00	349.360.722,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.316.325.584,00	1.199.374.892,00	116.950.692,00	91,12	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 01	<i>Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</i>	778.557.184,00	688.407.406,00	90.149.778,00	88,42	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.566.200,00	46.566.200,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	731.990.984,00	641.841.206,00	90.149.778,00	87,68	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 02	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</i>	184.631.264,00	179.446.550,00	5.184.714,00	97,19	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.631.264,00	179.446.550,00	5.184.714,00	97,19	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 06	<i>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</i>	95.500.000,00	77.147.800,00	18.352.200,00	80,78	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.000.000,00	54.758.800,00	8.241.200,00	86,92	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.500.000,00	22.389.000,00	10.111.000,00	68,89	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 11	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</i>	45.512.136,00	45.512.136,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.812.136,00	3.812.136,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12	<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</i>	197.125.000,00	193.861.000,00	3.264.000,00	98,34	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.125.000,00	193.861.000,00	3.264.000,00	98,34	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 17	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	57.400.000,00	47.581.016,00	9.818.984,00	82,89	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 12	<i>Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</i>	57.400.000,00	47.581.016,00	9.818.984,00	82,89	""
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.400.000,00	47.581.016,00	9.818.984,00	82,89	""
	SURPLUS / (DEFISIT)	(271.582.429.365,00)	(261.213.548.880,49)	(10.334.264.484,51)	96,18	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

Urusan Pemerintahan : 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
Bidang Pemerintahan : 1 . 02	Kesehatan					
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	9.859.743.000,00	8.787.815.094,00	(1.071.927.906,00)	89,13	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.859.743.000,00	8.787.815.094,00	(1.071.927.906,00)	89,13	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	333.680.000,00	300.568.850,00	(33.111.150,00)	90,08	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	9.526.063.000,00	8.487.246.244,00	(1.038.816.756,00)	89,10	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06 . 5	BELANJA DAERAH	113.672.685.220,00	107.081.225.887,11	6.591.459.332,89	94,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	373.289.800,00	356.799.593,00	16.490.207,00	95,58	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.289.800,00	52.859.500,00	430.300,00	99,19	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.289.800,00	52.859.500,00	430.300,00	99,19	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.000.000,00	303.940.093,00	16.059.907,00	94,98	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	303.940.093,00	16.059.907,00	94,98	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.819.984.000,00	53.633.220.221,00	1.186.763.779,00	97,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.819.984.000,00	53.633.220.221,00	1.186.763.779,00	97,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	54.180.984.000,00	53.134.591.646,00	1.046.392.354,00	98,07	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	639.000.000,00	498.628.575,00	140.371.425,00	78,03	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.593.818,00	291.333.157,00	2.260.661,00	99,23	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.505.000,00	3.489.000,00	16.000,00	99,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	3.489.000,00	16.000,00	99,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.499.918,00	57.455.918,00	44.000,00	99,92	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.499.918,00	57.455.918,00	44.000,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	9.999.400,00	9.999.400,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.999.400,00	9.999.400,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	20.294.000,00	20.274.000,00	20.000,00	99,90	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.294.000,00	20.274.000,00	20.000,00	99,90	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	22.307.300,00	22.307.000,00	300,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.307.300,00	22.307.000,00	300,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	179.988.200,00	177.807.839,00	2.180.361,00	98,79	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.988.200,00	177.807.839,00	2.180.361,00	98,79	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.914.376.992,00	3.834.786.911,00	79.590.081,00	97,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	89.999.992,00	72.331.431,00	17.668.561,00	80,37	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.999.992,00	72.331.431,00	17.668.561,00	80,37	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	15.900.000,00	15.880.000,00	20.000,00	99,87	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.880.000,00	20.000,00	99,87	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	3.808.477.000,00	3.746.575.480,00	61.901.520,00	98,37	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	129.050.000,00	129.045.000,00	5.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.679.427.000,00	3.617.530.480,00	61.896.520,00	98,32	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.500.000,00	129.306.600,00	3.193.400,00	97,59	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	12.500.000,00	9.832.000,00	2.668.000,00	78,66	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	9.832.000,00	2.668.000,00	78,66	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	120.000.000,00	119.474.600,00	525.400,00	99,56	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.474.600,00	525.400,00	99,56	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	16.025.090.227,00	14.463.294.205,30	1.561.796.021,70	90,25	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	16.025.090.227,00	14.463.294.205,30	1.561.796.021,70	90,25	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.630.889.811,00	4.230.583.532,44	400.306.278,56	91,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.394.200.416,00	10.232.710.672,86	1.161.489.743,14	89,81	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.591.949.280,00	2.701.535.337,92	890.413.942,08	75,21	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03	<i>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	20.000.000,00	14.966.000,00	5.034.000,00	74,83	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.966.000,00	5.034.000,00	74,83	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	145.000.000,00	144.328.188,92	671.811,08	99,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	144.328.188,92	671.811,08	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.994.050,00	14.783.650,00	210.400,00	98,60	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.994.050,00	14.783.650,00	210.400,00	98,60	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.058.152.633,00	928.631.255,00	129.521.378,00	87,76	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.058.152.633,00	928.631.255,00	129.521.378,00	87,76	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.353.802.597,00	1.598.826.244,00	754.976.353,00	67,93	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.353.802.597,00	1.598.826.244,00	754.976.353,00	67,93	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.381.135.113,00	21.226.764.975,52	2.154.370.137,48	90,79	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000,00	34.834.500,00	5.165.500,00	87,09	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	34.834.500,00	5.165.500,00	87,09	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	263.077.000,00	53.511.000,00	209.566.000,00	20,34	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.077.000,00	53.511.000,00	209.566.000,00	20,34	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000,00	22.957.500,00	2.042.500,00	91,83	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.957.500,00	2.042.500,00	91,83	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.000.000,00	28.949.800,00	6.050.200,00	82,71	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	28.949.800,00	6.050.200,00	82,71	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	29.000.000,00	28.332.800,00	667.200,00	97,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.332.800,00	667.200,00	97,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000,00	21.838.750,00	3.161.250,00	87,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.838.750,00	3.161.250,00	87,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000,00	25.534.412,00	4.465.588,00	85,11	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.534.412,00	4.465.588,00	85,11	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.160.000,00	34.754.500,00	2.405.500,00	93,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.160.000,00	34.754.500,00	2.405.500,00	93,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	48.180.000,00	46.609.750,00	1.570.250,00	96,74	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.180.000,00	46.609.750,00	1.570.250,00	96,74	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	50.000.000,00	49.631.000,00	369.000,00	99,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.631.000,00	369.000,00	99,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	65.000.000,00	64.766.250,00	233.750,00	99,64	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.766.250,00	233.750,00	99,64	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	45.000.000,00	44.202.750,00	797.250,00	98,23	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.202.750,00	797.250,00	98,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 13	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	643.282.700,00	537.832.317,00	105.450.383,00	83,61	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	643.282.700,00	537.832.317,00	105.450.383,00	83,61	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 15	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	297.545.900,00	225.367.900,00	72.178.000,00	75,74	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.545.900,00	225.367.900,00	72.178.000,00	75,74	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	47.858.000,00	47.327.650,00	530.350,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.858.000,00	47.327.650,00	530.350,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 17	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	187.634.900,00	186.766.400,00	868.500,00	99,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.634.900,00	186.766.400,00	868.500,00	99,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20	<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	40.120.000,00	39.897.000,00	223.000,00	99,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.120.000,00	39.897.000,00	223.000,00	99,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	54.660.000,00	52.694.000,00	1.966.000,00	96,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.660.000,00	52.694.000,00	1.966.000,00	96,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23	<i>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</i>	167.705.200,00	167.156.900,00	548.300,00	99,67	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.705.200,00	167.156.900,00	548.300,00	99,67	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 25	<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	35.000.000,00	33.437.000,00	1.563.000,00	95,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.437.000,00	1.563.000,00	95,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 26	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	9.500.000.000,00	9.315.711.749,00	184.288.251,00	98,06	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 26 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000.000,00	9.315.711.749,00	184.288.251,00	98,06	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32	<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	1.206.420.013,00	901.491.625,00	304.928.388,00	74,72	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.206.420.013,00	901.491.625,00	304.928.388,00	74,72	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 33	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	9.371.407.000,00	8.351.796.063,52	1.019.610.936,48	89,12	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 33 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.371.407.000,00	8.351.796.063,52	1.019.610.936,48	89,12	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 34	<i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	691.048.000,00	650.700.776,00	40.347.224,00	94,16	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 34 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	691.048.000,00	650.700.776,00	40.347.224,00	94,16	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 35	<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di</i>	184.880.000,00	0,00	184.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.880.000,00	0,00	184.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 36	<i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	104.480.000,00	104.357.000,00	123.000,00	99,88	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 36 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.480.000,00	104.357.000,00	123.000,00	99,88	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 37	<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>	156.676.400,00	156.305.583,00	370.817,00	99,76	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 37 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.676.400,00	156.305.583,00	370.817,00	99,76	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	104.996.700,00	104.318.605,00	678.095,00	99,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	104.996.700,00	104.318.605,00	678.095,00	99,35	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.996.700,00	104.318.605,00	678.095,00	99,35	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	54.693.200,00	54.246.300,00	446.900,00	99,18	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	54.693.200,00	54.246.300,00	446.900,00	99,18	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.693.200,00	54.246.300,00	446.900,00	99,18	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	75.799.200,00	74.926.363,00	872.837,00	98,85	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	34.089.200,00	33.615.541,00	473.659,00	98,61	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.089.200,00	33.615.541,00	473.659,00	98,61	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	41.710.000,00	41.310.822,00	399.178,00	99,04	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.710.000,00	41.310.822,00	399.178,00	99,04	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	28.477.000,00	28.105.600,00	371.400,00	98,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	28.477.000,00	28.105.600,00	371.400,00	98,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.477.000,00	28.105.600,00	371.400,00	98,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	391.657.000,00	389.560.650,00	2.096.350,00	99,46	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	391.657.000,00	389.560.650,00	2.096.350,00	99,46	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.657.000,00	389.560.650,00	2.096.350,00	99,46	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.765.500,00	50.051.300,00	714.200,00	98,59	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.765.500,00	50.051.300,00	714.200,00	98,59	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.765.500,00	50.051.300,00	714.200,00	98,59	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.995.100,00	39.712.000,00	1.283.100,00	96,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	40.995.100,00	39.712.000,00	1.283.100,00	96,87	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.995.100,00	39.712.000,00	1.283.100,00	96,87	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.239.400,00	40.815.300,00	424.100,00	98,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	41.239.400,00	40.815.300,00	424.100,00	98,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.239.400,00	40.815.300,00	424.100,00	98,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.500.000,00	186.340.000,00	160.000,00	99,91	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	186.500.000,00	186.340.000,00	160.000,00	99,91	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.500.000,00	186.340.000,00	160.000,00	99,91	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.355.705.103,00	1.209.851.165,00	145.853.938,00	89,24	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	1.355.705.103,00	1.209.851.165,00	145.853.938,00	89,24	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.328.609.103,00	1.209.851.165,00	118.757.938,00	91,06	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.396.000,00	0,00	26.396.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.212.446.000,00	6.671.273.631,37	541.172.368,63	92,50	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03	<i>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	810.000.000,00	731.189.220,00	78.810.780,00	90,27	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	810.000.000,00	731.189.220,00	78.810.780,00	90,27	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	50.000.000,00	49.682.544,37	317.455,63	99,37	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.682.544,37	317.455,63	99,37	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13	<i>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	981.000.000,00	881.017.400,00	99.982.600,00	89,81	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	511.000.000,00	418.754.300,00	92.245.700,00	81,95	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	470.000.000,00	462.263.100,00	7.736.900,00	98,35	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 14	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	5.371.446.000,00	5.009.384.467,00	362.061.533,00	93,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.371.446.000,00	5.009.384.467,00	362.061.533,00	93,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 22	<i>Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya</i>	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.597.491.787,00	1.594.983.972,00	2.507.815,00	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.597.491.787,00	1.594.983.972,00	2.507.815,00	99,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.992.515,00	278.484.700,00	2.507.815,00	99,11	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.316.499.272,00	1.316.499.272,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.812.942.220,00)	(98.293.410.793,11)	(7.663.387.238,89)	94,68	

Tanggal : Juni 2023



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	50.012.500.000,00	54.317.605.163,00	4.305.105.163,00	108,61	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.012.500.000,00	54.317.605.163,00	4.305.105.163,00	108,61	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	12.500.000,00	16.900.800,00	4.400.800,00	135,21	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000.000,00	54.300.704.363,00	4.300.704.363,00	108,60	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	89.338.642.661,00	85.209.000.973,00	4.129.641.688,00	95,38	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.612.219.129,00	35.302.257.396,00	1.309.961.733,00	96,42	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	36.612.219.129,00	35.302.257.396,00	1.309.961.733,00	96,42	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	35.115.819.129,00	34.291.193.110,00	824.626.019,00	97,65	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.496.400.000,00	1.011.064.286,00	485.335.714,00	67,57	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	52.726.423.532,00	49.906.743.577,00	2.819.679.955,00	94,65	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 32	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	2.103.363.250,00	1.639.021.188,00	464.342.062,00	77,92	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 32 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.103.363.250,00	1.639.021.188,00	464.342.062,00	77,92	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13	<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	50.623.060.282,00	48.267.722.389,00	2.355.337.893,00	95,35	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.692.140.056,00	31.074.812.894,00	1.617.327.162,00	95,05	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal	17.930.920.226,00	17.192.909.495,00	738.010.731,00	95,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.326.142.661,00)	(30.891.395.810,00)	8.434.746.851,00	78,55	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	1.330.000.000,00	526.738.000,00	-803.262.000,00	39,60	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.330.000.000,00	526.738.000,00	-803.262.000,00	39,60	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.330.000.000,00	526.738.000,00	-803.262.000,00	39,60	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5	BELANJA DAERAH	115.087.483.749,00	102.698.219.050,32	12.389.264.698,68	89,23	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.368.000,00	21.730.750,00	637.250,00	97,15	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.368.000,00	21.730.750,00	637.250,00	97,15	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.368.000,00	21.730.750,00	637.250,00	97,15	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.040.049.000,00	3.948.111.379,00	91.937.621,00	97,72	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.040.049.000,00	3.948.111.379,00	91.937.621,00	97,72	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.040.049.000,00	3.948.111.379,00	91.937.621,00	97,72	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.523.792,00	246.490.490,00	7.033.302,00	97,23	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.512.000,00	2.500.000,00	12.000,00	99,52	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.512.000,00	2.500.000,00	12.000,00	99,52	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.599.742,00	64.550.750,00		99,92	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.099.742,00	40.075.250,00	24.492,00	99,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.475.500,00	24.500,00	99,90	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.969.050,00	14.961.600,00	7.450,00	99,95	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.969.050,00	14.961.600,00	7.450,00	99,95	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.500.000,00	19.770.000,00	5.730.000,00	77,53	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	19.770.000,00	5.730.000,00	77,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	24.763.000,00	24.760.000,00	3.000,00	99,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.763.000,00	24.760.000,00	3.000,00	99,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	121.180.000,00	119.948.140,00	1.231.860,00	98,98	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.180.000,00	119.948.140,00	1.231.860,00	98,98	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	439.597.704,00	368.836.414,00	70.761.290,00	83,90	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	439.597.704,00	368.836.414,00	70.761.290,00	83,90	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.397.704,00	92.761.914,00	62.635.790,00	59,69	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.200.000,00	276.074.500,00	8.125.500,00	97,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.569.004.080,00	3.395.764.372,00	173.239.708,00	95,15	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	662.296.050,00	633.021.692,00	29.274.358,00	95,58	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	662.296.050,00	633.021.692,00	29.274.358,00	95,58	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2.906.708.030,00	2.762.742.680,00	143.965.350,00	95,05	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	332.200.000,00	196.300.000,00	135.900.000,00	59,09	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.574.508.030,00	2.566.442.680,00	8.065.350,00	99,69	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.365.358.950,00	1.195.421.061,00	169.937.889,00	87,55	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	325.650.000,00	182.479.425,00	143.170.575,00	56,04	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.650.000,00	182.479.425,00	143.170.575,00	56,04	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.039.708.950,00	1.012.941.636,00	26.767.314,00	97,43	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.039.708.950,00	1.012.941.636,00	26.767.314,00	97,43	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.465.357.420,00	3.430.851.150,00	34.506.270,00	99,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10	<i>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</i>	3.465.357.420,00	3.430.851.150,00	34.506.270,00	99,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	46.530.000,00	39.330.000,00	7.200.000,00	84,53	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.418.720,00	84.968.150,00	6.450.570,00	92,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.327.408.700,00	3.306.553.000,00	20.855.700,00	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.201.025.820,00	1.915.768.073,00	285.257.747,00	87,04	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14	<i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</i>	2.201.025.820,00	1.915.768.073,00	285.257.747,00	87,04	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	33.130.000,00	23.720.000,00	9.410.000,00	71,60	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.895.820,00	95.798.373,00	12.097.447,00	88,79	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.060.000.000,00	1.796.249.700,00	263.750.300,00	87,20	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.257.354.500,00	9.034.462.060,00	1.222.892.440,00	88,08	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	401.136.100,00	281.690.600,00	119.445.500,00	70,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00	75,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	399.736.100,00	280.640.600,00	119.095.500,00	70,21	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04	<i>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 06	<i>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	6.174.031.400,00	6.114.249.408,00	59.781.992,00	99,03	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	19.330.000,00	16.450.000,00	2.880.000,00	85,10	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.154.701.400,00	6.097.799.408,00	56.901.992,00	99,08	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 07	<i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</i>	559.997.000,00	454.007.200,00	105.989.800,00	81,07	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	559.997.000,00	454.007.200,00	105.989.800,00	81,07	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 19	<i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	2.822.190.000,00	1.884.514.852,00	937.675.148,00	66,77	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.676.230.000,00	1.669.714.852,00	6.515.148,00	99,61	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.145.960.000,00	214.800.000,00	931.160.000,00	18,74	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	607.550.000,00	605.081.250,00	2.468.750,00	99,59	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03	<i>Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>	607.550.000,00	605.081.250,00	2.468.750,00	99,59	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	607.550.000,00	605.081.250,00	2.468.750,00	99,59	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.347.408.700,00	2.302.727.003,00	44.681.697,00	98,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	256.005.000,00	253.071.000,00	2.934.000,00	98,85	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.005.000,00	253.071.000,00	2.934.000,00	98,85	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	304.700.000,00	300.000.000,00	4.700.000,00	98,46	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.700.000,00	300.000.000,00	4.700.000,00	98,46	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	14.390.000,00	5.212.050,00	9.177.950,00	36,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.390.000,00	5.212.050,00	9.177.950,00	36,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.704.028.700,00	1.682.861.980,00	21.166.720,00	98,76	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 12 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	15.450.000,00	10.700.000,00	4.750.000,00	69,26	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.688.578.700,00	1.672.161.980,00	16.416.720,00	99,03	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 16	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	68.285.000,00	61.581.973,00	6.703.027,00	90,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.285.000,00	61.581.973,00	6.703.027,00	90,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14.127.765.580,00	13.872.121.429,00	255.644.151,00	98,19	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.263.692.330,00	7.220.281.350,00	43.410.980,00	99,40	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	83.910.000,00	75.950.000,00	7.960.000,00	90,51	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.179.782.330,00	7.144.331.350,00	35.450.980,00	99,51	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.864.073.250,00	6.651.840.079,00	212.233.171,00	96,91	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.744.073.250,00	6.539.320.079,00	204.753.171,00	96,96	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	112.520.000,00	7.480.000,00	93,77	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20.244.348.036,00	14.214.698.655,00	6.029.649.381,00	70,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	19.845.902.036,00	13.942.092.655,00	5.903.809.381,00	70,25	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	128.080.000,00	108.550.000,00	19.530.000,00	84,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.106.272.500,00	11.736.228.375,00	370.044.125,00	96,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.314.000.000,00	749.700.000,00	564.300.000,00	57,05	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.297.549.536,00	1.347.614.280,00	4.949.935.256,00	21,40	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	398.446.000,00	272.606.000,00	125.840.000,00	68,42	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	398.446.000,00	272.606.000,00	125.840.000,00	68,42	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	51.621.610.535,00	47.811.628.055,32	3.809.982.479,68	92,62	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05	Pembangunan Jalan	40.368.464.175,00	37.171.014.620,44	3.197.449.554,56	92,08	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	138.010.000,00	94.700.000,00	43.310.000,00	68,62	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.063.203.175,00	2.018.275.918,00	44.927.257,00	97,82	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.167.251.000,00	35.058.038.702,44	3.109.212.297,56	91,85	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09	Rehabilitasi Jalan	1.612.047.160,00	1.595.607.510,00	16.439.650,00	98,98	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	15.500.000,00	15.700.000,00	49,68	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.580.847.160,00	1.580.107.510,00	739.650,00	99,95	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12	Pembangunan Jembatan	8.381.728.800,00	7.827.499.068,88	554.229.731,12	93,39	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	67.630.000,00	46.550.000,00	21.080.000,00	68,83	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	496.828.800,00	444.750.950,00	52.077.850,00	89,52	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.817.270.000,00	7.336.198.118,88	481.071.881,12	93,85	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18	Rehabilitasi Jembatan	1.259.370.400,00	1.217.506.856,00	41.863.544,00	96,68	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	40.550.000,00	15.030.000,00	25.520.000,00	37,07	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.218.820.400,00	1.202.476.856,00	16.343.544,00	98,66	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	169.858.070,00	90.268.165,00	79.589.905,00	53,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25 . 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	169.858.070,00	90.268.165,00	79.589.905,00	53,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.858.070,00	90.268.165,00	79.589.905,00	53,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	115.018.512,00	31.686.183,00	83.332.329,00	27,55	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28 . 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	115.018.512,00	31.686.183,00	83.332.329,00	27,55	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.018.512,00	31.686.183,00	83.332.329,00	27,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Belanja Barang dan Jasa	240.285.050,00	212.572.561,00	27.712.489,00	88,47	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04		240.285.050,00	212.572.561,00	27.712.489,00	88,47	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04 . 5 . 1 . 2		240.285.050,00	212.572.561,00	27.712.489,00	88,47	
SURPLUS / (DEFISIT)		(113.757.483.749,00)	(102.171.481.050,32)	-11.586.002.698,68	89,82	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Juni 2023

Urusan Pemerintahan : 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	205.278.400,00	232.729.200,00	27.450.800,00	113,37	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	205.278.400,00	232.729.200,00	27.450.800,00	113,37	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	205.278.400,00	232.729.200,00	27.450.800,00	113,37	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	12.314.356.710,00	11.732.178.756,40	582.177.953,60	95,27	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.598.775.000,00	1.386.438.107,00	212.336.893,00	86,72	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.598.775.000,00	1.386.438.107,00	212.336.893,00	86,72	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.598.775.000,00	1.386.438.107,00	212.336.893,00	86,72	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.767.350,00	182.985.031,00	782.319,00	99,57	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.367.600,00	31.872.020,00	495.580,00	98,47	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.367.600,00	31.872.020,00	495.580,00	98,47	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.481.000,00	19.455.850,00	25.150,00	99,87	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.481.000,00	19.455.850,00	25.150,00	99,87	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.374.000,00	12.323.800,00	50.200,00	99,59	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.374.000,00	12.323.800,00	50.200,00	99,59	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.037.750,00	115.826.361,00	211.389,00	99,82	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.037.750,00	115.826.361,00	211.389,00	99,82	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.723.800,00	438.761.030,00	27.962.770,00	94,01	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	466.723.800,00	438.761.030,00	27.962.770,00	94,01	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	105.900.000,00	90.550.000,00	15.350.000,00	85,51	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.823.800,00	348.211.030,00	12.612.770,00	96,50	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.575.000,00	28.082.300,00	10.492.700,00	72,80	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	12.575.000,00	2.531.300,00	10.043.700,00	20,13	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.575.000,00	2.531.300,00	10.043.700,00	20,13	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	26.000.000,00	25.551.000,00	449.000,00	98,27	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	25.551.000,00	449.000,00	98,27	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.330.000,00	1.803.650,00	526.350,00	77,41	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 05	<i>Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	2.330.000,00	1.803.650,00	526.350,00	77,41	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.330.000,00	1.803.650,00	526.350,00	77,41	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12.641.000,00	9.683.782,00	2.957.218,00	76,61	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 01	<i>Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana</i>	12.641.000,00	9.683.782,00	2.957.218,00	76,61	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.641.000,00	9.683.782,00	2.957.218,00	76,61	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	116.854.500,00	115.427.950,00	1.426.550,00	98,78	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 04	<i>Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana</i>	116.854.500,00	115.427.950,00	1.426.550,00	98,78	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.854.500,00	115.427.950,00	1.426.550,00	98,78	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 18	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.230.000,00	1.075.000,00	2.155.000,00	33,28	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 18 . 02	<i>Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	3.230.000,00	1.075.000,00	2.155.000,00	33,28	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.230.000,00	1.075.000,00	2.155.000,00	33,28	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 19	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	282.438.800,00	246.939.871,00	35.498.929,00	87,43	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 19 . 01	<i>Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun</i>	282.438.800,00	246.939.871,00	35.498.929,00	87,43	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.338.800,00	245.889.871,00	34.448.929,00	87,71	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 22	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	190.392.000,00	174.808.927,00	15.583.073,00	91,82	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 22 . 02	<i>Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</i>	190.392.000,00	174.808.927,00	15.583.073,00	91,82	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.392.000,00	174.808.927,00	15.583.073,00	91,82	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 23	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	68.525.400,00	61.777.146,00	6.748.254,00	90,15	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 23 . 03	<i>Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh</i>	68.525.400,00	61.777.146,00	6.748.254,00	90,15	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.525.400,00	61.777.146,00	6.748.254,00	90,15	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.036.736.960,00	3.981.640.504,79	55.096.455,21	98,64	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 06	<i>Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	2.362.325.460,00	2.312.492.529,79	49.832.930,21	97,89	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.326.625.460,00	2.276.792.529,79	49.832.930,21	97,86	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 08	<i>Pembangunan Rumah Baru Layak Huni</i>	1.674.411.500,00	1.669.147.975,00	5.263.525,00	99,69	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 08 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.674.411.500,00	1.669.147.975,00	5.263.525,00	99,69	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 25	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 00 . 25 . 01	<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00		
2.04 . 1.04.01 . 00 . 25	Penerbitan Izin Membuka Tanah	132.863.000,00	128.304.200,00	4.558.800,00	96,57	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 25 . 02	<i>Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	132.863.000,00	128.304.200,00	4.558.800,00	96,57	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 25 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.863.000,00	128.304.200,00	4.558.800,00	96,57	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.056.011.900,00	4.855.262.257,61	200.749.642,39	96,03	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	5.056.011.900,00	4.855.262.257,61	200.749.642,39	96,03	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	77.550.000,00	76.250.000,00	1.300.000,00	98,32	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.978.461.900,00	4.779.012.257,61	199.449.642,39	95,99	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 19	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	116.192.000,00	112.639.000,00	3.553.000,00	96,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 19 . 01	<i>Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun</i>	116.192.000,00	112.639.000,00	3.553.000,00	96,94	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.200.000,00	66.960.000,00	240.000,00	99,64	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.992.000,00	45.679.000,00	3.313.000,00	93,24	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.300.000,00	6.550.000,00	1.750.000,00	78,92	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	8.300.000,00	6.550.000,00	1.750.000,00	78,92	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.300.000,00	6.550.000,00	1.750.000,00	78,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.109.078.310,00)	(11.499.449.556,40)	(554.727.153,60)	94,97	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Juni 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 1 . 05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	7.725.032.180,00	7.580.689.112,00	144.343.068,00	98,13	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.385.033.000,00	2.294.029.995,00	91.003.005,00	96,18	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.385.033.000,00	2.294.029.995,00	91.003.005,00	96,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.385.033.000,00	2.294.029.995,00	91.003.005,00	96,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.344.600,00	131.322.329,00	22.271,00	99,38	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.955.000,00	5.950.000,00	5.000,00	99,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.955.000,00	5.950.000,00	5.000,00	99,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.904.000,00	19.899.500,00	4.500,00	99,98	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.904.000,00	19.899.500,00	4.500,00	99,98	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.600,00	9.998.140,00	460,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	9.998.600,00	9.998.140,00	460,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	99,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.493.600,00	7.432.000,00	61.600,00	99,18	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.493.600,00	7.432.000,00	61.600,00	99,94	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.442.000,00	92.424.689,00	17.311,00	99,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	92.442.000,00	92.424.689,00	17.311,00	99,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.494.582.840,00	4.468.113.252,00	26.469.588,00	98,39	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.500.000,00	3.456.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.456.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	28.080.000,00	27.344.412,00	735.588,00	97,38	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	27.344.412,00	735.588,00	97,38	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	4.463.002.840,00	4.437.312.840,00	25.690.000,00	99,42	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	64.500.000,00	56.950.000,00	7.550.000,00	96,75	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.398.502.840,00	4.380.362.840,00	18.140.000,00	99,59	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.835.290,00	240.674.936,00	3.160.354,00	98,70	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	235.135.290,00	231.979.936,00	3.155.354,00	98,66	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	235.135.290,00	231.979.936,00	3.155.354,00		
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	8.700.000,00	8.695.000,00	5.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.695.000,00	5.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.071.000,00	178.089.750,00	14.981.250,00	92,24	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 01	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	172.071.000,00	157.099.750,00	14.971.250,00	99,62	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	172.071.000,00	157.099.750,00	14.971.250,00	99,62	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 05	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	21.000.000,00	20.990.000,00	10.000,00	99,95	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 05.5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	20.990.000,00	10.000,00	99,95	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.615.000,00	37.508.150,00	106.850,00	99,72	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16 . 03	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	37.615.000,00	37.508.150,00	106.850,00	99,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.615.000,00	37.508.150,00	106.850,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	182.392.850,00	182.291.500,00	101.350,00	99,94	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23 . 02	<i>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	182.392.850,00	182.291.500,00	101.350,00	99,49	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.392.850,00	182.291.500,00	101.350,00	99,94	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 24	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 24 . 01	<i>Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 25	Investigasi Kejadian Kebakaran	7.242.500,00	4.817.700,00	2.424.800,00	66,52	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 25.01	<i>Investiqasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan</i>					
1.05 . 1.05.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Baranq dan Jasa	7.242.500,00	4.817.700,00	2.424.800,00	66,52	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 26	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	26.621.500,00	21.959.500,00	4.662.000,00	82,49	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 26. 02	<i>Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</i>	26.621.500,00	21.959.500,00	4.662.000,00	82,49	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Baranq dan Jasa	26.621.500,00	21.959.500,00	4.662.000,00	82,49	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	99,71	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	99,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	99,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15.01	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Aset tetap lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.725.032.180,00)	(7.580.689.112,00)	(144.343.068,00)	98,13	



Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
 Nomor : 3 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Juni 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	27.129.253.840,00	20.672.802.226,00	6.456.451.614,00	76,20	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	772.208.072,00	727.948.564,00	44.259.508,00	94,27	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	772.208.072,00	727.948.564,00	44.259.508,00	94,27	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	772.208.072,00	727.948.564,00	44.259.508,00	94,27	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.014.348,00	216.258.954,00	755.394,00	99,65	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	47.891.348,00	47.860.314,00	31.034,00	99,94	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.891.348,00	47.860.314,00	31.034,00	99,94	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	79.075.000,00	78.497.000,00	578.000,00	99,27	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.075.000,00	78.497.000,00	578.000,00	99,27	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	85.606.000,00	85.459.640,00	146.360,00	99,83	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.606.000,00	85.459.640,00	146.360,00	99,83	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.119.120,00	695.602.680,00	516.440,00	99,93	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	15.000.000,00	14.986.500,00	13.500,00	99,91	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.986.500,00	13.500,00	99,91	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	670.989.120,00	670.486.180,00	502.940,00	99,93	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	55.550.000,00	55.350.000,00	200.000,00	99,64	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	615.439.120,00	615.136.180,00	302.940,00	99,95	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.500.000,00	153.621.400,00	878.600,00	99,43	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.500.000,00	98.621.400,00	878.600,00	99,12	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	98.621.400,00	878.600,00	99,12	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 19	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	146.351.300,00	145.264.212,00	1.087.088,00	99,26	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 19 . 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	120.690.000,00	120.240.450,00	449.550,00	99,63	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.690.000,00	120.240.450,00	449.550,00	99,63	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 19 . 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.661.300,00	25.023.762,00	637.538,00	97,52	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.661.300,00	25.023.762,00	637.538,00	97,52	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 20	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	246.951.800,00	246.236.950,00	714.850,00	99,71	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 20 . 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	25.100.000,00	24.945.000,00	155.000,00	99,38	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 20 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	24.945.000,00	155.000,00	99,38	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 20 . 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	221.851.800,00	221.291.950,00	559.850,00	99,75	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 20 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.851.800,00	221.291.950,00	559.850,00	99,75	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	341.939.200,00	340.673.856,00	1.265.344,00	99,63	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis	23.063.700,00	22.622.434,00	441.266,00	98,09	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.063.700,00	22.622.434,00	441.266,00	98,09	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	33.181.900,00	33.019.270,00	162.630,00	99,51	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.181.900,00	33.019.270,00	162.630,00	99,51	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	83.423.600,00	82.822.152,00	601.448,00	99,28	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.423.600,00	82.822.152,00	601.448,00	99,28	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	192.130.000,00	192.070.000,00	60.000,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00 . 21 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.130.000,00	192.070.000,00	60.000,00	99,97	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.170.000,00	21.170.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 07 . 02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	21.170.000,00	21.170.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.170.000,00	21.170.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 20	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.500.000.000,00	18.093.025.610,00	6.406.974.390,00	73,85	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 20 . 07	<i>Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</i>	24.500.000.000,00	18.093.025.610,00	6.406.974.390,00	73,85	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.500.000.000,00	18.093.025.610,00	6.406.974.390,00	73,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	27.129.253.840,00	20.672.802.226,00	6.456.451.614,00	76,20	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	10.064.514.910,00	9.331.720.987,19	732.793.922,81	92,72	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.201.760.000,00	2.100.690.881,00	101.069.119,00	95,41	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.201.760.000,00	2.100.690.881,00	101.069.119,00	95,41	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.201.760.000,00	2.100.690.881,00	101.069.119,00	95,41	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.674.200,00	279.425.484,00	248.716,00	99,91	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.949.800,00	74.949.800,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.949.800,00	74.949.800,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.867.000,00	133.000,00	98,34	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.867.000,00	133.000,00	98,34	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak an dan Pengganda n	38.113.300,00	38.044.059,00	69.241,00	99,82	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.113.300,00	38.044.059,00	69.241,00	99,82	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.121.100,00	146.074.625,00	46.475,00	99,97	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.121.100,00	146.074.625,00	46.475,00	99,97	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.092.171.460,00	1.084.614.850,00	7.556.610,00	99,31	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	64.166.100,00	59.430.450,00	4.735.650,00	92,62	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.166.100,00	59.430.450,00	4.735.650,00	92,62	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.020.005.360,00	1.017.184.400,00	2.820.960,00	99,72	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	73.400.000,00	73.400.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	946.605.360,00	943.784.400,00	2.820.960,00	99,70	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.170.000,00	120.275.526,00	4.894.474,00	96,09	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.820.000,00	11.238.650,00	581.350,00	95,08	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.820.000,00	11.238.650,00	581.350,00	95,08	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	110.000.000,00	105.686.876,00	4.313.124,00	96,08	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	105.686.876,00	4.313.124,00	96,08	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	531.680.300,00	523.941.431,00	7.738.869,00	98,54	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15 . 03	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	531.680.300,00	523.941.431,00	7.738.869,00	98,54	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	531.680.300,00	523.941.431,00	7.738.869,00	98,54	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115.105.000,00	114.286.300,00	818.700,00	99,29	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 11	<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 13	<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	112.800.000,00	111.981.300,00	818.700,00	99,27	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.800.000,00	111.981.300,00	818.700,00	99,27	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	758.615.000,00	690.032.700,00	68.582.300,00	90,96	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01	<i>Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	4.375.000,00	4.374.400,00	600,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	4.374.400,00	600,00	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 02	<i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	25.000.000,00	24.975.000,00	25.000,00	99,90	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.975.000,00	25.000,00	99,90	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 04	<i>Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	70.640.000,00	70.523.300,00	116.700,00	99,83	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.640.000,00	70.523.300,00	116.700,00	99,83	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 06	<i>Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	100,00	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 17 . 07	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</i>	447.000.000,00	379.500.000,00	67.500.000,00	84,90	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	447.000.000,00	379.500.000,00	67.500.000,00	84,90	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 17 . 08	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</i>	40.000.000,00	39.060.000,00	940.000,00	97,65	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.060.000,00	940.000,00	97,65	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	87.501.900,00	87.398.600,00	103.300,00	99,88	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 02	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan</i>	87.501.900,00	87.398.600,00	103.300,00	99,88	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.501.900,00	87.398.600,00	103.300,00	99,88	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	100,00	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18 . 04	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	100,00	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18 . 04 . 23 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	355.432.600,00	324.722.950,00	30.709.650,00	91,36	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 01	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	8.100.000,00	8.034.250,00	65.750,00	99,19	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.034.250,00	65.750,00	99,19	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 03	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	333.867.900,00	303.224.300,00	30.643.600,00	90,82	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.867.900,00	303.224.300,00	30.643.600,00	90,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	5.064.700,00	5.064.400,00	300,00	99,99	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.064.700,00	5.064.400,00	300,00	99,99	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 08	<i>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90.205.000,00	24.462.310,00	65.742.690,00		
					27,12	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19 . 02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	90.205.000,00	24.462.310,00	65.742.690,00	27,12	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.205.000,00	24.462.310,00	65.742.690,00	27,12	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	68.520.000,00	68.515.800,00	4.200,00		
					99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 01	<i>Penyediaan Permakanan</i>	10.640.000,00	10.635.800,00	4.200,00	99,96	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.640.000,00	10.635.800,00	4.200,00	99,96	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 03	<i>Penyediaan Alat Bantu</i>	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 04	<i>Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 05	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	42.379.000,00	41.816.170,00	562.830,00		
					98,67	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 1 . 2	<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>	29.589.000,00	29.556.170,00	32.830,00	99,89	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.589.000,00	29.556.170,00	32.830,00	99,89	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09	<i>Pemberian Layanan Data dan Pengaduan</i>	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 12	<i>Pemberian Layanan Rujukan</i>	12.040.000,00	11.510.000,00	530.000,00	95,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	11.510.000,00	530.000,00	95,60	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	465.750.000,00	465.480.000,00	270.000,00	99,94	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 03	<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>	465.750.000,00	465.480.000,00	270.000,00	99,94	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	465.750.000,00	465.480.000,00	270.000,00	99,94	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.699.307.300,00	1.322.936.542,00	376.370.758,00	77,85	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21 . 02	<i>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	479.572.300,00	457.183.092,00	22.389.208,00	95,33	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	479.572.300,00	457.183.092,00	22.389.208,00	95,33	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21 . 03	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	64.995.000,00	64.913.450,00	81.550,00	99,87	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.995.000,00	64.913.450,00	81.550,00	99,87	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21 . 05	<i>Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Belanja Barang dan Jasa</i>	1.154.740.000,00	800.840.000,00	353.900.000,00	69,35	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 1 . 2		1.154.740.000,00	800.840.000,00	353.900.000,00	69,35	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57.471.950,00	57.210.300,00	261.650,00	99,54	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	40.010.450,00	39.988.800,00	21.650,00	99,95	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.010.450,00	39.988.800,00	21.650,00	99,95	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 03	<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	17.461.500,00	17.221.500,00	240.000,00	98,63	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.461.500,00	17.221.500,00	240.000,00	98,63	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	302.723.100,00	302.677.500,00	45.600,00	99,98	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 01	<i>Penyediaan Makanan</i>	299.615.100,00	299.569.500,00	45.600,00	99,98	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.615.100,00	299.569.500,00	45.600,00	99,98	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 05	<i>Pelayanan Dukungan Psikososial</i>	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	100,00	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 26	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96.363.450,00	96.260.886,00	102.564,00	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.02 . 1.06.01 . 00 . 26 . 03	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	96.363.450,00	96.260.886,00	102.564,00	99,89	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 26 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.363.450,00	96.260.886,00	102.564,00	99,89	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 27	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.439.650,00	150.275.450,00	1.164.200,00		
					99,23	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 27 . 01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	38.489.650,00	38.295.450,00			
				194.200,00	99,50	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.489.650,00	38.295.450,00	194.200,00	99,50	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 27 . 02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap</i>	112.950.000,00	111.980.000,00	970.000,00	99,14	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 27 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.950.000,00	111.980.000,00	970.000,00	99,14	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 28	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.839.000,00	125.944.182,00	45.894.818,00		
					73,29	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 28 . 02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	171.839.000,00	125.944.182,00			
				45.894.818,00	73,29	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.839.000,00	125.944.182,00	45.894.818,00	73,29	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 29	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000,00	58.211.000,00	18.595.000,00	75,79	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 29 . 02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	76.806.000,00	58.211.000,00	18.595.000,00	75,79	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 29 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.806.000,00	58.211.000,00	18.595.000,00	75,79	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.045.000.000,00	1.042.942.125,19	2.057.874,81		
					99,80	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	1.045.000.000,00	1.042.942.125,19	2.057.874,81	99,80	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.045.000.000,00	1.042.942.125,19	2.057.874,81	99,80	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.064.514.910,00)	(9.331.720.987,19)	(732.793.922,81)	92,72	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

Urusan Pemerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Bidang Pemerintahan : 2 . 03	Pangan					
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	265.000.000,00	131.550.000,00	(133.450.000,00)	49,64	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	265.000.000,00	131.550.000,00	(133.450.000,00)	49,64	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	265.000.000,00	131.550.000,00	(133.450.000,00)	49,64	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	5.392.871.710,00	5.251.408.258,00	141.463.452,00	97,38	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.624.092.000,00	2.533.996.121,00	90.095.879,00	96,57	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.092.000,00	2.533.996.121,00	90.095.879,00	96,57	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.624.092.000,00	2.533.996.121,00	90.095.879,00	96,57	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.293.050,00	141.191.627,00	101.423,00	99,93	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1.848.000,00	1.845.000,00	3.000,00	99,84	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.848.000,00	1.845.000,00	3.000,00	99,84	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.015.000,00	16.999.900,00	15.100,00	99,91	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.015.000,00	16.999.900,00	15.100,00	99,91	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.552.100,00	5.547.400,00	4.700,00	99,92	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.552.100,00	5.547.400,00	4.700,00	99,92	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.785.000,00	12.785.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.785.000,00	12.785.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.629.700,00	8.629.652,00	48,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.629.700,00	8.629.652,00	48,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.463.250,00	95.384.675,00	78.575,00	99,92	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.250,00	95.384.675,00	78.575,00	99,92	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	869.136.760,00	855.240.896,00	13.895.864,00	98,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	50.000.000,00	49.626.406,00	373.594,00	99,25	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.626.406,00	373.594,00	99,25	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	817.756.760,00	804.234.490,00	13.522.270,00	98,35	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	59.000.000,00	57.300.000,00	1.700.000,00	97,12	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	758.756.760,00	746.934.490,00	11.822.270,00	98,44	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.929.000,00	391.645.300,00	2.283.700,00	99,42	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	12.029.000,00	11.929.000,00	100.000,00	99,17	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.029.000,00	11.929.000,00	100.000,00	99,17	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	35.000.000,00	32.816.300,00	2.183.700,00	93,76	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.816.300,00	2.183.700,00	93,76	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	346.900.000,00	346.900.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	346.900.000,00	346.900.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 16	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	51.600.300,00	51.204.850,00	395.450,00	99,23	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 16 . 01	<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	14.794.750,00	14.705.750,00	89.000,00	99,40	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.794.750,00	14.705.750,00	89.000,00	99,40	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 16 . 04	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	36.805.550,00	36.499.100,00	306.450,00	99,17	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.805.550,00	36.499.100,00	306.450,00	99,17	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	592.589.650,00	590.947.074,00	1.642.576,00	99,72	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 01	<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	9.321.300,00	9.304.850,00	16.450,00	99,82	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.321.300,00	9.304.850,00	16.450,00	99,82	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 02	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	583.268.350,00	581.642.224,00	1.626.126,00	99,72	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	9.400.000,00	1.600.000,00	85,45	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.268.350,00	227.242.224,00	26.126,00	99,99	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00 . 21	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.364.550,00	113.166.590,00	197.960,00	99,83	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 21 . 02	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	113.364.550,00	113.166.590,00	197.960,00	99,83	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.364.550,00	113.166.590,00	197.960,00	99,83	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 22	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	10.023.600,00	10.002.900,00	20.700,00	99,79	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 04	<i>Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.023.600,00	10.002.900,00	20.700,00	99,79	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.023.600,00	10.002.900,00	20.700,00	99,79	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 24	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	519.661.500,00	487.259.200,00	32.402.100,00	93,76	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 24 . 02	<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	289.688.450,00	257.540.000,00	32.148.450,00	88,90	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.688.450,00	257.540.000,00	32.148.450,00	88,90	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 24 . 03	<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	229.972.850,00	229.719.200,00	253.650,00	99,89	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 24 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.972.850,00	229.719.200,00	253.650,00	99,89	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 25	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam	13.553.000,00	13.371.450,00	181.550,00	98,66	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 25 . 01	<i>Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>	13.553.000,00	13.371.450,00	181.550,00	98,66	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.553.000,00	13.371.450,00	181.550,00	98,66	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 28	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	62.728.500,00	62.482.250,00	246.250,00	99,61	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 28 . 01	<i>Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	62.728.500,00	62.482.250,00	246.250,00	99,61	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.728.500,00	62.482.250,00	246.250,00	99,61	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.127.871.710,00)	(5.119.858.258,00)	(274.913.452,00)	99,84	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA						
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						
TAHUN ANGGARAN 2022						
 Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	156.483.000,00	46.483.000,00	129,61	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	156.483.000,00	46.483.000,00	129,61	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	110.000.000,00	156.483.000,00	46.483.000,00	142,26	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	4.247.203.510,00	4.103.491.875,00	143.711.635,00	96,62	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.884.990.000,00	1.807.950.875,00	77.039.125,00	95,91	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.884.990.000,00	1.807.950.875,00	77.039.125,00	95,23	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.884.990.000,00	1.807.950.875,00	77.039.125,00	95,91	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.789.250,00	133.533.437,00	218.413,00	99,81	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.444.000,00	3.444.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.444.000,00	3.444.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.247.000,00	20.240.000,00	0,00	99,97	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.247.000,00	20.240.000,00	0,00	99,97	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.025.700,00	9.995.300,00	0,00	99,70	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.025.700,00	9.995.300,00	0,00	99,70	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.072.550,00	99.854.137,00	218.413,00	99,78	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.072.550,00	99.854.137,00	218.413,00	99,78	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.108.499.210,00	1.068.607.271,00	39.891.939,00	96,40	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	47.552.741,00	2.447.259,00	95,11	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.552.741,00	2.447.259,00	95,11	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.227.040,00	35.208.000,00	19.040,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.227.040,00	35.208.000,00	19.040,00	99,95	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.023.272.170,00	985.846.530,00	37.425.640,00	96,34	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	67.650.000,00	55.100.000,00	12.550.000,00	81,45	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	955.622.170,00	930.746.530,00	24.875.640,00	97,40	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.310.100,00	64.494.569,00	815.531,00	98,75	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	65.310.100,00	64.494.569,00	815.531,00	98,75	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.310.100,00	64.494.569,00	815.531,00	98,75	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	31.978.500,00	31.427.000,00	551.500,00	98,28	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01	<i>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa			0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02	<i>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	31.978.500,00	31.427.000,00	551.500,00	98,28	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.978.500,00	31.427.000,00	551.500,00	98,28	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	91.362.400,00	90.172.650,00	1.189.750,00	98,70	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media</i>	56.108.200,00	55.360.650,00	747.550,00	98,67	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.108.200,00	55.360.650,00	747.550,00	98,67	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	35.254.200,00	34.812.000,00	442.200,00	98,75	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.254.200,00	34.812.000,00	442.200,00	98,75	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	102.101.600,00	101.883.557,00	218.043,00	99,79	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 03	<i>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	102.101.600,00	101.883.557,00	218.043,00	99,79	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai			0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.101.600,00	101.883.557,00	218.043,00	99,79	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	15.442.750,00	15.161.200,00	281.550,00	98,18	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 04	<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	15.442.750,00	15.161.200,00	281.550,00	98,18	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.442.750,00	15.161.200,00	281.550,00	98,18	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21	Penyimpanan Sementara Limbah B3	7.247.200,00	6.837.900,00	409.300,00	94,35	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	7.247.200,00	6.837.900,00	409.300,00	94,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.247.200,00	6.837.900,00	14.085.100,00	94,35	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.158.500,00	48.720.500,00	1.438.000,00	97,13	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	25.112.500,00	24.913.600,00	198.900,00	99,21	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.112.500,00	24.913.600,00	198.900,00	99,21	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.046.000,00	23.806.900,00	1.239.100,00	95,05	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.046.000,00	23.806.900,00	1.239.100,00	95,05	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	13.372.600,00	13.372.500,00	100,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25 . 01	<i>Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional,</i>	13.372.600,00	13.372.500,00	100,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.372.600,00	13.372.500,00	100,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 27	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.753.000,00	8.695.000,00	58.000,00	99,34	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 27 . 01	<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	8.753.000,00	8.695.000,00	58.000,00	99,34	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.753.000,00	8.695.000,00	58.000,00	99,34	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 28	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.362.500,00	14.958.800,00	1.403.700,00	91,42	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 28 . 01	<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	16.362.500,00	14.958.800,00	1.403.700,00	91,42	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.362.500,00	14.958.800,00	1.403.700,00	91,42	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29	Pengelolaan Sampah	636.229.100,00	625.016.916,00	10.435.527,00	98,24	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29 . 03	<i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	600.581.850,00	589.450.785,00	11.131.065,00	98,15	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.581.850,00	589.450.785,00	11.131.065,00	98,15	
2.05 . 2.05.01.01 . 29 . 04	<i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>	35.647.250,00	35.566.131,00	(695.538,00)	99,77	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.647.250,00	35.566.131,00	(695.538,00)	99,77	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	



Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 06	Administrasi Kependudukan dan Capil
Unit Organisasi	: 2 . 06 . 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
 Nomor : Tahun 2023
 Tanggal : Juni 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 06 . 5	BELANJA DAERAH	4.688.452.740,00	4.600.670.094,00	87.782.646,00	98,13	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.050.000,00	13.047.000,00	3.000,00	99,98	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.050.000,00	13.047.000,00	3.000,00	99,98	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	13.047.000,00	3.000,00	99,98	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.423.337.000,00	2.344.707.101,00	78.629.899,00	96,76	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.423.337.000,00	2.344.707.101,00	78.629.899,00	96,76	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.423.337.000,00	2.344.707.101,00	78.629.899,00	96,76	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	958.931.500,00	957.223.082,00	1.708.418,00	99,82	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.240.000,00	19.237.800,00	2.200,00	99,99	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.240.000,00	19.237.800,00	2.200,00	99,99	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	446.634.000,00	445.796.360,00	837.640,00	99,81	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	446.634.000,00	445.796.360,00	837.640,00	99,81	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.113.000,00	17.103.388,00	9.612,00	99,94	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.113.000,00	17.103.388,00	9.612,00	99,94	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.654.500,00	461.795.534,00	858.966,00	99,81	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	462.654.500,00	461.795.534,00	858.966,00	99,81	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.124.240,00	587.004.500,00	5.119.740,00	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.700.000,00	3.674.772,00	25.228,00	99,32	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.674.772,00	25.228,00	99,32	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	122.378.000,00	119.004.128,00	3.373.872,00	97,24	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.378.000,00	119.004.128,00	3.373.872,00	97,24	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	466.046.240,00	464.325.600,00	1.720.640,00	99,63	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	50.850.000,00	49.750.000,00	1.100.000,00	97,84	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	415.196.240,00	414.575.600,00	620.640,00	99,85	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.860.000,00	213.882.411,00	977.589,00	99,55	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.200.000,00	11.177.250,00	22.750,00	99,80	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.177.250,00	22.750,00	99,80	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	53.660.000,00	53.033.161,00	626.839,00	98,83	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.660.000,00	53.033.161,00	626.839,00	98,83	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	150.000.000,00	149.672.000,00	328.000,00	99,78	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.672.000,00	328.000,00	99,78	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	486.150.000,00	484.806.000,00	1.344.000,00	99,72	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	468.900.000,00	467.556.000,00	1.344.000,00	99,71	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467.400.000,00	466.056.000,00	1.344.000,00	99,71	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.688.452.740,00)	(4.600.670.094,00)	(87.782.646,00)	98,13	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> Belanja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> Belanja Barang dan Jasa	8.984.991.179,00	8.856.791.917,00	128.199.262,00	98,57	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02		2.414.996.751,00	2.341.571.584,00	73.425.167,00	96,96	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01		2.414.996.751,00	2.341.571.584,00	73.425.167,00	96,96	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1		2.414.996.751,00	2.341.571.584,00	73.425.167,00	96,96	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06		592.516.650,00	592.079.860,00	436.790,00	99,93	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01		9.456.100,00	9.434.900,00	21.200,00	99,78	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2		9.456.100,00	9.434.900,00	21.200,00	99,78	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02		114.474.900,00	114.440.670,00	34.230,00	99,97	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2		114.474.900,00	48.026.000,00	66.448.900,00	41,95	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 03		14.284.850,00	14.203.700,00	81.150,00	99,43	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2		14.284.850,00	14.203.700,00	81.150,00	99,43	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 04		39.030.000,00	38.955.000,00	75.000,00	99,81	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2		39.030.000,00	38.955.000,00	75.000,00	99,81	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 05		51.628.800,00	51.628.400,00	400,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2		51.628.800,00	51.628.400,00	400,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 09		363.642.000,00	363.417.190,00	224.810,00	99,94	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2		363.642.000,00	363.417.190,00	224.810,00	99,94	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08		504.470.040,00	502.462.034,00	2.008.006,00	99,60	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 01		5.650.000,00	5.610.000,00	40.000,00	99,29	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2		5.650.000,00	5.610.000,00	40.000,00	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	37.100.000,00	36.681.994,00	418.006,00	98,87	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	36.681.994,00	418.006,00	98,87	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	461.720.040,00	460.170.040,00	1.550.000,00	99,66	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	85.250.000,00	85.250.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.470.040,00	374.920.040,00	1.550.000,00	99,59	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.393.818,00	247.929.650,00	2.464.168,00	99,02	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	31.072.450,00	30.847.000,00	225.450,00	99,27	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.072.450,00	30.847.000,00	225.450,00	99,27	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	151.051.100,00	148.862.650,00	2.188.450,00	98,55	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.051.100,00	148.862.650,00	2.188.450,00	98,55	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	55.620.268,00	55.570.000,00	50.268,00	99,91	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.620.268,00	55.570.000,00	50.268,00	99,91	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyelenggaraan Penataan Desa	211.458.100,00	210.829.650,00	628.450,00	99,70	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06	<i>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa</i>	211.458.100,00	210.829.650,00	628.450,00	99,70	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.458.100,00	210.829.650,00	628.450,00	99,70	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	128.722.300,00	127.387.986,00	1.334.314,00	98,96	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02	<i>Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota</i>	57.058.600,00	56.650.550,00	408.050,00	99,28	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.058.600,00	56.650.550,00	408.050,00	99,28	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 03	<i>Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	71.663.700,00	70.737.436,00	926.264,00	98,71	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.663.700,00	70.737.436,00	926.264,00	98,71	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.766.093.520,00	3.719.595.887,00	46.497.633,00	98,77	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	345.000.000,00	329.669.970,00	15.330.030,00	95,56	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	329.669.970,00	15.330.030,00	95,56	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa</i>	84.385.150,00	84.148.500,00	236.650,00	99,72	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.385.150,00	84.148.500,00	236.650,00	99,72	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Juni 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 09		Perhubungan				
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01		DINAS PERHUBUNGAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	244.052.000,00	(105.948.000,00)	69,73	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350.000.000,00	244.052.000,00	(105.948.000,00)	69,73	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	350.000.000,00	244.052.000,00	(105.948.000,00)	69,73	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02	BELANJA DAERAH	6.735.082.450,00	6.294.529.509,00	440.552.941,00	93,46	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.298.775.000,00	2.209.601.653,00	89.173.347,00	96,12	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.298.775.000,00	2.209.601.653,00	89.173.347,00	96,12	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.298.775.000,00	2.209.601.653,00	89.173.347,00	96,12	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.240.750,00	214.107.650,00	133.100,00	99,94	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.004.000,00	9.979.750,00	24.250,00	99,76	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.004.000,00	9.979.750,00	24.250,00	99,76	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.495.000,00	7.487.900,00	7.100,00	99,91	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.495.000,00	7.487.900,00	7.100,00	99,91	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.056.000,00	24.056.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.056.000,00	24.056.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.897.000,00	63.883.000,00	14.000,00	99,98	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.897.000,00	63.883.000,00	14.000,00	99,98	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.774.750,00	106.687.000,00	87.750,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.774.750,00	106.687.000,00	87.750,00	99,92	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.218.670.320,00	2.963.775.076,00	254.895.244,00	92,08	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	133.000.000,00	128.955.126,00	4.044.874,00	96,96	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	128.955.126,00	4.044.874,00	96,96	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	3.072.370.320,00	2.821.519.950,00	250.850.370,00	91,84	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	70.950.000,00	66.550.000,00	4.400.000,00	93,80	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.001.420.320,00	2.754.969.950,00	246.450.370,00	91,79	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.408.000,00	272.153.150,00	90.254.850,00	75,10	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak</i>	12.500.000,00	10.762.900,00	1.737.100,00	86,10	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	10.762.900,00	1.737.100,00	86,10	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan</i>	349.908.000,00	261.390.250,00	88.517.750,00	74,70	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.908.000,00	261.390.250,00	88.517.750,00	74,70	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	82.402.230,00	82.049.830,00	352.400,00	99,57	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	62.686.480,00	62.350.030,00	336.450,00	99,46	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.686.480,00	62.350.030,00	336.450,00	99,46	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 04	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	19.715.750,00	19.699.800,00	15.950,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.715.750,00	19.699.800,00	15.950,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	308.465.000,00	306.290.950,00	2.174.050,00	99,30	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	308.465.000,00	306.290.950,00	2.174.050,00	99,30	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.465.000,00	306.290.950,00	2.174.050,00	99,30	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 22	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	175.301.150,00	175.131.200,00	169.950,00	99,90	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 22 . 04	<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	175.301.150,00	175.131.200,00	169.950,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.301.150,00	175.131.200,00	169.950,00	99,90	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07 . 05	<i>Pengadaan Mebel</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.320.000,00	60.920.000,00	3.400.000,00	94,71	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	64.320.000,00	60.920.000,00	3.400.000,00	94,71	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.320.000,00	60.920.000,00	3.400.000,00	94,71	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.385.082.450,00)	(6.050.477.509,00)	(546.500.941,00)	94,76	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Daerah BELANJA DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> Belanja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	336.625.000,00	163.375.000,00	67,33	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1		500.000.000,00	336.625.000,00	-163.375.000,00	67,33	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2		500.000.000,00	336.625.000,00	-163.375.000,00	67,33	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 . 5		7.331.723.340,00	7.194.435.320,00	137.288.020,00	98,13	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02		1.992.952.000,00	1.948.004.551,00	44.947.449,00	97,74	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01		1.992.952.000,00	1.948.004.551,00	44.947.449,00	97,74	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1		1.992.952.000,00	1.948.004.551,00	44.947.449,00	97,74	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06		117.517.370,00	117.387.250,00	130.120,00	99,89	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01						
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2		1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2		1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02		20.546.500,00	20.541.000,00	5.500,00	99,97	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2		20.546.500,00	20.541.000,00	5.500,00	99,97	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02		3.491.670,00	3.490.000,00	1.670,00	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2		3.491.670,00	3.490.000,00	1.670,00	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04		7.520.000,00	7.516.000,00	4.000,00	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2		7.520.000,00	7.516.000,00	4.000,00	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05		13.986.800,00	13.963.200,00	23.600,00	99,83	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2		13.986.800,00	13.963.200,00	23.600,00	99,83	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 09		70.002.400,00	69.907.050,00	95.350,00	99,86	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2		70.002.400,00	69.907.050,00	95.350,00	99,86	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08						
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 01		1.303.148.620,00	1.295.517.832,00	7.630.788,00	99,41	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	703.081.900,00	701.422.422,00	1.659.478,00	99,76	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	703.081.900,00	701.422.422,00	1.659.478,00	99,76	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 04		593.266.720,00	587.295.410,00	5.971.310,00	98,99	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	64.900.000,00	63.800.000,00	1.100.000,00	98,31	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	528.366.720,00	523.495.410,00	4.871.310,00	99,08	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.244.250,00	53.843.200,00	401.050,00	99,26	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	54.244.250,00	53.843.200,00	401.050,00	99,26	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.244.250,00	53.843.200,00	401.050,00	99,26	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.713.667.900,00	3.629.989.487,00	83.678.413,00	97,75	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	877.981.300,00	803.873.872,00	74.107.428,00	91,56	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	877.981.300,00	803.873.872,00	74.107.428,00	91,56	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06	<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	633.843.000,00	632.125.292,00	1.717.708,00	99,73	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	633.843.000,00	632.125.292,00	1.717.708,00	99,73	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07	<i>Layanan Hubungan Media</i>	1.569.258.400,00	1.564.774.317,00	4.484.083,00	99,71	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.569.258.400,00	1.564.774.317,00	4.484.083,00	99,71	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08	<i>Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	69.998.400,00	69.934.775,00	63.625,00	99,91	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.998.400,00	69.934.775,00	63.625,00	99,91	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10	<i>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</i>	232.544.000,00	229.566.731,00	2.977.269,00	98,72	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.544.000,00	229.566.731,00	2.977.269,00	98,72	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 13	<i>Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</i>	330.042.800,00	329.714.500,00	328.300,00	99,90	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.042.800,00	329.714.500,00	328.300,00	99,90	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	110.181.000,00	110.090.000,00	91.000,00	99,92	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03	<i>Membangun Metadata Statistik Sektoral</i>	110.181.000,00	110.090.000,00	91.000,00	99,92	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.181.000,00	110.090.000,00	91.000,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i> Belanja Barang dan Jasa Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota <i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> Belanja Barang dan Jasa	20.056.200,00	19.950.000,00	106.200,00	99,47	
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04		20.056.200,00	19.950.000,00	106.200,00	99,47	
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2		20.056.200,00	19.950.000,00	106.200,00	99,47	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16		19.956.000,00	19.653.000,00	303.000,00	98,48	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01		19.956.000,00	19.653.000,00	303.000,00	98,48	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2		19.956.000,00	19.653.000,00	303.000,00	98,48	
		SURPLUS / (DEFISIT)	-6.831.723.340,00	-6.857.810.320,00	26.086.980,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
Unit Organisasi : 2 . 11.01		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 2.11.00 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	148.644.000,00	(1.356.000,00)	99,10	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	148.644.000,00	(1.356.000,00)	99,10	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	50.000.000,00	45.940.000,00	(4.060.000,00)	91,88	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	102.704.000,00	2.704.000,00	102,70	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	4.826.955.455,00	4.676.161.736,00	150.793.719,00	96,88	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	1.910.086.000,00	1.848.577.565,00	61.508.435,00	96,78	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.910.086.000,00	1.848.577.565,00	61.508.435,00	96,78	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.910.086.000,00	1.848.577.565,00	61.508.435,00	96,78	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	256.601.650,00	255.745.160,00	856.490,00	99,67	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3.003.000,00	3.003.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.003.000,00	3.003.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.950.000,00	14.189.000,00	761.000,00	94,91	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	14.189.000,00	761.000,00	94,91	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.001.700,00	14.984.900,00	16.800,00	99,89	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.001.700,00	14.984.900,00	16.800,00	99,89	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.948.000,00	52.000,00	99,65	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.948.000,00	52.000,00	99,65	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.007.000,00	16.007.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.007.000,00	16.007.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.639.950,00	192.613.260,00	26.690,00	99,99	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.639.950,00	192.613.260,00	26.690,00	99,99	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	977.240.080,00	947.856.119,00	29.383.961,00	96,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	225.000.000,00	215.668.149,00	9.331.851,00	95,85	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	215.668.149,00	9.331.851,00	95,85	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	746.240.080,00	726.187.970,00	20.052.110,00	97,31	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	61.950.000,00	60.950.000,00	1.000.000,00	98,39	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	684.290.080,00	665.237.970,00	19.052.110,00	97,22	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.700.000,00	83.465.950,00	234.050,00	99,72	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	61.000.000,00	60.778.950,00	221.050,00	99,64	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	60.778.950,00	221.050,00	99,64	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	100,00	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	863.753.850,00	825.678.450,00	38.075.400,00	95,59	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15 . 04	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	195.845.000,00	168.354.850,00	27.490.150,00	85,96	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.845.000,00	168.354.850,00	27.490.150,00	85,96	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15 . 05	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	667.908.850,00	657.323.600,00	10.585.250,00	98,42	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	667.908.850,00	657.323.600,00	10.585.250,00	98,42	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 16	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	19.644.950,00	19.630.550,00	14.400,00	99,93	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 16 . 01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi</i>	19.644.950,00	19.630.550,00	14.400,00	99,93	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.644.950,00	19.630.550,00	14.400,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.07 . 2.11.00 . 00 . 17	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 17 . 01	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa			0,00	0,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 18	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.317.600,00	42.222.650,00	94.950,00	99,78	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 18 . 01	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	42.317.600,00	42.222.650,00	94.950,00	99,78	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.317.600,00	42.222.650,00	94.950,00	99,78	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 19	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	174.545.000,00	158.612.500,00	15.932.500,00	90,87	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 19 . 01	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	174.545.000,00	158.612.500,00	15.932.500,00	90,87	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.545.000,00	158.612.500,00	15.932.500,00	90,87	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	349.143.000,00	346.957.650,00	2.185.350,00	99,37	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21 . 02	<i>Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>	119.488.000,00	118.060.750,00	1.427.250,00	98,81	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.488.000,00	118.060.750,00	1.427.250,00	98,81	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21 . 04	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	229.655.000,00	228.896.900,00	758.100,00	99,67	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.655.000,00	228.896.900,00	758.100,00	99,67	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 22	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36.108.500,00	36.026.513,00	81.987,00	99,77	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 22 . 01	<i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	36.108.500,00	36.026.513,00	81.987,00	99,77	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.108.500,00	36.026.513,00	81.987,00	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.06 . 2.11.00 . 00 . 23	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 23 . 02	<i>Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa			0,00	0,00	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 25	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	23.463.910,00	23.221.300,00	242.610,00	98,97	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 25 . 02	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	23.463.910,00	23.221.300,00	242.610,00	98,97	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 25 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.463.910,00	23.221.300,00	242.610,00	98,97	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	90.350.915,00	88.167.329,00	2.183.586,00	97,58	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28 . 01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	60.955.605,00	59.169.979,00	1.785.626,00	97,07	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.955.605,00	59.169.979,00	1.785.626,00	97,07	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28 . 02	<i>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</i>	29.395.310,00	28.997.350,00	397.960,00	98,65	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.395.310,00	28.997.350,00	397.960,00	98,65	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 07 . 10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(4.676.955.455,00)	(4.527.517.736,00)	(152.149.719,00)	96,80	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
Bidang Pemerintahan : 2 . 12		Penanaman Modal	
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	622.887.700,00	22.887.700,00	103,81	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	622.887.700,00	22.887.700,00	103,81	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	600.000.000,00	622.887.700,00	22.887.700,00	103,81	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	4.447.925.258,00	4.366.566.311,00	81.358.947,00	98,17	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.798.767.000,00	1.739.019.989,00	59.747.011,00	96,68	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.798.767.000,00	1.739.019.989,00	59.747.011,00	96,68	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.798.767.000,00	1.739.019.989,00	59.747.011,00	96,68	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.976.750,00	539.831.295,00	145.455,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.158.500,00	8.158.000,00	500,00	99,99	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.158.500,00	8.158.000,00	500,00	99,99	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.985.500,00	78.968.500,00	17.000,00	99,98	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.985.500,00	78.968.500,00	17.000,00	99,98	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.823.200,00	18.813.200,00	10.000,00	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.823.200,00	18.813.200,00	10.000,00	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.988.000,00	29.972.000,00	16.000,00	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.988.000,00	29.972.000,00	16.000,00	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.807.700,00	24.807.000,00	700,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.807.700,00	24.807.000,00	700,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.213.850,00	379.112.595,00	101.255,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	379.213.850,00	379.112.595,00	101.255,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.086.240,00	575.470.869,00	4.615.371,00	99,20	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	104.020.000,00	99.744.949,00	4.275.051,00	95,89	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.020.000,00	99.744.949,00	4.275.051,00	95,89	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	471.566.240,00	471.225.920,00	340.320,00	99,93	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	405.166.240,00	404.825.920,00	340.320,00	99,92	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.750.000,00	56.731.000,00	19.000,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	18.250.000,00	18.237.500,00	12.500,00	99,93	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	18.237.500,00	12.500,00	99,93	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	23.000.000,00	22.993.500,00	6.500,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	22.993.500,00	6.500,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.098.900,00	178.640.806,00	11.458.094,00	93,97	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 01	<i>Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	190.098.900,00	178.640.806,00	11.458.094,00	93,97	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.098.900,00	178.640.806,00	11.458.094,00	93,97	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.411.350,00	50.075.300,00	336.050,00	99,33	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 02	<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha</i>	50.411.350,00	50.075.300,00	336.050,00	99,33	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.411.350,00	50.075.300,00	336.050,00	99,33	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 17	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	588.994.650,00	585.693.852,00	3.300.798,00	99,44	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 17 . 02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	588.994.650,00	585.693.852,00	3.300.798,00	99,44	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	588.994.650,00	585.693.852,00	3.300.798,00	99,44	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	74.239.368,00	74.016.450,00	222.918,00	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 01	<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	60.072.100,00	60.021.750,00	50.350,00	99,92	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.072.100,00	60.021.750,00	50.350,00	99,92	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 03	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>	14.167.268,00	13.994.700,00	172.568,00	98,78	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.167.268,00	13.994.700,00	172.568,00	98,78	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 19	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	360.216.000,00	359.998.000,00	218.000,00	99,94	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 19 . 02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	258.460.000,00	258.336.000,00	124.000,00	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.460.000,00	258.336.000,00	124.000,00	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 19 . 03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	101.756.000,00	101.662.000,00	94.000,00	99,91	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.756.000,00	101.662.000,00	94.000,00	99,91	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 20	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	27.035.000,00	26.782.050,00	252.950,00	99,06	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 20 . 01	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara</i>	27.035.000,00	26.782.050,00	252.950,00	99,06	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.035.000,00	26.782.050,00	252.950,00	99,06	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.350.000,00	180.306.700,00	1.043.300,00	99,42	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 07 . 05	<i>Pengadaan Mebel</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 07 . 10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	161.350.000,00	160.306.700,00	1.043.300,00	99,35	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.350.000,00	138.456.700,00	893.300,00	99,36	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.000.000,00	21.850.000,00	150.000,00	99,32	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.847.925.258,00)	(3.743.678.611,00)	(58.471.247,00)	97,29	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	11.981.505.582,00	11.548.973.780,98	432.531.801,02	96,39	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.610.000,00	28.526.300,00	83.700,00	99,71	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	28.610.000,00	28.526.300,00	83.700,00	99,71	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	28.610.000,00	28.526.300,00	83.700,00	99,71	
2.16 . 2.13.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.218.211.000,00	2.053.836.347,00	164.374.653,00	92,59	
2.16 . 2.13.01.01 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.218.211.000,00	2.053.836.347,00	164.374.653,00	92,59	
2.16 . 2.13.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 1.1	Belanja Pegawai	2.218.211.000,00	2.053.836.347,00	164.374.653,00	92,59	
2.16 . 2.13.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.241.900,00	344.002.682,00	239.218,00	99,93	
2.16 . 2.13.01.01 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01.01 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	62.118.500,00	62.118.500,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	62.118.500,00	62.118.500,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01.01 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah tangga</i>	48.577.000,00	48.577.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00	48.577.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01.01 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	13.225.000,00	13.225.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	13.225.000,00	13.225.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01.01 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	18.125.000,00	18.064.900,00	60.100,00	99,67	
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	18.125.000,00	18.064.900,00	60.100,00	99,67	
2.16 . 2.13.01.01 . 06 . 09	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	199.346.400,00	199.167.282,00	179.118,00	99,91	
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	199.346.400,00	199.167.282,00	179.118,00	99,91	
2.16 . 2.13.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.075.080,00	899.004.417,00	47.070.663,00	90,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.13.01.01 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	140.400.000,00	127.562.147,00	12.837.853,00	90,86	
2.16 . 2.13.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	140.400.000,00	127.562.147,00	12.837.853,00	90,86	
2.16 . 2.13.01.01 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	10.200.000,00	10.130.000,00	70.000,00	99,31	
2.16 . 2.13.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.130.000,00	70.000,00	99,31	
2.16 . 2.13.01.01 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	795.475.080,00	761.312.270,00	34.162.810,00	97,91	
2.16 . 2.13.01.01 . 08 . 04 . 5 . 1.1	Belanja Pegawai	86.200.000,00	84.400.000,00	1.800.000,00	97,91	
2.16 . 2.13.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	709.275.080,00	676.912.270,00	32.362.810,00	95,44	
2.16 . 2.13.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.198.600,00	78.992.080,00	1.206.520,00	90,82	
2.16 . 2.13.01.01 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.000.000,00	9.990.000,00	1.010.000,00	90,82	
2.16 . 2.13.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	9.990.000,00	1.010.000,00	90,82	
2.16 . 2.13.01.01 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	29.000.000,00	28.838.300,00	161.700,00	99,44	
2.16 . 2.13.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.838.300,00	161.700,00	99,44	
2.16 . 2.13.01.01 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	40.198.600,00	40.163.780,00	34.820,00	99,91	
2.16 . 2.13.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	40.198.600,00	40.163.780,00	34.820,00	99,91	
3.02 . 2.13.01.01 . 15	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	110.257.250,00	109.205.158,00	1.714.980.240,00	99,05	
3.02 . 2.13.01.01 . 15 . 02	<i>Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	110.257.250,00	109.205.158,00	1.052.092,00	99,05	
3.02 . 2.13.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	110.257.250,00	109.205.158,00	1.052.092,00	99,05	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.956.942.196,00	2.875.344.239,98	81.597.956,02	65,79	
2.16 . 2.13.01.01 . 15 . 01	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	2.956.942.196,00	2.875.344.239,98	9.100.000,00	65,79	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	26.600.000,00	17.500.000,00	9.100.000,00	65,79	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.230.342.196,00	2.207.844.239,98	22.497.956,02	98,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	700.000.000,00	650.000.000,00	50.000.000,00	92,86	
2.13 . 2.13.01.01 . 15	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1.007.343.800,00	992.110.146,00	15.233.654,00	98,83	
2.13 . 2.13.01.01 . 15 . 01						
2.13 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	160.874.750,00	158.996.800,00	1.877.950,00	98,83	
2.13 . 2.13.01.01 . 15 . 06	<i>Perencanaan, Pengadaan, Pemantaatan, Pemeliharaan, dan Pendaawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan</i>	160.874.750,00	158.996.800,00	1.877.950,00	98,83	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	242.450.000,00	233.708.000,00	8.742.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01.01 . 15 . 09	<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>	241.400.000,00	233.708.000,00	7.692.000,00	96,81	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	604.019.050,00	599.405.346,00	4.613.704,00	49,70	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2.1	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
2.13 . 2.13.01.01 . 17	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	602.969.050,00	599.405.346,00	3.563.704,00	99,41	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 17 . 03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor</i>	597.692.900,00	591.432.300,00	6.260.600,00	83,33	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	597.692.900,00	591.432.300,00	700.000,00	83,33	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.500.000,00	700.000,00	83,33	
2.16 . 2.13.01.01 . 17	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	593.492.900,00	587.932.300,00	5.560.600,00	99,06	
2.16 . 2.13.01.01 . 17 . 01	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat</i>	747.482.500,00	695.623.410,00	51.859.090,00	93,06	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	747.482.500,00	695.623.410,00	51.859.090,00	93,06	
2.16 . 2.13.01.01 . 18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.439.811.456,00	1.416.051.368,00	23.760.088,00	98,35	
2.16 . 2.13.01.01 . 18 . 01	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	1.084.757.456,00	1.063.545.368,00	21.212.088,00	98,04	
2.16 . 2.13.01.01 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.084.757.456,00	1.063.545.368,00	21.212.088,00	98,04	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	355.054.000,00	352.506.000,00	2.548.000,00	99,28	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.954.000,00	272.506.000,00	448.000,00	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 18	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.032.250,00	231.374.800,00	10.657.450,00	95,60	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03	<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>					
2.13 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.032.250,00	231.374.800,00	10.657.450,00	96,14	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	142.032.250,00	132.152.400,00	9.879.850,00	93,04	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 19	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	100.000.000,00	99.222.400,00	777.600,00	99,22	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 19 . 02	<i>Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan</i>	226.641.000,00	225.708.013,00	932.987,00	99,87	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.641.000,00	225.708.013,00	932.987,00	99,87	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 20	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	104.767.300,00	103.706.800,00	1.060.500,00	98,99	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 20 . 01	<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>					
2.16 . 2.13.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.767.300,00	103.706.800,00	1.060.500,00	98,99	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21 . 03	<i>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</i>	602.971.900,00	580.034.300,00	22.937.600,00	96,20	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	602.971.900,00	580.034.300,00	22.937.600,00	96,20	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 22	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	602.971.900,00	580.034.300,00	22.937.600,00	96,20	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 22 . 01	<i>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	55.876.750,00	53.137.900,00	2.738.850,00	95,10	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.876.750,00	53.137.900,00	2.738.850,00	95,10	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 22	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
2.13 . 2.13.01 . 00 . 22 . 08	<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan</i>	134.669.700,00	134.118.500,00	551.200,00	99,59	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.669.700,00	134.118.500,00	551.200,00	99,59	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.880.000,00	132.059.020,00	820.980,00	99,38	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>					
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.310.000,00	130.489.020,00	820.980,00	99,37	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	100,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 17		Perpustakaan				
Unit Organisasi : 2 . 17 . 01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	3.441.253.330,00	3.189.345.010,00	251.908.320,00	92,68	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.433.596.000,00	2.203.059.390,00	230.536.610,00	90,53	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.433.596.000,00	2.203.059.390,00	230.536.610,00	90,53	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.433.596.000,00	2.203.059.390,00	230.536.610,00	90,53	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.986.700,00	224.598.008,00	2.388.692,00	98,95	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	2.510.800,00	2.450.800,00	60.000,00	99,92	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.510.800,00	2.450.800,00	60.000,00	97,61	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	38.311.000,00	36.485.000,00	1.826.000,00	95,23	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.311.000,00	36.485.000,00	1.826.000,00	95,23	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	9.034.400,00	8.858.600,00	175.800,00	98,05	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.034.400,00	8.858.600,00	175.800,00	98,05	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	23.250.000,00	23.120.000,00	130.000,00	99,83	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	23.120.000,00	130.000,00	99,44	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	9.834.500,00	9.833.400,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.834.500,00	9.833.400,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	144.046.000,00	143.850.208,00	195.792,00	99,75	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.046.000,00	143.850.208,00	195.792,00	99,86	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	390.524.080,00	382.233.178,00	8.290.902,00	97,97	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.800.000,00	1.550.000,00	250.000,00	99,75	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.550.000,00	250.000,00	86,11	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	31.020.000,00	30.457.118,00	562.882,00	98,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	3.441.253.330,00	3.189.345.010,00	251.908.320,00	92,68	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.020.000,00	30.457.118,00	562.882,00	98,19	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	357.704.080,00	350.226.060,00	7.478.020,00	98,42	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	52.450.000,00	50.500.000,00	1.950.000,00	96,28	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.254.080,00	299.726.060,00	5.528.020,00	97,77	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.250.000,00	118.278.550,00	971.450,00	98,45	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	14.500.000,00	14.346.500,00	153.500,00	98,04	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.346.500,00	153.500,00	98,94	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	48.100.000,00	47.432.050,00	667.950,00	95,74	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.100.000,00	47.432.050,00	667.950,00	98,61	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	6.650.000,00	6.500.000,00	150.000,00	97,03	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	6.500.000,00	150.000,00	97,03	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	82.968.650,00	82.496.334,00	472.316,00	98,71	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01	<i>Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</i>	34.521.150,00	34.331.350,00	189.800,00	99,45	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.521.150,00	34.331.350,00	189.800,00	99,45	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 02	<i>Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis</i>	27.090.000,00	26.992.684,00	97.316,00	98,51	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.090.000,00	26.992.684,00	97.316,00	98,51	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 03	<i>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	21.357.500,00	21.172.300,00	185.200,00		
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.357.500,00	21.172.300,00	185.200,00		
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.415.950,00	53.273.250,00	142.700,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 02	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.516.000,00	5.444.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.516.000,00	5.444.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 07	<i>Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	42.899.950,00	42.829.250,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.899.950,00	42.829.250,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Juni 2023

Urusan Pemerintahan : 3	Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03	Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 01	DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	131.500.000,00	112.417.250,00	(19.082.750,00)	85,49	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.500.000,00	112.417.250,00	(19.082.750,00)	85,49	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	31.500.000,00	31.552.500,00	52.500,00	100,17	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	80.864.750,00	(19.135.250,00)	80,86	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	20.011.708.490,00	19.669.334.761,57	342.373.728,43	98,29	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.311.138.000,00	11.051.040.452,00	260.097.548,00	97,70	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.311.138.000,00	11.051.040.452,00	260.097.548,00	97,70	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.311.138.000,00	11.051.040.452,00	260.097.548,00	97,70	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.018.880,00	287.847.420,00	171.460,00	99,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.414.480,00	28.414.480,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.414.480,00	28.414.480,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.490.000,00	17.490.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.490.000,00	17.490.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.610.400,00	22.610.400,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.610.400,00	22.610.400,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.504.000,00	219.332.540,00	171.460,00	99,92	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.504.000,00	219.332.540,00	171.460,00	99,92	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.641.145.400,00	1.622.150.096,00	18.995.304,00	98,84	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.450.000,00	55.696.006,00	2.753.994,00	95,29	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.450.000,00	55.696.006,00	2.753.994,00	95,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.582.695.400,00	1.566.454.090,00	16.241.310,00	98,97	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	99.550.000,00	99.550.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.483.145.400,00	1.466.904.090,00	16.241.310,00	98,90	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000,00	314.151.770,00	5.848.230,00	98,17	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	16.500.000,00	16.295.606,00	204.394,00	98,76	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.295.606,00	204.394,00	98,76	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	303.500.000,00	297.856.164,00	5.643.836,00	98,14	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.500.000,00	297.856.164,00	5.643.836,00	98,14	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	388.645.000,00	374.932.990,00	13.712.010,00	96,47	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	226.955.000,00	220.812.590,00	6.142.410,00	97,29	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.105.000,00	217.962.590,00	6.142.410,00	97,26	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 02	<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	161.690.000,00	154.120.400,00	7.569.600,00	95,32	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.690.000,00	154.120.400,00	7.569.600,00	95,32	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.479.739.250,00	1.473.228.216,91	6.511.033,09	99,56	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 01	<i>Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG</i>	59.292.000,00	54.534.900,00	4.757.100,00	91,98	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.292.000,00	54.534.900,00	4.757.100,00	91,98	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 02	<i>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>	219.245.000,00	217.856.000,00	1.389.000,00	99,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.445.000,00	214.056.000,00	1.389.000,00	99,36	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 03	<i>Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>	1.201.202.250,00	1.200.837.316,91	364.933,09	99,97	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.199.302.250,00	1.198.937.316,91	364.933,09	99,97	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	146.565.100,00	145.068.850,00	1.496.250,00	98,98	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 01	<i>Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	146.565.100,00	145.068.850,00	1.496.250,00	98,98	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.565.100,00	145.068.850,00	1.496.250,00	98,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21	Pengembangan Prasarana Pertanian	291.393.950,00	288.938.413,00	2.455.537,00	99,16	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 01	<i>Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B</i>	291.393.950,00	288.938.413,00	2.455.537,00	99,16	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.593.950,00	285.138.413,00	2.455.537,00	99,15	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.940.524.650,00	2.923.206.302,00	17.318.348,00	99,41	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 01	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	173.270.000,00	173.082.000,00	188.000,00	99,89	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.470.000,00	169.282.000,00	188.000,00	99,89	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 03	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	2.767.254.650,00	2.750.124.302,00	17.130.348,00	99,38	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.751.004.650,00	2.733.874.302,00	17.130.348,00	99,38	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	361.382.300,00	360.189.558,00	1.192.742,00	99,67	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 01	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	361.382.300,00	360.189.558,00	1.192.742,00	99,67	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	361.382.300,00	360.189.558,00	1.192.742,00	99,67	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 30	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	67.968.500,00	53.750.300,00	14.218.200,00	79,08	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 30 . 01	<i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	57.783.000,00	43.815.750,00	13.967.250,00	75,83	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.783.000,00	43.815.750,00	13.967.250,00	75,83	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 30 . 05	<i>Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	10.185.500,00	9.934.550,00	250.950,00	97,54	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 30 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.185.500,00	9.934.550,00	250.950,00	97,54	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 34	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	607.346.740,00	607.316.478,61	30.261,39	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 34 . 01	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</i>	607.346.740,00	607.316.478,61	30.261,39	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 34 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 34 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	606.646.740,00	606.616.478,61	30.261,39	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	16.245.000,00	16.245.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	16.245.000,00	16.245.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.245.000,00	16.245.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 34	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	151.595.720,00	151.268.915,05	326.804,95	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 34 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	151.595.720,00	151.268.915,05	326.804,95	99,78	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.380.000,00	124.330.000,00	50.000,00	99,96	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.215.720,00	26.938.915,05	276.804,95	98,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.880.208.490,00)	(19.556.917.511,57)	(323.290.978,43)	98,37	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 08 Transmigrasi Unit Organisasi : 3 . 08 . 01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	13.980.000,00	12.739.700,00	(1.240.300,00)	91,13	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.980.000,00	12.739.700,00	(1.240.300,00)	91,13	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	13.980.000,00	12.739.700,00	(1.240.300,00)	91,13	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5	BELANJA DAERAH	3.622.847.810,00	3.536.676.516,00	# 86.171.294,00	97,62	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.398.000,00	3.390.000,00	8.000,00	99,76	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3.398.000,00	3.390.000,00	8.000,00	99,76	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.398.000,00	3.390.000,00	8.000,00	99,76	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.561.290.000,00	2.498.824.380,00	62.465.620,00	97,56	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.561.290.000,00	2.498.824.380,00	62.465.620,00	97,56	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.561.290.000,00	2.498.824.380,00	62.465.620,00	97,56	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.382.150,00	160.981.463,00	400.687,00	99,75	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.008.500,00	2.988.500,00	20.000,00	99,34	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.008.500,00	2.988.500,00	20.000,00	99,34	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	35.283.900,00	35.232.100,00	51.800,00	99,85	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.283.900,00	35.232.100,00	51.800,00	99,85	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	9.750.000,00	9.730.000,00	20.000,00	99,79	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.730.000,00	20.000,00	99,79	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa			0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	113.339.750,00	113.030.863,00	308.887,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.339.750,00	113.030.863,00	308.887,00	99,73	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.872.000,00	28.810.100,00	61.900,00	99,79	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 07 . 10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau</i>	28.872.000,00	28.810.100,00	61.900,00	99,79	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.872.000,00	28.810.100,00	61.900,00	99,79	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.243.810,00	596.743.450,00	11.500.360,00	98,11	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	48.031.850,00	43.621.490,00	4.410.360,00	90,82	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.031.850,00	43.621.490,00	4.410.360,00	90,82	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	560.211.960,00	553.121.960,00	7.090.000,00	98,73	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	42.300.000,00	38.900.000,00	3.400.000,00	91,96	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	517.911.960,00	514.221.960,00	3.690.000,00	99,29	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.455.000,00	47.351.650,00	3.103.350,00	93,85	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	4.125.000,00	2.633.650,00	1.491.350,00	63,85	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	2.633.650,00	1.491.350,00	63,85	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	41.500.000,00	39.909.000,00	1.591.000,00	96,17	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	39.909.000,00	1.591.000,00	96,17	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	4.830.000,00	4.809.000,00	21.000,00	99,57	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	4.809.000,00	21.000,00	99,57	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	117.615.250,00	114.139.373,00	3.475.877,00	97,04	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 01	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	117.615.250,00	114.139.373,00	3.475.877,00	97,04	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.615.250,00	114.139.373,00	3.475.877,00	97,04	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 21	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	16.333.500,00	15.792.850,00	540.650,00	96,69	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 21 . 02	<i>Pelayanan antar Kerja</i>	16.333.500,00	15.792.850,00	540.650,00	96,69	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.333.500,00	15.792.850,00	540.650,00	96,69	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 17	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 17 . 01	<i>Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.08 . 3.08.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa			0,00	#DIV/0!	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	15.273.000,00	14.918.300,00	354.700,00	97,68	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23 . 02	<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	15.273.000,00	14.918.300,00	354.700,00	97,68	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.273.000,00	14.918.300,00	354.700,00	97,68	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 26	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.993.350,00	11.510.000,00	2.483.350,00	82,25	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 26 . 01	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</i>	13.993.350,00	11.510.000,00	2.483.350,00	82,25	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 26 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.993.350,00	11.510.000,00	2.483.350,00	82,25	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	15.863.750,00	15.586.950,00	276.800,00	98,26	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27 . 01	<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.863.750,00	15.586.950,00	276.800,00	98,26	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.863.750,00	15.586.950,00	276.800,00	98,26	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.128.000,00	28.628.000,00	1.500.000,00	95,02	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 07 . 06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	19.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	92,11	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	92,11	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 07 . 10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	11.128.000,00	11.128.000,00	0,00	100,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.128.000,00	11.128.000,00	0,00	100,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(3.608.867.810,00)	(3.523.936.816,00)	(84.930.994,00)	97,65	
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01		SEKRETARIAT DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	277,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	277,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	277,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	46.240.134.766,00	45.819.862.387,29	420.115.567,77	99,09	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.828.467.000,00	6.644.092.264,00	184.374.736,00	97,30	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.828.467.000,00	6.644.092.264,00	184.374.736,00	97,30	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.828.467.000,00	6.644.092.264,00	184.374.736,00	97,30	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.000.000,00	234.902.225,00	97.775,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 03 . 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	235.000.000,00	234.902.225,00	97.775,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 03 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	234.902.225,00	97.775,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.252.964.060,00	5.252.933.166,00	30.894,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	163.910.000,00	163.901.000,00	9.000,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.910.000,00	163.901.000,00	9.000,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.944.310,00	498.938.320,00	5.990,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.944.310,00	498.938.320,00	5.990,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.062.850,00	25.062.850,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.062.850,00	25.062.850,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.601.776.000,00	2.601.775.050,00	950,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.601.776.000,00	2.601.775.050,00	950,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.100.900,00	91.095.600,00	5.300,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.100.900,00	91.095.600,00	5.300,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1.872.170.000,00	1.872.160.346,00	9.654,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.872.170.000,00	1.872.160.346,00	9.654,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.273.651.880,00	7.273.012.880,00	639.000,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	1.026.000.000,00	1.025.992.300,00	7.700,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.026.000.000,00	1.025.992.300,00	7.700,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	2.106.500.000,00	2.106.490.000,00	10.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.106.500.000,00	2.106.490.000,00	10.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	4.123.551.880,00	4.122.930.580,00	621.300,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	218.250.000,00	218.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.905.301.880,00	3.904.680.580,00	621.300,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.752.828.300,00	5.752.755.356,06	6.214,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	341.025.000,00	341.021.677,00	3.323,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.025.000,00	341.021.677,00	3.323,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.458.885.000,00	1.458.882.109,00	2.891,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.458.885.000,00	1.458.882.109,00	2.891,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	186.550.000,00	186.487.500,00	0,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.550.000,00	186.487.500,00	62.500,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	3.766.368.300,00	3.766.364.070,06	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.766.368.300,00	3.766.364.070,06	4.229,94	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.078.349.000,00	1.047.356.922,00	30.992.078,00	97,13	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	167.389.000,00	136.408.722,00	30.980.278,00	81,49	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	167.389.000,00	136.408.722,00	30.980.278,00	81,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 02	<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	437.630.000,00	437.618.200,00	11.800,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	437.630.000,00	437.618.200,00	11.800,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 03	<i>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 04	<i>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	373.330.000,00	373.330.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 1 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	373.330.000,00	373.330.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	59.203.000,00	59.203.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 01	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</i>	39.179.000,00	39.179.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	39.179.000,00	39.179.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 02	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</i>	20.024.000,00	20.024.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.024.000,00	20.024.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17	Penataan Organisasi	260.000.042,00	259.895.630,00	104.412,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 01	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	122.327.218,00	122.310.608,00	16.610,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	122.327.218,00	122.310.608,00	16.610,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 02	<i>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	54.305.708,00	54.239.700,00	66.008,00	99,88	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	54.305.708,00	54.239.700,00	66.008,00	99,88	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 03	<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	83.367.116,00	83.345.322,00	21.794,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	83.367.116,00	83.345.322,00	21.794,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.316.198.650,00	3.316.044.467,00	64.183,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 01	<i>Fasilitasi Keprotokolan</i>	3.256.478.450,00	3.256.414.267,00	64.183,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.256.478.450,00	3.256.414.267,00	64.183,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 02	<i>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	59.720.200,00	59.630.200,00	0,00	99,85	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	59.720.200,00	59.630.200,00	90.000,00	99,85	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 03	<i>Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>			0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19	Administrasi Tata Pemerintahan	547.134.000,00	546.967.865,00	166.135,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 01	<i>Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	60.880.500,00	60.784.490,00	96.010,00	99,84	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	60.880.500,00	60.784.490,00	96.010,00	99,84	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 02	<i>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	398.384.000,00	398.349.997,00	34.003,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	398.384.000,00	398.349.997,00	34.003,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 03	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	87.869.500,00	87.833.378,00	36.122,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.869.500,00	87.833.378,00	36.122,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.321.450.000,00	6.218.168.094,23	103.281.905,77	98,37	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 01	<i>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	6.115.793.000,00	6.012.536.894,23	103.256.105,77	98,31	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.465.793.000,00	5.362.645.025,23	103.147.974,77	98,11	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	650.000.000,00	649.891.869,00	108.131,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 02	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</i>	97.336.400,00	97.336.400,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.336.400,00	97.336.400,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 03	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</i>	108.320.600,00	108.294.800,00	25.800,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.320.600,00	108.294.800,00	25.800,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	506.055.800,00	505.989.138,00	66.581,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 01	<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	223.935.800,00	223.935.767,00	33,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.935.800,00	223.935.767,00	33,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 02	<i>Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	220.536.000,00	220.535.919,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.536.000,00	220.535.919,00	81,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 03	<i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</i>	61.584.000,00	61.517.452,00	66.548,00	99,89	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.584.000,00	61.517.452,00	66.548,00	99,89	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 22	Fasilitasi Kerjasama Daerah	37.396.270,00	37.385.355,00	10.915,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 22 . 01	<i>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	37.396.270,00	37.385.355,00	10.915,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.396.270,00	37.385.355,00	10.915,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	157.351.150,00	157.324.001,00	27.149,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	25.631.150,00	25.622.000,00	9.150,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.631.150,00	25.622.000,00	9.150,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 02	<i>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	50.617.300,00	50.617.300,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.617.300,00	50.617.300,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 03	<i>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</i>	81.102.700,00	81.084.701,00	17.999,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.102.700,00	81.084.701,00	17.999,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	180.976.650,00	180.820.950,00	155.700,00	99,91	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 01	<i>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</i>	48.641.000,00	48.549.500,00	91.500,00	99,81	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.641.000,00	48.549.500,00	91.500,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 02	<i>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	80.167.650,00	80.105.450,00	62.200,00	99,92	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.167.650,00	80.105.450,00	62.200,00	99,92	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 03	<i>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	52.168.000,00	52.166.000,00	2.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.168.000,00	52.166.000,00	2.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	432.173.064,00	432.032.371,00	140.693,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 01	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	287.068.226,00	286.950.620,00	117.606,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	163.580.000,00	163.490.000,00	90.000,00	99,94	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.488.226,00	123.460.620,00	27.606,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 02	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</i>	97.226.742,00	97.220.527,00	6.215,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.226.742,00	97.220.527,00	6.215,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 03	<i>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	47.878.096,00	47.861.224,00	16.872,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.878.096,00	47.861.224,00	16.872,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	76.540.900,00	76.524.203,00	16.697,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26 . 02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	8.504.000,00	8.488.750,00	15.250,00	99,82	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.504.000,00	8.488.750,00	15.250,00	99,82	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26 . 02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	39.564.100,00	39.562.653,00	1.447,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.564.100,00	39.562.653,00	1.447,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26 . 03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	28.472.800,00	28.472.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.472.800,00	28.472.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.385.945.000,00	7.292.745.000,00	93.200.000,00	98,74	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	4.700.920.000,00	4.607.720.000,00	93.200.000,00	98,02	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.700.920.000,00	4.607.720.000,00	93.200.000,00	98,02	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 05	<i>Pengadaan Mebel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	2.685.025.000,00	2.685.025.000,00	0,00	100,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4 . 01 . 02		SEKRETARIAT DPRD				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	46.257.950.605,00	43.624.240.804,00	2.633.709.801,00	94,31	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.527.215.000,00	1.481.628.312,00	45.586.688,00	97,02	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.527.215.000,00	1.481.628.312,00	45.586.688,00	97,02	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.527.215.000,00	1.481.628.312,00	45.586.688,00	97,02	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.035.000,00	453.563.250,00	46.471.750,00	90,71	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	346.500.000,00	345.018.000,00	1.482.000,00	99,57	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	346.500.000,00	345.018.000,00	1.482.000,00	99,57	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	153.535.000,00	108.545.250,00	44.989.750,00	70,70	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.535.000,00	108.545.250,00	44.989.750,00	70,70	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.020.469.085,00	949.636.650,00	70.832.435,00	93,06	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	19.770.000,00	19.770.000,00	0,00	100,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.770.000,00	19.770.000,00	0,00	100,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	209.569.900,00	209.563.400,00	6.500,00	100,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.569.900,00	209.563.400,00	6.500,00	100,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	156.719.185,00	133.835.100,00	22.884.085,00	85,40	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.719.185,00	133.835.100,00	22.884.085,00	85,40	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	105.420.000,00	88.260.000,00	17.160.000,00	83,72	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.420.000,00	88.260.000,00	17.160.000,00	83,72	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	152.215.000,00	138.785.800,00	13.429.200,00	91,18	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.215.000,00	138.785.800,00	13.429.200,00	91,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	376.775.000,00	359.422.350,00	17.352.650,00	95,39	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.775.000,00	359.422.350,00	17.352.650,00	95,39	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.098.883.520,00	1.925.437.616,00	173.445.904,00	91,74	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	354.000.000,00	276.364.456,00	77.635.544,00	78,07	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.000.000,00	276.364.456,00	77.635.544,00	78,07	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	269.385.000,00	262.700.950,00	6.684.050,00	97,52	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.385.000,00	262.700.950,00	6.684.050,00	97,52	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.457.498.520,00	1.368.372.210,00	89.126.310,00	93,88	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	147.600.000,00	97.900.000,00	49.700.000,00	66,33	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.309.898.520,00	1.270.472.210,00	39.426.310,00	96,99	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.217.500,00	311.959.204,00	39.258.296,00	88,82	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	221.217.500,00	195.994.804,00	25.222.696,00	88,60	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.217.500,00	195.994.804,00	25.222.696,00	88,60	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	55.000.000,00	41.172.400,00	13.827.600,00	74,86	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	41.172.400,00	13.827.600,00	74,86	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	75.000.000,00	74.792.000,00	208.000,00	99,72	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.792.000,00	208.000,00	99,72	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.477.846.500,00	7.094.236.627,00	383.609.873,00	94,87	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 01	<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	7.117.246.500,00	6.741.136.627,00	376.109.873,00	94,72	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.117.246.500,00	6.741.136.627,00	376.109.873,00	94,72	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 04	<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	360.600.000,00	353.100.000,00	7.500.000,00	97,92	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.600.000,00	353.100.000,00	7.500.000,00	97,92	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.510.143.000,00	2.440.885.915,00	69.257.085,00	97,24	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 02	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	2.138.143.000,00	2.083.885.915,00	54.257.085,00	97,46	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.138.143.000,00	2.083.885.915,00	54.257.085,00	97,46	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 05	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	372.000.000,00	357.000.000,00	15.000.000,00	95,97	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.000.000,00	357.000.000,00	15.000.000,00	95,97	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	18.246.253.000,00	16.761.049.775,00	1.485.203.225,00	91,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 01	<i>Kunjungan Kerja dalam Daerah</i>	17.759.568.000,00	16.456.889.775,00	1.302.678.225,00	92,66	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.759.568.000,00	16.456.889.775,00	1.302.678.225,00	92,66	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 03	<i>Pelaksanaan Reses</i>	486.685.000,00	304.160.000,00	182.525.000,00	62,50	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.685.000,00	304.160.000,00	182.525.000,00	62,50	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21	Pembahasan Kerja Sama Daerah	683.685.000,00	675.728.750,00	7.956.250,00	98,84	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02	<i>Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi</i>	683.685.000,00	675.728.750,00	7.956.250,00	98,84	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	683.685.000,00	675.728.750,00	7.956.250,00	98,84	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150	Layanan Administrasi DPRD	179.660.000,00	151.760.000,00	27.900.000,00	84,47	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150 . 153	<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	179.660.000,00	151.760.000,00	27.900.000,00	84,47	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150 . 153 . 5 . 1	Belanja Barang dan Jasa	179.660.000,00	151.760.000,00	27.900.000,00	84,47	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.532.243.000,00	11.250.649.705,00	281.593.295,00	97,56	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151 . 151	<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	11.532.243.000,00	11.250.649.705,00	281.593.295,00	97,56	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151 . 151 . 5 . 1	Belanja Pegawai	11.532.243.000,00	11.250.649.705,00	281.593.295,00	97,56	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.300.000,00	127.705.000,00	2.595.000,00	98,01	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	130.300.000,00	127.705.000,00	2.595.000,00	98,01	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.300.000,00	127.705.000,00	2.595.000,00	98,01	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.257.950.605,00)	(43.624.240.804,00)	(2.633.709.801,00)	94,31	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharma Raya

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : Juni 2023



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.03 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	5.323.104.360,00	5.177.298.815,00	145.805.545,00	97,26	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.072.952.000,00	2.018.357.971,00	54.594.029,00	97,37	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.072.952.000,00	2.018.357.971,00	54.594.029,00	97,37	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.072.952.000,00	2.018.357.971,00	54.594.029,00	97,37	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.552.810,00	438.863.533,00	689.277,00	99,84	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.136.000,00	3.124.000,00	12.000,00	99,62	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.136.000,00	3.124.000,00	12.000,00	99,62	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	67.070.210,00	67.040.210,00	30.000,00	99,96	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.070.210,00	67.040.210,00	30.000,00	99,96	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	18.775.000,00	18.561.900,00	213.100,00	98,86	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.775.000,00	18.561.900,00	213.100,00	98,86	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	28.020.000,00	28.008.000,00	12.000,00	99,96	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.020.000,00	28.008.000,00	12.000,00	99,96	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	26.924.600,00	26.924.600,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.924.600,00	26.924.600,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	295.627.000,00	295.204.823,00	422.177,00	99,86	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.627.000,00	295.204.823,00	422.177,00	99,86	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.757.400,00	531.413.338,00	33.344.062,00	94,10	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	89.008.560,00	78.036.118,00	10.972.442,00	87,67	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.008.560,00	78.036.118,00	10.972.442,00	87,67	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	459.648.840,00	437.277.220,00	22.371.620,00	95,13	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	80.100.000,00	67.650.000,00	12.450.000,00	84,46	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	379.548.840,00	369.627.220,00	9.921.620,00	97,39	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.700.000,00	160.524.571,00	3.175.429,00	98,06	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	16.500.000,00	16.260.166,00	239.834,00	98,55	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.260.166,00	239.834,00	98,55	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	27.200.000,00	24.472.149,00	2.727.851,00	89,97	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	24.472.149,00	2.727.851,00	89,97	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	120.000.000,00	119.792.256,00	207.744,00	99,83	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.792.256,00	207.744,00	99,83	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 15	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	514.806.500,00	506.856.246,00	7.950.254,00	98,46	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 15 . 05	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	105.585.850,00	105.577.110,00	8.740,00	99,99	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.585.850,00	105.577.110,00	8.740,00	99,99	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 15 . 07	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	409.220.650,00	401.279.136,00	7.941.514,00	98,06	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	409.220.650,00	401.279.136,00	7.941.514,00	98,06	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 16	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.096.900,00	29.907.050,00	1.189.850,00	96,17	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 16 . 01	<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan</i>	31.096.900,00	29.907.050,00	1.189.850,00	96,17	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.096.900,00	29.907.050,00	1.189.850,00	96,17	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 17	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.669.900,00	19.253.798,00	1.416.102,00	93,15	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 17 . 03	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	20.669.900,00	19.253.798,00	1.416.102,00	93,15	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 17 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.669.900,00	19.253.798,00	1.416.102,00	93,15	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 18	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	131.632.250,00	130.665.751,00	966.499,00	99,27	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 18 . 01	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	48.376.000,00	47.869.000,00	507.000,00	98,95	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.376.000,00	47.869.000,00	507.000,00	98,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.03 . 00 . 18 . 05	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	83.256.250,00	82.796.751,00	459.499,00	99,45	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 18 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.256.250,00	82.796.751,00	459.499,00	99,45	
4.07 . 4.01.03 . 00 . 18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	334.356.000,00	324.821.300,00	9.534.700,00	97,15	
4.07 . 4.01.03 . 00 . 18 . 01	<i>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	334.356.000,00	324.821.300,00	9.534.700,00	97,15	
4.07 . 4.01.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.356.000,00	324.821.300,00	9.534.700,00	97,15	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 19	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	51.704.650,00	48.023.668,00	3.680.982,00	92,88	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 19 . 01	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	31.707.000,00	29.439.968,00	2.267.032,00	92,85	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.707.000,00	29.439.968,00	2.267.032,00	92,85	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 19 . 05	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	19.997.650,00	18.583.700,00	1.413.950,00	92,93	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 19 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.997.650,00	18.583.700,00	1.413.950,00	92,93	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 20	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	705.175.950,00	676.060.238,00	29.115.712,00	95,87	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 20 . 03	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	25.252.950,00	24.483.306,00	769.644,00	96,95	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.252.950,00	24.483.306,00	769.644,00	96,95	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 20 . 05	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	679.923.000,00	651.576.932,00	28.346.068,00	95,83	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 20 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	679.923.000,00	651.576.932,00	28.346.068,00	95,83	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.351.351,00	148.649,00	98,90	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	13.500.000,00	13.351.351,00	148.649,00	98,90	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	13.351.351,00	148.649,00	98,90	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.200.000,00	279.200.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 07 . 02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	279.200.000,00	279.200.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.01.03 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.200.000,00	279.200.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.323.104.360,00)	(5.177.298.815,00)	(145.805.545,00)	97,26	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 BADAN KEUANGAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	854.877.771.458,00	845.340.443.571,80	-9.537.327.886,20	98,88	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1		41.815.498.274,00	42.274.350.938,80	458.852.664,80	101,10	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1		22.776.715.953,00	21.634.156.143,46	-1.142.559.809,54	94,98	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3		4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4		14.714.716.485,00	16.316.128.959,34	1.601.412.474,34	110,88	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2		797.437.653.184,00	786.486.021.026,00	-10.951.632.158,00	98,63	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1		736.565.887.000,00	727.854.055.483,00	-8.711.831.517,00	98,82	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2		60.871.766.184,00	58.631.965.543,00	-2.239.800.641,00	96,32	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3		15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	955.451.607,00	106,12	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1		15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	955.451.607,00	106,12	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01 . 5		124.606.521.627,00	123.344.226.999,00	1.262.294.628,00	98,99	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02		5.413.905.974,00	5.089.809.306,00	324.096.668,00	94,01	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01		5.413.905.974,00	5.089.809.306,00	324.096.668,00	94,01	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1		5.413.905.974,00	5.089.809.306,00	324.096.668,00	94,01	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	20.000.000,00	18.178.864,00	1.821.136,00	90,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05 . 11		20.000.000,00	18.178.864,00	1.821.136,00	90,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05 . 09 . 5 . 1 . 2		20.000.000,00	18.178.864,00	1.821.136,00	90,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06		968.030.900,00	967.366.324,00	664.576,00	99,93	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01		22.730.000,00	22.702.000,00	28.000,00	99,88	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2		22.730.000,00	22.702.000,00	28.000,00	99,88	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02		134.041.500,00	134.018.938,00	22.562,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.041.500,00	134.018.938,00	22.562,00	99,98	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	202.991.900,00	202.900.400,00	91.500,00	99,95	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.991.900,00	202.900.400,00	91.500,00	99,95	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	103.595.000,00	103.555.500,00	39.500,00	99,96	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.595.000,00	103.555.500,00	39.500,00	99,96	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	186.649.500,00	186.649.300,00	200,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.649.500,00	186.649.300,00	200,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	318.023.000,00	317.540.186,00	482.814,00	99,85	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.023.000,00	317.540.186,00	482.814,00	99,85	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.910.000,00	274.930.000,00	8.980.000,00	96,84	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	40.000.000,00	34.400.000,00	5.600.000,00	86,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	34.400.000,00	5.600.000,00	86,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 02	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	243.910.000,00	240.530.000,00	3.380.000,00	98,61	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	243.910.000,00	240.530.000,00	3.380.000,00	98,61	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.077.986.240,00	1.045.772.682,00	32.213.558,00	97,01	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	22.000.000,00	21.687.600,00	312.400,00	98,58	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.687.600,00	312.400,00	98,58	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	267.600.000,00	248.846.642,00	18.753.358,00	92,99	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.600.000,00	248.846.642,00	18.753.358,00	92,99	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	161.630.000,00	160.562.200,00	1.067.800,00	99,34	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.630.000,00	160.562.200,00	1.067.800,00	99,34	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	626.756.240,00	614.676.240,00	12.080.000,00	98,07	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	166.900.000,00	163.700.000,00	3.200.000,00	98,08	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	459.856.240,00	450.976.240,00	8.880.000,00	98,07	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.700.000,00	84.028.557,00	18.671.443,00	81,82	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.500.000,00	9.960.757,00	1.539.243,00	86,62	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	9.960.757,00	1.539.243,00	86,62	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	70.200.000,00	53.122.800,00	17.077.200,00	75,67	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	53.122.800,00	17.077.200,00	75,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	21.000.000,00	20.945.000,00	55.000,00	99,74	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	20.945.000,00	55.000,00	99,74	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.744.163.150,00	1.700.453.800,00	43.709.350,00	97,49	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01	<i>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</i>	256.559.400,00	255.833.450,00	725.950,00	99,72	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.559.400,00	255.833.450,00	725.950,00	99,72	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	188.835.750,00	187.796.250,00	1.039.500,00	99,45	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.835.750,00	187.796.250,00	1.039.500,00	99,45	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	406.450.000,00	399.560.700,00	6.889.300,00	98,31	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.450.000,00	399.560.700,00	6.889.300,00	98,31	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 08	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	892.318.000,00	857.263.400,00	35.054.600,00	96,07	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	892.318.000,00	857.263.400,00	35.054.600,00	96,07	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	438.069.000,00	420.902.579,00	17.166.421,00	96,08	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	40.801.000,00	37.594.400,00	3.206.600,00	92,14	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.801.000,00	37.594.400,00	3.206.600,00	92,14	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 11	<i>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	397.268.000,00	383.308.179,00	13.959.821,00	96,49	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	397.268.000,00	383.308.179,00	13.959.821,00	96,49	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	422.775.900,00	422.289.033,00	486.867,00	99,88	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 01	<i>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 03	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan</i>	73.127.250,00	73.099.818,00	27.432,00	99,96	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.127.250,00	73.099.818,00	27.432,00	99,96	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 04	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	93.825.000,00	93.810.050,00	14.950,00	99,98	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.825.000,00	93.810.050,00	14.950,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	189.773.650,00	189.685.165,00	88.485,00	99,95	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.773.650,00	189.685.165,00	88.485,00	99,95	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 07	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	34.393.500,00	34.313.000,00	80.500,00	99,77	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.393.500,00	34.313.000,00	80.500,00	99,77	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 08	<i>Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09	<i>Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	31.656.500,00	31.381.000,00	275.500,00	99,13	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.656.500,00	31.381.000,00	275.500,00	99,13	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	107.841.184.000,00	107.760.337.297,00	80.846.703,00	99,93	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	9.000,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	9.000,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 09	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	695.329.000,00	689.357.675,00	5.971.325,00	99,14	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19 . 02	<i>Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	695.329.000,00	689.357.675,00	5.971.325,00	99,14	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	695.329.000,00	689.357.675,00	5.971.325,00	99,14	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20	Pengelolaan Barang Milik Daerah	591.991.500,00	579.045.691,00	12.945.809,00	97,81	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01	<i>Penyusunan Standar Harga</i>	221.745.000,00	219.173.450,00	2.571.550,00	98,84	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.745.000,00	219.173.450,00	2.571.550,00	98,84	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	58.724.000,00	57.675.400,00	1.048.600,00	98,21	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.724.000,00	57.675.400,00	1.048.600,00	98,21	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 05	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	162.641.050,00	161.523.820,00	1.117.230,00	99,31	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.641.050,00	161.523.820,00	1.117.230,00	99,31	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 08	<i>Penilaian Barang Milik Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	148.881.450,00	140.673.021,00	8.208.429,00	94,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.881.450,00	140.673.021,00	8.208.429,00	94,49	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	756.788.150,00	752.339.875,00	4.448.275,00	99,41	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	460.980.000,00	457.728.000,00	3.252.000,00	99,29	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	460.980.000,00	457.728.000,00	3.252.000,00	99,29	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	47.777.500,00	47.561.300,00	216.200,00	99,55	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.777.500,00	47.561.300,00	216.200,00	99,55	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	59.893.250,00	59.743.750,00	149.500,00	99,75	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.893.250,00	59.743.750,00	149.500,00	99,75	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	188.137.400,00	187.306.825,00	830.575,00	99,56	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.137.400,00	187.306.825,00	830.575,00	99,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	730.271.249.831,00	721.996.216.572,80	8.275.033.258,20	98,87	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	-0,71	100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	-0,71	100,00	
PEMBIAYAAN NETTO		800.478.235.813,00	792.203.202.555,51	8.275.033.257,49	98,97	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan			
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.01.05 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	5.967.286.712,00	5.722.807.411,00	244.479.301,00	95,90	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.877.246.000,00	2.797.080.734,00	80.165.266,00	97,21	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.877.246.000,00	2.797.080.734,00	80.165.266,00	97,21	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.877.246.000,00	2.797.080.734,00	80.165.266,00	97,21	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.855.640,00	267.632.412,00	1.223.228,00	99,55	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.037.840,00	46.037.600,00	240,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.037.840,00	46.037.600,00	240,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.235.000,00	18.232.000,00	3.000,00	99,98	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.235.000,00	18.232.000,00	3.000,00	99,98	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.735.400,00	18.735.400,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.735.400,00	18.735.400,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.013.400,00	181.793.412,00	1.219.988,00	99,33	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.013.400,00	181.793.412,00	1.219.988,00	99,33	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.421.072,00	358.713.935,00	8.707.137,00	97,63	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.978.192,00	43.557.055,00	2.421.137,00	94,73	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.978.192,00	43.557.055,00	2.421.137,00	94,73	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.442.880,00	315.156.880,00	6.286.000,00	98,04	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	67.100.000,00	63.050.000,00	4.050.000,00	93,96	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.01.05 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.342.880,00	252.106.880,00	2.236.000,00	99,12	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.530.000,00	36.409.050,00	120.950,00	99,67	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.230.000,00	11.229.750,00	250,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.230.000,00	11.229.750,00	250,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	17.700.000,00	17.579.300,00	120.700,00	99,32	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	17.579.300,00	120.700,00	99,32	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	386.320.250,00	382.891.801,00	3.428.449,00	99,11	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 02	<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	28.139.350,00	27.801.204,00	338.146,00	98,80	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.139.350,00	27.801.204,00	338.146,00	98,80	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 03	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	237.542.650,00	235.919.707,00	1.622.943,00	99,32	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.542.650,00	235.919.707,00	1.622.943,00	99,32	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 06	<i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	40.497.750,00	39.882.359,00	615.391,00	98,48	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.497.750,00	39.882.359,00	615.391,00	98,48	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 10	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	52.136.000,00	52.005.478,00	130.522,00	99,75	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.136.000,00	52.005.478,00	130.522,00	99,75	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 11	<i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	28.004.500,00	27.283.053,00	721.447,00	97,42	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.004.500,00	27.283.053,00	721.447,00	97,42	
4.06 . 4.01.05 . 00 . 15	Pengembangan Kompetensi Teknis	12.643.000,00	10.526.800,00	2.116.200,00	83,26	
4.06 . 4.01.05 . 00 . 15 . 01	<i>Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</i>	12.643.000,00	10.526.800,00	2.116.200,00	83,26	
4.06 . 4.01.05 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.643.000,00	10.526.800,00	2.116.200,00	83,26	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 16	Mutasi dan Promosi ASN	112.896.600,00	109.773.300,00	3.123.300,00	97,23	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 16 . 01	<i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>	40.304.850,00	39.566.850,00	738.000,00	98,17	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.304.850,00	39.566.850,00	738.000,00	98,17	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 16 . 02	<i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	72.591.750,00	70.206.450,00	2.385.300,00	96,71	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.591.750,00	70.206.450,00	2.385.300,00	96,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.06 . 4.01.05 . 00 . 16	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	928.863.100,00	872.158.222,00	56.704.878,00	93,90	
4.06 . 4.01.05 . 00 . 16 . 07	<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	928.863.100,00	872.158.222,00	56.704.878,00	93,90	
4.06 . 4.01.05 . 00 . 16 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	928.863.100,00	872.158.222,00	56.704.878,00	93,90	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17	Pengembangan Kompetensi ASN	639.287.350,00	563.537.315,00	75.750.035,00	88,15	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 01	<i>Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN</i>	26.509.250,00	26.459.050,00	50.200,00	99,81	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.509.250,00	26.459.050,00	50.200,00	99,81	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 02	<i>Pengelolaan Assessment Center</i>	234.404.100,00	187.022.000,00	47.382.100,00	79,79	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.404.100,00	187.022.000,00	47.382.100,00	79,79	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 03	<i>Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>	375.714.000,00	347.566.265,00	28.147.735,00	92,51	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.714.000,00	347.566.265,00	28.147.735,00	92,51	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 04	<i>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	2.660.000,00	2.490.000,00	170.000,00	93,61	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	2.490.000,00	170.000,00	93,61	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 18	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	176.923.700,00	175.873.842,00	1.049.858,00	99,41	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 18 . 02	<i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	17.972.000,00	17.906.438,00	65.562,00	99,64	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.972.000,00	17.906.438,00	65.562,00	99,64	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 18 . 04	<i>Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai</i>	119.962.200,00	119.801.704,00	160.496,00	99,87	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 18 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.962.200,00	119.801.704,00	160.496,00	99,87	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 18 . 08	<i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	38.989.500,00	38.165.700,00	823.800,00	97,89	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 18 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.989.500,00	38.165.700,00	823.800,00	97,89	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.300.000,00	148.210.000,00	12.090.000,00	92,46	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	160.300.000,00	148.210.000,00	12.090.000,00	92,46	
4.05 . 4.01.05 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.300.000,00	148.210.000,00	12.090.000,00	92,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.967.286.712,00)	(5.722.807.411,00)	(244.479.301,00)	95,90	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan			
Unit Organisasi : 4 . 01 . 06		INSPEKTORAT KABUPATEN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	7.619.324.550,00	7.427.311.467,00	192.013.083,00	97,48	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.050.000,00	184.869.604,00	180.396,00	99,90	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185.050.000,00	184.869.604,00	180.396,00	99,90	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.050.000,00	184.869.604,00	180.396,00	99,90	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.470.107.000,00	3.381.508.642,00	88.598.358,00	97,45	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.470.107.000,00	3.381.508.642,00	88.598.358,00	97,45	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.470.107.000,00	3.381.508.642,00	88.598.358,00	97,45	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	324.217.150,00	322.267.566,00	1.949.584,00	99,40	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	324.217.150,00	322.267.566,00	1.949.584,00	99,40	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 05 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	324.217.150,00	322.267.566,00	1.949.584,00	99,40	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.288.250,00	581.217.080,00	5.071.170,00	99,14	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.262.000,00	15.192.000,00	70.000,00	99,54	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.262.000,00	15.192.000,00	70.000,00	99,54	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.836.250,00	129.601.152,00	235.098,00	99,82	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.836.250,00	129.601.152,00	235.098,00	99,82	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	74.930.000,00	70.000,00	99,91	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.930.000,00	70.000,00	99,91	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.840.000,00	45.836.000,00	4.000,00	99,99	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.840.000,00	45.836.000,00	4.000,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	4.500.000,00	1.520.000,00	2.980.000,00	33,78	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	1.520.000,00	2.980.000,00	33,78	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	315.850.000,00	314.137.928,00	1.712.072,00	99,46	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.850.000,00	314.137.928,00	1.712.072,00	99,46	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.318.600,00	452.305.371,00	40.013.229,00	91,87	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7.900.000,00	5.900.000,00	2.000.000,00	74,68	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	5.900.000,00	2.000.000,00	74,68	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	112.000.000,00	94.546.771,00	17.453.229,00	84,42	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	94.546.771,00	17.453.229,00	84,42	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	326.068.600,00	305.508.600,00	20.560.000,00	93,69	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	57.310.000,00	52.950.000,00	4.360.000,00	92,39	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.758.600,00	252.558.600,00	16.200.000,00	93,97	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.830.400,00	230.173.633,00	5.656.767,00	97,60	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	7.000.000,00	6.963.950,00	36.050,00	99,49	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.963.950,00	36.050,00	99,49	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	93.000.000,00	92.867.133,00	132.867,00	99,86	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	92.867.133,00	132.867,00	99,86	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	135.830.400,00	130.342.550,00	5.487.850,00	95,96	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.830.400,00	130.342.550,00	5.487.850,00	95,96	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	729.974.550,00	721.357.450,00	8.617.100,00	98,82	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 01	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	107.510.000,00	106.061.250,00	1.448.750,00	98,65	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.510.000,00	106.061.250,00	1.448.750,00	98,65	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 02	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	122.645.000,00	122.292.000,00	353.000,00	99,71	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.645.000,00	122.292.000,00	353.000,00	99,71	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 03	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	60.897.500,00	60.552.250,00	345.250,00	99,43	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.897.500,00	60.552.250,00	345.250,00	99,43	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 04	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	103.579.200,00	103.076.750,00	502.450,00	99,51	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.579.200,00	103.076.750,00	502.450,00	99,51	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 05	<i>Pengawasan Desa</i>	132.532.850,00	130.119.250,00	2.413.600,00	98,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.532.850,00	130.119.250,00	2.413.600,00	98,18	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 06	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	133.732.000,00	133.084.700,00	647.300,00	99,52	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.732.000,00	133.084.700,00	647.300,00	99,52	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 07	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	69.078.000,00	66.171.250,00	2.906.750,00	95,79	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.078.000,00	66.171.250,00	2.906.750,00	95,79	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 16	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	43.207.500,00	40.492.250,00	2.715.250,00	93,72	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 16 . 02	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	43.207.500,00	40.492.250,00	2.715.250,00	93,72	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.207.500,00	40.492.250,00	2.715.250,00	93,72	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 17	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	155.343.600,00	154.415.865,00	927.735,00	99,40	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 17 . 02	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas</i>	155.343.600,00	154.415.865,00	927.735,00	99,40	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.343.600,00	154.415.865,00	927.735,00	99,40	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 18	Pendampingan dan Asistensi	768.997.500,00	752.068.097,00	16.929.403,00	97,80	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 18 . 01	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	404.307.500,00	390.790.456,00	13.517.044,00	96,66	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	404.307.500,00	390.790.456,00	13.517.044,00	96,66	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 18 . 02	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	107.305.000,00	107.006.456,00	298.544,00	99,72	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.305.000,00	107.006.456,00	298.544,00	99,72	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 18 . 03	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	257.385.000,00	254.271.185,00	3.113.815,00	98,79	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.385.000,00	254.271.185,00	3.113.815,00	98,79	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.990.000,00	201.672.959,00	14.317.041,00	93,37	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	215.990.000,00	201.672.959,00	14.317.041,00	93,37	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.990.000,00	201.672.959,00	14.317.041,00	93,37	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	412.000.000,00	404.962.950,00	7.037.050,00	98,29	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 07 . 02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	400.000.000,00	392.962.950,00	7.037.050,00	98,24	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	392.962.950,00	7.037.050,00	98,24	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 07 . 05	<i>Pengadaan Mebel</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.01.06 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.619.324.550,00)	(7.427.311.467,00)	(192.013.083,00)	97,48	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN PULAU PUNJUNG						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	166,67	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	166,67	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	166,67	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	2.061.138.347,00	1.995.519.985,00	65.618.362,00	96,82	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.624.432.000,00	1.568.566.110,00	55.865.890,00	96,56	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.432.000,00	1.568.566.110,00	55.865.890,00	96,56	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.624.432.000,00	1.568.566.110,00	55.865.890,00	96,56	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.852.207,00	119.235.297,00	1.616.910,00	98,66	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.958.707,00	1.958.707,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.958.707,00	1.958.707,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.442.000,00	16.294.000,00	148.000,00	99,10	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.442.000,00	16.294.000,00	148.000,00	99,10	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.265.400,00	4.265.400,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.265.400,00	4.265.400,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.604.000,00	33.556.000,00	1.048.000,00	96,97	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.604.000,00	33.556.000,00	1.048.000,00	96,97	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.508.100,00	2.508.100,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.508.100,00	2.508.100,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	61.074.000,00	60.653.090,00	420.910,00	99,31	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.074.000,00	60.653.090,00	420.910,00	99,31	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.587.640,00	209.523.578,00	5.064.062,00	97,64	
				0,00		
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	7.200.000,00	5.541.178,00	1.658.822,00	76,96	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	5.541.178,00	1.658.822,00	76,96	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	206.387.640,00	202.982.400,00	3.405.240,00	98,35	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.237.640,00	173.832.400,00	3.405.240,00	98,08	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.106.500,00	87.335.000,00	1.771.500,00	98,01	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	10.986.500,00	10.851.500,00	135.000,00	98,77	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.986.500,00	10.851.500,00	135.000,00	98,77	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	3.720.000,00	2.083.500,00	1.636.500,00	56,01	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	2.083.500,00	1.636.500,00	56,01	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	70.000.000	70.000.000	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	70.000.000	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.580.000,00	1.360.000,00	220.000,00	89,82	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	1.080.000,00	860.000,00	220.000,00	79,63	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	860.000,00	220.000,00	79,63	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18 . 02	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.530.000,00	6.490.000,00	40.000,00	99,39	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 19 . 01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	6.530.000,00	6.490.000,00	40.000,00	99,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.07 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.530.000,00	6.490.000,00	40.000,00	99,39	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 26	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 26 . 01	<i>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Permdang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.300.000,00	3.010.000,00	290.000,00	91,21	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 28 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	3.300.000,00	3.010.000,00	290.000,00	91,21	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.010.000,00	290.000,00	91,21	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-2.058.138.347,00	-1.990.519.985,00	-67.618.362,00	96,71	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN SITIUNG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN SITIUNG						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.796.344.380,00	1.754.263.701,00	42.080.679,00	97,66	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.435.681.000,00	1.394.219.684,00	41.461.316,00	97,11	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.681.000,00	1.394.219.684,00	41.461.316,00	97,11	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.435.681.000,00	1.394.219.684,00	41.461.316,00	97,11	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.279.250,00	133.064.840,00	214.410,00	99,84	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.564.500,00	1.563.804,00	696,00	99,96	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.564.500,00	1.563.804,00	696,00	99,96	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.173.950,00	12.173.888,00	62,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.173.950,00	12.173.888,00	62,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.549.500,00	2.549.500,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.549.500,00	2.549.500,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.070.000,00	7.058.000,00	12.000,00	99,83	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	7.058.000,00	12.000,00	99,83	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.148.400,00	10.148.375,00	25,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.148.400,00	10.148.375,00	25,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.772.900,00	99.571.273,00	201.627,00	99,80	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.772.900,00	99.571.273,00	201.627,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.336.680,00	152.028.180,00	308.500,00	99,80	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.500.000,00	1.492.000,00	8.000,00	99,47	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.492.000,00	8.000,00	99,47	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	6.000.000,00	5.999.500,00	500,00	99,99	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.999.500,00	500,00	99,99	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	144.836.680,00	144.536.680,00	300.000,00	99,79	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.836.680,00	122.536.680,00	300.000,00	99,76	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.320.000,00	18.263.550,00	56.450,00	99,69	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.100.000,00	11.090.550,00	9.450,00	99,91	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.090.550,00	9.450,00	99,91	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	4.720.000,00	4.673.000,00	47.000,00	99,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	4.673.000,00	47.000,00	99,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.629.700,00	10.620.000,00	9.700,00	99,91	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 02	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	9.549.700,00	9.540.000,00	9.700,00	99,90	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.549.700,00	9.540.000,00	9.700,00	99,90	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.297.750,00	16.267.447,00	30.303,00	99,81	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19 . 01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	16.297.750,00	16.267.447,00	30.303,00	99,81	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.297.750,00	16.267.447,00	30.303,00	99,81	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 07 . 05	<i>Pengadaan Mebel</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 07 . 06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-1.794.884.380,00	-1.752.803.701,00	42.080.679,00	97,66	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN KOTO BARU Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN KOTO BARU						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	2.074.155.460,00	2.021.261.386,00	52.894.074,00	97,45	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.472.269.000,00	1.424.813.632,00	47.455.368,00	96,78	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.472.269.000,00	1.424.813.632,00	47.455.368,00	96,78	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.472.269.000,00	1.424.813.632,00	47.455.368,00	96,78	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.007.100,00	106.512.902,00	494.198,00	99,54	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	7.499.200,00	7.498.252,00	948,00	99,99	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.499.200,00	7.498.252,00	948,00	99,99	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	4.498.100,00	4.498.100,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.498.100,00	4.498.100,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	25.162.000,00	25.162.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.162.000,00	25.162.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 07	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	62.245.800,00	61.752.550,00	493.250,00	99,21	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.245.800,00	61.752.550,00	493.250,00	99,21	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.529.360,00	316.198.926,00	4.330.434,00	98,65	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	8.496.000,00	4.266.876,00	4.229.124,00	50,22	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.496.000,00	4.266.876,00	4.229.124,00	50,22	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	310.233.360,00	310.132.050,00	101.310,00	99,97	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.933.360,00	284.832.050,00	101.310,00	99,96	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.550.000,00	137.955.926,00	594.074,00	99,57	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.200.000,00	10.957.326,00	242.674,00	97,83	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	10.957.326,00	242.674,00	97,83	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	4.450.000,00	4.394.600,00	55.400,00	98,76	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.394.600,00	55.400,00	98,76	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	120.000.000,00	119.704.000,00	296.000,00	99,75	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.704.000,00	296.000,00	99,75	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.070.000,00	1.050.000,00	20.000,00	98,13	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18 . 02	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	1.070.000,00	1.050.000,00	20.000,00	98,13	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	1.050.000,00	20.000,00	98,13	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19 . 01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24 . 01	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 07 . 06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.072.655.460,00)	(2.019.761.386,00)	(52.894.074,00)	97,45	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KECAMATAN SUNGAI RUMBAI						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	3.500.000,00	4.685.600,00	1.185.600,00	133,87	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.500.000,00	4.685.600,00	1.185.600,00	127,60	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	3.500.000,00	4.685.600,00	1.185.600,00	127,60	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.499.504.577,00	1.463.282.395,00	36.222.182,00	97,58	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.192.017.000,00	1.156.308.091,00	35.708.909,00	97,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.192.017.000,00	1.156.308.091,00	35.708.909,00	97,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.192.017.000,00	1.156.308.091,00	35.708.909,00	97,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.980.657,00	97.747.508,00	233.149,00	99,76	
44.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.794.707,00	1.793.900,00	807,00	99,96	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.794.707,00	1.793.900,00	807,00	99,96	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.977.450,00	10.977.450,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.977.450,00	10.977.450,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.852.200,00	3.852.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.852.200,00	3.852.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	19.236.000,00	19.236.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.236.000,00	19.236.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	4.971.800,00	4.971.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.971.800,00	4.971.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	57.148.500,00	56.916.158,00	232.342,00	99,59	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.148.500,00	56.916.158,00	232.342,00	99,59	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.991.920,00	171.983.170,00	8.750,00	99,99	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	10.920.000,00	10.911.250,00	8.750,00	99,92	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.911.250,00	8.750,00	99,92	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	160.071.920,00	160.071.920,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.921.920,00	130.921.920,00		100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.820.000,00	17.618.626,00	201.374,00	98,87	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.200.000,00	10.998.626,00	201.374,00	98,20	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	10.998.626,00	201.374,00	98,20	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	2.083.500,00	1.636.500,00	56,01	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 18 . 01	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 18 . 02	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.115.000,00	10.075.000,00	40.000,00	99,60	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.115.000,00	10.075.000,00	40.000,00	99,60	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.115.000,00	10.075.000,00	40.000,00	99,60	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 26	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 26 . 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Permdang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.150.000,00	3.120.000,00	30.000,00	99,05	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.150.000,00	3.120.000,00	30.000,00	99,05	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.120.000,00	30.000,00	99,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.496.004.577,00)	(1.458.596.795,00)	(37.407.782,00)	97,50	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN SEMBILAN KOTO						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.452.226.960,00	1.401.394.556,00	50.832.404,00	96,50	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.135.022.000,00	1.094.390.137,00	40.631.863,00	96,42	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.135.022.000,00	1.094.390.137,00	40.631.863,00	96,42	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.135.022.000,00	1.094.390.137,00	40.631.863,00	96,42	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.387.800,00	89.580.459,00	3.807.341,00	95,92	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.198.600,00	13.123.720,00	74.880,00	99,43	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.198.600,00	13.123.720,00	74.880,00	99,43	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.427.000,00	21.285.000,00	142.000,00	99,34	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.427.000,00	21.285.000,00	142.000,00	99,34	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.858.200,00	3.837.000,00	1.021.200,00	78,98	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.858.200,00	3.837.000,00	1.021.200,00	78,98	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.948.000,00	49.378.739,00	2.569.261,00	95,05	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.948.000,00	49.378.739,00	2.569.261,00	95,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.567.160,00	178.970.160,00	5.597.000,00	96,97	
				0,00		
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	6.000.000,00	4.853.000,00	1.147.000,00	80,88	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.853.000,00	1.147.000,00	80,88	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	100,00	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	175.207.160,00	170.757.160,00	4.450.000,00	97,46	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 04	Belanja Pegawai	27.500.000,00	24.850.000,00	2.650.000,00	90,36	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Baranq dan Jasa	147.707.160,00	145.907.160,00		98,78	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.450.000,00	18.663.800,00	786.200,00	95,96	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	2.700.000,00	2.010.950,00	689.050,00	74,48	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.010.950,00	689.050,00	74,48	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	16.750.000,00	16.652.850,00	97.150,00	99,42	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16750000	16652850			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.000.000,00	3.990.000,00	10.000,00	99,75	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 19 . 01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	4.000.000,00	3.990.000,00	10.000,00	99,75	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.990.000,00	10.000,00	99,75	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 26	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 28 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-1.450.476.960,00	-1.399.644.556,00	-50.832.404,00	96,50	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN TIMPEH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	1.660.000,00	0,00	-1.660.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.660.000,00	0,00	-1.660.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.660.000,00	0,00	-1.660.000,00	0,00	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.345.846.660,00	1.308.587.784,00	37.258.876,00	97,23	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.022.413.000,00	988.770.229,00	33.642.771,00	96,71	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.022.413.000,00	988.770.229,00	33.642.771,00	96,71	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.022.413.000,00	988.770.229,00	33.642.771,00	96,71	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.913.500,00	104.232.200,00	681.300,00	99,35	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	1.580.000,00	1.368.000,00	212.000,00	86,58	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	1.368.000,00	212.000,00	86,58	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	14.129.400,00	14.117.400,00	12.000,00	99,92	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.129.400,00	14.117.400,00	12.000,00	99,92	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	775.000,00	765.000,00	10.000,00	98,71	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	765.000,00	10.000,00	98,71	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	20.900.000,00	20.830.000,00	70.000,00	99,67	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	20.830.000,00	70.000,00	99,67	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	7.000.600,00	6.971.000,00	29.600,00	99,58	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.600,00	6.971.000,00	29.600,00	99,58	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60.528.500,00	60.180.800,00	347.700,00	99,43	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.528.500,00	60.180.800,00	347.700,00	99,43	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.200.000,00	11.126.125,00	73.875,00	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.12 . 00 . 07 . 06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	11.200.000,00	11.126.125,00	73.875,00	99,34	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.200.000,00	11.126.125,00	73.875,00	99,34	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.480.160,00	180.018.230,00	2.461.930,00	98,65	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	91,67	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	91,67	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	3.620.000,00	3.542.000,00	78.000,00	97,85	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	3.542.000,00	78.000,00	97,85	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	173.917.160,00	171.633.230,00	2.283.930,00	98,69	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.067.160,00	145.783.230,00	2.283.930,00	98,46	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.200.000,00	19.801.000,00	399.000,00	98,02	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan</i>	10.900.000,00	10.600.400,00	299.600,00	97,25	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	<i>PaiaK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i> Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.600.400,00	299.600,00	97,25	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	6.400.000,00	6.310.600,00	89.400,00	98,60	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.310.600,00	89.400,00	98,60	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2.900.000,00	2.890.000,00	10.000,00	99,66	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.890.000,00	10.000,00	99,66	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 19 . 01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.344.186.660,00)	(1.308.587.784,00)	(38.918.876,00)	97,35	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021						
Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4 . 01 . 13		KECAMATAN KOTO SALAK				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.290.701.020,00	1.248.475.717,00	42.225.303,00	96,73	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	978.586.000,00	941.626.092,00	36.959.908,00	96,22	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	978.586.000,00	941.626.092,00	36.959.908,00	96,22	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	978.586.000,00	941.626.092,00	36.959.908,00	96,22	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.503.100,00	112.315.487,00	187.613,00	99,83	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2.227.000,00	2.227.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.227.000,00	2.227.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.007.650,00	14.007.650,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.007.650,00	14.007.650,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.472.200,00	3.472.200,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.472.200,00	3.472.200,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.986.000,00	4.986.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.986.000,00	4.986.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.890.250,00	67.702.637,00	187.613,00	99,72	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.890.250,00	67.702.637,00	187.613,00	99,72	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.171.920,00	174.179.566,00	2.992.354,00	98,31	



Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA						
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						
TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14		KECAMATAN ASAM JUJUHAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.195.964.850,00	1.105.406.643,00	90.558.207,00	92,43	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	843.934.000,00	755.011.336,00	88.922.664,00	89,46	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	843.934.000,00	755.011.336,00	88.922.664,00	89,46	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	843.934.000,00	755.011.336,00	88.922.664,00	89,46	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.923.850,00	120.182.817,00	741.033,00	99,39	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2.307.500,00	1.634.600,00	672.900,00	70,84	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.307.500,00	1.634.600,00	672.900,00	70,84	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.642.000,00	9.622.900,00	19.100,00	99,80	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.642.000,00	9.622.900,00	19.100,00	99,80	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.895.000,00	24.890.000,00	5.000,00	99,98	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.895.000,00	24.890.000,00	5.000,00	99,98	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.700.000,00	2.659.000,00	41.000,00	98,48	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.659.000,00	41.000,00	98,48	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.969.350,00	75.966.317,00	3.033,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.969.350,00	75.966.317,00	3.033,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.837.000,00	179.464.940,00	372.060,00	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.14 . 00 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	4.919.250,00	80.750,00	98,39	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.919.250,00	80.750,00	98,39	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.337.000,00	172.045.690,00	291.310,00	99,83	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.150.000,00	250.000,00	99,15	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.937.000,00	142.895.690,00	41.310,00	99,97	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.570.000,00	18.047.550,00	522.450,00	97,19	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.170.000,00	11.114.550,00	55.450,00	99,50	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000,00	11.114.550,00	55.450,00	99,50	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.400.000,00	4.933.000,00	467.000,00	91,35	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	4.933.000,00	467.000,00	91,35	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.195.964.850,00)	(1.105.406.643,00)	(90.558.207,00)	92,43	



Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
 Nomor : 3 Tahun 2023
 Tanggal : **27** Juni 2023

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Unit Organisasi : 4 . 01 . 15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KECAMATAN KOTO BESAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	50,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.843.494.717,00	1.777.365.598,00	66.129.119,00	96,41	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.519.312.000,00	1.453.522.579,00	65.789.421,00	95,67	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.519.312.000,00	1.453.522.579,00	65.789.421,00	95,67	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.519.312.000,00	1.453.522.579,00	65.789.421,00	95,67	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.359.057,00	100.118.450,00	240.607,00	99,76	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.794.707,00	1.794.300,00	407,00	99,98	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.794.707,00	1.794.300,00	407,00	99,98	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.834.700,00	13.834.700,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.834.700,00	13.834.700,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.262.000,00	20.238.000,00	24.000,00	99,88	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.262.000,00	20.238.000,00	24.000,00	99,88	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.921.200,00	4.921.200,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.921.200,00	4.921.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	55.699.250,00	55.483.050,00	216.200,00	99,61	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.699.250,00	55.483.050,00	216.200,00	99,61	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.803.660,00	193.787.410,00	16.250,00	99,99	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	6.396.500,00	6.380.250,00	16.250,00	99,75	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.396.500,00	6.380.250,00	16.250,00	99,75	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	181.957.160,00	181.957.160,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.150.000,00	29.150.000,00		100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.807.160,00	152.807.160,00		100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.920.000,00	14.837.159,00	82.841,00	99,44	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	11.200.000,00	11.164.759,00	35.241,00	99,69	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.164.759,00	35.241,00	99,69	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	3.720.000,00	3.672.400,00	47.600,00	98,72	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.672.400,00	47.600,00	98,72	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	0,00	0,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18 . 02	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 19 . 01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.15 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 24 . 01	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 28	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 28 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-1.841.494.717,00	-1.776.365.598,00	-65.129.119,00	96,46	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022						
Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4 . 01 . 16		KECAMATAN PADANG LAWEH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	33,33	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	33,33	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	33,33	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.196.875.440,00	1.159.564.716,00	37.310.724,00	96,88	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	858.720.000,00	822.258.176,00	36.461.824,00	95,75	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	858.720.000,00	822.258.176,00	36.461.824,00	95,75	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	858.720.000,00	822.258.176,00	36.461.824,00	95,41	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.509.000,00	170.121.300,00	387.700,00	99,77	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	1.099.600,00	1.098.000,00	1.600,00	99,85	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.099.600,00	1.098.000,00	1.600,00	99,85	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	13.527.700,00	13.391.700,00	136.000,00	98,99	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.527.700,00	13.391.700,00	136.000,00	98,99	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	3.811.200,00	3.809.700,00	1.500,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.811.200,00	3.809.700,00	1.500,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	68.340.000,00	68.336.000,00	4.000,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.340.000,00	68.336.000,00	4.000,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	8.591.500,00	8.591.200,00	300,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.591.500,00	8.591.200,00	300,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	75.139.000,00	74.894.700,00	244.300,00	99,67	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.139.000,00	74.894.700,00	244.300,00	99,75	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.441.440,00	132.433.440,00	8.000,00	99,99	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	1.500.000,00	1.492.000,00	8.000,00	99,47	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.492.000,00	8.000,00	83,54	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Unit Organisasi : 4 . 01 . 17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KECAMATAN TIUMANG				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	1.586.271.300,00	1.552.760.567,00	33.510.733,00	97,89	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.244.542.000,00	1.212.091.441,00	32.450.559,00	97,39	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.244.542.000,00	1.212.091.441,00	32.450.559,00	97,39	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.244.542.000,00	1.212.091.441,00	32.450.559,00	97,39	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.751.900,00	101.647.200,00	104.700,00	99,90	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.174.600,00	1.174.000,00	600,00	99,95	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.174.600,00	1.174.000,00	600,00	99,95	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.715.650,00	10.715.000,00	650,00	99,99	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.715.650,00	10.715.000,00	650,00	99,99	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.477.650,00	4.477.000,00	650,00	99,99	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.477.650,00	4.477.000,00	650,00	99,99	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.904.000,00	21.864.000,00	40.000,00	99,82	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.904.000,00	21.864.000,00	40.000,00	99,82	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.287.000,00	5.286.000,00	1.000,00	99,98	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.287.000,00	5.286.000,00	1.000,00	99,98	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.193.000,00	58.131.200,00	61.800,00	99,89	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.193.000,00	58.131.200,00	61.800,00	99,89	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.962.400,00	204.175.926,00	786.474,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.460.000,00	8.038.766,00	421.234,00	95,02	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	8.038.766,00	421.234,00	95,02	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.002.400,00	194.637.160,00	365.240,00	99,81	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.150.000,00	28.950.000,00	200.000,00	99,31	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.852.400,00	165.687.160,00	165.240,00	99,90	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	15.831.000,00	169.000,00	98,94	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.800.000,00	10.631.000,00	169.000,00	98,44	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.631.000,00	169.000,00	98,44	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.585.021.300,00)	(1.552.760.567,00)	(34.760.733,00)	97,96	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022							
Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 02 . 01 . 5	BELANJA DAERAH	2.655.113.020,00	2.596.877.289,00	58.235.731,00	97,81	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	812.462.000,00	781.292.118,00	31.169.882,00	96,16	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	812.462.000,00	781.292.118,00	31.169.882,00	96,16	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	812.462.000,00	781.292.118,00	31.169.882,00	96,16	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.467.250,00	204.920.803,00	546.447,00	99,73	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	3.986.800,00	3.986.600,00	200,00	99,99	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	<i>Banqunan Kantor</i> Belanja Barang dan Jasa	3.986.800,00	3.986.600,00	200,00	99,99	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	42.061.000,00	41.898.800,00	162.200,00	99,61	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.061.000,00	41.898.800,00	162.200,00	99,61	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	10.178.400,00	10.178.400,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.178.400,00	10.178.400,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	16.547.100,00	16.539.300,00	7.800,00	99,95	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.547.100,00	16.539.300,00	7.800,00	99,95	

	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	113.643.950,00	113.267.703,00	376.247,00	99,67	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.643.950,00	113.267.703,00	376.247,00	99,67	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.797.640,00	232.160.743,00	9.636.897,00	96,01	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	14.040.000,00	13.839.653,00	200.347,00	98,57	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	13.839.653,00	200.347,00	98,57	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	221.357.640,00	211.921.090,00	9.436.550,00	95,74	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	39.950.000,00	36.800.000,00	3.150.000,00	92,12	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.407.640,00	175.121.090,00	6.286.550,00	96,53	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	105.599.300,00	95.533.400,00	10.065.900,00	90,47	

	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16 . 02	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit</i>	105.599.300,00	95.533.400,00	10.065.900,00	90,47	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.599.300,00	95.533.400,00	10.065.900,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 17	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.006.600,00	9.822.600,00	184.000,00	98,16	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 17 . 05	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	10.006.600,00	9.822.600,00	184.000,00	98,16	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Hibah	10.006.600,00	9.822.600,00	184.000,00	98,16	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	879.370.580,00	873.180.280,00	6.190.300,00	99,30	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16 . 03	<i>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	849.376.880,00	844.086.880,00	5.290.000,00	99,38	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.986.000,00	47.196.000,00	3.790.000,00	92,57	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16 . 03 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	798.390.880,00	796.890.880,00	1.500.000,00	99,81	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penvalaqaunaan</i>	10.671.000,00	10.618.000,00	53.000,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.671.000,00	10.618.000,00	53.000,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 05	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	19.322.700,00	18.475.400,00	847.300,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.322.700,00	18.475.400,00	847.300,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	357.224.650,00	356.782.345,00	442.305,00	99,88	

	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19 . 01	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	<i>Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orana Asina. Tenaaa Kerja Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19 . 04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,</i>	357.224.650,00	356.782.345,00	442.305,00	99,88	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19 . 04 . 5 . 1 . 2	<i>Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Belanja Barang dan Jasa</i>	357.224.650,00	356.782.345,00	442.305,00	99,88	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.435.000,00	29.435.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 07 . 06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	29.435.000,00	29.435.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.435.000,00	29.435.000,00	0,00	100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.655.113.020,00)	(2.596.877.289,00)	(58.235.731,00)	97,81	

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	685.234.661.555,00	125.281.701.745,00		
1.01	Pendidikan	447.119.325.795,70	98.228.164.040,62		
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	246.404.451.716,00	25.223.727.649,00		
1.01 . 1.01.01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	203.653.355.554,56	18.364.227.365,93		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00	Non Program	246.404.451.716,00	25.223.727.649,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00	Non Kegiatan	203.653.355.554,56	18.364.227.365,93		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.404.451.716,00	25.223.727.649,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	203.653.355.554,56	18.364.227.365,93		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	166.200.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	166.200.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.210.000,00	0,00		
		288.985.000,00	0,00		
		289.210.000,00	0,00		
		288.985.000,00	0,00		
		199.597.462.742,00	0,00		
		192.363.005.067,00	0,00		
		199.597.462.742,00	0,00		
		192.363.005.067,00	0,00		
		673.704.152,00	123.505.000,00		
		655.296.294,00	123.020.000,00		
		110.989.500,00	0,00		
		99.548.400,00	0,00		
		123.727.452,00	123.505.000,00		
		123.716.800,00	123.020.000,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.504.250,00	0,00		
		58.977.520,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.750.000,00	0,00		
		79.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.490.000,00	0,00		
		124.490.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.242.950,00	0,00		
		169.063.574,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	80.000.000,00		
		0,00	70.922.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	80.000.000,00		
		0,00	70.922.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.728.311.520,00	0,00		
		7.272.292.443,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	0,00		
		134.172.933,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	0,00		
		34.567.200,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.543.311.520,00	0,00		
		7.103.552.310,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.500.000,00	0,00		
		268.077.781,99	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.500.000,00	0,00		
		70.475.100,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.000.000,00	0,00		
		197.602.681,99	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.172.739.593,00	17.120.251.673,00		
		656.007.168,57	12.278.906.982,05		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	100.000.000,00	210.599.936,00		
		99.614.070,05	210.370.898,96		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	1.346.779.414,00		
		0,00	1.230.024.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	913.077.080,00		
		0,00	825.217.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	1.299.282.513,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		0,00	1.185.111.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	124.400.000,00	998.827.197,00		
		123.735.698,52	923.811.246,09		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 14	Pengadaan Mebel Sekolah	7.646.000,00	30.000.000,00		
		7.305.000,00	28.971.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	356.250.000,00	5.168.375.000,00		
		356.055.000,00	5.162.852.667,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12.158.000,00	0,00		
		12.158.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	17.500.000,00	0,00		
		17.290.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.872.000,00	0,00		
		9.822.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	25.555.500,00	0,00		
		25.455.400,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4.622.000,00	0,00		
		4.572.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.514.736.093,00	4.341.844.864,00		
		0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 181	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	2.811.465.669,00		
		0,00	2.712.547.870,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	9.533.763.595,00	6.526.245.392,00		
		723.644.500,00	4.737.514.827,88		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	790.047.150,00		
		0,00	759.582.130,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	523.462.183,00		
		0,00	503.918.850,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06	Pembangunan Laboratorium	0,00	2.355.918.048,00		
		0,00	2.290.611.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000,00	510.000.000,00		
		500.000.000,00	506.875.471,88		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	176.310.000,00	678.913.200,00		
		175.885.000,00	676.526.776,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.240.000,00	0,00		
		10.240.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.500.000,00	0,00		
		6.830.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.872.000,00	0,00		
		9.872.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.842.500,00	0,00		
		20.817.500,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.801.999.095,00	1.667.904.811,00		
		0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.262.078.814,00	1.316.325.584,00		
		1.151.803.150,00	1.153.862.756,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	809.231.850,00	778.557.184,00		
		807.547.050,00	689.966.206,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	184.631.264,00		
		0,00	179.446.550,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.280.000,00	95.500.000,00		
		0,00	75.589.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	5.104.122.614,00	45.512.136,00		
		2.510.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	261.250.000,00	197.125.000,00		
		260.150.000,00	193.861.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	9.872.000,00	0,00		
		9.467.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	19.418.000,00	0,00		
		18.288.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	54.904.350,00	15.000.000,00		
		53.841.100,00	15.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	793.812.000,00	57.400.000,00		
		30.187.250,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	761.926.000,00	57.400.000,00		
		7.691.250,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.544.000,00	0,00		
		12.454.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.342.000,00	0,00		
		10.042.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	23.039.300,00	0,00		
		23.028.900,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	23.039.300,00	0,00		
		23.028.900,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	54.830.000,00	0,00		
		54.828.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.830.000,00	0,00		
		54.828.000,00	0,00		
1.02	Kesehatan	167.674.035.021,00	14.812.672.860,00		
		165.264.868.596,74	11.536.828.263,37		
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	103.320.542.330,00	10.352.142.890,00		
		97.248.777.118,74	9.662.448.768,37		
1.02 . 1.02.01 . 01	DINAS KESEHATAN	76.717.625.090,00	7.398.946.000,00		
		73.702.195.224,92	6.857.613.631,37		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	373.289.800,00	0,00		
		356.799.593,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.289.800,00	0,00		
		52.859.500,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.000.000,00	0,00		
		303.940.093,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	54.819.984.000,00	0,00		
		53.633.220.221,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.819.984.000,00	0,00		
		53.633.220.221,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	293.593.818,00	186.500.000,00		
		291.333.157,00	186.340.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.505.000,00	0,00		
		3.489.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.499.918,00	186.500.000,00		
		57.455.918,00	186.340.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.400,00	0,00		
		9.999.400,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.294.000,00	0,00		
		20.274.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.307.300,00	0,00		
		22.307.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.988.200,00	0,00		
		177.807.839,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.914.376.992,00	0,00		
		3.834.786.911,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.999.992,00	0,00		
		72.331.431,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.900.000,00	0,00		
		15.880.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.808.477.000,00	0,00		
		3.746.575.480,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.500.000,00	0,00		
		129.306.600,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	0,00		
		9.832.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	0,00		
		119.474.600,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.591.949.280,00	7.212.446.000,00		
		2.701.535.337,92	6.671.273.631,37		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20.000.000,00	810.000.000,00		
		14.966.000,00	731.189.220,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	145.000.000,00	50.000.000,00		
		144.328.188,92	49.682.544,37		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.994.050,00	981.000.000,00		
		14.783.650,00	881.017.400,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	5.371.446.000,00		
		0,00	5.009.384.467,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.058.152.633,00	0,00		
		928.631.255,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.353.802.597,00	0,00		
		1.598.826.244,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.803.308.100,00	0,00		
		11.973.477.287,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000,00	0,00		
		34.834.500,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	263.077.000,00	0,00		
		53.511.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000,00	0,00		
		22.957.500,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.000.000,00	0,00		
		28.949.800,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.000.000,00	0,00		
		28.332.800,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000,00	0,00		
		21.838.750,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000,00	0,00		
		25.534.412,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.160.000,00	0,00		
		34.754.500,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	48.180.000,00	0,00		
		46.609.750,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000,00	0,00		
		49.631.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	65.000.000,00	0,00		
		64.766.250,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	45.000.000,00	0,00		
		44.202.750,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	643.282.700,00	0,00		
		537.832.317,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	297.545.900,00	0,00		
		225.367.900,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	47.858.000,00	0,00		
		47.327.650,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	187.634.900,00	0,00		
		186.766.400,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.120.000,00	0,00		
		39.897.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	54.660.000,00	0,00		
		52.694.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	167.705.200,00	0,00		
		167.156.900,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.000.000,00	0,00		
		33.437.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.500.000.000,00	0,00		
		9.315.711.749,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	691.048.000,00	0,00		
		650.700.776,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	184.880.000,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	104.480.000,00	0,00		
		104.357.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	156.676.400,00	0,00		
		156.305.583,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	104.996.700,00	0,00		
		104.318.605,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	104.996.700,00	0,00		
		104.318.605,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	54.693.200,00	0,00		
		54.246.300,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	54.693.200,00	0,00		
		54.246.300,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	75.799.200,00	0,00		
		74.926.363,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	34.089.200,00	0,00		
		33.615.541,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	41.710.000,00	0,00		
		41.310.822,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	28.477.000,00	0,00		
		28.105.600,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	28.477.000,00	0,00		
		28.105.600,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	391.657.000,00	0,00		
		389.560.650,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	391.657.000,00	0,00		
		389.560.650,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.765.500,00	0,00		
		50.051.300,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.765.500,00	0,00		
		50.051.300,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.995.100,00	0,00		
		39.712.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	40.995.100,00	0,00		
		39.712.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.239.400,00	0,00		
		40.815.300,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.239.400,00	0,00		
		40.815.300,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02	RS Umum Sungai Rumbai	6.936.084.410,00	2.467.827.390,00		
		5.872.489.272,00	2.463.910.617,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.729.664.397,00	870.335.603,00		
		5.140.997.647,00	868.926.645,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.729.664.397,00	870.335.603,00		
		5.140.997.647,00	868.926.645,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15 . 22	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.206.420.013,00	1.597.491.787,00		
		731.491.625,00	1.594.983.972,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.206.420.013,00	1.597.491.787,00		
		731.491.625,00	1.594.983.972,00		
1.02 . 1.02.01 . 03	Puskesmas sungai Rumbai	1.490.020.003,00	22.000.000,00		
		1.362.488.161,00	20.000.000,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 03 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	849.020.003,00	22.000.000,00		
		761.165.062,00	20.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 03 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	849.020.003,00	22.000.000,00		
		761.165.062,00	20.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 03 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	641.000.000,00	0,00		
		601.323.099,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	641.000.000,00	0,00		
		601.323.099,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 04	Puskesmas Koto Besar	1.452.441.939,00	13.365.000,00		
		1.236.872.961,93	8.512.685,00		
1.02 . 1.02.01 . 04 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	757.441.939,00	13.365.000,00		
		653.582.098,93	8.512.685,00		
1.02 . 1.02.01 . 04 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	757.441.939,00	13.365.000,00		
		653.582.098,93	8.512.685,00		
1.02 . 1.02.01 . 04 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	695.000.000,00	0,00		
		583.290.863,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	695.000.000,00	0,00		
		583.290.863,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05	Puskesmas Sungai Limau	1.222.037.868,00	38.700.000,00		
		1.029.945.959,00	3.769.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	532.037.868,00	38.700.000,00		
		379.997.622,00	3.769.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	532.037.868,00	38.700.000,00		
		379.997.622,00	3.769.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 05 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	690.000.000,00	0,00		
		649.948.337,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	690.000.000,00	0,00		
		649.948.337,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06	Puskesmas Koto Baru	2.355.903.241,00	71.996.000,00		
		2.078.274.871,00	66.955.200,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	1.725.903.241,00	71.996.000,00		
		1.505.452.998,00	66.955.200,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.725.903.241,00	71.996.000,00		
		1.505.452.998,00	66.955.200,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 06 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	630.000.000,00	0,00		
		572.821.873,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	630.000.000,00	0,00		
		572.821.873,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 07	Puskesmas Tiumang	1.027.282.625,00	10.000.000,00		
		996.815.973,00	9.435.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	337.282.625,00	10.000.000,00		
		337.104.800,00	9.435.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	337.282.625,00	10.000.000,00		
		337.104.800,00	9.435.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	690.000.000,00	0,00		
		659.711.173,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	690.000.000,00	0,00		
		659.711.173,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 08	Puskesmas Padang Laweh	1.129.929.196,00	15.000.000,00		
		1.007.660.338,00	7.770.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	434.929.196,00	15.000.000,00		
		380.625.338,00	7.770.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	434.929.196,00	15.000.000,00		
		380.625.338,00	7.770.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	695.000.000,00	0,00		
		627.035.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	695.000.000,00	0,00		
		627.035.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 09	Puskesmas Sitiung I	1.821.515.925,00	95.700.000,00		
		1.722.246.963,00	73.396.825,00		
1.02 . 1.02.01 . 09 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	1.126.515.925,00	95.700.000,00		
		1.096.777.636,00	73.396.825,00		
1.02 . 1.02.01 . 09 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.126.515.925,00	95.700.000,00		
		1.096.777.636,00	73.396.825,00		
1.02 . 1.02.01 . 09 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	695.000.000,00	0,00		
		625.469.327,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	695.000.000,00	0,00		
		625.469.327,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 10	Puskesmas Timpeh	1.194.640.236,00	35.500.000,00		
		1.126.608.794,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 10 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	544.640.236,00	35.500.000,00		
		534.547.218,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 10 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	544.640.236,00	35.500.000,00		
		534.547.218,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 10 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	650.000.000,00	0,00		
		592.061.576,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	650.000.000,00	0,00		
		592.061.576,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 11	Puskesmas Gunung Medan	1.321.002.665,00	16.000.000,00		
		1.195.990.492,00	3.220.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 11 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	626.002.665,00	16.000.000,00		
		540.098.416,00	3.220.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 11 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	626.002.665,00	16.000.000,00		
		540.098.416,00	3.220.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 11 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	695.000.000,00	0,00		
		655.892.076,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	695.000.000,00	0,00		
		655.892.076,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 12	Puskesmas Sitiung II	1.426.921.200,00	25.345.500,00		
		1.299.678.685,91	25.345.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	731.921.200,00	25.345.500,00		
		722.022.730,91	25.345.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	731.921.200,00	25.345.500,00		
		722.022.730,91	25.345.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	695.000.000,00	0,00		
		577.655.955,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	695.000.000,00	0,00		
		577.655.955,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 13	Puskesmas Beringin Sakti	808.687.128,00	5.000.000,00		
		538.233.840,98	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 13 . 10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	218.280.128,00	5.000.000,00		
		169.482.509,46	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 13 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	218.280.128,00	5.000.000,00		
		169.482.509,46	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 13 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	590.407.000,00	0,00		
		368.751.331,52	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	590.407.000,00	0,00		
		368.751.331,52	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 14	Puskesmas Silago	1.447.316.687,00	13.400.000,00		
		1.323.468.532,00	8.290.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 14 . 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	757.316.687,00	13.400.000,00		
		691.765.879,00	8.290.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 14 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	757.316.687,00	13.400.000,00		
		691.765.879,00	8.290.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 14 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	690.000.000,00	0,00		
		631.702.653,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	690.000.000,00	0,00		
		631.702.653,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15	Puskesmas Sungai Dareh	1.868.624.014,00	95.363.000,00		
		1.760.434.745,00	95.330.310,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.248.624.014,00	95.363.000,00		
		1.178.116.801,00	95.330.310,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.248.624.014,00	95.363.000,00		
		1.178.116.801,00	95.330.310,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	620.000.000,00	0,00		
		582.317.944,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	620.000.000,00	0,00		
		582.317.944,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16	Puskesmas Sialang	1.100.510.103,00	28.000.000,00		
		995.372.305,00	18.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	405.510.103,00	28.000.000,00		
		371.557.449,00	18.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	405.510.103,00	28.000.000,00		
		371.557.449,00	18.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	695.000.000,00	0,00		
		623.814.856,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	695.000.000,00	0,00		
		623.814.856,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19	RSUD SUNGAI DAREH	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.02	RSUD SUNGAI DAREH	87.246.705.422,00	17.192.909.495,00		
		68.016.091.478,00	16.801.404.296,00		
1.02 . 1.02.02 . 01	RSUD SUNGAI DAREH	64.353.492.691,00	17.192.909.495,00		
		68.016.091.478,00	16.801.404.296,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	18.911.148.000,00	0,00		
		35.115.819.129,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.291.193.110,00	0,00		
		17.839.693.183,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	45.442.344.691,00	17.192.909.495,00		
		50.176.398.295,00	16.801.404.296,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.103.363.250,00	0,00		
		1.639.021.188,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	43.338.981.441,00	17.192.909.495,00		
		48.537.377.107,00	16.801.404.296,00		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.529.344.513,00	60.558.139.236,00		
		52.475.995.249,00	50.222.223.801,32		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.529.344.513,00	60.558.139.236,00		
		52.475.995.249,00	50.222.223.801,32		
1.03 . 1.03.01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.529.344.513,00	60.558.139.236,00		
		52.475.995.249,00	50.222.223.801,32		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	22.368.000,00	0,00		
		21.730.750,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.368.000,00	0,00		
		21.730.750,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.040.049.000,00	0,00		
		3.948.111.379,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.040.049.000,00	0,00		
		3.948.111.379,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	229.023.792,00	24.500.000,00		
		222.014.990,00	24.475.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.512.000,00	0,00		
		2.500.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.099.742,00	24.500.000,00		
		40.075.250,00	24.475.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.969.050,00	0,00		
		14.961.600,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.500.000,00	0,00		
		19.770.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.763.000,00	0,00		
		24.760.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.180.000,00	0,00		
		119.948.140,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	155.397.704,00	284.200.000,00		
		92.761.914,00	276.074.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.397.704,00	284.200.000,00		
		92.761.914,00	276.074.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3.569.004.080,00	0,00		
		3.395.764.372,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	662.296.050,00	0,00		
		633.021.692,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.906.708.030,00	0,00		
		2.762.742.680,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.365.358.950,00	0,00		
		1.195.421.061,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.650.000,00	0,00		
		182.479.425,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.039.708.950,00	0,00		
		1.012.941.636,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	137.948.720,00	3.327.408.700,00		
		124.298.150,00	3.306.553.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	137.948.720,00	3.327.408.700,00		
		124.298.150,00	3.306.553.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.025.820,00	2.060.000.000,00		
		119.518.373,00	1.796.249.700,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	141.025.820,00	2.060.000.000,00		
		119.518.373,00	1.796.249.700,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.111.394.500,00	1.145.960.000,00		
		8.819.662.060,00	214.800.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	401.136.100,00	0,00		
		281.690.600,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	300.000.000,00	0,00		
		300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.174.031.400,00	0,00		
		6.114.249.408,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	559.997.000,00	0,00		
		454.007.200,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.676.230.000,00	1.145.960.000,00		
		1.669.714.852,00	214.800.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	607.550.000,00	0,00		
		605.081.250,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	607.550.000,00	0,00		
		605.081.250,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.347.408.700,00	0,00		
		2.302.727.003,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	256.005.000,00	0,00		
		253.071.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	304.700.000,00	0,00		
		300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	14.390.000,00	0,00		
		5.212.050,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.704.028.700,00	0,00		
		1.682.861.980,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	68.285.000,00	0,00		
		61.581.973,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21	<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	14.007.765.580,00	120.000.000,00		
		13.759.601.429,00	112.520.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.263.692.330,00	0,00		
		7.220.281.350,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.744.073.250,00	120.000.000,00		
		6.539.320.079,00	112.520.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	12.632.798.500,00	7.611.549.536,00		
		12.117.384.375,00	2.097.314.280,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12.234.352.500,00	7.611.549.536,00		
		11.844.778.375,00	2.097.314.280,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	398.446.000,00	0,00		
		272.606.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	5.637.089.535,00	45.984.521.000,00		
		5.417.391.234,00	42.394.236.821,32		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05	Pembangunan Jalan	2.201.213.175,00	38.167.251.000,00		
		2.112.975.918,00	35.058.038.702,44		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 09	Rehabilitasi Jalan	1.612.047.160,00	0,00		
		1.595.607.510,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 12	Pembangunan Jembatan	564.458.800,00	7.817.270.000,00		
		491.300.950,00	7.336.198.118,88		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18	Rehabilitasi Jembatan	1.259.370.400,00	0,00		
		1.217.506.856,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	169.858.070,00	0,00		
		90.268.165,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	169.858.070,00	0,00		
		90.268.165,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28	<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	115.018.512,00	0,00		
		31.686.183,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	115.018.512,00	0,00		
		31.686.183,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	240.285.050,00	0,00		
		212.572.561,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	240.285.050,00	0,00		
		212.572.561,00	0,00		
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.057.001.710,00	124.492.000,00		
		11.484.685.556,40	119.189.000,00		
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.057.001.710,00	124.492.000,00		
		11.484.685.556,40	119.189.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.057.001.710,00	124.492.000,00		
		11.484.685.556,40	119.189.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.598.775.000,00	0,00		
		1.386.438.107,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.598.775.000,00	0,00		
		1.386.438.107,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	183.767.350,00	0,00		
		182.985.031,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.507.000,00	0,00		
		3.507.000,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.367.600,00	0,00		
		31.872.020,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.481.000,00	0,00		
		19.455.850,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.374.000,00	0,00		
		12.323.800,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.037.750,00	0,00		
		115.826.361,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.723.800,00	0,00		
		438.761.030,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.723.800,00	0,00		
		438.761.030,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.575.000,00	0,00		
		28.082.300,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.575.000,00	0,00		
		2.531.300,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.000.000,00	0,00		
		25.551.000,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.330.000,00	0,00		
		1.803.650,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.330.000,00	0,00		
		1.803.650,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12.641.000,00	0,00		
		9.683.782,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	12.641.000,00	0,00		
		9.683.782,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	116.854.500,00	0,00		
		115.427.950,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	116.854.500,00	0,00		
		115.427.950,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.230.000,00	0,00		
		1.075.000,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.230.000,00	0,00		
		1.075.000,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	282.438.800,00	116.192.000,00		
		246.939.871,00	112.639.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	282.438.800,00	116.192.000,00		
		246.939.871,00	112.639.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	190.392.000,00	0,00		
		174.808.927,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	190.392.000,00	0,00		
		174.808.927,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	68.525.400,00	0,00		
		61.777.146,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	68.525.400,00	0,00		
		61.777.146,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.036.736.960,00	0,00		
		3.981.640.504,79	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2.362.325.460,00	0,00		
		2.312.492.529,79	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1.674.411.500,00	0,00		
		1.669.147.975,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25 . 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.056.011.900,00	8.300.000,00		
		4.855.262.257,61	6.550.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.056.011.900,00	8.300.000,00		
		4.855.262.257,61	6.550.000,00		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.291.616.020,00	24.562.670.000,00		
		10.097.795.728,00	18.155.695.610,00		
1.05 . 1.05.01	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.716.532.180,00	8.500.000,00		
		7.572.189.112,00	8.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.716.532.180,00	8.500.000,00		
		7.572.189.112,00	8.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.385.033.000,00	0,00		
		2.294.029.995,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.385.033.000,00	0,00		
		2.294.029.995,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.793.200,00	1.000.000,00		
		144.704.329,00	1.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.955.000,00	0,00		
		5.950.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.904.000,00	1.000.000,00		
		19.899.500,00	1.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.600,00	0,00		
		9.998.140,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	0,00		
		9.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.493.600,00	0,00		
		7.432.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.442.000,00	0,00		
		92.424.689,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.494.582.840,00	0,00		
		4.468.113.252,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	0,00		
		3.456.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.080.000,00	0,00		
		27.344.412,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.463.002.840,00	0,00		
		4.437.312.840,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.835.290,00	0,00		
		240.674.936,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.135.290,00	0,00		
		231.979.936,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.700.000,00	0,00		
		8.695.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.071.000,00	7.500.000,00		
		178.089.750,00	7.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	172.071.000,00	7.500.000,00		
		157.099.750,00	7.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	21.000.000,00	0,00		
		20.990.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 160	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.615.000,00	0,00		
		37.508.150,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.615.000,00	0,00		
		37.508.150,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	182.392.850,00	0,00		
		182.291.500,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	182.392.850,00	0,00		
		182.291.500,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 24	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.345.000,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 24 . 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.345.000,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 25	Investigasi Kejadian Kebakaran	7.242.500,00	0,00		
		4.817.700,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 25 . 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	7.242.500,00	0,00		
		4.817.700,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	26.621.500,00	0,00		
		21.959.500,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	26.621.500,00	0,00		
		21.959.500,00	0,00		
1.05 . 1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.575.083.840,00	24.554.170.000,00		
		2.525.606.616,00	18.147.195.610,00		
1.05 . 1.05.02 . 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.575.083.840,00	24.554.170.000,00		
		2.525.606.616,00	18.147.195.610,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	772.208.072,00	0,00		
		727.948.564,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	772.208.072,00	0,00		
		727.948.564,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.014.348,00	33.000.000,00		
		216.258.954,00	33.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.748.000,00	0,00		
		1.748.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.891.348,00	33.000.000,00		
		47.860.314,00	33.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.075.000,00	0,00		
		78.497.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.694.000,00	0,00		
		2.694.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.606.000,00	0,00		
		85.459.640,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	21.170.000,00		
		0,00	21.170.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	21.170.000,00		
		0,00	21.170.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.119.120,00	0,00		
		695.602.680,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.630.000,00	0,00		
		2.630.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	0,00		
		14.986.500,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	0,00		
		7.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	670.989.120,00	0,00		
		670.486.180,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.500.000,00	0,00		
		153.621.400,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.500.000,00	0,00		
		98.621.400,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	0,00		
		55.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	146.351.300,00	0,00		
		145.264.212,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	120.690.000,00	0,00		
		120.240.450,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.661.300,00	0,00		
		25.023.762,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	246.951.800,00	24.500.000.000,00		
		246.236.950,00	18.093.025.610,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	25.100.000,00	0,00		
		24.945.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	221.851.800,00	24.500.000.000,00		
		221.291.950,00	18.093.025.610,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	341.939.200,00	0,00		
		340.673.856,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	23.063.700,00	0,00		
		22.622.434,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	33.181.900,00	0,00		
		33.019.270,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	83.423.600,00	0,00		
		82.822.152,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.140.000,00	0,00		
		10.140.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	192.130.000,00	0,00		
		192.070.000,00	0,00		
1.06	Sosial	4.257.371.610,00	0,00		
		4.142.625.111,00	0,00		
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.257.371.610,00	0,00		
		4.142.625.111,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.257.371.610,00	0,00		
		4.142.625.111,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.201.760.000,00	0,00		
		2.100.690.881,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.201.760.000,00	0,00		
		2.100.690.881,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	279.674.200,00	0,00		
		279.425.484,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	0,00		
		2.500.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.949.800,00	0,00		
		74.949.800,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	0,00		
		7.867.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.990.000,00	0,00		
		9.990.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.113.300,00	0,00		
		38.044.059,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.121.100,00	0,00		
		146.074.625,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.092.171.460,00	0,00		
		1.084.614.850,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	0,00		
		8.000.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.166.100,00	0,00		
		59.430.450,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.005.360,00	0,00		
		1.017.184.400,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.170.000,00	0,00		
		120.275.526,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.820.000,00	0,00		
		11.238.650,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000,00	0,00		
		105.686.876,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.350.000,00	0,00		
		3.350.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	87.501.900,00	0,00		
		87.398.600,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.501.900,00	0,00		
		87.398.600,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	110.899.000,00	0,00		
		110.331.970,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 01	Penyediaan Permakanan	10.640.000,00	0,00		
		10.635.800,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 03	Penyediaan Alat Bantu	5.880.000,00	0,00		
		5.880.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.000.000,00	0,00		
		2.000.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000,00	0,00		
		50.000.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	29.589.000,00	0,00		
		29.556.170,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 09		750.000,00	0,00		
		750.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 12	Pemberian Layanan Rujukan	12.040.000,00	0,00		
		11.510.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 13	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57.471.950,00	0,00		
		57.210.300,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.010.450,00	0,00		
		39.988.800,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	17.461.500,00	0,00		
		17.221.500,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	302.723.100,00	0,00		
		302.677.500,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 01	Penyediaan Makanan	299.615.100,00	0,00		
		299.569.500,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	3.108.000,00	0,00		
		3.108.000,00	0,00		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	63.198.217.049,00	2.976.792.730,00		
		60.679.473.921,98	2.948.359.325,19		
2.01	Tenaga Kerja	179.078.850,00	0,00		
		171.947.473,00	0,00		
2.01 . 3.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	179.078.850,00	0,00		
		171.947.473,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	179.078.850,00	0,00		
		171.947.473,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 16	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	117.615.250,00	0,00		
		114.139.373,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 16 . 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	117.615.250,00	0,00		
		114.139.373,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.01 . 3.08.01 . 01 . 21	<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	16.333.500,00	0,00		
		15.792.850,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 21 . 02	Pelayanan antar Kerja	16.333.500,00	0,00		
		15.792.850,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 23	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	15.273.000,00	0,00		
		14.918.300,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 23 . 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	15.273.000,00	0,00		
		14.918.300,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 26	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kahunaten /Kota</i>	13.993.350,00	0,00		
		11.510.000,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 26 . 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	13.993.350,00	0,00		
		11.510.000,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 27	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.863.750,00	0,00		
		15.586.950,00	0,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 27 . 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.863.750,00	0,00		
		15.586.950,00	0,00		
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.118.333.400,00	0,00		
		979.095.259,00	0,00		
2.02 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.118.333.400,00	0,00		
		979.095.259,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	1.118.333.400,00	0,00		
		979.095.259,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 15	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	531.680.300,00	0,00		
		523.941.431,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 15 . 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	531.680.300,00	0,00		
		523.941.431,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	90.205.000,00	0,00		
		24.462.310,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 19 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	90.205.000,00	0,00		
		24.462.310,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 26	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	96.363.450,00	0,00		
		96.260.886,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.02 . 1.06.01 . 01 . 26 . 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.363.450,00	0,00		
		96.260.886,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 27	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.439.650,00	0,00		
		150.275.450,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 27 . 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.489.650,00	0,00		
		38.295.450,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 27 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.950.000,00	0,00		
		111.980.000,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 28	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.839.000,00	0,00		
		125.944.182,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 28 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	171.839.000,00	0,00		
		125.944.182,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 29	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000,00	0,00		
		58.211.000,00	0,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 29 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000,00	0,00		
		58.211.000,00	0,00		
2.03	Pangan	4.796.028.910,00	900.000,00		
		4.687.395.358,00	900.000,00		
2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	4.796.028.910,00	900.000,00		
		4.687.395.358,00	900.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	4.796.028.910,00	900.000,00		
		4.687.395.358,00	900.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.624.092.000,00	0,00		
		2.533.996.121,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.092.000,00	0,00		
		2.533.996.121,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.293.050,00	900.000,00		
		141.191.627,00	900.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.848.000,00	0,00		
		1.845.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.015.000,00	0,00		
		16.999.900,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.552.100,00	900.000,00		
		5.547.400,00	900.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.785.000,00	0,00		
		12.785.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.629.700,00	0,00		
		8.629.652,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.463.250,00	0,00		
		95.384.675,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	869.136.760,00	0,00		
		855.240.896,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.380.000,00	0,00		
		1.380.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	0,00		
		49.626.406,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.756.760,00	0,00		
		804.234.490,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.929.000,00	0,00		
		391.645.300,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.029.000,00	0,00		
		11.929.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	0,00		
		32.816.300,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	346.900.000,00	0,00		
		346.900.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	51.600.300,00	0,00		
		51.204.850,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	14.794.750,00	0,00		
		14.705.750,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	36.805.550,00	0,00		
		36.499.100,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	592.589.650,00	0,00		
		590.947.074,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	9.321.300,00	0,00		
		9.304.850,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	583.268.350,00	0,00		
		581.642.224,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.364.550,00	0,00		
		113.166.590,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.364.550,00	0,00		
		113.166.590,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.023.600,00	0,00		
		10.002.900,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 . 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.023.600,00	0,00		
		10.002.900,00	0,00		
2.04	Pertanahan	132.863.000,00	0,00		
		128.304.200,00	0,00		
2.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	132.863.000,00	0,00		
		128.304.200,00	0,00		
2.04 . 1.04.01 . 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	132.863.000,00	0,00		
		128.304.200,00	0,00		
2.04 . 1.04.01 . 01 . 25	Penerbitan Izin Membuka Tanah	132.863.000,00	0,00		
		128.304.200,00	0,00		
2.04 . 1.04.01 . 01 . 25 . 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	132.863.000,00	0,00		
		128.304.200,00	0,00		
2.05	Lingkungan Hidup	4.159.269.260,00	87.934.250,00		
		4.023.791.875,00	79.700.000,00		
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.159.269.260,00	87.934.250,00		
		4.023.791.875,00	79.700.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.159.269.260,00	87.934.250,00		
		4.023.791.875,00	79.700.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.884.990.000,00	0,00		
		1.807.950.875,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.884.990.000,00	0,00		
		1.807.950.875,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.789.250,00	0,00		
		133.533.437,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.444.000,00	0,00		
		3.444.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.247.000,00	0,00		
		20.240.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.025.700,00	0,00		
		9.995.300,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.072.550,00	0,00		
		99.854.137,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.418.960,00	53.105.000,00		
		1.068.404.871,00	46.150.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	0,00		
		47.552.741,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.227.040,00	53.105.000,00		
		35.208.000,00	46.150.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.024.191.920,00	0,00		
		985.644.130,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.310.100,00	0,00		
		64.494.569,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.310.100,00	0,00		
		64.494.569,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	31.978.500,00	0,00		
		31.427.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	31.978.500,00	0,00		
		31.427.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	91.362.400,00	0,00		
		90.172.650,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	56.108.200,00	0,00		
		55.360.650,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	35.254.200,00	0,00		
		34.812.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	102.101.600,00	0,00		
		101.883.557,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	102.101.600,00	0,00		
		101.883.557,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21	Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.442.750,00	0,00		
		15.161.200,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.442.750,00	0,00		
		15.161.200,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.158.500,00	0,00		
		48.720.500,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	25.112.500,00	0,00		
		24.913.600,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.046.000,00	0,00		
		23.806.900,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	13.372.600,00	0,00		
		13.372.500,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	13.372.600,00	0,00		
		13.372.500,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.753.000,00	0,00		
		8.695.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27 . 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8.753.000,00	0,00		
		8.695.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 28	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.362.500,00	0,00		
		14.958.800,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 28 . 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16.362.500,00	0,00		
		14.958.800,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29	Pengelolaan Sampah	636.229.100,00	34.829.250,00		
		625.016.916,00	33.550.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	600.581.850,00	34.829.250,00		
		589.450.785,00	33.550.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	35.647.250,00	0,00		
		35.566.131,00	0,00		
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.202.302.740,00	486.150.000,00		
		4.115.864.094,00	484.806.000,00		
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.202.302.740,00	486.150.000,00		
		4.115.864.094,00	484.806.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.202.302.740,00	486.150.000,00		
		4.115.864.094,00	484.806.000,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.050.000,00	0,00		
		13.047.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.050.000,00	0,00		
		13.047.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.423.337.000,00	0,00		
		2.344.707.101,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.423.337.000,00	0,00		
		2.344.707.101,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	958.931.500,00	486.150.000,00		
		957.223.082,00	484.806.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.240.000,00	17.250.000,00		
		19.237.800,00	17.250.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	446.634.000,00	468.900.000,00		
		445.796.360,00	467.556.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.290.000,00	0,00		
		13.290.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.113.000,00	0,00		
		17.103.388,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.654.500,00	0,00		
		461.795.534,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.124.240,00	0,00		
		587.004.500,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700.000,00	0,00		
		3.674.772,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.378.000,00	0,00		
		119.004.128,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.046.240,00	0,00		
		464.325.600,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.860.000,00	0,00		
		213.882.411,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.200.000,00	0,00		
		11.177.250,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.660.000,00	0,00		
		53.033.161,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0,00		
		149.672.000,00	0,00		
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.940.891.179,00	44.100.000,00		
		8.812.691.917,00	44.100.000,00		
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.940.891.179,00	44.100.000,00		
		8.812.691.917,00	44.100.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.940.891.179,00	44.100.000,00		
		8.812.691.917,00	44.100.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.414.996.751,00	0,00		
		2.341.571.584,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.414.996.751,00	0,00		
		2.341.571.584,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	592.516.650,00	0,00		
		592.079.860,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.456.100,00	0,00		
		9.434.900,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.474.900,00	0,00		
		114.440.670,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.284.850,00	0,00		
		14.203.700,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.030.000,00	0,00		
		38.955.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.628.800,00	0,00		
		51.628.400,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.642.000,00	0,00		
		363.417.190,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.470.040,00	0,00		
		502.462.034,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.650.000,00	0,00		
		5.610.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.100.000,00	0,00		
		36.681.994,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.720.040,00	0,00		
		460.170.040,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	250.393.818,00	0,00		
		247.929.650,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.072.450,00	0,00		
		30.847.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.051.100,00	0,00		
		148.862.650,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.650.000,00	0,00		
		12.650.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.620.268,00	0,00		
		55.570.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	211.458.100,00	0,00		
		210.829.650,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	211.458.100,00	0,00		
		210.829.650,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	<i>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</i>	128.722.300,00	0,00		
		127.387.986,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	57.058.600,00	0,00		
		56.650.550,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	71.663.700,00	0,00		
		70.737.436,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	3.766.093.520,00	0,00		
		3.719.595.887,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	345.000.000,00	0,00		
		329.669.970,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.000.000,00	0,00		
		5.000.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	84.385.150,00	0,00		
		84.148.500,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3.246.755.920,00	0,00		
		3.216.122.617,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	84.952.450,00	0,00		
		84.654.800,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.072.240.000,00	44.100.000,00		
		1.070.835.266,00	44.100.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	945.800.100,00	44.100.000,00		
		945.106.066,00	44.100.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	75.093.500,00	0,00		
		74.881.050,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	51.346.400,00	0,00		
		50.848.150,00	0,00		
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.643.809.900,00	1.045.000.000,00		
		3.167.058.492,00	1.042.942.125,19		
2.08 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.643.809.900,00	1.045.000.000,00		
		3.167.058.492,00	1.042.942.125,19		
2.08 . 1.06.01 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.643.809.900,00	1.045.000.000,00		
		3.167.058.492,00	1.042.942.125,19		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 16	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115.105.000,00	0,00		
		114.286.300,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 16 . 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2.305.000,00	0,00		
		2.305.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 16 . 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	112.800.000,00	0,00		
		111.981.300,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	757.115.000,00	0,00		
		690.032.700,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	0,00		
		4.374.400,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	0,00		
		24.975.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000,00	0,00		
		70.523.300,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	171.600.000,00	0,00		
		171.600.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.500.000,00	0,00		
		379.500.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	0,00		
		39.060.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 18	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	249.600.000,00	0,00		
		249.600.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 18 . 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	249.600.000,00	0,00		
		249.600.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 19	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	356.932.600,00	1.045.000.000,00		
		324.722.950,00	1.042.942.125,19		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 19 . 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.100.000,00	0,00		
		8.034.250,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 19 . 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	333.867.900,00	0,00		
		303.224.300,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 19 . 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	6.564.700,00	1.045.000.000,00		
		5.064.400,00	1.042.942.125,19		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 19 . 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.400.000,00	0,00		
		8.400.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 20	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	465.750.000,00	0,00		
		465.480.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 20 . 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	465.750.000,00	0,00		
		465.480.000,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 21	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.699.307.300,00	0,00		
		1.322.936.542,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 21 . 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	479.572.300,00	0,00		
		457.183.092,00	0,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 21 . 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	64.995.000,00	0,00		
		64.913.450,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.08 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.154.740.000,00	0,00		
		800.840.000,00	0,00		
2.09	Perhubungan	6.474.338.970,00	260.743.480,00		
		6.039.222.029,00	255.307.480,00		
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	6.474.338.970,00	260.743.480,00		
		6.039.222.029,00	255.307.480,00		
2.09 . 2.09.01 . 01	DINAS PERHUBUNGAN	6.474.338.970,00	260.743.480,00		
		6.039.222.029,00	255.307.480,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.298.775.000,00	0,00		
		2.209.601.653,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.298.775.000,00	0,00		
		2.209.601.653,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.240.750,00	0,00		
		214.107.650,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.014.000,00	0,00		
		2.014.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.004.000,00	0,00		
		9.979.750,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.495.000,00	0,00		
		7.487.900,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.056.000,00	0,00		
		24.056.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.897.000,00	0,00		
		63.883.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.774.750,00	0,00		
		106.687.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10.500.000,00		
		0,00	10.500.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	10.500.000,00		
		0,00	10.500.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.218.670.320,00	64.320.000,00		
		2.963.775.076,00	60.920.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00		
		6.000.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.000.000,00	0,00		
		128.955.126,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000,00	64.320.000,00		
		7.300.000,00	60.920.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.072.370.320,00	0,00		
		2.821.519.950,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.408.000,00	0,00		
		272.153.150,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	0,00		
		10.762.900,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.908.000,00	0,00		
		261.390.250,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	45.353.750,00	37.048.480,00		
		45.281.350,00	36.768.480,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.638.000,00	37.048.480,00		
		25.581.550,00	36.768.480,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	19.715.750,00	0,00		
		19.699.800,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	159.590.000,00	148.875.000,00		
		159.171.950,00	147.119.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	159.590.000,00	148.875.000,00		
		159.171.950,00	147.119.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	175.301.150,00	0,00		
		175.131.200,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	175.301.150,00	0,00		
		175.131.200,00	0,00		
2.10	Komunikasi dan Informatika	6.566.530.140,00	615.000.000,00		
		6.430.241.320,00	614.501.000,00		
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.566.530.140,00	615.000.000,00		
		6.430.241.320,00	614.501.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.566.530.140,00	615.000.000,00		
		6.430.241.320,00	614.501.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.992.952.000,00	0,00		
		1.948.004.551,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.992.952.000,00	0,00		
		1.948.004.551,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.517.370,00	0,00		
		117.387.250,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.970.000,00	0,00		
		1.970.000,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.546.500,00	0,00		
		20.541.000,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.491.670,00	0,00		
		3.490.000,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.520.000,00	0,00		
		7.516.000,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.986.800,00	0,00		
		13.963.200,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.002.400,00	0,00		
		69.907.050,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.148.620,00	0,00		
		1.295.517.832,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00		
		2.000.000,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	703.081.900,00	0,00		
		701.422.422,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.800.000,00	0,00		
		4.800.000,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.266.720,00	0,00		
		587.295.410,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.244.250,00	0,00		
		53.843.200,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.244.250,00	0,00		
		53.843.200,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.098.667.900,00	615.000.000,00		
		3.015.488.487,00	614.501.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	877.981.300,00	0,00		
		803.873.872,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06	Pelayanan Informasi Publik	198.843.000,00	435.000.000,00		
		197.549.292,00	434.576.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07	Layanan Hubungan Media	1.569.258.400,00	0,00		
		1.564.774.317,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	69.998.400,00	0,00		
		69.934.775,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	232.544.000,00	0,00		
		229.566.731,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.042.800,00	180.000.000,00		
		149.789.500,00	179.925.000,00		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.793.633.330,00	0,00		
		3.683.437.594,00	0,00		
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	3.793.633.330,00	0,00		
		3.683.437.594,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	3.793.633.330,00	0,00		
		3.683.437.594,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.910.086.000,00	0,00		
		1.848.577.565,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.910.086.000,00	0,00		
		1.848.577.565,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	256.601.650,00	0,00		
		255.745.160,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.003.000,00	0,00		
		3.003.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.950.000,00	0,00		
		14.189.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.001.700,00	0,00		
		14.984.900,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	0,00		
		14.948.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.007.000,00	0,00		
		16.007.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.639.950,00	0,00		
		192.613.260,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	977.240.080,00	0,00		
		947.856.119,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00		
		6.000.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000,00	0,00		
		215.668.149,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	746.240.080,00	0,00		
		726.187.970,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	83.700.000,00	0,00		
		83.465.950,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	0,00		
		9.987.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.000.000,00	0,00		
		60.778.950,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.700.000,00	0,00		
		12.700.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	42.317.600,00	0,00		
		42.222.650,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.317.600,00	0,00		
		42.222.650,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	174.545.000,00	0,00		
		158.612.500,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	174.545.000,00	0,00		
		158.612.500,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	349.143.000,00	0,00		
		346.957.650,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	119.488.000,00	0,00		
		118.060.750,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	229.655.000,00	0,00		
		228.896.900,00	0,00		
2.12	Penanaman Modal	4.266.575.258,00	181.350.000,00		
		4.186.259.611,00	180.306.700,00		
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.266.575.258,00	181.350.000,00		
		4.186.259.611,00	180.306.700,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2.12.01 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.266.575.258,00	181.350.000,00		
		4.186.259.611,00	180.306.700,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.798.767.000,00	0,00		
		1.739.019.989,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.798.767.000,00	0,00		
		1.739.019.989,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	539.976.750,00	0,00		
		539.831.295,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.158.500,00	0,00		
		8.158.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.985.500,00	0,00		
		78.968.500,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.823.200,00	0,00		
		18.813.200,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.988.000,00	0,00		
		29.972.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.807.700,00	0,00		
		24.807.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.213.850,00	0,00		
		379.112.595,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0,00	181.350.000,00		
		0,00	180.306.700,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	20.000.000,00		
		0,00	20.000.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	161.350.000,00		
		0,00	160.306.700,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	580.086.240,00	0,00		
		575.470.869,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	0,00		
		4.500.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.020.000,00	0,00		
		99.744.949,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.566.240,00	0,00		
		471.225.920,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.750.000,00	0,00		
		56.731.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.250.000,00	0,00		
		18.237.500,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.000.000,00	0,00		
		22.993.500,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.500.000,00	0,00		
		15.500.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.098.900,00	0,00		
		178.640.806,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	190.098.900,00	0,00		
		178.640.806,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.411.350,00	0,00		
		50.075.300,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50.411.350,00	0,00		
		50.075.300,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	588.994.650,00	0,00		
		585.693.852,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	588.994.650,00	0,00		
		585.693.852,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	74.239.368,00	0,00		
		74.016.450,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60.072.100,00	0,00		
		60.021.750,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	14.167.268,00	0,00		
		13.994.700,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	360.216.000,00	0,00		
		359.998.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	258.460.000,00	0,00		
		258.336.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101.756.000,00	0,00		
		101.662.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.035.000,00	0,00		
		26.782.050,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	27.035.000,00	0,00		
		26.782.050,00	0,00		
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.584.710.550,00	2.200.000,00		
		2.529.070.046,00	2.200.000,00		
2.13 . 2.13.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.584.710.550,00	2.200.000,00		
		2.529.070.046,00	2.200.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.584.710.550,00	2.200.000,00		
		2.529.070.046,00	2.200.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.007.343.800,00	0,00		
		992.110.146,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	160.874.750,00	0,00		
		158.996.800,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	242.450.000,00	0,00		
		233.708.000,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	604.019.050,00	0,00		
		599.405.346,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	597.692.900,00	0,00		
		591.432.300,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	597.692.900,00	0,00		
		591.432.300,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.032.250,00	0,00		
		231.374.800,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	242.032.250,00	0,00		
		231.374.800,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	602.971.900,00	0,00		
		580.034.300,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	602.971.900,00	0,00		
		580.034.300,00	0,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 22	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	134.669.700,00	2.200.000,00		
		134.118.500,00	2.200.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 22 . 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	134.669.700,00	2.200.000,00		
		134.118.500,00	2.200.000,00		
2.14	Statistik	110.181.000,00	0,00		
		110.090.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	110.181.000,00	0,00		
		110.090.000,00	0,00		
2.14 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	110.181.000,00	0,00		
		110.090.000,00	0,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	110.181.000,00	0,00		
		110.090.000,00	0,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	110.181.000,00	0,00		
		110.090.000,00	0,00		
2.15	Persandian	40.012.200,00	0,00		
		39.603.000,00	0,00		
2.15 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.012.200,00	0,00		
		39.603.000,00	0,00		
2.15 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.012.200,00	0,00		
		39.603.000,00	0,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	20.056.200,00	0,00		
		19.950.000,00	0,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.056.200,00	0,00		
		19.950.000,00	0,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 16	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	19.956.000,00	0,00		
		19.653.000,00	0,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.956.000,00	0,00		
		19.653.000,00	0,00		
2.16	Kebudayaan	8.866.340.032,00	135.480.000,00		
		8.495.087.643,98	134.565.020,00		
2.16 . 2.13.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.866.340.032,00	135.480.000,00		
		8.495.087.643,98	134.565.020,00		
2.16 . 2.13.01 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.866.340.032,00	135.480.000,00		
		8.495.087.643,98	134.565.020,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	28.610.000,00	0,00		
		28.526.300,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.610.000,00	0,00		
		28.526.300,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.218.211.000,00	0,00		
		2.053.836.347,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.218.211.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.053.836.347,00	0,00		
		344.241.900,00	132.880.000,00		
		344.002.682,00	132.059.020,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.850.000,00	0,00		
		2.850.000,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.118.500,00	131.310.000,00		
		62.118.500,00	130.489.020,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.577.000,00	1.570.000,00		
		48.577.000,00	1.570.000,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.225.000,00	0,00		
		13.225.000,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.125.000,00	0,00		
		18.064.900,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.346.400,00	0,00		
		199.167.282,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.075.080,00	0,00		
		899.004.417,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.400.000,00	0,00		
		127.562.147,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.200.000,00	0,00		
		10.130.000,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	795.475.080,00	0,00		
		761.312.270,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.198.600,00	0,00		
		78.992.080,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000,00	0,00		
		9.990.000,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000,00	0,00		
		28.838.300,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.198.600,00	0,00		
		40.163.780,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.956.942.196,00	0,00		
		2.875.344.239,98	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 15 . 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.956.942.196,00	0,00		
		2.875.344.239,98	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2.13.01 . 01 . 17	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	747.482.500,00	0,00		
		695.623.410,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 17 . 01		747.482.500,00	0,00		
		695.623.410,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.439.811.456,00	2.600.000,00		
		1.416.051.368,00	2.506.000,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 18 . 01		1.084.757.456,00	2.600.000,00		
		1.063.545.368,00	2.506.000,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 18 . 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	355.054.000,00	0,00		
		352.506.000,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 20	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	104.767.300,00	0,00		
		103.706.800,00	0,00		
2.16 . 2.13.01 . 01 . 20 . 01		104.767.300,00	0,00		
		103.706.800,00	0,00		
2.17	Perpustakaan	3.240.349.680,00	117.935.000,00		
		2.997.817.676,00	109.031.000,00		
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.240.349.680,00	117.935.000,00		
		2.997.817.676,00	109.031.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.240.349.680,00	117.935.000,00		
		2.997.817.676,00	109.031.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.433.596.000,00	0,00		
		2.203.059.390,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.433.596.000,00	0,00		
		2.203.059.390,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.986.700,00	0,00		
		224.598.008,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.510.800,00	0,00		
		2.450.800,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.311.000,00	0,00		
		36.485.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.034.400,00	0,00		
		8.858.600,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.250.000,00	0,00		
		23.120.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.834.500,00	0,00		
		9.833.400,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.046.000,00	0,00		
		143.850.208,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	102.935.000,00		
		0,00	94.831.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	52.500.000,00		
		0,00	46.848.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	50.435.000,00		
		0,00	47.983.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.524.080,00	0,00		
		382.233.178,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	0,00		
		1.550.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.020.000,00	0,00		
		30.457.118,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.704.080,00	0,00		
		350.226.060,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.250.000,00	0,00		
		118.278.550,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.500.000,00	0,00		
		14.346.500,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.100.000,00	0,00		
		47.432.050,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.650.000,00	0,00		
		6.500.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00		
		50.000.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.415.950,00	15.000.000,00		
		53.273.250,00	14.200.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.516.000,00	15.000.000,00		
		5.444.000,00	14.200.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	42.899.950,00	0,00		
		42.829.250,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 08	Pengembangan Bahan Pustaka	5.000.000,00	0,00		
		5.000.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16	<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	16.576.950,00	0,00		
		16.375.300,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	16.576.950,00	0,00		
		16.375.300,00	0,00		
2.18	Kearsipan	82.968.650,00	0,00		
		82.496.334,00	0,00		
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	82.968.650,00	0,00		
		82.496.334,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	82.968.650,00	0,00		
		82.496.334,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>	82.968.650,00	0,00		
		82.496.334,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	34.521.150,00	0,00		
		34.331.350,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	27.090.000,00	0,00		
		26.992.684,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21.357.500,00	0,00		
		21.172.300,00	0,00		
3	Urusan Pilihan	25.279.548.655,00	197.968.720,00		
		24.781.810.002,52	196.141.915,05		
3.01	Kelautan dan Perikanan	595.942.800,00	0,00		
		563.112.900,00	0,00		
3.01 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	595.942.800,00	0,00		
		563.112.900,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	595.942.800,00	0,00		
		563.112.900,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	519.661.300,00	0,00		
		487.259.200,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	289.688.450,00	0,00		
		257.540.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.972.850,00	0,00		
		229.719.200,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 25	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	13.553.000,00	0,00		
		13.371.450,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 25 . 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	13.553.000,00	0,00		
		13.371.450,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 28	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	62.728.500,00	0,00		
		62.482.250,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 28 . 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.728.500,00	0,00		
		62.482.250,00	0,00		
3.02	Pariwisata	392.775.000,00	0,00		
		388.051.071,00	0,00		
3.02 . 2.13.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	392.775.000,00	0,00		
		388.051.071,00	0,00		
3.02 . 2.13.01 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	392.775.000,00	0,00		
		388.051.071,00	0,00		
3.02 . 2.13.01 . 01 . 15	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	110.257.250,00	0,00		
		109.205.158,00	0,00		
3.02 . 2.13.01 . 01 . 15 . 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	110.257.250,00	0,00		
		109.205.158,00	0,00		
3.02 . 2.13.01 . 01 . 19	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	226.641.000,00	0,00		
		225.708.013,00	0,00		
3.02 . 2.13.01 . 01 . 19 . 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	226.641.000,00	0,00		
		225.708.013,00	0,00		
3.02 . 2.13.01 . 01 . 22	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	55.876.750,00	0,00		
		53.137.900,00	0,00		
3.02 . 2.13.01 . 01 . 22 . 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	55.876.750,00	0,00		
		53.137.900,00	0,00		
3.03	Pertanian	19.843.867.770,00	167.840.720,00		
		19.501.820.846,52	167.513.915,05		
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	19.843.867.770,00	167.840.720,00		
		19.501.820.846,52	167.513.915,05		
3.03 . 3.03.01 . 01	DINAS PERTANIAN	19.843.867.770,00	167.840.720,00		
		19.501.820.846,52	167.513.915,05		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.311.138.000,00	0,00		
		11.051.040.452,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.311.138.000,00	0,00		
		11.051.040.452,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.018.880,00	0,00		
		287.847.420,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.414.480,00	0,00		
		28.414.480,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.490.000,00	0,00		
		17.490.000,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.610.400,00	0,00		
		22.610.400,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.504.000,00	0,00		
		219.332.540,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.641.145.400,00	0,00		
		1.622.150.096,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.450.000,00	0,00		
		55.696.006,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.582.695.400,00	0,00		
		1.566.454.090,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000,00	0,00		
		314.151.770,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	0,00		
		16.295.606,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.500.000,00	0,00		
		297.856.164,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	388.645.000,00	16.245.000,00		
		374.932.990,00	16.245.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	226.955.000,00	16.245.000,00		
		220.812.590,00	16.245.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	161.690.000,00	0,00		
		154.120.400,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.479.739.250,00	0,00		
		1.473.228.216,91	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	59.292.000,00	0,00		
		54.534.900,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	219.245.000,00	0,00		
		217.856.000,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.201.202.250,00	0,00		
		1.200.837.316,91	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	146.565.100,00	0,00		
		145.068.850,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	146.565.100,00	0,00		
		145.068.850,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21	Pengembangan Prasarana Pertanian	291.393.950,00	0,00		
		288.938.413,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	291.393.950,00	0,00		
		288.938.413,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.940.524.650,00	0,00		
		2.923.206.302,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	173.270.000,00	0,00		
		173.082.000,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.767.254.650,00	0,00		
		2.750.124.302,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	361.382.300,00	0,00		
		360.189.558,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	361.382.300,00	0,00		
		360.189.558,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 30	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	67.968.500,00	0,00		
		53.750.300,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 30 . 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	57.783.000,00	0,00		
		43.815.750,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 30 . 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.185.500,00	0,00		
		9.934.550,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	607.346.740,00	151.595.720,00		
		607.316.478,61	151.268.915,05		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	607.346.740,00	151.595.720,00		
		607.316.478,61	151.268.915,05		
3.06	Perdagangan	149.923.325,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.06 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	147.415.142,00	0,00		
		149.923.325,00	0,00		
		147.415.142,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	149.923.325,00	0,00		
		147.415.142,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 22	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36.108.500,00	0,00		
		36.026.513,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 22 . 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36.108.500,00	0,00		
		36.026.513,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 25	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	23.463.910,00	0,00		
		23.221.300,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 25 . 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	23.463.910,00	0,00		
		23.221.300,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 28	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	90.350.915,00	0,00		
		88.167.329,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 28 . 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.955.605,00	0,00		
		59.169.979,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 28 . 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	29.395.310,00	0,00		
		28.997.350,00	0,00		
3.07	Perindustrian	883.398.800,00	0,00		
		845.309.000,00	0,00		
3.07 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	883.398.800,00	0,00		
		845.309.000,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	883.398.800,00	0,00		
		845.309.000,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	863.753.850,00	0,00		
		825.678.450,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 . 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	195.845.000,00	0,00		
		168.354.850,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 . 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	667.908.850,00	0,00		
		657.323.600,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	19.644.950,00	0,00		
		19.630.550,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	19.644.950,00	0,00		
		19.630.550,00	0,00		
3.08	Transmigrasi	3.413.640.960,00	30.128.000,00		
		3.336.101.043,00	28.628.000,00		
3.08 . 3.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.413.640.960,00	30.128.000,00		
		3.336.101.043,00	28.628.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.413.640.960,00	30.128.000,00		
		3.336.101.043,00	28.628.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.398.000,00	0,00		
		3.390.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.398.000,00	0,00		
		3.390.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.561.290.000,00	0,00		
		2.498.824.380,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.561.290.000,00	0,00		
		2.498.824.380,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.382.150,00	0,00		
		160.981.463,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.008.500,00	0,00		
		2.988.500,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.283.900,00	0,00		
		35.232.100,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.750.000,00	0,00		
		9.730.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.339.750,00	0,00		
		113.030.863,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.872.000,00	30.128.000,00		
		28.810.100,00	28.628.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	19.000.000,00		
		0,00	17.500.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.872.000,00	11.128.000,00		
		28.810.100,00	11.128.000,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	608.243.810,00	0,00		
		596.743.450,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08 . 02		48.031.850,00	0,00		
		43.621.490,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08 . 04		560.211.960,00	0,00		
		553.121.960,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09		50.455.000,00	0,00		
		47.351.650,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 01		4.125.000,00	0,00		
		2.633.650,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 02		41.500.000,00	0,00		
		39.909.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 06		4.830.000,00	0,00		
		4.809.000,00	0,00		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	246.033.579.351,00	9.978.380.000,00		
		192.915.883.335,29	9.828.836.885,00		
4.01		38.315.739.766,00	7.924.395.000,00		
		37.995.407.887,29	7.824.454.500,00		
4.01 . 4.01.01		38.315.739.766,00	7.924.395.000,00		
		37.995.407.887,29	7.824.454.500,00		
4.01 . 4.01.01 . 01		38.315.739.766,00	7.924.395.000,00		
		37.995.407.887,29	7.824.454.500,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02		6.828.467.000,00	0,00		
		6.644.092.264,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 01		6.828.467.000,00	0,00		
		6.644.092.264,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03		235.000.000,00	0,00		
		234.902.225,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 02		235.000.000,00	0,00		
		234.902.225,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	5.252.964.060,00	0,00		
		5.252.933.166,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 01		163.910.000,00	0,00		
		163.901.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.944.310,00	0,00		
		498.938.320,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.062.850,00	0,00		
		25.062.850,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.601.776.000,00	0,00		
		2.601.775.050,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.100.900,00	0,00		
		91.095.600,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.872.170.000,00	0,00		
		1.872.160.346,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	7.385.945.000,00		
		0,00	7.292.745.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	4.700.920.000,00		
		0,00	4.607.720.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	2.685.025.000,00		
		0,00	2.685.025.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.273.651.880,00	0,00		
		7.273.012.880,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.600.000,00	0,00		
		17.600.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.026.000.000,00	0,00		
		1.025.992.300,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.106.500.000,00	0,00		
		2.106.490.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.123.551.880,00	0,00		
		4.122.930.580,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.752.828.300,00	0,00		
		5.752.755.356,06	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	341.025.000,00	0,00		
		341.021.677,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.458.885.000,00	0,00		
		1.458.882.109,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.550.000,00	0,00		
		186.487.500,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.766.368.300,00	0,00		
		3.766.364.070,06	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.078.349.000,00	0,00		
		1.047.356.922,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	167.389.000,00	0,00		
		136.408.722,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	437.630.000,00	0,00		
		437.618.200,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	0,00		
		100.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	373.330.000,00	0,00		
		373.330.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	59.203.000,00	364.600.000,00		
		59.203.000,00	358.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	39.179.000,00	364.600.000,00		
		39.179.000,00	358.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	20.024.000,00	0,00		
		20.024.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17	Penataan Organisasi	260.000.042,00	0,00		
		259.895.630,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	122.327.218,00	0,00		
		122.310.608,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	54.305.708,00	0,00		
		54.239.700,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	83.367.116,00	0,00		
		83.345.322,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.316.198.650,00	0,00		
		3.316.044.467,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 01	Fasilitasi Keprotokolan	3.256.478.450,00	0,00		
		3.256.414.267,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	59.720.200,00	0,00		
		59.630.200,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19	Administrasi Tata Pemerintahan	547.134.000,00	0,00		
		546.967.865,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	60.880.500,00	0,00		
		60.784.490,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	398.384.000,00	0,00		
		398.349.997,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	87.869.500,00	0,00		
		87.833.378,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	6.321.450.000,00	165.000.000,00		
		6.218.168.094,23	164.859.500,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.115.793.000,00	165.000.000,00		
		6.012.536.894,23	164.859.500,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	97.336.400,00	0,00		
		97.336.400,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	108.320.600,00	0,00		
		108.294.800,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	506.055.800,00	8.850.000,00		
		505.989.138,00	8.850.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	223.935.800,00	8.850.000,00		
		223.935.767,00	8.850.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	220.536.000,00	0,00		
		220.535.919,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	61.584.000,00	0,00		
		61.517.452,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	37.396.270,00	0,00		
		37.385.355,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22 . 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	37.396.270,00	0,00		
		37.385.355,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	157.351.150,00	0,00		
		157.324.001,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	25.631.150,00	0,00		
		25.622.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	50.617.300,00	0,00		
		50.617.300,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	81.102.700,00	0,00		
		81.084.701,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	180.976.650,00	0,00		
		180.820.950,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	48.641.000,00	0,00		
		48.549.500,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	80.167.650,00	0,00		
		80.105.450,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.168.000,00	0,00		
		52.166.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	432.173.064,00	0,00		
		432.032.371,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	287.068.226,00	0,00		
		286.950.620,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	97.226.742,00	0,00		
		97.220.527,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	47.878.096,00	0,00		
		47.861.224,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	76.540.900,00	0,00		
		76.524.203,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	8.504.000,00	0,00		
		8.488.750,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	39.564.100,00	0,00		
		39.562.653,00	0,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	28.472.800,00	0,00		
		28.472.800,00	0,00		
4.02	Pengawasan	6.991.334.550,00	627.990.000,00		
		6.820.675.558,00	606.635.909,00		
4.02 . 4.01.06	INSPEKTORAT KABUPATEN	6.991.334.550,00	627.990.000,00		
		6.820.675.558,00	606.635.909,00		
4.02 . 4.01.06 . 01	INSPEKTORAT KABUPATEN	6.991.334.550,00	627.990.000,00		
		6.820.675.558,00	606.635.909,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	185.050.000,00	0,00		
		184.869.604,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185.050.000,00	0,00		
		184.869.604,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4.01.06 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.470.107.000,00	0,00		
		3.381.508.642,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.470.107.000,00	0,00		
		3.381.508.642,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	324.217.150,00	0,00		
		322.267.566,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	324.217.150,00	0,00		
		322.267.566,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.288.250,00	215.990.000,00		
		581.217.080,00	201.672.959,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.262.000,00	0,00		
		15.192.000,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.836.250,00	215.990.000,00		
		129.601.152,00	201.672.959,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	0,00		
		74.930.000,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.840.000,00	0,00		
		45.836.000,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	0,00		
		1.520.000,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.850.000,00	0,00		
		314.137.928,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	412.000.000,00		
		0,00	404.962.950,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	400.000.000,00		
		0,00	392.962.950,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	12.000.000,00		
		0,00	12.000.000,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.318.600,00	0,00		
		452.305.371,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.900.000,00	0,00		
		5.900.000,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.000,00	0,00		
		94.546.771,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.350.000,00	0,00		
		46.350.000,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.068.600,00	0,00		
		305.508.600,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.830.400,00	0,00		
		230.173.633,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.000.000,00	0,00		
		6.963.950,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.000.000,00	0,00		
		92.867.133,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.830.400,00	0,00		
		130.342.550,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	729.974.550,00	0,00		
		721.357.450,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	107.510.000,00	0,00		
		106.061.250,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	122.645.000,00	0,00		
		122.292.000,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 03	Reviu Laporan Kinerja	60.897.500,00	0,00		
		60.552.250,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 04	Reviu Laporan Keuangan	103.579.200,00	0,00		
		103.076.750,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 05	Pengawasan Desa	132.532.850,00	0,00		
		130.119.250,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 06	Kerjasama Pengawasan Internal	133.732.000,00	0,00		
		133.084.700,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	69.078.000,00	0,00		
		66.171.250,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 16	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	43.207.500,00	0,00		
		40.492.250,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	43.207.500,00	0,00		
		40.492.250,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 17	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	155.343.600,00	0,00		
		154.415.865,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4.01.06 . 01 . 17 . 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	155.343.600,00	0,00		
		154.415.865,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	768.997.500,00	0,00		
		752.068.097,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	404.307.500,00	0,00		
		390.790.456,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	107.305.000,00	0,00		
		107.006.456,00	0,00		
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	257.385.000,00	0,00		
		254.271.185,00	0,00		
4.03	Perencanaan	4.696.048.360,00	292.700.000,00		
		4.559.926.164,00	292.551.351,00		
4.03 . 4.01.03	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.696.048.360,00	292.700.000,00		
		4.559.926.164,00	292.551.351,00		
4.03 . 4.01.03 . 01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.696.048.360,00	292.700.000,00		
		4.559.926.164,00	292.551.351,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.072.952.000,00	0,00		
		2.018.357.971,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.072.952.000,00	0,00		
		2.018.357.971,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	439.552.810,00	13.500.000,00		
		438.863.533,00	13.351.351,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.136.000,00	0,00		
		3.124.000,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.070.210,00	13.500.000,00		
		67.040.210,00	13.351.351,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.775.000,00	0,00		
		18.561.900,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.020.000,00	0,00		
		28.008.000,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.924.600,00	0,00		
		26.924.600,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.627.000,00	0,00		
		295.204.823,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.03 . 01 . 07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0,00	279.200.000,00		
		0,00	279.200.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 07 . 02		0,00	279.200.000,00		
		0,00	279.200.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	564.757.400,00	0,00		
		531.413.338,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 01		5.000.000,00	0,00		
		5.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.008.560,00	0,00		
		78.036.118,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.100.000,00	0,00		
		11.100.000,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.648.840,00	0,00		
		437.277.220,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	163.700.000,00	0,00		
		160.524.571,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	0,00		
		16.260.166,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.200.000,00	0,00		
		24.472.149,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	0,00		
		119.792.256,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	514.806.500,00	0,00		
		506.856.246,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	105.585.850,00	0,00		
		105.577.110,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	409.220.650,00	0,00		
		401.279.136,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	31.096.900,00	0,00		
		29.907.050,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	31.096.900,00	0,00		
		29.907.050,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 17	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	20.669.900,00	0,00		
		19.253.798,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.03 . 01 . 17 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20.669.900,00	0,00		
		19.253.798,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	131.632.250,00	0,00		
		130.665.751,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18 . 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.376.000,00	0,00		
		47.869.000,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18 . 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.256.250,00	0,00		
		82.796.751,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	51.704.650,00	0,00		
		48.023.668,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.707.000,00	0,00		
		29.439.968,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.997.650,00	0,00		
		18.583.700,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	705.175.950,00	0,00		
		676.060.238,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.252.950,00	0,00		
		24.483.306,00	0,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	679.923.000,00	0,00		
		651.576.932,00	0,00		
4.04	Keuangan	123.887.111.627,00	719.410.000,00		
		74.882.359.999,00	706.079.000,00		
4.04 . 4.01.04	BADAN KEUANGAN DAERAH	123.887.111.627,00	719.410.000,00		
		74.882.359.999,00	706.079.000,00		
4.04 . 4.01.04 . 01	BADAN KEUANGAN DAERAH	123.887.111.627,00	719.410.000,00		
		74.882.359.999,00	706.079.000,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.413.905.974,00	0,00		
		5.089.809.306,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.413.905.974,00	0,00		
		5.089.809.306,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00		
		18.178.864,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	0,00		
		18.178.864,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	968.030.900,00	0,00		
		967.366.324,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01		22.730.000,00	0,00		
		22.702.000,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02		134.041.500,00	0,00		
		134.018.938,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 03		202.991.900,00	0,00		
		202.900.400,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04		103.595.000,00	0,00		
		103.555.500,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05		186.649.500,00	0,00		
		186.649.300,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 09		318.023.000,00	0,00		
		317.540.186,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07		0,00	283.910.000,00		
		0,00	274.930.000,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	40.000.000,00		
		0,00	34.400.000,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 06		0,00	243.910.000,00		
		0,00	240.530.000,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.077.986.240,00	0,00		
		1.045.772.682,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 01		22.000.000,00	0,00		
		21.687.600,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 02		267.600.000,00	0,00		
		248.846.642,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 03		161.630.000,00	0,00		
		160.562.200,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 04		626.756.240,00	0,00		
		614.676.240,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09		102.700.000,00	0,00		
		84.028.557,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 01		11.500.000,00	0,00		
		9.960.757,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.200.000,00	0,00		
		53.122.800,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.000.000,00	0,00		
		20.945.000,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.744.163.150,00	0,00		
		1.700.453.800,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	256.559.400,00	0,00		
		255.833.450,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	188.835.750,00	0,00		
		187.796.250,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	406.450.000,00	0,00		
		399.560.700,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	892.318.000,00	0,00		
		857.263.400,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	438.069.000,00	0,00		
		420.902.579,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	40.801.000,00	0,00		
		37.594.400,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	397.268.000,00	0,00		
		383.308.179,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	422.775.900,00	0,00		
		422.289.033,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	73.127.250,00	0,00		
		73.099.818,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	93.825.000,00	0,00		
		93.810.050,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	189.773.650,00	0,00		
		189.685.165,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	34.393.500,00	0,00		
		34.313.000,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	31.656.500,00	0,00		
		31.381.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	0,00	0,00	450.000.000,00	110.640.401.813,00
		0,00	0,00	369.162.297,00	110.050.724.476,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08		0,00	0,00		110.640.401.813,00
		0,00	0,00		110.050.724.476,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	450.000.000,00	
		0,00	0,00	369.162.297,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19	<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	259.829.000,00	435.500.000,00		
		258.208.675,00	431.149.000,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19 . 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	259.829.000,00	435.500.000,00		
		258.208.675,00	431.149.000,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	591.991.500,00	0,00		
		579.045.691,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01	Penyusunan Standar Harga	221.745.000,00	0,00		
		219.173.450,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	58.724.000,00	0,00		
		57.675.400,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	162.641.050,00	0,00		
		161.523.820,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	148.881.450,00	0,00		
		140.673.021,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	756.788.150,00	0,00		
		752.339.875,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	460.980.000,00	0,00		
		457.728.000,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	47.777.500,00	0,00		
		47.561.300,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	59.893.250,00	0,00		
		59.743.750,00	0,00		
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	188.137.400,00	0,00		
		187.306.825,00	0,00		
4.05	Kepegawaian	4.865.480.612,00	160.300.000,00		
		4.691.912.389,00	148.210.000,00		
4.05 . 4.01.05	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.865.480.612,00	160.300.000,00		
		4.691.912.389,00	148.210.000,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.05 . 4.01.05 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.865.480.612,00	160.300.000,00		
		4.691.912.389,00	148.210.000,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.877.246.000,00	0,00		
		2.797.080.734,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.877.246.000,00	0,00		
		2.797.080.734,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	268.855.640,00	160.300.000,00		
		267.632.412,00	148.210.000,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.834.000,00	0,00		
		2.834.000,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.037.840,00	160.300.000,00		
		46.037.600,00	148.210.000,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.235.000,00	0,00		
		18.232.000,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.735.400,00	0,00		
		18.735.400,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.013.400,00	0,00		
		181.793.412,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	367.421.072,00	0,00		
		358.713.935,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.978.192,00	0,00		
		43.557.055,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.442.880,00	0,00		
		315.156.880,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	36.530.000,00	0,00		
		36.409.050,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.230.000,00	0,00		
		11.229.750,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.700.000,00	0,00		
		17.579.300,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.600.000,00	0,00		
		7.600.000,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	386.320.250,00	0,00		
		382.891.801,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	28.139.350,00	0,00		
		27.801.204,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	237.542.650,00	0,00		
		235.919.707,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	40.497.750,00	0,00		
		39.882.359,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.136.000,00	0,00		
		52.005.478,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	28.004.500,00	0,00		
		27.283.053,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 16	Mutasi dan Promosi ASN	112.896.600,00	0,00		
		109.773.300,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 16 . 01	Pengelolaan Mutasi ASN	40.304.850,00	0,00		
		39.566.850,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 16 . 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	72.591.750,00	0,00		
		70.206.450,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17	Pengembangan Kompetensi ASN	639.287.350,00	0,00		
		563.537.315,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	26.509.250,00	0,00		
		26.459.050,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 02	Pengelolaan Assessment Center	234.404.100,00	0,00		
		187.022.000,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	375.714.000,00	0,00		
		347.566.265,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.660.000,00	0,00		
		2.490.000,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	176.923.700,00	0,00		
		175.873.842,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.972.000,00	0,00		
		17.906.438,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	119.962.200,00	0,00		
		119.801.704,00	0,00		
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	38.989.500,00	0,00		
		38.165.700,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	941.506.100,00	0,00		
		882.685.022,00	0,00		
4.06 . 4.01.05	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	941.506.100,00	0,00		
		882.685.022,00	0,00		
4.06 . 4.01.05 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	941.506.100,00	0,00		
		882.685.022,00	0,00		
4.06 . 4.01.05 . 01 . 15	Pengembangan Kompetensi Teknis	12.643.000,00	0,00		
		10.526.800,00	0,00		
4.06 . 4.01.05 . 01 . 15 . 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	12.643.000,00	0,00		
		10.526.800,00	0,00		
4.06 . 4.01.05 . 01 . 16	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	928.863.100,00	0,00		
		872.158.222,00	0,00		
4.06 . 4.01.05 . 01 . 16 . 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	928.863.100,00	0,00		
		872.158.222,00	0,00		
4.07	Penelitian dan Pengembangan	334.356.000,00	0,00		
		324.821.300,00	0,00		
4.07 . 4.01.03	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	334.356.000,00	0,00		
		324.821.300,00	0,00		
4.07 . 4.01.03 . 01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	334.356.000,00	0,00		
		324.821.300,00	0,00		
4.07 . 4.01.03 . 01 . 18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	334.356.000,00	0,00		
		324.821.300,00	0,00		
4.07 . 4.01.03 . 01 . 18 . 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	334.356.000,00	0,00		
		324.821.300,00	0,00		
4.08	Sekretariat DPRD	46.127.650.605,00	130.300.000,00		
		43.496.535.804,00	127.705.000,00		
4.08 . 4.01.02	SEKRETARIAT DPRD	46.127.650.605,00	130.300.000,00		
		43.496.535.804,00	127.705.000,00		
4.08 . 4.01.02 . 01	SEKRETARIAT DPRD	46.127.650.605,00	130.300.000,00		
		43.496.535.804,00	127.705.000,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.527.215.000,00	0,00		
		1.481.628.312,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.527.215.000,00	0,00		
		1.481.628.312,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.035.000,00	0,00		
		453.563.250,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	346.500.000,00	0,00		
		345.018.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153.535.000,00	0,00		
		108.545.250,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.020.469.085,00	130.300.000,00		
		949.636.650,00	127.705.000,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.770.000,00	0,00		
		19.770.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.569.900,00	130.300.000,00		
		209.563.400,00	127.705.000,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	156.719.185,00	0,00		
		133.835.100,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.420.000,00	0,00		
		88.260.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	152.215.000,00	0,00		
		138.785.800,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.775.000,00	0,00		
		359.422.350,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.098.883.520,00	0,00		
		1.925.437.616,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000,00	0,00		
		18.000.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.000.000,00	0,00		
		276.364.456,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.385.000,00	0,00		
		262.700.950,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.457.498.520,00	0,00		
		1.368.372.210,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.217.500,00	0,00		
		311.959.204,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	221.217.500,00	0,00		
		195.994.804,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	0,00		
		41.172.400,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	0,00		
		74.792.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.477.846.500,00	0,00		
		7.094.236.627,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7.117.246.500,00	0,00		
		6.741.136.627,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	360.600.000,00	0,00		
		353.100.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.510.143.000,00	0,00		
		2.440.885.915,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 02	Pendalaman Tugas DPRD	2.138.143.000,00	0,00		
		2.083.885.915,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	372.000.000,00	0,00		
		357.000.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	18.246.253.000,00	0,00		
		16.761.049.775,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	17.759.568.000,00	0,00		
		16.456.889.775,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 03	Pelaksanaan Reses	486.685.000,00	0,00		
		304.160.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21	Pembahasan Kerja Sama Daerah	683.685.000,00	0,00		
		675.728.750,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	683.685.000,00	0,00		
		675.728.750,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150	Layanan Administrasi DPRD	179.660.000,00	0,00		
		151.760.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150 . 153	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	179.660.000,00	0,00		
		151.760.000,00	0,00		
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.532.243.000,00	0,00		
		11.250.649.705,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151 . 151	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.532.243.000,00	0,00		
		11.250.649.705,00	0,00		
4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	17.248.673.711,00	93.850.000,00		
		16.694.116.923,00	93.766.125,00		
4.11 . 4.01.07	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	2.061.138.347,00	0,00		
		1.995.519.985,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	2.061.138.347,00	0,00		
		1.995.519.985,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.624.432.000,00	0,00		
		1.568.566.110,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.432.000,00	0,00		
		1.568.566.110,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.852.207,00	0,00		
		119.235.297,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.958.707,00	0,00		
		1.958.707,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.442.000,00	0,00		
		16.294.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.265.400,00	0,00		
		4.265.400,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.604.000,00	0,00		
		33.556.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.508.100,00	0,00		
		2.508.100,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.074.000,00	0,00		
		60.653.090,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.587.640,00	0,00		
		209.523.578,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00		
		1.000.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	0,00		
		5.541.178,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.387.640,00	0,00		
		202.982.400,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	89.106.500,00	0,00		
		87.335.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.986.500,00	0,00		
		10.851.500,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.720.000,00	0,00		
		2.083.500,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000,00	0,00		
		4.400.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	0,00		
		70.000.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 18	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	1.580.000,00	0,00		
		1.360.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.080.000,00	0,00		
		860.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	500.000,00	0,00		
		500.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 19	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	6.530.000,00	0,00		
		6.490.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.530.000,00	0,00		
		6.490.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 26	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</i>	750.000,00	0,00		
		0,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 26 . 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	750.000,00	0,00		
		0,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 28	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	3.300.000,00	0,00		
		3.010.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.300.000,00	0,00		
		3.010.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08	KECAMATAN SITIUNG	1.772.244.380,00	24.100.000,00		
		1.730.163.701,00	24.100.000,00		
4.11 . 4.01.08 . 01	KECAMATAN SITIUNG	1.772.244.380,00	24.100.000,00		
		1.730.163.701,00	24.100.000,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.435.681.000,00	0,00		
		1.394.219.684,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.681.000,00	0,00		
		1.394.219.684,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.279.250,00	0,00		
		133.064.840,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.564.500,00	0,00		
		1.563.804,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.173.950,00	0,00		
		12.173.888,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.549.500,00	0,00		
		2.549.500,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.070.000,00	0,00		
		7.058.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.148.400,00	0,00		
		10.148.375,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.772.900,00	0,00		
		99.571.273,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	24.100.000,00		
		0,00	24.100.000,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00		
		0,00	5.000.000,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	19.100.000,00		
		0,00	19.100.000,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.336.680,00	0,00		
		152.028.180,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	0,00		
		1.492.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	0,00		
		5.999.500,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.836.680,00	0,00		
		144.536.680,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.320.000,00	0,00		
		18.263.550,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.100.000,00	0,00		
		11.090.550,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.720.000,00	0,00		
		4.673.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	0,00		
		2.500.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	10.629.700,00	0,00		
		10.620.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.080.000,00	0,00		
		1.080.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.549.700,00	0,00		
		9.540.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	16.297.750,00	0,00		
		16.267.447,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.297.750,00	0,00		
		16.267.447,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	5.700.000,00	0,00		
		5.700.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.700.000,00	0,00		
		5.700.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
4.11 . 4.01.09	KECAMATAN KOTO BARU	2.054.155.460,00	20.000.000,00		
		2.001.261.386,00	20.000.000,00		
4.11 . 4.01.09 . 01	KECAMATAN KOTO BARU	2.054.155.460,00	20.000.000,00		
		2.001.261.386,00	20.000.000,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.472.269.000,00	0,00		
		1.424.813.632,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.472.269.000,00	0,00		
		1.424.813.632,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	107.007.100,00	0,00		
		106.512.902,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.992.000,00	0,00		
		1.992.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.499.200,00	0,00		
		7.498.252,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.498.100,00	0,00		
		4.498.100,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.162.000,00	0,00		
		25.162.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	0,00		
		4.650.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	960.000,00	0,00		
		960.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.245.800,00	0,00		
		61.752.550,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	20.000.000,00		
		0,00	20.000.000,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	20.000.000,00		
		0,00	20.000.000,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.529.360,00	0,00		
		316.198.926,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	0,00		
		1.800.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.496.000,00	0,00		
		4.266.876,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.233.360,00	0,00		
		310.132.050,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.550.000,00	0,00		
		137.955.926,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.200.000,00	0,00		
		10.957.326,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.450.000,00	0,00		
		4.394.600,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000,00	0,00		
		2.900.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	0,00		
		119.704.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	1.070.000,00	0,00		
		1.050.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.070.000,00	0,00		
		1.050.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	9.650.000,00	0,00		
		9.650.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.650.000,00	0,00		
		9.650.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	1.790.000,00	0,00		
		1.790.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.790.000,00	0,00		
		1.790.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	3.290.000,00	0,00		
		3.290.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.290.000,00	0,00		
		3.290.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1.499.504.577,00	0,00		
		1.463.282.395,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1.499.504.577,00	0,00		
		1.463.282.395,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.192.017.000,00	0,00		
		1.156.308.091,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.192.017.000,00	0,00		
		1.156.308.091,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1.250.000,00	0,00		
		1.250.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.250.000,00	0,00		
		1.250.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	97.980.657,00	0,00		
		97.747.508,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.794.707,00	0,00		
		1.793.900,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.977.450,00	0,00		
		10.977.450,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.852.200,00	0,00		
		3.852.200,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.236.000,00	0,00		
		19.236.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.971.800,00	0,00		
		4.971.800,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.148.500,00	0,00		
		56.916.158,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.991.920,00	0,00		
		171.983.170,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00		
		1.000.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.920.000,00	0,00		
		10.911.250,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.071.920,00	0,00		
		160.071.920,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.820.000,00	0,00		
		17.618.626,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.200.000,00	0,00		
		10.998.626,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.720.000,00	0,00		
		3.720.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000,00	0,00		
		2.900.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.280.000,00	0,00		
		4.280.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.080.000,00	0,00		
		1.080.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.200.000,00	0,00		
		3.200.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.115.000,00	0,00		
		10.075.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.115.000,00	0,00		
		10.075.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.10 . 01 . 26	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	900.000,00	0,00		
		900.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 26 . 01		900.000,00	0,00		
		900.000,00	0,00		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
4.11 . 4.01.10 . 01 . 28		3.150.000,00	0,00		
		3.120.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.10 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.150.000,00	0,00		
		3.120.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	1.438.226.960,00	14.000.000,00		
		1.387.394.556,00	14.000.000,00		
4.11 . 4.01.11 . 01	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	1.438.226.960,00	14.000.000,00		
		1.387.394.556,00	14.000.000,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.135.022.000,00	0,00		
		1.094.390.137,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.135.022.000,00	0,00		
		1.094.390.137,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.387.800,00	14.000.000,00		
		89.580.459,00	14.000.000,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.956.000,00	0,00		
		1.956.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.198.600,00	0,00		
		13.123.720,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	14.000.000,00		
		0,00	14.000.000,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.427.000,00	0,00		
		21.285.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.858.200,00	0,00		
		3.837.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.948.000,00	0,00		
		49.378.739,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.567.160,00	0,00		
		178.970.160,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00		
		1.000.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	0,00		
		4.853.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.360.000,00	0,00		
		2.360.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.207.160,00	0,00		
		170.757.160,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.450.000,00	0,00		
		18.663.800,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.700.000,00	0,00		
		2.010.950,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.750.000,00	0,00		
		16.652.850,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.000.000,00	0,00		
		3.990.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.000.000,00	0,00		
		3.990.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	0,00		
		1.800.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.11 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.800.000,00	0,00		
		1.800.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12	KECAMATAN TIMPEH	1.334.246.660,00	11.600.000,00		
		1.297.071.659,00	11.516.125,00		
4.11 . 4.01.12 . 01	KECAMATAN TIMPEH	1.334.246.660,00	11.600.000,00		
		1.297.071.659,00	11.516.125,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.022.413.000,00	0,00		
		988.770.229,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.022.413.000,00	0,00		
		988.770.229,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.513.500,00	400.000,00		
		103.842.200,00	390.000,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.580.000,00	0,00		
		1.368.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.129.400,00	0,00		
		14.117.400,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	375.000,00	400.000,00		
		375.000,00	390.000,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.900.000,00	0,00		
		20.830.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.600,00	0,00		
		6.971.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.528.500,00	0,00		
		60.180.800,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	11.200.000,00		
		0,00	11.126.125,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	11.200.000,00		
		0,00	11.126.125,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.480.160,00	0,00		
		180.018.230,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	0,00		
		1.100.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.620.000,00	0,00		
		3.542.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.743.000,00	0,00		
		3.743.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.917.160,00	0,00		
		171.633.230,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.200.000,00	0,00		
		19.801.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.900.000,00	0,00		
		10.600.400,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.400.000,00	0,00		
		6.310.600,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000,00	0,00		
		2.890.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.640.000,00	0,00		
		4.640.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.12 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.640.000,00	0,00		
		4.640.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.13	KECAMATAN KOTO SALAK	1.290.701.020,00	0,00		
		1.248.475.717,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01	KECAMATAN KOTO SALAK	1.290.701.020,00	0,00		
		1.248.475.717,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	978.586.000,00	0,00		
		941.626.092,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	978.586.000,00	0,00		
		941.626.092,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	112.503.100,00	0,00		
		112.315.487,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.227.000,00	0,00		
		2.227.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.007.650,00	0,00		
		14.007.650,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.472.200,00	0,00		
		3.472.200,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.920.000,00	0,00		
		19.920.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.986.000,00	0,00		
		4.986.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.890.250,00	0,00		
		67.702.637,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	177.171.920,00	0,00		
		174.179.566,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	168.671.920,00	0,00		
		168.311.920,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.500.000,00	0,00		
		5.867.646,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	14.060.000,00	0,00		
		12.064.572,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	0,00		
		3.054.822,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.230.000,00	0,00		
		4.179.750,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.13 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000,00	0,00		
		4.830.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 18	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	1.320.000,00	0,00		
		1.300.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.320.000,00	0,00		
		1.300.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 19	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	5.090.000,00	0,00		
		5.050.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.090.000,00	0,00		
		5.050.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 28	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	1.970.000,00	0,00		
		1.940.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.13 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.970.000,00	0,00		
		1.940.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	1.171.814.850,00	24.150.000,00		
		1.081.256.643,00	24.150.000,00		
4.11 . 4.01.14 . 01	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	1.171.814.850,00	24.150.000,00		
		1.081.256.643,00	24.150.000,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	843.934.000,00	0,00		
		755.011.336,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	843.934.000,00	0,00		
		755.011.336,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	120.923.850,00	0,00		
		120.182.817,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.307.500,00	0,00		
		1.634.600,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.642.000,00	0,00		
		9.622.900,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.895.000,00	0,00		
		24.890.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	5.410.000,00	0,00		
		5.410.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.700.000,00	0,00		
		2.659.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.969.350,00	0,00		
		75.966.317,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	24.150.000,00		
		0,00	24.150.000,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	24.150.000,00		
		0,00	24.150.000,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.837.000,00	0,00		
		179.464.940,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00		
		2.500.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	0,00		
		4.919.250,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.337.000,00	0,00		
		172.045.690,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.570.000,00	0,00		
		18.047.550,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.170.000,00	0,00		
		11.114.550,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.400.000,00	0,00		
		4.933.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	0,00		
		2.000.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.350.000,00	0,00		
		1.350.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	650.000,00	0,00		
		650.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	700.000,00	0,00		
		700.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.200.000,00	0,00		
		7.200.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.14 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.200.000,00	0,00		
		7.200.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15	KECAMATAN KOTO BESAR	1.843.494.717,00	0,00		
		1.777.365.598,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.15 . 01	KECAMATAN KOTO BESAR	1.843.494.717,00	0,00		
		1.777.365.598,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 02		1.519.312.000,00	0,00		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.453.522.579,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.519.312.000,00	0,00		
		1.453.522.579,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100.359.057,00	0,00		
		100.118.450,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.794.707,00	0,00		
		1.794.300,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.834.700,00	0,00		
		13.834.700,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.847.200,00	0,00		
		3.847.200,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.262.000,00	0,00		
		20.238.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.921.200,00	0,00		
		4.921.200,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.699.250,00	0,00		
		55.483.050,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	193.803.660,00	0,00		
		193.787.410,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00		
		1.000.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.396.500,00	0,00		
		6.380.250,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.450.000,00	0,00		
		4.450.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.957.160,00	0,00		
		181.957.160,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	14.920.000,00	0,00		
		14.837.159,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.200.000,00	0,00		
		11.164.759,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.15 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.720.000,00	0,00		
		3.672.400,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.050.000,00	0,00		
		3.050.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.050.000,00	0,00		
		3.050.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.500.000,00	0,00		
		8.500.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.500.000,00	0,00		
		8.500.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	900.000,00	0,00		
		900.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	900.000,00	0,00		
		900.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.650.000,00	0,00		
		2.650.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.650.000,00	0,00		
		2.650.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16	KECAMATAN PADANG LAWEH	1.196.875.440,00	0,00		
		1.159.564.716,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01	KECAMATAN PADANG LAWEH	1.196.875.440,00	0,00		
		1.159.564.716,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	858.720.000,00	0,00		
		822.258.176,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	858.720.000,00	0,00		
		822.258.176,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.509.000,00	0,00		
		170.121.300,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.099.600,00	0,00		
		1.098.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.527.700,00	0,00		
		13.391.700,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.811.200,00	0,00		
		3.809.700,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.340.000,00	0,00		
		68.336.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.591.500,00	0,00		
		8.591.200,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.139.000,00	0,00		
		74.894.700,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.441.440,00	0,00		
		132.433.440,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00		
		1.000.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000,00	0,00		
		1.492.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.941.440,00	0,00		
		129.941.440,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.520.000,00	0,00		
		16.126.800,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.800.000,00	0,00		
		10.471.500,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.720.000,00	0,00		
		3.655.300,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	0,00		
		2.000.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.120.000,00	0,00		
		4.100.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	720.000,00	0,00		
		700.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.400.000,00	0,00		
		3.400.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.415.000,00	0,00		
		10.415.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.415.000,00	0,00		
		10.415.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.16 . 01 . 24	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	900.000,00	0,00		
		900.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 24 . 01		900.000,00	0,00		
		900.000,00	0,00		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
4.11 . 4.01.16 . 01 . 28	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	3.250.000,00	0,00		
		3.210.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.16 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.250.000,00	0,00		
		3.210.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17	KECAMATAN TIUMANG	1.586.271.300,00	0,00		
		1.552.760.567,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01	KECAMATAN TIUMANG	1.586.271.300,00	0,00		
		1.552.760.567,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.244.542.000,00	0,00		
		1.212.091.441,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.244.542.000,00	0,00		
		1.212.091.441,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	101.751.900,00	0,00		
		101.647.200,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.174.600,00	0,00		
		1.174.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.715.650,00	0,00		
		10.715.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.477.650,00	0,00		
		4.477.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.904.000,00	0,00		
		21.864.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.287.000,00	0,00		
		5.286.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.193.000,00	0,00		
		58.131.200,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	204.962.400,00	0,00		
		204.175.926,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	0,00		
		1.500.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.17 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.460.000,00	0,00		
		8.038.766,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.002.400,00	0,00		
		194.637.160,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	0,00		
		15.831.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.800.000,00	0,00		
		10.631.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.750.000,00	0,00		
		3.750.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.450.000,00	0,00		
		1.450.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.400.000,00	0,00		
		3.400.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	450.000,00	0,00		
		450.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.950.000,00	0,00		
		2.950.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.415.000,00	0,00		
		10.415.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.415.000,00	0,00		
		10.415.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 24	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	750.000,00	0,00		
		750.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	750.000,00	0,00		
		750.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.450.000,00	0,00		
		4.450.000,00	0,00		
4.11 . 4.01.17 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.450.000,00	0,00		
		4.450.000,00	0,00		
4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.625.678.020,00	29.435.000,00		
		2.567.442.289,00	29.435.000,00		
4.12 . 4.01.18	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.625.678.020,00	29.435.000,00		
		2.567.442.289,00	29.435.000,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.12 . 4.01.18 . 01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.625.678.020,00	29.435.000,00		
		2.567.442.289,00	29.435.000,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	812.462.000,00	0,00		
		781.292.118,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	812.462.000,00	0,00		
		781.292.118,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	205.467.250,00	0,00		
		204.920.803,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.986.800,00	0,00		
		3.986.600,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.061.000,00	0,00		
		41.898.800,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.400,00	0,00		
		10.178.400,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.050.000,00	0,00		
		19.050.000,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.547.100,00	0,00		
		16.539.300,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.643.950,00	0,00		
		113.267.703,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0,00	29.435.000,00		
		0,00	29.435.000,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	241.797.640,00	0,00		
		232.160.743,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00		
		3.000.000,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.040.000,00	0,00		
		13.839.653,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.400.000,00	0,00		
		3.400.000,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.357.640,00	0,00		
		211.921.090,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	13.750.000,00	0,00		
		13.750.000,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	750.000,00	0,00		
		750.000,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Keigiatan,dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.12 . 4.01.18 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	0,00		
		13.000.000,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 15	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	115.605.900,00	0,00		
		105.356.000,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 15 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	105.599.300,00	0,00		
		95.533.400,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 15 . 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10.006.600,00	0,00		
		9.822.600,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 16	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	849.376.880,00	0,00		
		844.086.880,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 16 . 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	849.376.880,00	0,00		
		844.086.880,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	29.993.700,00	0,00		
		29.093.400,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 18 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kenerravaan di Daerah	10.671.000,00	0,00		
		10.618.000,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 18 . 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	19.322.700,00	0,00		
		18.475.400,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 19	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	357.224.650,00	0,00		
		356.782.345,00	0,00		
4.12 . 4.01.18 . 01 . 19 . 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	357.224.650,00	0,00		
		356.782.345,00	0,00		
	JUMLAH	725.688.993.576,00	151.905.233.451,00	450.000.000,00	110.640.401.813,00
		696.160.075.415,49	132.791.374.992,86	369.162.297,00	110.050.724.476,00

 BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022	2021
1	2	3
Saldo Anggaran Lebih Awal	70.206.985.982,71	8.334.425.206,49
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	70.206.985.982,71	8.334.425.206,49
Subtotal	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	41.912.532.080,16	70.206.985.982,71
Subtotal	41.912.532.080,16	70.206.985.982,71
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	41.912.532.080,16	70.206.985.982,71

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran III : Laporan Operasional
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	23.850.796.763,46	22.455.754.207,25	1.395.042.556,21	6,21
Pendapatan Retribusi Daerah	2.947.679.575,54	2.499.784.055,43	447.895.520,11	17,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.325.813.847,00	10.284.830,00	4.315.529.017,00	41.960
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	68.255.991.163,72	68.868.917.011,55	(612.925.847,83)	(0,89)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	99.380.281.349,72	93.834.740.104,23	5.545.541.245,49	5,91
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	26.203.605.085,00	26.352.048.498,00	(148.443.413,00)	(0,56)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.871.006.918,00	3.419.652.416,00	2.451.354.502,00	71,68
Dana Alokasi Umum (DAU)	472.528.368.549,00	472.416.143.000,00	112.225.549,00	0,02
Dana Alokasi Khusus (DAK)	171.656.798.100,00	207.765.406.760,00	(36.108.608.660,00)	(17,38)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	676.259.778.652,00	709.953.250.674,00	(33.693.472.022,00)	(4,75)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
Dana Penyesuaian	54.283.677.000,00	73.540.405.000,00	(19.256.728.000,00)	(26,19)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	54.283.677.000,00	73.540.405.000,00	(19.256.728.000,00)	(26,19)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.188.095.920,00	51.935.128.939,00	6.252.966.981,00	12,04
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	58.188.095.920,00	51.935.128.939,00	6.252.966.981,00	12,04
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	788.731.551.572,00	835.428.784.613,00	(46.697.233.041,00)	(5,59)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	62.593.326.137,23	91.236.115.776,00	(28.642.789.638,77)	(31,39)
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	30.885.940.000,00	(30.885.940.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	62.593.326.137,23	122.122.055.776,00	(59.528.729.638,77)	(48,75)
JUMLAH PENDAPATAN	950.705.159.058,95	1.051.385.580.493,23	(100.680.421.434,28)	(9,58)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	380.917.803.230,71	382.354.718.195,46	(1.436.914.964,75)	(0,38)
Beban Persediaan	108.439.121.892,65	72.600.984.126,33	35.838.137.766,32	49,36
Beban Jasa	110.592.860.111,88	98.084.318.217,81	12.508.541.894,07	12,75
Beban Sewa	4.396.584.495,00	2.509.976.767,12	1.886.607.727,88	75,16
Beban Pemeliharaan	12.208.329.617,99	11.196.376.603,00	1.011.953.014,99	9,04
Beban Perjalanan Dinas	60.814.621.826,00	47.517.031.727,00	13.297.590.099,00	27,98
Beban Hibah	12.430.936.621,00	21.567.610.832,00	(9.136.674.211,00)	(42,36)
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan/Amortisasi	152.432.894.181,18	168.473.799.471,73	(16.040.905.290,55)	(9,52)
Beban Penyisihan Piutang	3.187.423.217,05	3.573.789.229,02	(386.366.011,97)	(10,81)
Beban Transfer	109.572.502.947,00	112.110.404.801,00	(2.537.901.854,00)	(2,26)
Beban Lain-Lain	1.658.326.578,00	3.567.438.148,62	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASI	956.651.404.718,46	923.556.448.119,09	33.094.956.599,37	3,58
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.946.245.659,51)	127.829.132.374,14	(133.775.378.033,65)	(104,65)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	945.393.931,00	363.292.100,00	582.101.831,00	160,23
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	945.393.931,00	363.292.100,00	582.101.831,00	160,23
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(5.000.851.728,51)	128.192.424.474,14	(133.193.276.202,65)	(103,90)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	336.162.297,00	197.439.330,00	138.722.967,00	70,26
Jumlah Pos Luar Biasa	336.162.297,00	197.439.330,00	138.722.967,00	70,26
SURPLUS/DEFISIT LO	(5.337.014.025,51)	127.994.985.144,14	(133.331.999.169,65)	(104,17)

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022	2021
1	2	3
Ekuitas Awal	2.488.069.809.561,05	2.346.493.866.411,02
Surplus/Defisit-LO	(5.337.014.025,51)	127.994.985.144,14
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	-	-
b Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(24.673.543.875,93)	13.580.958.005,89
Ekuitas Akhir	2.458.059.251.659,61	2.488.069.809.561,05

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran V : Neraca
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	34.291.745.810,17	66.539.152.597,42
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di BLUD	7.568.677.529,99	3.500.297.770,29
Kas di BOS	52.108.740,00	154.484.863,00
Kas Lainnya	123.263.561,00	312.184.107,27
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	38.486.798.355,00	36.232.224.028,00
Penyisihan Piutang Pajak	(28.707.658.256,28)	(26.498.466.733,38)
Piutang Pajak Netto	9.779.140.098,72	9.733.757.294,62
Piutang Retribusi	946.831.911,00	767.327.811,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(647.241.325,00)	(486.855.897,00)
Piutang Retribusi Netto	299.590.586,00	280.471.914,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.032.841,00	10.284.830,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(60.164,21)	(51.424,15)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	11.972.676,79	10.233.405,85
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.378.150.461,63	18.281.799.828,37
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.046.534.023,19)	(2.215.645.745,10)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	8.331.616.438,44	16.066.154.083,27
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.186.486.845,00	9.630.356.468,00
Piutang Pendapatan Lainnya	-	13.050.752,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	(13.050.752,00)
Piutang Lainnya Netto	-	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	276.672.526,15	1.558.223.934,04
Persediaan	46.047.259.249,88	38.086.898.001,69
Jumlah Aset Lancar	115.968.534.062,14	145.872.214.439,45
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-

URAIAN	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya	-	-
Jumlah Investasi Permanen	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
ASET TETAP		
Tanah	642.128.841.182,00	667.421.012.047,00
Peralatan dan Mesin	409.319.889.897,76	365.830.496.579,36
Gedung dan Bangunan	881.692.577.852,98	828.611.661.247,80
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.417.084.539.911,16	1.347.104.392.370,42
Aset Tetap Lainnya	110.099.518.896,00	108.279.890.823,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.734.430.274,00	11.750.539.457,00
Akumulasi Penyusutan	(1.190.948.112.056,18)	(1.055.277.207.905,60)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan	2.282.111.685.957,72	2.273.720.784.618,98
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	-	-
Jumlah Dana Cadangan	-	-
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	287.907.729,00	293.258.963,00
Aset Tak Berwujud	4.345.006.277,00	4.013.267.277,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.233.315.887,00)	(1.906.478.687,00)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi	2.111.690.390,00	2.106.788.590,00
Aset Lain-Lain	201.056.181.109,44	205.255.939.395,84
Penyusutan Aset Lain-Lain	(157.064.214.099,44)	(148.585.496.096,84)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan	43.991.967.010,00	56.670.443.299,00
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	2.689.400.169,00	-
Jumlah Aset Lainnya	49.080.965.298,00	59.070.490.852,00
JUMLAH ASET	2.474.613.185.317,86	2.506.115.489.910,43
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	257.846.811,27	765.399.544,27
Pendapatan Diterima Dimuka	83.144.415,10	102.623.340,64
Utang Belanja	11.321.739.731,88	12.286.454.764,47
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	4.891.202.700
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16.553.933.658,25	18.045.680.349,38

URAIAN	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	16.553.933.658,25	18.045.680.349,38
EKUITAS		
EKUITAS	2.458.059.251.659,61	2.488.069.809.561,05
JUMLAH EKUITAS	2.458.059.251.659,61	2.488.069.809.561,05
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.474.613.185.317,86	2.506.115.489.910,43

 **BUPATI DHARMASRAYA,**

SUTAN RISKA

Lampiran VI : Laporan Arus Kas
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	21.634.156.143,46	20.495.633.388,25
Penerimaan Retribusi Daerah	2.759.700.350,00	2.411.365.382,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836,00	3.524.570.411,00
Lain-Lain PAD yang Sah	78.250.863.518,34	56.034.600.239,62
Dana Bagi Hasil Pajak	23.514.204.916,00	30.199.842.269,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.871.006.918,00	3.462.713.300,00
Dana Alokasi Umum	472.528.368.549,00	472.416.143.000,00
Dana Alokasi Khusus	171.656.798.100,00	207.765.406.760,00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	54.283.677.000,00	73.540.405.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.631.965.543,00	51.272.491.740,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Penerimaan Hibah	16.580.071.607,00	26.548.313.512,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	30.885.940.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	910.034.878.480,80	978.557.425.001,87
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	380.048.882.570,44	380.289.821.307,81
Pembayaran Barang	304.834.151.224,05	246.612.992.141,35
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Hibah	11.277.041.621,00	11.804.111.087,00
Pembayaran Bantuan Sosial	-	0,00
Pembayaran Tak Terduga	369.162.297,00	164.439.330,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.384.214.550,00	1.708.764.771,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	275.334.926,00	152.413.472,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	107.391.175.000,00	110.062.863.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	806.579.962.188,49	750.795.405.109,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	103.454.916.292,31	227.762.019.892,71
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.041.104.798,00	354.867.100,00

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	900.000,00	8.425.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	1.042.004.798,00	363.292.100,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin	48.052.940.621,00	51.541.549.729,92
Perolehan Gedung dan Bangunan	15.750.482.106,12	85.986.356.136,57
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	66.363.505.690,74	22.155.213.262,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.624.446.575,00	6.569.632.088,00
Perolehan Aset Lainnya		
Jumlah Arus Keluar Kas	132.791.374.992,86	166.252.751.216,49
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(131.749.370.194,86)	(165.889.459.116,49)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.514.332.692,54	62.122.057.999,27
Penerimaan Kas	13.497.876,00	38.500.244,00
Jumlah Arus Masuk Kas	60.527.830.568,54	62.160.558.243,27
Arus Keluar Kas		
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.665.200.118,81	61.853.274.136,00
Pengeluaran Kas	38.500.244,00	1.897.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas	60.703.700.362,81	61.855.171.336,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(175.869.794,27)	305.386.907,27
Kenaikan/Penurunan Kas	(28.470.323.696,82)	62.177.947.683,49
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas	66.539.152.597,42	6.155.879.601,54
Saldo Awal Kas di BLUD	3.500.297.770,29	1.526.712.732,95
Saldo Awal Kas di Dana BOS	154.484.863,00	645.579.320,00
Saldo Awal Kas Lainnya	312.184.107,27	
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	34.291.745.810,17	66.539.152.597,42
Saldo Akhir Kas di BLUD	7.568.677.529,99	3.500.297.770,29
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Dana BOS	52.108.740,00	154.484.863,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	123.263.561,00	312.184.107,27
Saldo Akhir Kas	42.035.795.641,16	70.506.119.337,98

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Informasi Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas, setiap pengelola keuangan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan secara tertip dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat dan atau golongan tertentu.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI setelah direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan Audit dan diberikan opini sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam pembahasan rapat paripurna antara Eksekutif dan Legislatif.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD selaku Entitas Akuntansi. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut.

1. mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

7. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2022 sehingga dapat dievaluasi dan dinilai kinerjanya oleh *stake holder*, dan tujuan secara umum adalah memberikan informasi dalam rangka:

1. pembuatan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. informasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang berhubungan dengan anggaran/keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang;
3. melaporkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah selama periode Tahun 2022;
4. menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek;
5. menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya, dalam satu tahun anggaran;
6. memonitor kinerja, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan;
7. perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;
8. mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain: untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satker sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya dengan kinerja unit pemerintahan, mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
46. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
47. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
48. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
49. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
50. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
51. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
52. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
53. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
54. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
55. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan serta menghindari kesalahpahaman dan multitafsir dalam memahami laporan maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pengungkapan hal-hal penting yang diperlukan dalam penyajian Laporan Keuangan, dimana secara umum bertujuan untuk:

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;

3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Untuk lebih mudah memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, maka CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- A. Informasi Umum
- B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Kinerja APBD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan Daerah
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- A. Penjelasan Atas Kinerja Dan Posisi Keuangan
- B. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- C. Neraca
- D. Laporan Operasional

E. Laporan Arus Kas

F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

B. Susunan Perangkat Daerah

C. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Pada dasarnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2022 dipengaruhi kondisi tahun 2021 karena proses perencanaan dan penganggaran tahun 2022 dilaksanakan pada tahun 2021. Ekonomi makro merupakan kajian tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Pada dasarnya kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Dharmasraya yang berjalan pada periode sebelumnya.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD.

Penyusunan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro tahun 2021. Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang direncanakan dalam APBD mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan atas kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Adapun indikator ekonomi makro dapat diuraikan sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan perhitungannya maka PDRB ini dibagi menjadi 3 (tiga) PDRB terdiri dari PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai 10,24 triliun rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,10 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 10,34 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini utamanya dipengaruhi oleh menurunnya nilai produksi di sebagian lapangan usaha. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Dharmasraya ADHB naik menjadi 10,75 triliun rupiah. Kenaikan ini terutama terdapat pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 juga mengalami penurunan sebesar 0,10 triliun rupiah, dari 7,56 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 7,46 triliun rupiah pada tahun 2020. Penurunan nilai PDRB ini mengindikasikan telah terjadinya penurunan output produksi. Pada 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya berkontraksi sebesar -1,39 persen, sedangkan pada 2019 mampu tumbuh sebesar 4,94 persen. Perlambatan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Dharmasraya, tetapi juga telah menjadi permasalahan global akibat merebaknya pandemi Covid-19 yang di Indonesia sendiri dirasakan sejak Maret 2020. Seiring dengan makin menurunnya angka Covid-19 dan penghapusan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, maka pada tahun 2021 nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya ADHK membaik menjadi 7,7 triliun rupiah.

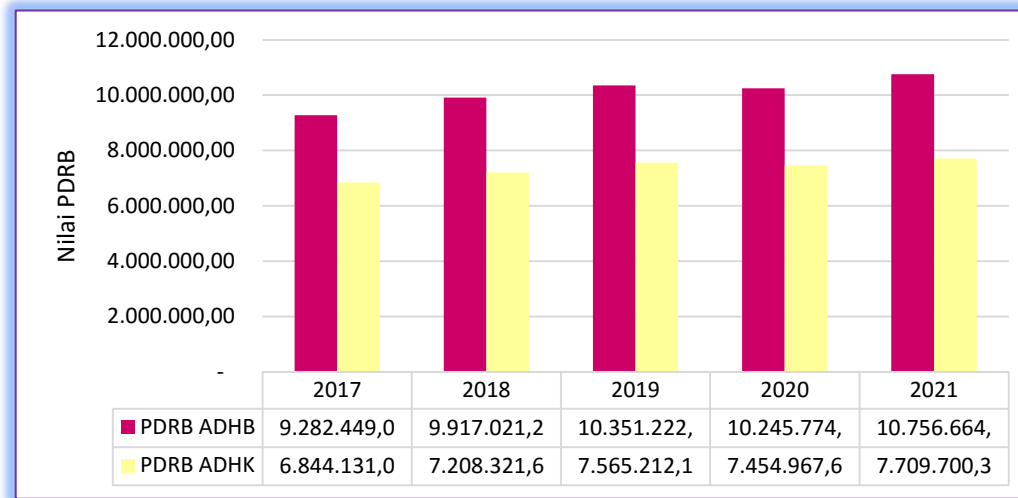
Untuk lebih jelasnya Untuk perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2021 (Jutaan Rupiah)

PDRB	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.852.097,92	2.949.573,35	2.897.945,76	2.788.471.75	2.957.554.44
B. Pertambangan dan Penggalian	674.407,94	700.488,64	728.630,78	690.128.35	666.873.43
C. Industri Pengolahan	564.907.91	578.751.87	509.422,40	512.063.92	576.755.37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	91,70	2.371.90	2.364,29	2.232.75	2.303.55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52,73	1343.69	1.374,85	1.347.51	1.357.37
F. Konstruksi	1.242.481,06	1.368.732,37	1.528.778,65	1.518.921.00	1.591.651.46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.309.136,86	1.431.109,11	1.536.370,11	1.526.575,49	1.560.824,47
H. Transportasi dan Pergudangan	556.334,00	606.728.93	674.451,04	610.900,94	656.819,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	90.275.81	98.432.60	108.608,81	93.709,18	103.850,46
J. Informasi dan Komunikasi	546.480,60	604.748.84	638.260,51	687.553,31	740.759,13
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	208.172,57	218.323,35	229.137,08	234.242,96	254.986,50
L. Real Estat	204.116,27	219.837,17	236.684,00	237.121,72	245.527,50
M,N. Jasa Perusahaan	80,08	2.055.70	2.190,45	2.094,33	2.113,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	540.821,72	594.587,38	656.363,92	711.018,92	740.943,31
P. Jasa Pendidikan	262.198,82	287.288,26	322.993,17	339.322,07	346.047,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154.792,33	172.267,78	187.701,55	206.681,63	219.601,77
R,S,T,U. Jasa lainnya	70.837,91	80.380,33	89.945,22	83.388,43	88.696,30
PDRB Dharmasraya (ADHB)	9.282.449,03	9.917.021,29	10.351.222,59	10.245.774,26	10.756.664,94
PDRB Dharmasraya (ADHK)	6.844.131,09	7.208.321,66	7.565.212,12	7.454.967,67	7.709.700,34

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/>

Gambar 2.1
Grafik Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2021



Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/>

Dari grafik di atas terlihat secara umum bahwa PDRB Kabupaten Dharmasraya baik ADHB maupun ADHK selalu meningkat tiap tahunnya kecuali dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan, yang merupakan salah satu akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya kembali mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021.

Besarnya kontribusi setiap lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa akan menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Struktur perekonomian Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Pertambangan dan Penggalian. Peningkatan ini dapat dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Dharmasraya.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 27,19 persen, meskipun kontribusinya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 27,99 persen. Pada tahun 2021, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap memiliki kontribusi terbesar dan naik dari tahun sebelumnya yaitu 27,50 persen, dan kontribusi paling rendah disumbangkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan mengalami penurunan dari 0,91 persen tahun 2020 menjadi 0,97 persen tahun 2021.

Selanjutnya, Tahun 2021, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,90 persen atau turun dibanding 2020 yang sebesar 14,90 persen. Kontribusi lapangan usaha Konstruksi tercatat sebesar 14,80 persen, turun dibandingkan 2020 yang tercatat sebesar 14,83 persen. Kontribusi lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah sebesar 6,89 persen, juga naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang

tercatat sebesar 6,94 persen. Terakhir, kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sebesar 6,20 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan 2020 sebesar 6,74 persen.

Tabel 2.2
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHB)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021

PDRB	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,85	30,23	27,99	27.19	27.50
B. Pertambangan dan Penggalian	7,44	7,09	7,04	6.74	6.20
C. Industri Pengolahan	6,00	5,73	4,92	5.00	5.36
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0.02	0.02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0.01	0.01
F. Konstruksi	13,56	13,88	14,77	14.83	14.80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,92	14,23	14,84	14,90	14.51
H. Transportasi dan Pergudangan	6,00	6,20	6,51	5,96	6.11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	0,98	1,05	0,91	0.97
J. Informasi dan Komunikasi	5,51	5,67	6,16	6,71	6.89
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,19	2,22	2,29	2.37
L. Real Estat	2,23	2,25	2,29	2,32	2.28
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0.02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,05	6,07	6, 43	6,94	6.89
P. Jasa Pendidikan	2,76	2,89	3,12	3,31	3.22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,65	1,72	1,81	2,02	2.04
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,77	0,81	0,87	0,81	0.82
PDRB Dharmasraya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : dharmasrayakab.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya adalah kategori yang kontribusinya mengalami peningkatan dibandingkan 2020. Sebaliknya, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,

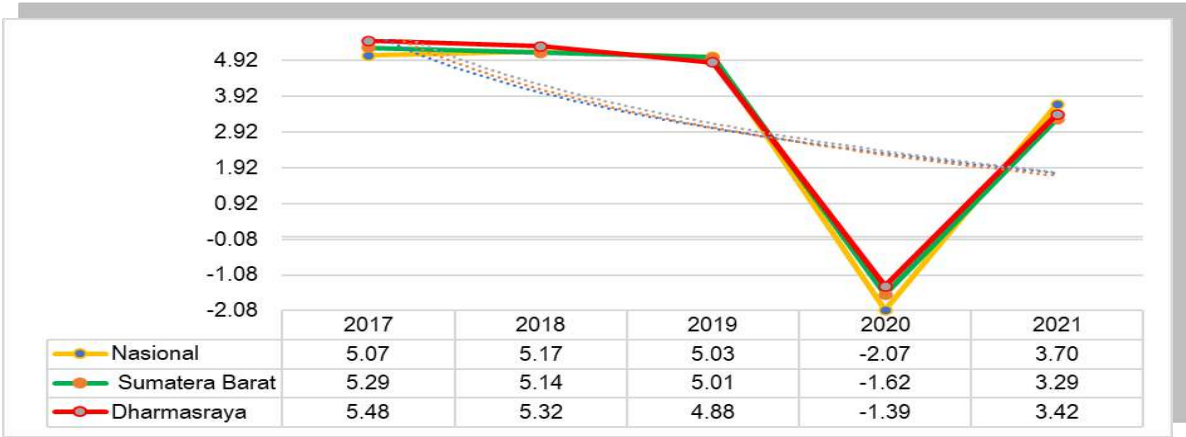
Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Jasa Pendidikan kontribusinya berangsur-angsur menurun.

A.2. Laju Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil pada suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama setahun.

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.

Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Pertumbuhan PDB/PDRB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2017 hingga tahun 2019 tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya, jika di tahun 2017 pertumbuhan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi, namun di tahun 2019 menjadi lebih rendah. Sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan PDRB berkontraksi untuk ketiga wilayah, hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menahan aktivitas ekonomi. kontraksi tertinggi terjadi di tingkat nasional sebesar -2,07%, diikuti oleh Sumatera Barat sebesar -1,62% dan dampak terendah ada Dharmasraya sebesar -1,39%. Dilihat dari lapangan usaha penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 untuk

nasinal terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-21,77%), sektor pertambangan (-13,60%), dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan (-10,46%). Untuk Sumatera barat tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-18,42%), sektor akomodasi dan makan minum (-14,68%), dan sektor jasa lainnya (-7,76%). Untuk Dharmasraya penyebab kontarksi ada di sektor akomodasi dan makan minum (-15,19%), diikuti sektor transportasi dan pergudangan(-13,18%) dan sektor jasa lainnya (-9,4%) dan sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB juga ikut berkontraksi sebesar minus 0,76%.

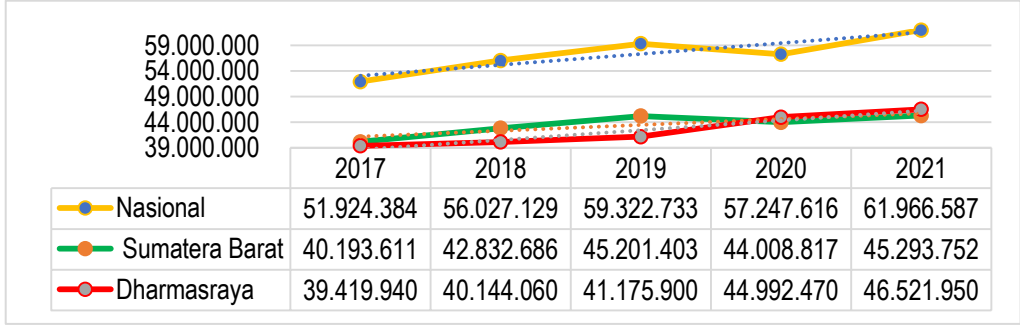
Secara keseluruhan di tahun 2021, perekonomian PDRB kembali tumbuh positif, meskipun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas menyusul kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021.

A.3. Pendapatan Perkapita

Indikator makro tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah, dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB perkapita merupakan jumlah PDRB ADHB seluruhnya dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

Gambar 2.3
Perbandingan PDB/ PDRB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (Rupiah)



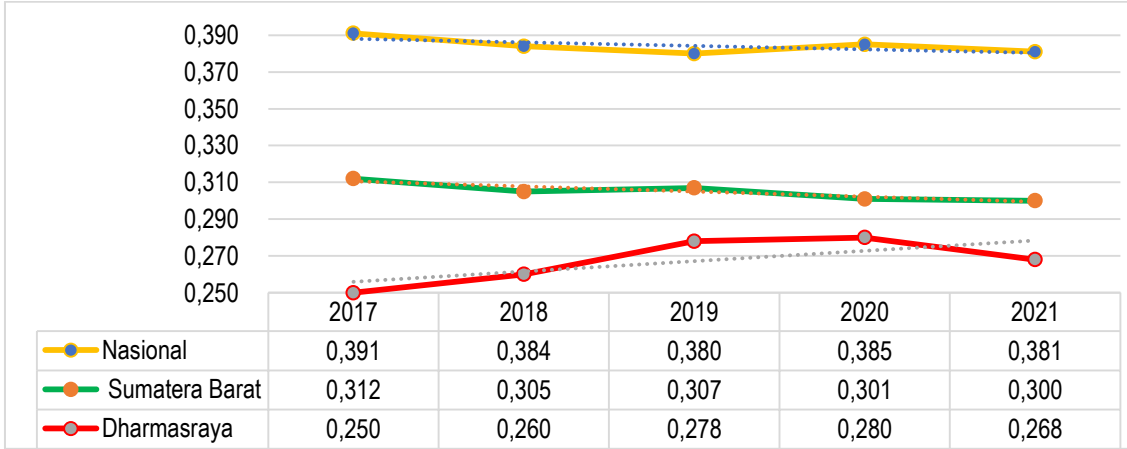
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Perkembangan nilai PDRB per kapita dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terlihat adanya peningkatan, baik secara nasional, provinsi maupun Dharmasraya. Salah satu perbedaan terjadi di tahun 2020, dimana dampak dari adanya pandemi covid-19 dimana PDRB perkapita nasional dan Provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019, sedangkan Kabupaten Dharmasraya masih menunjukkan peningkatan, karena dilihat dari struktur PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian yang tidak berdampak besar oleh covid-19. Selanjutnya di tahun 2021 PDRB perkapita Dharmasraya sudah berada di atas Provinsi Sumatera Barat, namun masih di bawah angka nasional.

A.4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Dilihat dari pengelompokannya, maka indeks Gini dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Gambar 2.4
Grafik Perkembangan Gini Rasio (Indeks) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumbar berada pada kategori ketimpangan rendah (lebih baik) dibandingkan angka nasional, dimana indeks Gini nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai, dari tahun 2017 hingga 2021 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumbar sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik, maka nilai Gini diusahakan agar semakin

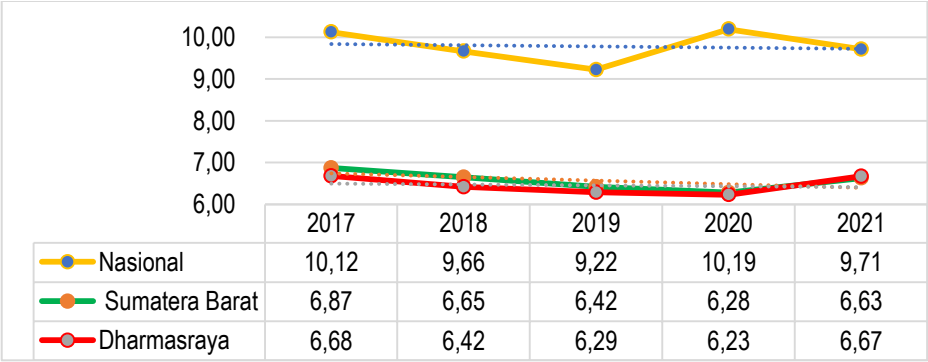
mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik. Dilihat berdasarkan capaian rasio gini, capaian Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan nasional dan provinsi, aetinya ketimpangan pendapatan tidak sebesar nasional dan provinsi.

A.5. **Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan setiap tahun. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman (setara 2.100 kkalori per kapita per hari). Per kapita adalah per orang. Sebagian besar negara di dunia menggunakan standar 2.100 kkalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non-makanan. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai paling rendah pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang setiap bulan di bawah garis kemiskinan itu. Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan penduduk miskin.

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan (persen) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2017-2021



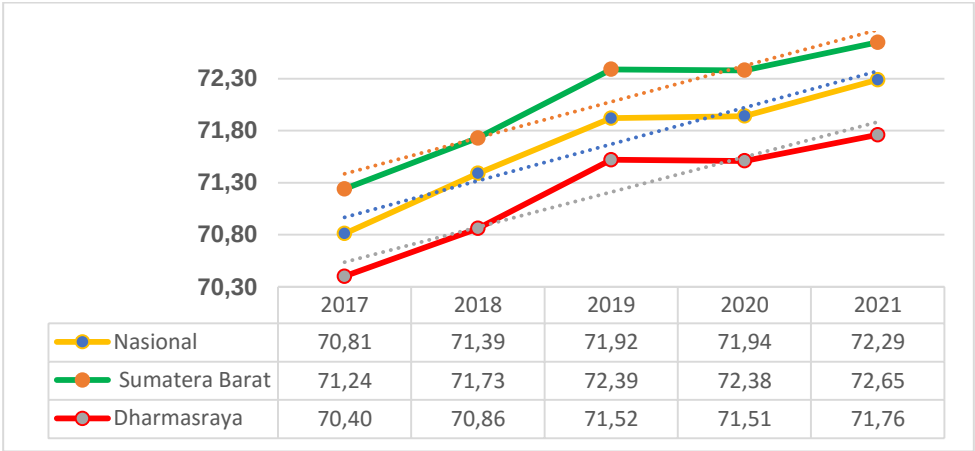
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Tingkat kemiskinan Provinsi hampir sama dengan Dharmasraya serta sudah jauh berada di bawah tingkat kemiskinan nasional. Dengan relatif rendahnya tingkat kemiskinan provinsi provinsi dan kabupaten maka adanya kecenderungan penurunan dari tahun 2017 - 2020, sementara tahun 2020 – 2021 mengalami kenaikan. Diharapkan ke depan angka kemiskinan akan semakin kecil seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.

A.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wiayah lainnya. Secara nasional IPM merupakan data strategis ukuran kinerja Pemerintah serta digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah:

Gambar 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber BPS, tahun 2022

Dilihat dari perkembangan nilai IPM, maka setiap tahun terjadi peningkatan IPM, kecuali dari tahun 2019 ke tahun 2020, meskipun IPM nasional masih mengalami sedikit kenaikan, namun IPM provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya menunjukkan penurunan. Hal ini akibat dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020. sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat unprecedented shock dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Sejak semakin meluasnya kasus covid-19 selama tahun 2020, maka Pemerintah terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya di tahun 2021, sejalan dengan penurunan kasus covid-19 serta diikuti oleh pemulihan ekonomi, maka IPM nasional, provinsi, maupun Kabupaten Dharmasraya kembali menunjukkan peningkatan. Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian herd immunity. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren positif.

Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.3
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rangking
Kepulauan Mentawai	59,25	60,28	61,26	61,09	61,35	19
Pesisir Selatan	68,74	69,40	70,08	69,90	70,03	12
Kab.Solok	67,86	68,60	69,08	69,08	69,24	14
Sijunjung	66,60	66,97	67,66	67,74	67,86	17
Tanah Datar	70,37	71,25	72,14	72,33	72,46	9
Padang Pariaman	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76	11
Agam	71,10	71,70	72,37	72,46	72,57	8
Lima Puluh Kota	68,69	69,17	69,67	69,47	69,68	13
Pasaman	64,94	65,60	66,46	66,64	66,77	18
Solok Selatan	67,81	68,45	68,94	69,04	69,23	15
Dharmasraya	70,40	70,86	71,52	71,51	71,76	10
Pasaman Barat	66,83	67,43	68,21	68,49	68,76	16
Padang	81,58	82,25	82,68	82,82	82,90	1
Kota Solok	77,44	77,89	78,38	78,29	78,41	4
Sawahlunto	71,13	71,72	72,39	72,64	72,88	7
Padang Panjang	77,01	77,30	78,00	77,93	77,97	5
Bukittinggi	79,80	80,11	80,71	80,58	80,70	2
Payakumbuh	77,91	78,23	78,95	78,90	79,08	3
Pariaman	75,71	76,26	76,70	76,90	77,07	6

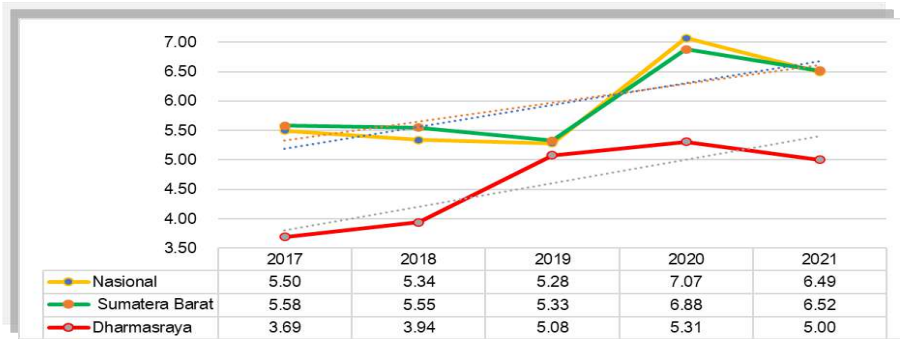
Sumber BPS, tahun 2022

Ditinjau dari perbandingan kab/kota, maka Dharmasraya berada di peringkat 10 dari 19 kab/kota atau peringkat 3 dibandingkan kabupaten lain, dan berada di bawah Agam dan Tanah Datar.

A.7. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka adalah persenta sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Capaian TPT Dharmasraya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu berada di bawah nasional dan provinsi. Salah satu faktor penyebab dari rendahnya tingkat pengangguran adalah masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti setkor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Dharmasraya :

Tabel 2.4
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2021

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2020	2021	
1	2	3	5	6	7
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Jutaan Rupiah	10.245.774,26	10.756.664,94	510,890.68
2.	PDRB (Harga Konstan)	Jutaan Rupiah	7.454.967,67	7.709.700,34	254,732.67

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2020	2021	
3.	PDRB Perkapita ADHB	Rp	44.992.470	46.521.950	1,529,480.00
5.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	(-1,39)	3,42	4.81
7.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	27.19	27.50	0.31
B	Pertambangan dan Penggalian	%	6.74	6.20	-0.54
C	Industri Pengolahan	%	5.00	5.36	0.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0.02	0.02	0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0.01	0.01	0
F	Konstruksi	%	14.83	14.80	-0.03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	14,90	14.51	-0.39
H	Transportasi dan Pergudangan	%	5,96	6.11	0.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,91	0.97	0.06
J	Informasi dan Komunikasi	%	6,71	6.89	0.18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	2,29	2.37	0.08
L	Real Estat	%	2,32	2.28	-0.04
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,02	0.02	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosiall Wajib	%	6,94	6.89	-0.05
P	Jasa Pendidikan	%	3,31	3.22	-0.09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	2,02	2.04	0.02
R, S, T, U	Jasa lainnya	%	0,81	0.82	0.01
10.	Indeks Gini	Indeks	0,28	0,27	-0.01
11.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,23	6,67	0.44
12.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,51	71,76	0.25
13.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.31	5.00	-0.31

Sumber : Hasil Analisis Bapppeda

Berdasarkan tabel indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya di atas dilihat terlihat bahwa secara umum perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2021 mengalami peningkatan diantaranya nilai PDRB baik ADHK maupun AHDB, nilai PDRB perkapita dan maupun pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan struktur PDRB, maka sektor pertanian masih menduduki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya tetapi juga mengalami peningkatan. Dilihat berdasarkan rasio gini untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan sebesar 0,01 persen artinya indeks ini dikategorikan rendah dimana pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Dharmasraya tiap tahunnya semakin membaik.

Sebagai dampak dari covid-19, melambatnya indikator perekonomian secara umum, maka hal ini juga berdampak pada tingkat kemiskinan daerah, terakhir pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6,23% dan meningkat menjadi 6,67% di tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,44%. Tingkat Pengangguran Terbuka di Dharmasraya menunjukkan penurunan sebesar 0,31 persen. Dilihat dari indikator makro secara umum mengalami peningkatan. Untuk kedepan kita tetap optimis bahwa capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut dapat memicu meningkatkan daya saing Dharmasraya semakin baik di tingkat regional maupun nasional.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

B.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Dilakukan Tahun 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

B.1. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

B.1.1.1. Pajak dan Retribusi

- a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- m. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- n. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- o. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:

- a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b) menghambat mobilitas penduduk;
 - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- q. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir o) dan butir p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- r. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

B.1.1.2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.1.1.3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

B.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

I. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

II. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

DBH SDA terdiri dari ; (1)DBH-Kehutanan; (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi; (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi; (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan (6) DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022

Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

IV. Dana Transfer Khusus terdiri dari : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperoleh target terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Dan Proyeksi 2022

Kode Akun					Uraian Akun	2021	2022	Selisih	%
1					2	3	4	5	6
4					PENDAPATAN DAERAH	950.959.985.306	874.645.276.063	(76.314.709.243,00)	(8,0)
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.116.605.330	92.252.675.707	8.136.070.377	9,7
4	1	1			Pajak Daerah	18.714.133.896	26.381.633.896	7.667.500.000	41,0
4	1	2			Retribusi Daerah	3.073.472.400	3.161.472.400	88.000.000	2,9
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034	3.524.570.411	(539.181.623,00)	(13,3)
4	1	4			Lain-lain PAD yang Sah	58.265.247.000	59.184.999.000	919.752.000	1,6
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	835.392.279.976	781.892.600.356	(53.499.679.620,00)	(6,4)
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	795.317.896.000	734.685.921.999	(60.631.974.001,00)	(7,6)
4	2	1	1		Dana Perimbangan	721.777.491.000	680.402.244.999	(41.375.246.001,00)	(5,7)
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.129.795.817	20.451.510.999	3.321.715.182	19,4
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	488.046.996.000	472.606.168.000	(15.440.828.000,00)	(3,2)
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	126.655.180.000	68.322.925.000	(58.332.255.000,00)	(46,1)
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.945.519.183	119.021.641.000	29.076.121.817	32,3
4	2	1	2		Dana Insentif Daerah (DID)	17.000.339.000	6.527.889.000	(10.472.450.000,00)	(61,6)
4	2	1	3		Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4	2	1	4		Dana Keistimewaan	-	-	-	-
4	2	1	5		Dana Desa	56.540.066.000	47.755.788.000	(8.784.278.000,00)	(15,5)
4	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.074.383.976	47.206.678.357	7.132.294.381	17,8
4	2	2	1		Pendapatan Bagi Hasil	40.074.383.976	47.206.678.357	7.132.294.381	17,8
4	2	2	2		Bantuan Keuangan				-

Kode Akun					Uraian Akun	2021	2022	Selisih	%
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.451.100.000	500.000.000	(30.951.100.000,00)	(98,4)
4	3	1			Pendapatan Hibah	500.000.000	500.000.000	-	-
4	3	2			Dana Darurat	-	-	-	-
4	3	3			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.951.100.000	-	(30.951.100.000,00)	(100)

Sumber : KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Secara umum pendapatan daerah tahun 2022 diperkirakan masih dibawah nilai pendapatan daerah tahun 2021, yaitu turun dari 950,9 milyar menjadi 874.645.276.063 milyar, hal ini dominan disebabkan oleh asumsi yang digunakan untuk penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 yang masih menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun 2022.

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli daerah (PAD) ditargetkan meningkat dibandingkan dengan PAD Tahun 2021, yaitu naik dari 84,17 milyar menjadi 92,25 milyar. Kenaikan ini didasarkan pada asumsi membaiknya perekonomian makro, dengan demikian sektor perekonomian yang terkait dengan pajak maupun retribusi daerah mengalami peningkatan pendapatan, selain peningkatan tersebut juga dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan daerah dan , diantaranya pajak daerah yang berasal dari Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir Air Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Berbeda dengan pajak daerah, untuk pendapatan daerah dari retribusi mengalami sedikit peningkatan dari 3,07 milyar di tahun 2021 menjadi 3,16 milyar di tahun 2022, untuk retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, dan retribusi lainnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun 2021, namun untuk retribusi jasa usaha belum dapat ditarget meningkat dibandingkan tahun 2021, baik untuk retribusi pemakaian kekayaan, parkir, tera ulang maupun jenis retribusi lainnya, dan ini tidak dapat ditargetkan meningkat namun diharapkan penurunan pungutan retribusi usaha ini akan dapat memperbaiki prospek dunia usaha untuk bangkit selama tahun 2022. Tak jauh berbeda dengan tahun 2021, target retribusi perizinan IMB yang juga belum ditargetkan meningkat karena pembangunan konstruksi bangunan pada umumnya belum sepenuhnya pulih.
3. Pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah atau provinsi.
4. Untuk pendapatan transfer pusat, diasumsikan pendapatan di tahun 2022 dari Dana Bagi hasil (DBH) adalah sebesar 20,45 milyar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 472.60 milyar, dan Dana Desa sebesar 47.75 milyar, sedangkan DAK Fisik sebesar 68,32 milyar, DAK Non Fisik 119.02 milyar dan DID sebesar 6,52 milyar, sehingga dengan demikian pendapatan transfer pusat untuk sementara nilainya berkurang dari 795,3 milyar rupiah menjadi 734,68 milyar rupiah.
5. Untuk pendapatan transfer dari provinsi tahun 2022 lebih besar dari kondisi tahun 2021 yaitu 40,0 M tahun 2021 menjadi 47.20 M tahun 2022 karena mempedomani SK Gubernur Nomor : 903-179-2021 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, pendapatan transfer dari provinsi berasal dari dana bagi hasil pajak, yaitu bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bea balik nama, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan, dan pajak rokok.

6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk jenis pendapatan ini di tahun 2022 terdiri dari pendapatan hibah sebesar 500 juta rupiah yang berasal dari pendapatan hibah swasta

B.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK, serta perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi pada tingkat desa/nagari melalui Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, APBD tahun 2022 ini diprioritaskan untuk : 1) Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor Kesehatan dalam penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi; 2) Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat Covid-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha; 3) Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas Pendidikan, penguatan sistem Kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat; 4) Optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalan potensi retribusi dan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pengelolaan asset serta inovasi layanan; (penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

B.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

B.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan wakil Bupati, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

1. Bupati dan wakil Bupati dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
3. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran penambahan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021 yang berjumlah 102 orang yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 53 orang, tenaga kesehatan 40 orang, dan tenaga teknis sebanyak 9 orang.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
 Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

B.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan skema daub kegiatan.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi walinagari dan perangkat nagari serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
 - Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
 - Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
 - Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
 - Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - 1) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - 2) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 3) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - 4) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- 1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi covid19..

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan bupati dan wakil bupati.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- n. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2.1.3. Belanja Bunga dan Subsidi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

B.2.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

a. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - ii. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

B.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta program strategis daerah lainnya
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- f. Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2.3. Belanja Tak Terduga

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Meliputi :
- 1) luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2) keperluan mendesak; dan/atau
 - 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan
- d. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

B.2.4. Belanja Transfer

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa/nagari. Belanja transfer dirinci atas jenis:

B.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari, kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

B.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada nagari. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada pemerintah nagari penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah nagari. Selanjutnya, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Adapun Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.6
Rencana Belanja Daerah Tahun 2022

Kode akun	Uraian Akun	2021	2022	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	1.038.476.229.202	937.945.978.539	-100.530.250.663	-9,68%
5.1	BELANJA OPERASI	731.293.221.750	697.153.360.429	-34.139.861.321	-4,67%
5.1.01	Belanja Pegawai	465.348.163.502	454.362.009.224	-10.986.154.278	-2%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.767.067.368	234.258.060.325	12.490.992.957	6%
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	44.177.990.880	8.533.290.880	-35.644.700.000	-80,68%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				0
5.2	BELANJA MODAL	191.968.383.822	87.259.722.480	-104.708.661.342	-54,54%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.337.634.273	15.244.980.480	-42.092.653.793	-73,41%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.633.398.549	13.814.451.000	-85.818.947.549	-86,13%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.521.551.000	57.700.291.000	23.178.740.000	67,14%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	475.800.000	500.000.000	24.200.000	5,09%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	49.300.000.000	44.300.000.000	886%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	49.300.000.000	44.300.000.000	886%
5.4	BELANJA TRANSFER	110.214.623.630	104.232.895.630	-5.981.728.000	-5,43%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.178.760.630	2.954.310.630	775.550.000	35,60%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.035.863.000	101.278.585.000	-6.757.278.000	-6,25%

Sumber Data : KUA Kabupaten Dharmasraya 2022

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih belanja tahun 2022 dibanding tahun 2021, yaitu berkurang sebesar 74,3 milyar rupiah, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja operasi, terdiri dari
 - a. Belanja pegawai, jenis belanja ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati serta tambahan/penerimaan lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja pegawai diperkirakan naik dari 465,34 milyar rupiah menjadi 454.36 milyar rupiah atau turun sekitar 10,98 milyar rupiah. Untuk belanja gaji diperhitungkan sebanyak 14 bulan dengan tambahan akses sebesar 2,5 persen dari kondisi tahun 2021, yaitu untuk ASN yang mengalami kenaikan pangkat maupun impasing gaji. untuk tambahan penghasilan ASN (tunjangan daerah) hanya dihitung sebanyak 12 bulan. Penurunan belanja pegawai ini belum diperhitungkan belanja dari pendapatan DAK, DID dan tambahan DAU Tahun 2022
 - b. belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa turun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 221,7 Milyar menjadi 234.25 Milyar atau meningkat sebesar 12,49 Milyar. Belanja barang dan jasa ini terdiri dari belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat serta belanja jasa yang diantaranya untuk honorarium ASN maupun honor THL, serta untuk sementara baru dapat dialokasikan sebagian besar hanya untuk belanja rutin atau belanja kesekretariatan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan di perangkat daerah.
 - c. belanja hibah, besaran belanja hibah tahun 2022 diperkirakan akan berkurang dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu dari 44,1 milyar menjadi 30,9 milyar rupiah. Diantara bentuk belanja hibah yang akan dialokasikan yaitu belanja hibah dana BOS sebesar 30,9 milyar rupiah, di tahun 2022 hanya sebesar 8,53 milyar, yang dialokasikan untuk hibah kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
 - d. Sedangkan untuk belanja subsidi dan belanja bunga tidak dialokasikan, dengan alasan tidak adanya pembayaran bunga yang diakibatkan oleh hutang maupun tidak adanya belanja subsidi.
2. Belanja modal, alokasi belanja dibandingkan dengan tahun 2021 turun dari 191,9 Milyar rupiah menjadi sebesar 88.37 milyar rupiah yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja aset tetap lainnya. Penurunan belanja modal ini disebabkan karena menurunnya alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat di Tahun 2022
3. Belanja tidak terduga. merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran belanja ini dialokasikan sebesar 49,3 milyar rupiah.
4. Belanja transfer. Terdiri dari
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada nagari, belanja bagi hasil ini dialokasikan sebesar 2.95 milyar rupiah yang dihitung sebesar 10 persen dari jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan retribusi daerah
 - b. Belanja bantuan keuangan kepada nagari, alokasi ini diperkirakan sebesar 101,27 milyar rupiah yang berasal dari dana desa ditambah dengan bantuan keuangan pemerintahan nagari /alokasi dana nagari yang perhitungannya didapat dari 10 % dana Perimbangan diluar DAK.

B.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan besaran APBD Tahun Anggaran 2021, maka diasumsikan tidak adanya pembiayaan daerah. Dilihat dari sisi penerimaan pembiayaan, maka dengan melihat struktur dan besaran APBD tahun 2021 maka diasumsikan secara cermat tidak adanya SILPA selama tahun 2021, dan apabila akan terjadi SILPA maka nilainya tidak terlalu signifikan terhadap APBD tahun 2022.

Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan yang tidak dialokasikan untuk tahun 2022, belum mempunya pemerintah untuk penyertaan modal karena APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan belanja sesuai prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.7
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Kode Akun					Uraian Akun	2021	2022	Selisih	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6					PEMBIAYAAN DAERAH	87.516.243.896	58.994.211.000	-28.522.032.896	-32,6
6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.516.243.896	58.994.211.000	-28.522.032.896	-32,6
6	1	01			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	-	-	-	-
6	1	02			Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	1	03			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6	1	04			Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	1	05			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	1	06			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
6	2	01			Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	2	02			Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
6	2	03			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo	-	-	-	-
6	2	04			Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	2	05			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-
					SILPA	-	-	-	-

Sumber : KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Target penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp918.477,642.858,00 dapat direalisasikan sebesar Rp910.906.883,278.80 atau sebesar 99,18 % terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105.415.369.674,00 terealisasi sebesar Rp108,010,790,645.80 atau 102.46 %
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp797.437.653.184,00 dengan terealisasi sebesar Rp786.316.021.026.00 atau 98,61%;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp15.624.620.000.00 terealisasi sebesar Rp16.580.071.607,00 atau 106,12%.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp988.684.628.840,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp725.688.993.576,00, belanja modal sebesar Rp151.905.233.451,00, belanja tak terduga sebesar Rp450.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp110.640.401.813,00.

Dari total target Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp939.201.337.181,35 atau 95% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp696.035.587.551,49 belanja modal sebesar Rp132.745.862.856,86 , belanja tak terduga sebesar Rp369.162.297,00 dan belanja transfer sebesar Rp110.050.724.476,00.

Sementara dari nilai penerimaan pembiayaan yang ditargetkan pada APBD perubahan sebesar Rp70.206.985.982,00 terealisasi 100% dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 sehingga nilai pembiayaan netto menjadi sebesar Rp70.206.985.982,71.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah di Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

Dalam Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp918.477.642.858,00 yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp105.415.369.674,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp797.437.653.184,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp15.624.620.000,00

Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp 988.684.628.840,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Operasi Rp725.688.993.576,00
- Belanja Modal Rp151.905.233.451,00
- Belanja Tidak Terduga Rp 450.000.000,00
- Belanja Transfer Rp110.640.401.813,00

Kekurangan dana untuk membiayai belanja daerah selama Tahun 2022 sebesar Rp70.206.985.982,00 akan di danai dari SiLPA Tahun Lalu setelah koreksi sebesar Rp70.206.985.982,00.

Tabel 3.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2022

URAIAN	APBD TA. 2022	REALISASI
Pendapatan	918.477.642.858,00	911.076.883.278,80
Belanja	988.684.628.840,00	939.371.337.181,35
Surplus/Defisit	(70.206.985.982,00)	(28.294.453.902,55)

Persentase Target dan Realisasi capaian keuangan sebagaimana Tabel 3.1 di atas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat di Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Persentase Pendapatan dan Belanja SKPD TA 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
1	Dinas Pendidikan	137,83	96,19
2	Dinas Kesehatan	89,13	95,24
3	Rumah Sakit Umum Daerah	108,61	95,38
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	39,60	89,23
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	113,37	95,27
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	98,13
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	-	92,72
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	76,20
9	Dinas Pangan Perikanan	49,64	97,38
10	Dinas Lingkungan Hidup	142,26	96,62
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	98,13
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	98,57
13	Dinas Perhubungan	69,73	93,46
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	67,33	98,13
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	91,88	96,88
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	103,81	98,17
17	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	-	96,39
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	92,68
19	Dinas Pertanian	181,03	98,29
20	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	91,13	97,62
21	Sekretariat Daerah	277,00	99,09
22	Sekretariat DPRD	-	94,31
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	97,26
24	Badan Keuangan Daerah	98,86	98,86
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	95,90
26	Inspektorat Kabupaten	-	97,48
27	Kecamatan Pulau Punjung	166,67	96,82

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
28	Kecamatan Sitiung	100,00	97,66
29	Kecamatan Koto Baru	100,00	97,45
30	Kecamatan Sungai Rumbai	133,87	97,58
31	Kecamatan Sembilan Koto	100,00	96,50
32	Kecamatan Timpeh	-	97,23
33	Kecamatan Koto Salak	-	96,73
34	Kecamatan Asam Jujuhan	-	92,43
35	Kecamatan Koto Besar	50,00	96,41
36	Kecamatan Padang Laweh	-	96,88
37	Kecamatan Tiumang	-	97,89
38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	97,81

Untuk lebih rinci, Target Pendapatan dan Belanja dari masing-masing Perangkat Daerah di atas dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3.3
Target Capaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Per SKPD Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
1	Dinas Pendidikan	PENDAPATAN	45.750.000,00	63.058.000,00	17.308.000,00	137,83
		Pendapatan Asli Daerah	45.750.000,00	63.058.000,00	17.308.000,00	137,83
		Pendapatan Retribusi Daerah	45.750.000,00	63.058.000,00	17.308.000,00	137,83
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	271.628.179.365,00	261.276.606.880,49	10.351.572.484,51	96,19
		Belanja Operasi	246.404.451.716,00	236.811.036.687,56	9.593.415.028,44	96,11
		Belanja Pegawai	200.647.412.742,00	193.339.905.067,00	7.307.507.675,00	96,36
		Belanja Barang dan Jasa	37.179.738.974,00	35.115.095.148,56	2.064.643.825,44	94,45
		Belanja Hibah	8.577.300.000,00	8.356.036.472,00	221.263.528,00	
		Belanja Modal	25.223.727.649,00	24.465.570.192,93	758.157.456,07	96,99
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.546.171.349,00	11.481.304.608,00	64.866.741,00	99,44
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.774.853.924,00	11.083.063.208,93	691.790.715,07	94,12
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.902.702.376,00	1.901.202.376,00	1.500.000,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(271.582.429.365,00)	(261.213.548.880,49)	(10.334.264.484,51)	96,18
2	Dinas Kesehatan	PENDAPATAN	333.680.000,00	300.568.850,00	(33.111.150,00)	90,08
		Pendapatan Asli Daerah	333.680.000,00	300.568.850,00	(33.111.150,00)	90,08
		Pendapatan Retribusi Daerah	333.680.000,00	300.568.850,00	(33.111.150,00)	90,08
		BELANJA	85.460.166.362,00	91.408.080.516,81	(5.947.914.154,81)	106,96
		Belanja Operasi	76.717.625.090,00	82.955.482.913,44	(6.237.857.823,44)	108,13
		Belanja Pegawai	54.310.034.000,00	53.263.636.646,00	1.046.397.354,00	98,07
		Belanja Barang dan Jasa	22.407.591.090,00	29.691.846.267,44	(7.284.255.177,44)	132,51
		Belanja Modal	8.742.541.272,00	8.452.597.603,37	289.943.668,63	96,68
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.068.946.000,00	5.892.963.467,00	175.982.533,00	97,10
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.127.199.272,00	2.047.688.492,00	79.510.780,00	96,26
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	546.396.000,00	511.945.644,37	34.450.355,63	93,69
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(85.126.486.362,00)	(91.107.511.666,81)	5.914.803.004,81	107,03
3	BLUD Puskesmas	PENDAPATAN	9.526.063.000,00	8.487.246.244,00	(1.038.816.756,00)	89,10
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0,00	0,00
		Lain Lain PAD yang sah	9.526.063.000,00	8.487.246.244,00	(1.038.816.756,00)	89,10
		BELANJA	28.212.518.858,00	15.673.145.370,30	12.539.373.487,70	55,55
		Belanja Operasi	26.602.917.240,00	14.463.294.205,30	12.139.623.034,70	54,37
		Belanja Pegawai	4.630.889.811,00	4.230.583.532,44	400.306.278,56	91,36
		Belanja Barang dan Jasa	21.972.027.429,00	10.232.710.672,86	11.739.316.756,14	46,57
		Belanja Modal	1.609.601.618,00	1.209.851.165,00	399.750.453,00	75,16
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.609.601.618,00	1.209.851.165,00	399.750.453,00	75,16
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.686.455.858,00)	(7.185.899.126,30)	(13.578.190.243,70)	38,46
4	Rumah Sakit Umum Daerah	PENDAPATAN	12.500.000,00	16.900.800,00	4.400.800,00	135,21
		Pendapatan Asli Daerah	12.500.000,00	16.900.800,00	4.400.800,00	135,21
		Pendapatan Retribusi Daerah	12.500.000,00	16.900.800,00	4.400.800,00	135,21
		BELANJA	36.539.131.250,00	34.967.244.371,00	1.571.886.879,00	95,70
		Belanja Operasi	21.014.511.250,00	19.478.714.371,00	1.535.796.879,00	92,69
		Belanja Pegawai	17.414.748.000,00	16.828.628.897,00	586.119.103,00	96,63
		Belanja Barang dan Jasa	3.599.763.250,00	2.650.085.474,00	949.677.776,00	73,62
		Belanja Modal	15.524.620.000,00	15.488.530.000,00	36.090.000,00	99,77
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.524.620.000,00	15.488.530.000,00	36.090.000,00	99,77
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(36.526.631.250,00)	(34.950.343.571,00)	(1.567.486.079,00)	95,68
5	BLUD RSUD	PENDAPATAN	50.000.000.000,00	54.300.704.363,00	(4.300.704.363,00)	108,60
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	-
		Lain Lain PAD yang sah	50.000.000.000,00	54.300.704.363,00	(4.300.704.363,00)	108,60
		BELANJA	52.799.511.411,00	50.241.756.602,00	2.125.753.092,00	96,32
		Belanja Operasi	50.393.211.185,00	48.537.377.107,00	1.617.327.162,00	96,32
		Belanja Pegawai	17.701.071.129,00	17.462.564.213,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	32.692.140.056,00	31.074.812.894,00	1.617.327.162,00	95,05
		Belanja Modal	2.406.300.226,00	1.704.379.495,00	508.425.930,00	70,83
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.821.300.226,00	1.312.874.296,00	508.425.930,00	72,08
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	585.000.000,00	391.505.199,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.799.511.411,00)	4.058.947.761,00	(6.426.457.455,00)	-144,99
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	PENDAPATAN	1.330.000.000,00	526.738.000,00	(803.262.000,00)	39,60
		Pendapatan Asli Daerah	1.330.000.000,00	526.738.000,00	(803.262.000,00)	39,60
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.330.000.000,00	526.738.000,00	(803.262.000,00)	39,60

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	115.087.483.749,00	102.698.219.050,32	12.389.264.698,68	89,23
		Belanja Operasi	54.529.344.513,00	52.475.995.249,00	2.053.349.264,00	96,23
		Belanja Pegawai	4.977.469.000,00	4.591.941.379,00	385.527.621,00	92,25
		Belanja Barang dan Jasa	49.551.875.513,00	47.884.053.870,00	1.667.821.643,00	96,63
		Belanja Modal	60.558.139.236,00	50.222.223.801,32	10.335.915.434,68	82,93
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.622.700.000,00	1.050.250.000,00	572.450.000,00	64,72
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.417.549.536,00	1.460.134.280,00	4.957.415.256,00	22,75
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.517.889.700,00	47.711.839.521,32	4.806.050.178,68	90,85
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(113.757.483.749,00)	(102.171.481.050,32)	(13.192.526.698,68)	89,82
7	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PENDAPATAN	205.278.400,00	232.729.200,00	27.450.800,00	113,37
		Pendapatan Asli Daerah	205.278.400,00	232.729.200,00	27.450.800,00	113,37
		Pendapatan Retribusi Daerah	205.278.400,00	232.729.200,00	27.450.800,00	113,37
		BELANJA	12.314.356.710,00	11.732.178.756,40	582.177.953,60	95,27
		Belanja Operasi	12.189.864.710,00	11.612.989.756,40	576.874.953,60	95,27
		Belanja Pegawai	1.820.025.000,00	1.589.988.107,00	230.036.893,00	87,36
		Belanja Barang dan Jasa	10.369.839.710,00	10.023.001.649,40	346.838.060,60	96,66
		Belanja Modal	124.492.000,00	119.189.000,00	5.303.000,00	95,74
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.500.000,00	73.510.000,00	1.990.000,00	97,36
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.992.000,00	45.679.000,00	3.313.000,00	93,24
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(12.109.078.310,00)	(11.499.449.556,40)	(554.727.153,60)	94,97
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah			-	0,00
		BELANJA	7.725.032.180,00	7.580.689.112,00	144.343.068,00	98,13
		Belanja Operasi	7.716.532.180,00	7.572.189.112,00	144.343.068,00	98,13
		Belanja Pegawai	2.449.533.000,00	2.350.979.995,00	98.553.005,00	95,98

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Barang dan Jasa	5.266.999.180,00	5.221.209.117,00	45.790.063,00	99,13
		Belanja Modal	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.725.032.180,00)	(7.580.689.112,00)	(144.343.068,00)	98,13
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan keluarga Berencana	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	10.064.514.910,00	9.331.720.987,19	732.793.922,81	92,72
		Belanja Operasi	9.019.514.910,00	8.288.778.862,00	730.736.048,00	91,90
		Belanja Pegawai	2.286.610.000,00	2.184.040.881,00	102.569.119,00	95,51
		Belanja Barang dan Jasa	6.682.904.910,00	6.054.737.981,00	628.166.929,00	90,60
		Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal	1.045.000.000,00	1.042.942.125,19	2.057.874,81	99,80
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.045.000.000,00	1.042.942.125,19	2.057.874,81	99,80
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.064.514.910,00)	(9.331.720.987,19)	(732.793.922,81)	92,72
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	27.129.253.840,00	20.672.802.226,00	6.456.451.614,00	76,20
		Belanja Operasi	2.575.083.840,00	2.525.606.616,00	49.477.224,00	98,08
		Belanja Pegawai	827.758.072,00	783.298.564,00	44.459.508,00	94,63
		Belanja Barang dan Jasa	1.747.325.768,00	1.742.308.052,00	5.017.716,00	99,71

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal	24.554.170.000,00	18.147.195.610,00	6.406.974.390,00	73,91
		Belanja Modal Tanah			0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.170.000,00	54.170.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.500.000.000,00	18.093.025.610,00	6.406.974.390,00	73,85
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(27.129.253.840,00)	(20.672.802.226,00)	(6.456.451.614,00)	76,20
11	Dinas Pangan Perikanan	PENDAPATAN	265.000.000,00	131.550.000,00	(133.450.000,00)	49,64
		Pendapatan Asli Daerah	265.000.000,00	131.550.000,00	(133.450.000,00)	49,64
		Pendapatan Retribusi Daerah	265.000.000,00	131.550.000,00	(133.450.000,00)	49,64
		BELANJA	5.392.871.710,00	5.251.408.258,00	141.463.452,00	97,38
		Belanja Operasi	5.391.971.710,00	5.250.508.258,00	141.463.452,00	97,38
		Belanja Pegawai	2.694.092.000,00	2.600.696.121,00	93.395.879,00	96,53
		Belanja Barang dan Jasa	2.352.879.710,00	2.304.812.137,00	48.067.573,00	97,96
		Belanja Hibah	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.127.871.710,00)	(5.119.858.258,00)	(274.913.452,00)	99,84
12	Dinas Lingkungan Hidup	PENDAPATAN	110.000.000,00	156.483.000,00	46.483.000,00	142,26
		Pendapatan Asli Daerah	110.000.000,00	156.483.000,00	46.483.000,00	142,26
		Pendapatan Retribusi Daerah	110.000.000,00	156.483.000,00	46.483.000,00	142,26
		BELANJA	4.247.203.510,00	4.103.491.875,00	143.711.635,00	96,62
		Belanja Operasi	4.159.269.260,00	4.023.791.875,00	135.477.385,00	96,74
		Belanja Pegawai	1.952.640.000,00	1.863.050.875,00	89.589.125,00	95,41
		Belanja Barang dan Jasa	2.206.629.260,00	2.160.741.000,00	45.888.260,00	97,92
		Belanja Modal	87.934.250,00	79.700.000,00	8.234.250,00	90,64
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.934.250,00	79.700.000,00	8.234.250,00	90,64

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.137.203.510,00)	(3.947.008.875,00)	(97.228.635,00)	95,40
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	4.688.452.740,00	4.600.670.094,00	87.782.646,00	98,13
		Belanja Operasi	4.202.302.740,00	4.115.864.094,00	86.438.646,00	97,94
		Belanja Pegawai	2.474.187.000,00	2.394.457.101,00	79.729.899,00	96,78
		Belanja Barang dan Jasa	1.728.115.740,00	1.721.406.993,00	6.708.747,00	99,61
		Belanja Modal	486.150.000,00	484.806.000,00	1.344.000,00	99,72
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467.400.000,00	466.056.000,00	1.344.000,00	99,71
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.688.452.740,00)	(4.600.670.094,00)	(87.782.646,00)	98,13
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	8.984.991.179,00	8.856.791.917,00	128.199.262,00	98,57
		Belanja Operasi	8.940.891.179,00	8.812.691.917,00	128.199.262,00	98,57
		Belanja Pegawai	2.500.246.751,00	2.426.821.584,00	73.425.167,00	97,06
		Belanja Barang dan Jasa	6.440.644.428,00	6.385.870.333,00	54.774.095,00	99,15
		Belanja Modal	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(8.984.991.179,00)	(8.856.791.917,00)	(128.199.262,00)	98,57

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
15	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN	350.000.000,00	244.052.000,00	(105.948.000,00)	69,73
		Pendapatan Asli Daerah	350.000.000,00	244.052.000,00	(105.948.000,00)	69,73
		Pendapatan Retribusi Daerah	350.000.000,00	244.052.000,00	-105.948.000,00	69,73
		BELANJA	6.735.082.450,00	6.294.529.509,00	440.552.941,00	93,46
		Belanja Operasi	6.474.338.970,00	6.039.222.029,00	435.116.941,00	93,28
		Belanja Pegawai	2.377.425.000,00	2.283.301.653,00	94.123.347,00	96,04
		Belanja Barang dan Jasa	4.096.913.970,00	3.755.920.376,00	340.993.594,00	91,68
		Belanja Modal	260.743.480,00	255.307.480,00	5.436.000,00	97,92
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.218.480,00	118.888.480,00	4.330.000,00	96,49
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	137.525.000,00	136.419.000,00	1.106.000,00	99,20
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.385.082.450,00)	(6.050.477.509,00)	(546.500.941,00)	94,76
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENDAPATAN	500.000.000,00	336.625.000,00	(163.375.000,00)	67,33
		Pendapatan Asli Daerah	500.000.000,00	336.625.000,00	(163.375.000,00)	67,33
		Pendapatan Retribusi Daerah	500.000.000,00	336.625.000,00	-163.375.000,00	67,33
		BELANJA	7.331.723.340,00	7.194.435.320,00	137.288.020,00	98,13
		Belanja Operasi	6.716.723.340,00	6.579.934.320,00	136.789.020,00	97,96
		Belanja Pegawai	2.057.852.000,00	2.011.804.551,00	46.047.449,00	97,76
		Belanja Barang dan Jasa	4.658.871.340,00	4.568.129.769,00	90.741.571,00	98,05
		Belanja Modal	615.000.000,00	614.501.000,00	499.000,00	99,92
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	615.000.000,00	614.501.000,00	499.000,00	99,92
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.831.723.340,00)	(6.857.810.320,00)	(300.663.020,00)	100,38
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	PENDAPATAN	150.000.000,00	148.644.000,00	(1.356.000,00)	91,88
		Pendapatan Asli Daerah	150.000.000,00	148.644.000,00	(1.356.000,00)	91,88
		Pendapatan Retribusi Daerah	50.000.000,00	45.940.000,00	-4.060.000,00	91,88
		Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	102.704.000,00	2.704.000,00	102,70

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		BELANJA	4.826.955.455,00	4.676.161.736,00	150.793.719,00	96,88
		Belanja Operasi	4.826.955.455,00	4.676.161.736,00	150.793.719,00	96,88
		Belanja Pegawai	1.980.286.000,00	1.917.727.565,00	62.558.435,00	96,84
		Belanja Barang dan Jasa	2.846.669.455,00	2.758.434.171,00	88.235.284,00	96,90
		Belanja Modal	-	-	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.676.955.455,00)	(4.527.517.736,00)	(152.149.719,00)	96,80
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	PENDAPATAN	600.000.000,00	622.887.700,00	22.887.700,00	103,81
		Pendapatan Asli Daerah	600.000.000,00	622.887.700,00	22.887.700,00	103,81
		Pendapatan Retribusi Daerah	600.000.000,00	622.887.700,00	22.887.700,00	103,81
		BELANJA	4.447.925.258,00	4.366.566.311,00	81.358.947,00	98,17
		Belanja Operasi	4.266.575.258,00	4.186.259.611,00	80.315.647,00	98,12
		Belanja Pegawai	1.865.167.000,00	1.805.419.989,00	59.747.011,00	96,80
		Belanja Barang dan Jasa	2.401.408.258,00	2.380.839.622,00	20.568.636,00	99,14
		Belanja Modal	181.350.000,00	180.306.700,00	1.043.300,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.350.000,00	158.456.700,00	893.300,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.000.000,00	21.850.000,00	150.000,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.847.925.258,00)	(3.743.678.611,00)	(58.471.247,00)	97,29
19	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	11.981.505.582,00	11.548.973.780,98	432.531.801,02	96,39
		Belanja Operasi	11.843.825.582,00	11.412.208.760,98	431.616.821,02	96,36
		Belanja Pegawai	2.339.411.000,00	2.159.236.347,00	180.174.653,00	92,30
		Belanja Barang dan Jasa	8.624.414.582,00	8.423.750.013,98	200.664.568,02	97,67

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Hibah	880.000.000,00	829.222.400,00	50.777.600,00	94,23
		Belanja Modal	137.680.000,00	136.765.020,00	914.980,00	99,34
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.080.000,00	134.259.020,00	820.980,00	99,39
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.600.000,00	2.506.000,00	94.000,00	96,38
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.981.505.582,00)	(11.548.973.780,98)	(432.531.801,02)	96,39
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	3.441.253.330,00	3.189.345.010,00	251.908.320,00	92,68
		Belanja Operasi	3.323.318.330,00	3.080.314.010,00	243.004.320,00	92,69
		Belanja Pegawai	2.486.046.000,00	2.253.559.390,00	232.486.610,00	90,65
		Belanja Barang dan Jasa	837.272.330,00	826.754.620,00	10.517.710,00	98,74
		Belanja Modal	117.935.000,00	109.031.000,00	8.904.000,00	92,45
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.935.000,00	109.031.000,00	8.904.000,00	92,45
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.441.253.330,00)	(3.189.345.010,00)	(251.908.320,00)	92,68
21	Dinas Pertanian	PENDAPATAN	131.500.000,00	112.417.250,00	(19.082.750,00)	181,03
		Pendapatan Asli Daerah	131.500.000,00	112.417.250,00	(19.082.750,00)	181,03
		Pendapatan Retribusi Daerah	31.500.000,00	31.552.500,00	52.500,00	100,17
		Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	80.864.750,00	-19.135.250,00	80,86
		BELANJA	20.011.708.490,00	19.669.334.761,57	342.373.728,43	98,29
		Belanja Operasi	19.843.867.770,00	19.501.820.846,52	342.046.923,48	98,28
		Belanja Pegawai	11.443.788.000,00	11.183.690.452,00	260.097.548,00	97,73
		Belanja Barang dan Jasa	8.400.079.770,00	8.318.130.394,52	81.949.375,48	99,02
		Belanja Modal	167.840.720,00	167.513.915,05	326.804,95	99,81
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.625.000,00	140.575.000,00	50.000,00	99,96
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.215.720,00	26.938.915,05	276.804,95	98,98
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.880.208.490,00)	(19.556.917.511,57)	(361.456.478,43)	98,37
22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	PENDAPATAN	13.980.000,00	12.739.700,00	(1.240.300,00)	91,13
		Pendapatan Asli Daerah	13.980.000,00	12.739.700,00	(1.240.300,00)	91,13
		Pendapatan Retribusi Daerah	13.980.000,00	12.739.700,00	-1.240.300,00	91,13
		BELANJA	3.622.847.810,00	3.536.676.516,00	86.171.294,00	97,62
		Belanja Operasi	3.592.719.810,00	3.508.048.516,00	84.671.294,00	97,64
		Belanja Pegawai	2.608.990.000,00	2.542.674.380,00	66.315.620,00	97,46
		Belanja Barang dan Jasa	983.729.810,00	965.374.136,00	18.355.674,00	98,13
		Belanja Modal	30.128.000,00	28.628.000,00	1.500.000,00	95,02
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.128.000,00	28.628.000,00	1.500.000,00	95,02
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.608.867.810,00)	(3.523.936.816,00)	(87.411.594,00)	97,65
23	Sekretariat Daerah	PENDAPATAN	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	277,00
		Pendapatan Asli Daerah	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	277,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	277,00
		BELANJA	46.240.134.766,00	45.819.862.387,29	420.272.378,71	99,09
		Belanja Operasi	38.315.739.766,00	37.995.407.887,29	320.331.878,71	99,16
		Belanja Pegawai	7.788.816.000,00	7.573.370.986,00	215.445.014,00	97,23
		Belanja Barang dan Jasa	29.626.923.766,00	29.522.145.032,29	104.778.733,71	99,65
		Belanja Hibah	900.000.000,00	899.891.869,00	108.131,00	99,99
		Belanja Modal	7.924.395.000,00	7.824.454.500,00	99.940.500,00	98,74
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.875.270.000,00	7.775.329.500,00	99.940.500,00	98,73
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.125.000,00	49.125.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(46.230.134.766,00)	(45.792.162.387,29)	(402.572.378,71)	99,05
24	Sekretariat DPRD	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	46.257.950.605,00	43.624.240.804,00	2.633.709.801,00	94,31
		Belanja Operasi	46.127.650.605,00	43.496.535.804,00	2.631.114.801,00	94,30
		Belanja Pegawai	13.207.058.000,00	12.830.178.017,00	376.879.983,00	97,15
		Belanja Barang dan Jasa	32.920.592.605,00	30.666.357.787,00	2.254.234.818,00	93,15
		Belanja Modal	130.300.000,00	127.705.000,00	2.595.000,00	98,01
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.300.000,00	127.705.000,00	2.595.000,00	98,01
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(46.257.950.605,00)	(43.624.240.804,00)	(2.633.709.801,00)	94,31
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	5.323.104.360,00	5.177.298.815,00	145.805.545,00	97,26
		Belanja Operasi	5.030.404.360,00	4.884.747.464,00	145.656.896,00	97,10
		Belanja Pegawai	2.153.052.000,00	2.086.007.971,00	67.044.029,00	96,89
		Belanja Barang dan Jasa	2.877.352.360,00	2.798.739.493,00	78.612.867,00	97,27
		Belanja Modal	292.700.000,00	292.551.351,00	148.649,00	99,95
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.700.000,00	292.551.351,00	148.649,00	99,95
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.323.104.360,00)	(5.177.298.815,00)	(145.805.545,00)	97,26
26	Badan Keuangan Daerah	PENDAPATAN	854.877.771.458,00	845.345.663.571,80	(9.532.107.886,20)	98,88
		Pendapatan Asli Daerah	41.815.498.274,00	42.279.570.938,80	464.072.664,80	101,11

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Pajak Daerah	22.776.715.953,00	21.634.156.143,46	(1.142.559.809,54)	94,98
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	0,00	100,00
		Lain-lain PAD yang Sah	14.714.716.485,00	16.321.348.959,34	1.606.632.474,34	110,92
		Pendapatan Transfer	797.437.653.184,00	786.486.021.026,00	(10.951.632.158,00)	98,63
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736.565.887.000,00	727.854.055.483,00	(8.711.831.517,00)	98,82
		Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.871.766.184,00	58.631.965.543,00	(2.239.800.641,00)	96,32
		Lain-lain PAD yang Sah	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	955.451.607,00	106,12
		Pendapatan Hibah	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	955.451.607,00	106,12
		BELANJA	124.606.521.627,00	123.344.226.999,00	1.262.294.628,00	98,99
		Belanja Operasi	12.796.709.814,00	12.218.261.226,00	578.448.588,00	95,48
		Belanja Pegawai	5.580.805.974,00	5.253.509.306,00	327.296.668,00	94,14
		Belanja Barang dan Jasa	7.215.903.840,00	6.964.751.920,00	251.151.920,00	96,52
		Belanja Modal	719.410.000,00	706.079.000,00	13.331.000,00	98,15
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	-	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.410.000,00	519.759.000,00	9.651.000,00	98,18
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	-	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000,00	186.320.000,00	3.680.000,00	98,06
		Belanja Tak Terduga	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04
		Belanja Tidak Terduga	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04
		Belanja Transfer	110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	589.677.337,00	99,47
		Belanja Bagi Hasil	3.249.217.813,00	2.659.549.476,00	589.668.337,00	81,85
		Belanja Bantuan Keuangan	107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	9.000,00	98,84
		SURPLUS / (DEFISIT)	730.271.249.831,00	721.826.216.572,80	(10.969.622.514,20)	98,84
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	5.967.286.712,00	5.722.807.411,00	244.479.301,00	95,90
		Belanja Operasi	5.806.986.712,00	5.574.597.411,00	232.389.301,00	96,00
		Belanja Pegawai	2.944.346.000,00	2.860.130.734,00	84.215.266,00	97,14
		Belanja Barang dan Jasa	2.862.640.712,00	2.714.466.677,00	148.174.035,00	94,82

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal	160.300.000,00	148.210.000,00	12.090.000,00	92,46
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.300.000,00	148.210.000,00	12.090.000,00	92,46
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.967.286.712,00)	(5.722.807.411,00)	(244.479.301,00)	95,90
28	Inspektorat Kabupaten	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	7.619.324.550,00	7.427.311.467,00	192.013.083,00	97,48
		Belanja Operasi	6.991.334.550,00	6.820.675.558,00	170.658.992,00	97,56
		Belanja Pegawai	3.527.417.000,00	3.434.458.642,00	92.958.358,00	97,36
		Belanja Barang dan Jasa	3.463.917.550,00	3.386.216.916,00	77.700.634,00	97,76
		Belanja Modal	627.990.000,00	606.635.909,00	21.354.091,00	96,60
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	627.990.000,00	606.635.909,00	21.354.091,00	96,60
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.619.324.550,00)	(7.427.311.467,00)	(192.013.083,00)	97,48
29	Kecamatan Pulau Punjung	PENDAPATAN	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	166,67
		Pendapatan Asli Daerah	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	166,67
		Pendapatan Retribusi Daerah	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	166,67
		BELANJA	2.061.138.347,00	1.995.519.985,00	65.618.362,00	96,82
		Belanja Operasi	2.061.138.347,00	1.995.519.985,00	65.618.362,00	96,82
		Belanja Pegawai	1.653.582.000,00	1.597.716.110,00	55.865.890,00	96,62
		Belanja Barang dan Jasa	407.556.347,00	397.803.875,00	9.752.472,00	97,61
		Belanja Modal	-	-	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.058.138.347,00)	(1.990.519.985,00)	(63.618.362,00)	96,71
30	Kecamatan Sitiung	PENDAPATAN	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
		Pendapatan Asli Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
		BELANJA	1.796.344.380,00	1.754.263.701,00	42.080.679,00	97,66
		Belanja Operasi	1.772.244.380,00	1.730.163.701,00	42.080.679,00	97,63
		Belanja Pegawai	1.461.181.000,00	1.419.719.684,00	41.461.316,00	97,16
		Belanja Barang dan Jasa	311.063.380,00	310.444.017,00	619.363,00	99,80
		Belanja Modal	24.100.000,00	24.100.000,00	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.794.884.380,00)	(1.752.803.701,00)	(42.080.679,00)	97,66
32	Kecamatan Koto Baru	PENDAPATAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		Pendapatan Asli Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		BELANJA	2.074.155.460,00	2.021.261.386,00	52.894.074,00	97,45
		Belanja Operasi	2.054.155.460,00	2.001.261.386,00	52.894.074,00	97,43
		Belanja Pegawai	1.501.419.000,00	1.453.963.632,00	47.455.368,00	96,84
		Belanja Barang dan Jasa	552.736.460,00	547.297.754,00	5.438.706,00	99,02
		Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.072.655.460,00)	(2.019.761.386,00)	(52.894.074,00)	97,45

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
33	Kecamatan Sungai Rumbai	PENDAPATAN	3.500.000,00	4.685.600,00	1.185.600,00	133,87
		Pendapatan Asli Daerah	3.500.000,00	4.685.600,00	1.185.600,00	133,87
		Pendapatan Retribusi Daerah	3.500.000,00	4.685.600,00	1.185.600,00	133,87
		BELANJA	1.499.504.577,00	1.463.282.395,00	36.222.182,00	97,58
		Belanja Operasi	1.499.504.577,00	1.463.282.395,00	36.222.182,00	97,58
		Belanja Pegawai	1.221.167.000,00	1.185.458.091,00	35.708.909,00	97,08
		Belanja Barang dan Jasa	278.337.577,00	277.824.304,00	513.273,00	99,82
		Belanja Modal	-	-	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.496.004.577,00)	(1.458.596.795,00)	(35.036.582,00)	97,50
34	Kecamatan Sembilan Koto	PENDAPATAN	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
		Pendapatan Asli Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
		BELANJA	1.452.226.960,00	1.401.394.556,00	50.832.404,00	96,50
		Belanja Operasi	1.438.226.960,00	1.387.394.556,00	50.832.404,00	96,47
		Belanja Pegawai	1.162.522.000,00	1.119.240.137,00	43.281.863,00	96,28
		Belanja Barang dan Jasa	275.704.960,00	268.154.419,00	7.550.541,00	97,26
		Belanja Modal	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.450.476.960,00)	(1.399.644.556,00)	(50.832.404,00)	96,50
35	Kecamatan Timpeh	PENDAPATAN	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.660.000,00	0,00	-1.660.000,00	0,00
		BELANJA	1.345.846.660,00	1.308.587.784,00	37.258.876,00	97,23

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Operasi	1.334.246.660,00	1.297.071.659,00	37.175.001,00	97,21
		Belanja Pegawai	1.048.263.000,00	1.014.620.229,00	33.642.771,00	96,79
		Belanja Barang dan Jasa	285.983.660,00	282.451.430,00	3.532.230,00	98,76
		Belanja Modal	11.600.000,00	11.516.125,00	83.875,00	83875,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.600.000,00	11.516.125,00	83.875,00	83875,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.344.186.660,00)	(1.308.587.784,00)	(38.918.876,00)	97,35
36	Kecamatan Koto Salak	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	1.290.701.020,00	1.248.475.717,00	42.225.303,00	96,73
		Belanja Operasi	1.290.701.020,00	1.248.475.717,00	42.225.303,00	96,73
		Belanja Pegawai	1.007.736.000,00	970.776.092,00	36.959.908,00	96,33
		Belanja Barang dan Jasa	282.965.020,00	277.699.625,00	5.265.395,00	98,14
		Belanja Modal	-	-	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.290.701.020,00)	(1.248.475.717,00)	(42.225.303,00)	96,73
37	Kecamatan Asam Jujuhan	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0,00	0,00
		BELANJA	1.195.964.850,00	1.105.406.643,00	90.558.207,00	92,43
		Belanja Operasi	1.171.814.850,00	1.081.256.643,00	90.558.207,00	92,27
		Belanja Pegawai	873.334.000,00	784.161.336,00	89.172.664,00	89,79

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Barang dan Jasa	298.480.850,00	297.095.307,00	1.385.543,00	99,54
		Belanja Modal	24.150.000,00	24.150.000,00	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.195.964.850,00)	(1.105.406.643,00)	(90.558.207,00)	92,43
38	Kecamatan Koto Besar	PENDAPATAN	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00
		Pendapatan Asli Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	50,00
		BELANJA	1.843.494.717,00	1.777.365.598,00	66.129.119,00	96,41
		Belanja Operasi	1.843.494.717,00	1.777.365.598,00	66.129.119,00	96,41
		Belanja Pegawai	1.548.462.000,00	1.482.672.579,00	65.789.421,00	95,75
		Belanja Barang dan Jasa	295.032.717,00	294.693.019,00	339.698,00	99,88
		Belanja Modal	-	-	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.841.494.717,00)	(1.776.365.598,00)	(67.129.119,00)	96,46
39	Kecamatan Padang Laweh	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0,00	0,00
		BELANJA	1.196.875.440,00	1.159.564.716,00	37.310.724,00	96,88
		Belanja Operasi	1.196.875.440,00	1.159.564.716,00	37.310.724,00	96,88
		Belanja Pegawai	888.370.000,00	851.908.176,00	36.461.824,00	95,90
		Belanja Barang dan Jasa	308.505.440,00	307.656.540,00	848.900,00	99,72
		Belanja Modal	-	-	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.196.875.440,00)	(1.159.564.716,00)	(37.310.724,00)	96,88
40	Kecamatan Tiumang	PENDAPATAN	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00
		BELANJA	1.586.271.300,00	1.552.760.567,00	33.510.733,00	97,89
		Belanja Operasi	1.586.271.300,00	1.552.760.567,00	33.510.733,00	97,89
		Belanja Pegawai	1.273.692.000,00	1.241.041.441,00	32.650.559,00	97,44
		Belanja Barang dan Jasa	312.579.300,00	311.719.126,00	860.174,00	99,72
		Belanja Modal	-	-	-	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.585.021.300,00)	(1.552.760.567,00)	(34.760.733,00)	97,96
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	2.655.113.020,00	2.596.877.289,00	58.235.731,00	97,81
		Belanja Operasi	2.625.678.020,00	2.567.442.289,00	58.235.731,00	97,78
		Belanja Pegawai	856.262.000,00	821.942.118,00	34.319.882,00	95,99
		Belanja Barang dan Jasa	971.025.140,00	948.609.291,00	22.415.849,00	97,69
		Belanja Hibah	798.390.880,00	796.890.880,00	1.500.000,00	99,81
		Belanja Modal	29.435.000,00	29.435.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.435.000,00	29.435.000,00	0,00	100,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.655.113.020,00)	(2.596.877.289,00)	(58.235.731,00)	97,81
	Rekapitulasi	PENDAPATAN	918.477.642.858,00	910.906.883.278,80	(7.570.759.579,20)	99,18
		Pendapatan Asli Daerah	105.415.369.674,00	108.010.790.645,80	2.595.420.971,80	102,46
		Pendapatan Pajak Daerah	22.776.715.953,00	21.634.156.143,46	(1.142.559.809,54)	94,98
		Pendapatan Retribusi Daerah	3.873.808.400,00	2.764.920.350,00	(1.108.888.050,00)	71,37
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	0,00	100,00
		Lain-lain PAD Yang Sah	74.440.779.485,00	79.287.648.316,34	4.846.868.831,34	106,51
		PENDAPATAN TRANSFER	797.437.653.184,00	786.316.021.026,00	(11.121.632.158,00)	98,61
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736.565.887.000,00	727.684.055.483,00	(8.881.831.517,00)	98,79
		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	60.871.766.184,00	58.631.965.543,00	(2.239.800.641,00)	96,32
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	955.451.607,00	106,12
		Pendapatan Hibah	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	955.451.607,00	106,12
		BELANJA	878.044.227.027,00	829.150.612.705,35	48.461.612.604,65	94,43
		Belanja Operasi	725.688.993.576,00	696.035.587.551,49	29.414.899.108,51	95,91
		Belanja Pegawai	393.543.166.479,00	380.048.882.570,44	13.255.776.992,56	96,57
		Belanja Barang dan Jasa	320.595.136.217,00	304.709.663.360,05	15.885.472.856,95	95,05
		Belanja Hibah	11.550.690.880,00	11.277.041.621,00	273.649.259,00	97,63
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	151.905.233.451,00	132.745.862.856,86	18.965.875.793,14	87,39
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.984.934.923,00	48.011.240.621,00	1.973.694.302,00	96,05
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.484.719.732,00	15.750.482.106,12	5.734.237.625,88	73,31
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.611.351.420,00	66.363.505.690,74	11.247.845.729,26	85,51
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.824.227.376,00	2.620.634.439,00	10.098.136,00	92,79
		BELANJA TAK TERDUGA	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04
		Belanja Tak Terduga	450.000.000,00	369.162.297,00	80.837.703,00	82,04
		TRANSFER	110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	589.677.337,00	99,47
		TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA	110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	589.677.337,00	99,47
		Bagi Hasil Pajak	2.825.328.297,00	2.384.214.550,00	441.113.747,00	84,39

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	7	8
		Bagi Hasil Retribusi	423.889.516,00	275.334.926,00	148.554.590,00	64,95
		Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	9.000,00	100,00
		JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	988.684.628.840,00	939.201.337.181,35	49.051.289.941,65	95,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(70.206.985.982,00)	(28.294.453.902,55)	(56.622.049.520,85)	40,30
		PEMBIAYAAN				
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71		100,00
		Penggunaan SiLPA	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71		100,00
		PEMBIAYAAN NETTO	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71		100,00
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	41.912.532.080,16		

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas, maka dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2022

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.415.369.674,00	105.415.369.674,00	108.010.790.645,80	102,46	2.595.420.971,80
PENDAPATAN TRANSFER	797.437.653.184,00	797.437.653.184,00	786.316.021.026,00	98,61	- 11.121.632.158,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	100.000.000,00	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	106,12	955.451.607,00
JUMLAH PENDAPATAN	897.953.022.858,00	918.477.642.858,00	910.906.883.278,80	99,18	-7.570.759.579,20
BELANJA	968.160.008.840,00	988.684.628.840,00	939.201.337.181,35	95,00	49.483.291.658,65
BELANJA OPERASI	718.634.763.832,00	725.688.993.576,00	696.035.587.551,49	95,91	29.653.406.024,51
BELANJA MODAL	138.434.843.195,00	151.905.233.451,00	132.745.862.856,86	87,39	19.159.370.594,14

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
BELANJA TIDAK TERDUGA	450.000.000,00	450.000.000,00	369.162.297,00	82,04	80.837.703,00
TRANSFER	110.640.401.813,00	110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	99,47	589.677.337,00
SURPLUS/(DEFISIT)	-70.206.985.982,00	-70.206.985.982,00	-28.294.453.902,55	40,30	-41.912.532.079,46
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.206.985.982,00	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	100,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		-
PEMBIAYAAN NETTO	70.206.985.982,00	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	100,00	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	41.912.532.080,16		

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan daerah antara lain :

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan perolehan pendapatan;
3. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan pendapatan;
4. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, akan dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, pengusaha maupun masyarakat;
2. Menjaga akurasi data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
4. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung kualitas pelayanan.

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan prioritas masih kurang besar dibandingkan kebutuhan belanja yang disediakan;

2. Belum optimalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dalam upaya efisiensi penggunaan belanja atas dana yang disediakan dalam anggaran;
3. Masih kurang pahamiannya tertib administrasi pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD.

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia melalui skala prioritas anggaran;
2. Peningkatan penyerapan dana masing-masing SKPD melalui mekanisme pencairan dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2022 masih ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangannya masih rendah, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan Tahun 2022

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
1	1 01 01 101 10101011815	Dinas Pendidikan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.342.000,00	10.042.000,00	51,92	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
2	1.02.01 102 10201011517 102 10201011602	Dinas Kesehatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.353.802.597,00 263.077.000,00	1.598.826.244,00 53.511.000,00	67,93 20,34	1 Hanya ada 1 item produk e katalog yang tidak dapat disuplai oleh penyedia, yaitu Alkohol Swab karena terjadi kekosongan stok sampai kontrak berakhir, senilai Rp. 23.550.000,- 2 Persentase realisasi sangat signifikan karena ada perbedaan pagu DPA dan RK untuk penyediaan BHP Gula Darah, pada DPA sebesar Rp. 1.089.637.000,- sedangkan pada RK sebesar Rp. 800.800.000,- 3 Pada realisasi penyediaan BHP Gula Darah harga satuan didapatkan pada e katalog dengan harga yang jauh lebih kecil sehingga dengan volume yang sesuai dengan RK terdapat kelebihan anggaran. 1 Belum Optimalnya Pemanfaatan RTK bagi ibu hamil yang akan melahirkan 2 Ibu langsung dirujuk ke Rumah Sakit (khususnya bagi ibu hamil yang jauh dari fakses rujukan) 3 Adanya Juknis terbaru terkait dengan program Jampesal yang langsung diinput melalui aplikasi ekohort, dan sistem pembayaran klaim dari Kementerian Kesehatan melalui BPJS langsung kepada Penerima Layanan (Puskesmas/Rumah Sakit)
3	1.03.01 308 30801010901 103 10301011719	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	325.650.000,00 2.822.190.000,00	182.479.425,00 1.884.514.852,00	56,04 66,77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari anggaran sebesar 325.650.000,- realisasi sebesar 182.479.425, dengan persentase 56,04% terdiri dari Belanja, KIR, Pajak dan untuk Belanja pemeliharaan tidak terealisasi seluruhnya. ada beberapa kontrak yang tidak jadi dilaksanakan sebesar (801.285.148) serta belanja konsultan pengawasan sebesar (130.160.000) dan belanja pendukung kegiatan (6.230.000)
	103 1030101 1908 103 103010 02211 103 10301012504 103 1030101 2803	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	14.390.000,00 398.446.000,00 169.858.070,00 115.018.512,00	5.212.050,00 272.606.000,00 90.268.165,00 31.686.183,00	36,22 68,42 53,14 27,55	Adanya Penghematan Anggaran pada Belanja pendukung kegiatan Adanya Penghematan Anggaran pada Belanja pendukung kegiatan Ada Kegiatan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang tidak di laksanakan karena ada perubahan regulasi Kegiatan pelatihan yang tidak di laksanakan karena ada perubahan regulasi, dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi yang bekerja sama dengan LSP
4	3 03 01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan				

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
	104 10401010901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.575.000,00	2.531.300,00	20,13	Secara umum tidak adanya hambatan/kendala dalam proses berjalannya kegiatan, ada pun realisasi capaian dipengaruhi kurang telitinya dalam penganggaran pada kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan anggaran.
	104 10401011802	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.230.000,00	1.075.000,00	33,28	karena keterbatasan personil teknis dan bertepatan dengan penyelesaian pekerjaan fisik lainnya sehingga beberapa tahapan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak dapat terlaksana secara optimal seperti penyerahan secara simbolis, sosialisasi dan rapat kegiatan lainnya.
5	1 05 01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran				
	105 10501012501	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	7.242.500,00	4.817.700,00	66,52	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
6	1 06 01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
	202 10601011902	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	90.205.000,00	24.462.310,00	27,12	Kurang nya SDM DI UPTD PPA sehingga semua layanan di UPTD PPA yang seharusnya terdiri dari beberapa bagian dilakukan secara bersama-sama oleh SDM yang tersedia di UPTD, Kurangnya efektifitas pemanfaatan Molin untuk UPTD PPA, Kurangnya Fasilitas seperti Laptop dan lainnya untuk operasional UPTD PPA, kurang maksimalnya koordinasi bersama jaring dan jejaring di kabupaten karna pendanaan di UPTD PPA hanya seputar penanganan Korban saja dan Petugas UPTD PPA menjalankan layanannya jika ada kasus saja, meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk promosi layanan di UPTD PPA mengingat keterbatasan tugas serta layanan di UPTD
	208 1060101 2105	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.154.740.000,00	800.840.000,00	69,35	- Unit cost terlalu kecil - Masih banyak kader yg belum paham dgn tupoksi nya masing-masing - Batas-batas demografi wilayah yg susah di jangkau - Masyarakat pada umum nya belum terpapar dengan elsimil dan google form - Jaringan telekomunikasi yang masih minim di beberapa daerah dan kecamatan, khususnya pd daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah bekas transmigrasi - Kemampuan kader TPK terhadap IT masih minim - SDM Kader yang Masih rendah - Sarana transportasi yang tidak memadai
7	3 08 01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				
	308 30801010901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.125.000,00	2.633.650,00	63,85	Pembayaran pajak tidak terealisasi optimal karena terdapat 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua yang rusak berat, maka pajaknya tidak dibayarkan dan ada 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua yang masih tanggungan provinsi, jadi disini tidak ada pembayaran pajaknya.
8	4 01 02	Sekretariat DPRD				
	408 40102011903	Pelaksanaan Reses	486.685.000,00	304.160.000,00	62,50	Pelaksanaan kegiatan reses yang masih mengikuti protkol kesehatan dan pembatasan jumlah peserta pada sebahagian daerah dalam pelaksanaan reses.

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
						2 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD pada kegiatan Reses tidak bisa dibayarkan terkait dengan peraturan belanja perjalanan dinas yang dapat diterima oleh anggota DPRD (Jarak tempuh lokasi pelaksanaan reses dengan kantor DPRD).

9	4 01 06 402 40106010606	Inspektorat Kabupaten Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	1.520.000,00	33,78	Salah Perhitungan Perencanaan Penganggaran, karena pada awalnya direncanakan untuk pembelian buku tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru, tetapi untuk penghematan anggaran, peraturan perundang-undangan tersebut bisa di download.
10	4 01 07 411 40109010802	Kecamatan Pulau Punjung Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	5.541.178,00	76,96	Penghitungan rencana berpedoman dari pemakaian tahun lalu, tetapi realisasi pemakaian tahun ini lebih sedikit, sehingga terjadi penghematan anggaran
11	4 01 09 411 40109010802	KECAMATAN KOTO BARU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.496.000,00	4.266.876,00	50,22	Karena Rumah dinas Camat Dipakai sebagai Pos Damkar Kec. Koto Baru maka Listrik rumah dinas dibayar oleh Damkar sehingga terjadinya efisiensi Anggaran
12	4 01 13 411 40113010802 411 40113010901	Kecamatan Koto Salak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.500.000,00 5.000.000,00	5.867.646,00 3.054.822,00	69,03 61,10	Karena Banyaknya Peralatan Elektronik yang rusak jadi penggunaan Listrik juga semakin sedikit di tahun 2022. Adanya penggantian kendaraan dinas camat pada bulan trimester pertama, sehingga pajak tidak dibayarkan lagi dan dibayarkan ditempat yang baru Makanya biaya pemeliharannya hanya terealisasi 61%

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Organisasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan struktur ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 sebanyak 38 SKPD yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) RSUD Sungai Dareh
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- 7) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 8) Dinas Pangan dan Perikanan
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 12) Dinas Perhubungan
- 13) Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
- 17) Dinas Perpustakaan Kearsipan
- 18) Dinas Pertanian
- 19) Dinas Transmisgrasi dan Tenaga Kerja

- 20) Inspektorat Kabupaten
- 21) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 22) Badan Keuangan Daerah
- 23) Kecamatan Pulau Punjung
- 24) Kecamatan Sitiung
- 25) Kecamatan Koto Baru
- 26) Kecamatan Sungai Rumbai
- 27) Kecamatan IX Koto
- 28) Kecamatan Timpeh
- 29) Kecamatan Koto Salak
- 30) Kecamatan Asam Jujuhan
- 31) Kecamatan Koto Besar
- 32) Kecamatan Padang Laweh
- 33) Kecamatan Tiumang
- 34) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 35) Sekretariat Daerah
- 36) Sekretariat DPRD
- 37) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 38) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2022 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 147 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui Rekening Kas Daerah. Adapun BLUD yang dikelola sebanyak 16 BLUD yaitu.

1. BLUD RSUD Sungai Dareh.
2. BLUD RSUD Sungai Rumbai
3. BLUD Puskesmas Sungai Rumbai.
4. BLUD Puskesmas Sungai Limau.
5. BLUD Puskesmas Sitiung II.
6. BLUD Puskesmas Padang Laweh.
7. BLUD Puskesmas Sungai Dareh.
8. BLUD Puskesmas Silago.
9. BLUD Puskesmas Gunung Medan.
10. BLUD Puskesmas Sitiung I.
11. BLUD Puskesmas Koto Baru.
12. BLUD Puskesmas Timpeh.
13. BLUD Puskesmas Sialang.
14. BLUD Puskesmas Tiumbang.
15. BLUD Puskesmas Koto Besar
16. BLUD Puskesmas Beringin Sakti

- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD sebanyak 16 BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 147 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui rekening Kas Daerah
- *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah.

b. Laporan Operasional

Laporan Finansial menyangkut laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Pendapatan- LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Laporan Operasional disusun berdasarkan konsolidasi dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam Penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun *reciprocal* tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun *reciprocal* yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK- SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e) Lain-lain;
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos.

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
- d) Ekuitas Akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian informasi yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah **basis kas** untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas, dan **basis akrual** untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Ekuitas.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk LO dan Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

D. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Umum

Klasifikasi pendapatan-LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut.

Adapun klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu.

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.

b) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.
- 2) Pendapatan Transfer
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan rinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya menurut obyek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dana BOS, tunjangan profesi guru, dana insentif daerah dan lain sejenisnya.
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menurut obyek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil lainnya dan lain sejenisnya.
 - d) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya atau Pemerintah Kabupaten terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi lainnya dan bantuan keuangan dari kabupaten.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- a) Kelompok pendapatan hibah dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - b) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
 - c) Pendapatan lainnya berupa pendapatan sumbangan pihak ketiga dan lain sejenisnya.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

c. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah.

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

1. Pendapatan Perpajakan

a. Umum

Definisi Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Defenisi *pendapatan Perpajakan-LRA* adalah semua penerimaan RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Klasifikasi

Jenis Pajak Daerah terdiri atas.

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Bawah Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi Perpajakan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

d. Penyajian

Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun sebelumnya.

e. Pengungkapan

Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain.

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.

- b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

2. Pendapatan Nonperpajakan

a. Umum

- 1. Definisi pendapatan nonperpajakan diartikan sebagai pendapatan negara atau daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
- 2. Klasifikasi Nonperpajakan

Klasifikasi Pendapatan Nonperpajakan dapat dibagi berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi.

- a. Pendapatan perizinan;
- b. Pendapatan layanan;
- c. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam
- d. Pendapatan hasil investasi;
- e. Pendapatan hasil investasi aset non keuangan;
- f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

Dalam rangka penyusunan LRA, basis akuntansi yang digunakan untuk mencatat pendapatan nonperpajakan adalah basis kas.

Pendapatan nonperpajakan-LRA adalah semua penerimaan pendapatan nonperpajakan pada rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan

Secara umum pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan LRA yang berasal dari pendapatan nonperpajakan diakui pada saat.

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima telah melaporkan/mengesahkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan pengakuan pendapatan nonperpajakan basis kas adalah bukti setor seperti SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atau dokumen lainnya yang dipersamakan setelah mendapat otorisasi dari bank/pos tempat menyetor, seperti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau sejenisnya maupun dokumen lain yang ditetapkan oleh BUD sebagai dasar pengakuan pendapatan tersebut.

1.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan -LO

a. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat.

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assesment system*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assesment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assesment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assesment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assesment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assesment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber *official assesment system* antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

3. Pengembalian Pajak

Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar ke Kas Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

b. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu.

1. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self asesment*.
2. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian

Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;
2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi beban dan belanja ialah mengatur perlakuan akuntansi beban dan belanja. Perlakuan akuntansi beban dan belanja mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan belanja.

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu.

No	Beban	Belanja
a	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

a.2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

b. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat.

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Akuntansi Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat.

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin

2. Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

e. Penyajian

Penyajian Beban dan Belanja disesuaikan dengan format yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah.

1. rincian beban per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. rincian belanja per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 3) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

a.2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain.

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
3. Transfer Pemerintah Provinsi.
4. Transfer/Bagi Hasil ke Desa.
5. Transfer/Bantuan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

c. Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.

d. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Penyajian

Transfer disajikan sebagai pengeluaran transfer.

f. Pengungkapan

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah.
 - 1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah.
 - 1) transfer keluar harus dirinci;
 - 2) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain.
 - 1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

a.2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

c. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut.

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

a.2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari.

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

b. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

6. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Definisi dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 Tahun 2010 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

a.2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas.

1. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas.

1. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Piutang Retribusi;
4. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas.

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

3. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas.

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
- 7) Piutang Transfer antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas.

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi Daerah
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika.

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran.

Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila.

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

1. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat

sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari.

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan.

1. Kualitas lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu sampai dengan tiga bulan;

3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan.

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar.

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar.

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;

2. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa.

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Persediaan merupakan aset yang berwujud.

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

a.2. Klasifikasi

1. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
3. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
4. Persediaan dapat terdiri dari.
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan
 - d. Perangko dan materai
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi
 - f. Amunisi;
 - g. Bahan untuk pemeliharaan;
 - h. Suku cadang;
 - i. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - j. Pita cukai dan leges;
 - k. Bahan Baku;
 - l. Barang dalam proses / setengah jadi;
 - m. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
6. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman

7. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang tidak lagi digunakan disebabkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber adalah faktur, kwitansi, dan kwitansi, dan berita acara serah terima (BAST).
3. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
4. Beban Persediaan diakui dengan dua pendekatan yaitu.
 - a. Pendekatan Aset
Pengakuan Beban Persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan Aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
Contohnya antara lain adalah persediaan obat di Rumah Sakit, persediaan di Sekretariat SKPD.
 - b. Pendekatan Beban
Setiap pembelian Persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
5. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
6. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka persediaan ini diperlukan sebagai beban.
7. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai kerugian daerah.

c. Metode Pencatatan

1. Metode Periodik yaitu pencatatan berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), barang habis pakai, barang cetakan, dan sejenisnya yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

2. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

d. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar.
 - (a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian.
 - (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan.
 - (a) Metode *First In First Out* (FIFO)
 - (b) Harga pembelian terakhir
3. Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu.
 - a. Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis
 - b. Barang Konsumsi
 - c. Barang habis pakai
 - d. Barang cetakan
 - e. Perangko dan materai
 - f. Obat-obatan dan bahan farmasi
4. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan baik untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dinilai dengan menggunakan nilai wajar dan indeks nilai wajar dari Persediaan hewan dan tanaman tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

e. Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*)
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional
3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
5. Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan hilang, using, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan ini dipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan diperlakukan sebagai beban.

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan.

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (c) Kondisi Persediaan.

8. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

a.2 Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Investasi antara lain.

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu.

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

c. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a) Investasi dalam bentuk surat berharga.
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi non permanen
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

- 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyesuaian perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu.

1. Metode biaya.

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20 sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain.

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

f. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*material*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dalam rangka penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang berkaitan dengan penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah maka untuk Laporan Barang Milik Daerah TA 2019 telah diharuskan untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan adanya perubahan regulasi tersebut berakibat pada perubahan klasifikasi dan penyajian data aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut.

- Nilai Aset Tetap yang tidak berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
 - Aset Tetap Tanah
 - Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Kontruksi Dalam Pengerjaan
- Nilai Aset Tetap yang berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
 - KIB peralatan mesin dari 9 sub KIB menjadi 19 sub KIB
 - KIB Bangunan gedung dari 2 sub KIB menjadi 4 sub KIB
 - KIB Aset Tetap Lainnya dari 4 sub KIB menjadi 6 sub KIB
 - Aset tetap rambu-rambu yang semula dicatat pada KIB Bangunan Gedung, sub KIB monumen, pindah ke KIB Peralatan Mesin, sub KIB rambu-rambu
 - Aset tetap peralatan olahraga yang semula dicatat pada KIB Aset Tetap Lainnya pindah ke KIB Peralatan Mesin sub KIB peralatan olahraga
 - Saldo Aset Lain-Lain berubah mengikut pada perpindahan aset rambu-rambu dan alat olahraga

Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan klasifikasi aset sebagai berikut.

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat kounikasi, rambu-rambu, alat olahraga dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin air conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, dan biota air. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan

sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.
- Merupakan objek pemeliharaan
Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel.

1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan.
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai Peralatan dan Mesin apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.000.000,00

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

3. Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.

Terhadap hewan dan tanaman memiliki batasan kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00. Hewan dan tanaman yang telah dikembangbiakkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap tetapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut.

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.
Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir (a) dan (b) di atas adalah Rp.20.000.000,00.
Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika.

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Peraturan Bupati ini memberikan pedoman sebagai berikut.

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggungjawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di hapusbukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- g. Khusus untuk konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan, apabila BAST sudah ada namun pekerjaan belum selesai, dan telah bisa digunakan/ dimanfaatkan namun karena keterbatasan waktu dan dana, pekerjaan tidak dilanjutkan akan diakui sebagai Aset Tetap Definitif.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim, biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp20.000.000,00 maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Aset Tetap Lainnya

Khusus hewan dan tumbuhan memiliki batasan kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

Hal-Hal Khusus Tentang Aset Tetap

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharaan.

Pembedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (*peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut*) dan penggantian utama (*memperbaharui bagian aset tetap*).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidak pastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan *renovasi* berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu.

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari Neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Bagian Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara.

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. D hibahkan; atau
- d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu.

- a. *Renovasi aset tetap milik sendiri*, merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
- b. *Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan*, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai pelaporan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum di serah terimakan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- c. *Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan* yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode pelaporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

Aset Tetap Di Luar Negeri

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan adat dan kebudayaan. Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap lainnya. Pada prinsipnya pengakuan Aset Tetap di luar negeri sama dengan pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur khusus, yaitu *“pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen”*.

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di neraca tersebut dengan tanpa batas waktu. Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengakuan Aset Tetap Luar Negeri diukur dengan nilai perolehan atau apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, karena pembelian aset tetap diluar negeri umumnya menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Perolehan secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan.
 - a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklamasi dan lain-lain);
 - b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklamasi dan lain-lain);
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi.
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan.
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;

- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 6. Untuk KDP diungkapkan.
 - a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - c. Jumlah biaya yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - e. Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
- 7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

10. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

a.2 Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika.

- 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi.

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi.

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi.

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi.

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

d. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

11. Akuntansi Dana Cadangan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup.

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) Sumber dana cadangan; dan

5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

a.2 Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

12. Kebijakan Aset Lainnya

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

a.2 Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi.

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi.

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut.

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas.

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. *Hasil* kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika.

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari.

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah.
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah.

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

d. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

e. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

f. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a.2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika.

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari.

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misalnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contohnya biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu.

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

14. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

a. Definisi

Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLUD.

b. Karakteristik dan Prinsip BLUD

BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
- b. BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- d. BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
- i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

c. Pengakuan Akun Laporan Keuangan

- 1) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
- 2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
- 3) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD.

- 4) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD.
- 5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - Pendapatan direalisasi.
- 6) Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 7) Pendapatan – LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 8) Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
 - terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

d. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- 2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- 3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD
- 4) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
- 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya.
- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 7) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.
- 8) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.
- 9) Dikecualikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun –akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Bahwa dengan adanya tambahan dana bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah, maka dilakukanlah pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2022

Uraian	JUMLAH (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2022	Pergeseran I	Pergeseran II	APBD-P 2022	Pergeseran		
	PERDA No. 4 Tahun 2021	PERBUP No. 5 Tahun 2022	PERBUP No. 19 Tahun 2022	PERDA No. 5 Tahun 2022	PERBUP No. 27 Tahun 2022	(Rp)	%
	24/12/2021	14/04/2022	15/09/2022	26/10/2022	02/11/2022		
1	2	3	3	4	5	6=5-2	7
PENDAPATAN	874.930.212.063,00	879.130.212.063,00	897.895.255.858,00	897.953.022.858,00	918.477.642.858,00	43.547.430.795,00	4,98
BELANJA	933.924.423.063,00	939.431.631.713,00	980.818.663.132,00	968.160.008.840,00	988.684.628.840,00	54.760.205.777,00	5,86
SURPLUS/ (DEFISIT)	(58.994.211.000,00)	(60.301.419.650,00)	(82.923.407.274,00)	(70.206.985.982,00)	(70.206.985.982,00)	(11.212.774.982,00)	19,01
PEMBIAYAAN	58.994.211.000,00	60.301.419.650,00	70.206.985.982,00	70.206.985.982,00	70.206.985.982,00	11.212.774.982,00	19,01
SILPA	-	-	(12.716.421.292,00)	-	-	-	

APBD Awal Tahun 2022

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan tanggal 24 Desember 2021;
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan tanggal 24 Desember 2021;

1. Pergeseran I APBD Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan tanggal 14 April 2022;

Perubahan dilakukan bahwa RSUD Sungai Dareh sebagai Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 maka perlu disesuaikan kembali program kegiatan pada RSUD Sungai Dareh sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan terdapatnya pekerjaan yang belum selesai Tahun 2021 sumber dana DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan dan dilanjutkan pekerjaannya Tahun 2022 dengan penambahan waktu, maka dianggarkan kembali pada akun belanja yang sama dalam APBD TA 2022.

2. Pergeseran II APBD Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan tanggal 15 September 2022;

Perubahan dilakukan bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib untuk mengatasi dampak inflasi dalam rangka mendukung penanganan pandemic Covid-19.

3. APBD Perubahan Tahun 2022

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan tanggal 26 Oktober 2022;
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan tanggal 26 Oktober 2022.

4. Pergeseran Perubahan APBD Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan tanggal 2 November 2022.

Bahwa dalam rangka Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Bantuan Lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada rumah sakit Pemerintah Daerah TA 2022 yang didasari dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor

HK.02.02/III/8197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1. Pendapatan Daerah	911.076.883.278,80	978.920.717.101,87

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp918.477.642.858,00 dengan realisasi sebesar Rp911.076.883.278,80 atau 99,19% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp978.920.717.101,87 maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp67.843.833.823,07 atau -6,93%. Secara umum penurunan tertinggi di Tahun 2022 terdapat pada pendapatan transfer sebesar Rp52.170.981.043,00 atau -6,22%

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 dan 2021 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	105.415.369.674,00	108.010.790.645,80	102,46	82.829.461.520,87
Pendapatan Transfer	797.437.653.184,00	786.486.021.026,00	98,63	838.657.002.069,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	106,12	57.434.253.512,00
JUMLAH	918.477.642.858,00	911.076.883.278,80	99,19	978.920.717.101,87

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	108.010.790.645,80	82.829.461.520,87

PAD – terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah – Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp105.415.369.674,00 dan realisasinya sebesar Rp108.010.790.645,80 atau sebesar 102,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82.829.461.520,87 maka terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp25.181.329.124,93 atau 30,4%.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 oleh Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/376/KPTS-BUP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/78/KPTS-BUP/2022 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah	21.634.156.143,46	20.495.633.388,25

Berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014.

Berdasarkan penetapan target penerimaan dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah selaku pemungut Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp22.776.715.953,00 dan realisasinya sebesar Rp21.634.156.143,46 atau sebesar 94,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.495.633.388,25, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp1.138.522.755,21 atau 5,55%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1.2
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	180.000.000,00	193.432.436,00	107,46%	113.415.750,00
2	Pajak Restoran	1.425.000.000,00	1.721.533.518,00	120,81%	1.322.388.104,00
3	Pajak Hiburan	3.000.000,00	4.129.250,00	137,64%	0,00
4	Pajak Reklame	235.000.000,00	260.438.054,00	110,82%	281.958.792,00
5	Pajak Penerangan Jalan	12.973.500.000,00	13.226.640.017,46	101,95%	11.976.313.351,00
6	Pajak Parkir	6.000.000,00	6.427.883,00	107,13%	0,00
7	Pajak Air Tanah	15.000.000,00	16.611.667,00	110,74%	13.959.165,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.100.000,00	101,00%	26.500.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	425.000.000,00	371.121.511,00	87,32%	279.629.242,25
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	4.504.215.953,00	2.475.105.302,00	54,95%	2.564.106.809,00
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.348.616.505,00	111,62%	3.917.362.175,00
JUMLAH		22.776.715.953,00	21.634.156.143,46	94,98%	20.495.633.388,25

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 berasal dari penerimaan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.1.3
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Penerimaan Piutang					2022	Jumlah (Rp)
		1996 s.d 2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Pajak Hotel						193.432.436,00	193.432.436,00
2	Pajak Restoran					1.540.275	1.719.993.243,00	1.721.533.518,00
3	Pajak Hiburan						4.129.250,00	4.129.250,00
4	Pajak Reklame						260.438.054,00	260.438.054,00
5	Pajak Penerangan Jalan					1.067.255.885	12.159.384.132,46	13.226.640.017,46
a	PLN					1.019.037.641	11.674.426.394,00	12.693.464.035,00
b	Non PLN					48.218.244	484.957.738,46	533.175.982,46
6	Pajak Parkir						6.427.883,00	6.427.883,00
7	Pajak Air Tanah						16.611.667,00	16.611.667,00
8	Pajak Sarang Burung Walet						10.100.000,00	10.100.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						371.121.511,00	371.121.511,00
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	19.401.408	16.061.599	17.058.052	33.045.277	149.321.373	2.240.217.593,00	2.475.105.302,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						3.348.616.505,00	3.348.616.505,00
JUMLAH		19.401.408	16.061.599	17.058.052	33.045.277	1.218.117.533	20.330.472.274,46	21.634.156.143,46

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 berasal dari penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp20.330.472.274,46 dan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.303.683.869,00.

Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022, dari **sebelas** obyek pajak daerah terdapat **empat** obyek pajak mengalami **kenaikan** penerimaan, **empat** obyek pajak mengalami **penurunan** serta **dua** obyek pajak ada target dan penerimaan pada Tahun 2022 yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Penerimaan pajak dapat uraian sebagai berikut.

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp193.432.436,00 atau 107,46% dari target ditetapkan. Dibandingkan Tahun 2021, penerimaan pajak hotel Tahun 2022 mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp80.016.686,00 atau 70,55%. Dibandingkan Tahun 2021 masa pandemic Covid-19 sudah berkurang dan aktifitas perekonomian sudah mulai berjalan normal.

b) **Pajak Restoran**

Pajak Restoran Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.425.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.721.533.518,00 atau 120,81% dari target ditetapkan. Dibandingkan Tahun 2021, penerimaan pajak restoran mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp399.145.414,00 atau 13,18%. Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2022 terdiri dari Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar Rp1.540.275,00 dan Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp1.719.993.243,00. Salah satu upaya untuk meningkatkan target pajak restoran, adanya inovasi aplikasi e-Panda untuk pelaporan pembayaran pajak restoran oleh Wajib Pajak dan Pemungut Pajak Restoran. Aplikasi ini digunakan oleh Bendahara SKPD, Puskesmas dan Sekolah untuk melaporkan pembayaran pajak restoran atas kegiatan pembelian makan minum pada instansi masing-masing yang berasal dari rumah makan/ restoran. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan kedepannya pelaporan pajak restoran bisa lebih akurat dan konsisten.

c) **Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.129.250,00 atau 137,64%. Setelah melewati pandemi covid 19 pada tahun 2021, kegiatan event tahunan di Kabupaten Dharmasraya seperti pasar malam dan lainnya sudah bisa beraktivitas kembali.

d) **Pajak Reklame**

Pajak Reklame Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp235.000.000,00 terealisasi sebesar Rp260.438.054,00 atau 110,82% mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp21.520.738,00 atau sebesar -7,63%. Pajak reklame mengalami penurunan karena banyaknya reklame pada tahun 2022 di bongkar karena tidak sesuai dengan tata kota dan belum adanya izin IMB.

e) **Pajak Penerangan Jalan (PPJ)**

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp12.973.500.000,00 terealisasi sebesar Rp13.226.640.017,46 atau 101,95% mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp1.250.326.666,46 atau 10,44%. Selama Tahun 2022 terdapat penerimaan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp1.067.255.885,00 yang terdiri dari piutang PPJ Sumber Lain (PLN) sebesar Rp1.019.037.641,00 dan piutang PPJ Dihasilkan Sendiri (Non PLN) sebesar Rp48.218.244,00. Kenaikan penerimaan PPJ disebabkan karena adanya pemasangan listrik baru dan pelanggan baru serta penambahan daya pemakaian PPJ dihasilkan sendiri.

f) **Pajak Parkir**

Pajak Parkir Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.427.883,00 atau 107,13%. Tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi karena belum adanya kesadaran pihak swasta terkait pajak parkir, selain itu kegiatan hiburan yang mengumpulkan orang banyak belum beroperasi.

g) **Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp16.611.667,00 atau 110,74%. Penerimaan pajak air tanah Tahun 2022 mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp2.652.502,00 atau 19% dibandingkan Tahun 2021, disebabkan karena produksi air minum kemasan yang ada di Dharmasraya telah beroperasi normal kembali.

h) **Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.100.000,00 atau 101%. Tahun 2022 mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp16.400.000,00 atau -61,89% karena pada tahun 2021 terdapat penerimaan sarang burung walet goa dan tahun 2022 pajak sarang burung walet goa tidak dipungut oleh pemda karena berada dikawasan hutan lindung merupakan kewenangannya pemerintah pusat dan menjadi Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP).

i) **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp425.000.000,00 terealisasi sebesar Rp371.121.511,00 atau 87,32%. Mengalami kenaikan penerimaan dibanding Tahun 2021 sebesar Rp91.492.268,75 atau 5,55%. Hal ini karena adanya persetujuan pemberian surat izin penambangan batuan jenis tertentu untuk komoditas kerikil berpasir alami (SIRTU).

j) **PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.504.215.953,00 terealisasi sebesar Rp2.475.105.302,00 atau 54,95% mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp89.001.507,00 atau -3,47%. Penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 sebesar Rp2.475.105.302,00 terdiri dari **pokok penerimaan PBB** sebesar Rp2.471.453.779,00 dan lain-lain sebesar Rp3.651.523,00 terdiri dari penerimaan PBB melalui transaksi online tercatat dobel sebesar Rp555.965,00, penerimaan PBB melalui QRIS belum ada NOPnya sebesar Rp1.980.000,00 dan penerimaan pendapatan selisih bayar atas perbaikan data PBB sebesar Rp1.115.397,00.

Rincian penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 terdiri dari.

Tahun	PBB-P2		Penerimaan PBB-P2
	Pokok	Lain-Lain	
2022	2.236.566.070,00	3.651.523,00	2.240.217.593,00
2021	149.321.373,00		149.321.373,00
2020	33.045.277,00		33.045.277,00
2019	17.058.052,00		17.058.052,00
2018	16.061.599,00		16.061.599,00
2017	9.635.661,00		9.635.661,00
1996-2016	9.765.747,00		9.765.747,00
Jumlah	2.471.453.779,00		2.475.105.302,00

k) **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

BPHTB Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.348.616.505,00 atau 111,62%. Mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp568.745.670,00 atau -14,52%. Menurunnya penerimaan BPHTB selama Tahun 2022 disebabkan karena pengajuan transaksi BPHTB pada tahun 2022 mengalami penurunan yakni pada tahun 2021 berkas yang diverifikasi berkas sebanyak 1.327 dokumen dan tahun 2022 sebanyak 1.197 dokumen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah	2.759.700.350,00	2.411.365.382,00

Merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.873.808.400,00 dengan realisasi sebesar Rp2.759.700.350,00 atau 71,24%. Retribusi Daerah Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp348.334.968,00 atau sebesar 14,45%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.4
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
A	Retribusi Jasa Umum	1.293.000.000,00	1.067.042.850,00	82,52%	1.030.469.700,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	275.000.000,00	252.522.850,00	91,83%	179.266.100,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	110.000.000,00	156.483.000,00	142,26%	129.612.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	8.000.000,00	8.020.000,00	100,25%	162.721.000,00
4	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor	320.000.000,00	234.152.000,00	73,17%	261.618.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	30.000.000,00	33.300.000,00	111,00%	39.300.000,00
6	Retribusi Pelayan Tera / Tera Ulang	50.000.000,00	45.940.000,00	91,88%	58.055.500,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	336.625.000,00	67,33%	199.897.100,00
B	Retribusi Jasa Usaha	1.980.808.400,00	1.069.769.800,00	54,01%	1.191.247.332,00
1	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.119.808.400,00	632.338.500,00	56,47%	579.429.337,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	32.500.000,00	12.400.800,00	38,16%	21.132.895,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.500.000,00	3.520.000,00	100,57%	3.520.000,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	825.000.000,00	421.510.500,00	51,09%	587.165.100,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00	622.887.700,00	103,81%	189.648.350,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	622.887.700,00	103,81%	189.648.350,00
JUMLAH		3.873.808.400,00	2.759.700.350,00	71,24%	2.411.365.382,00

Berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022, dari **12** obyek retribusi daerah terdapat **lima** obyek retribusi mengalami **kenaikan** penerimaan, **satu** obyek penerimaan konstan, dan **enam** obyek retribusi mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp275.000.000,00 terealisasi sebesar Rp252.522.850,00 atau sebesar 91,83%. Target retribusi ini di berikan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Pada Penerimaan tahun ini terdapat **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp73.256.750,00 atau 29,01%. Meningkatnya pendapatan Tahun 2022 karena Labkesda sudah bekerjasama dengan BPJS terkait pemeriksaan layanan kesehatan.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp156.483.000,00 atau sebesar 91,83%. Adanya **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp26.871.000,00 atau 17,17%. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya area pelayanan persampahan/kebersihan di sektor perumahan.

c) Retribusi Pelayanan Pasar.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp8.000.000,00 terdapat pada Dinas Pertanian dengan realisasi sebesar Rp8.020.000,00 atau 100,25%.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya terjadi **penurunan** pendapatan sebesar Rp154.701.000,00 atau -1.928%. Menurunnya penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2022 disebabkan karena Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipindahkan rekening pendapatannya ke Lain-Lain PAD Yang Sah yaitu Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dari Target retribusi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp320.000.000,00 terealisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2022 sebesar Rp234.152.000,00 atau 73,17% mengalami **penurunan** dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp27.466.000,00 atau -11,73%. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengujian kendaraan tepat waktu.

e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Target di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp33.300.000,00 dengan persentase capaian penerimaan Retribusi Penyedotan Kakus Tahun 2022 sebesar 111%. Mengalami penurunan penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp6.000.000,00 atau -18,02% disebabkan karena menurunnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan kakus.

f) Retribusi Tera/ Tera ulang

Pendapatan Retribusi Tera/ Tera Ulang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Tera/ Tera Ulang.

Dari Target retribusi yang diberikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi Penerimaan Retribusi Retribusi Tera/Tera Ulang Tahun 2022 sebesar Rp45.940.000,00 atau 91,88%. Mengalami **penurunan** dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp12.115.500,00 atau -26,37%. Hal ini disebabkan karena timbangan ram sawit dan Pertashop milik masyarakat banyak yang tidak beroperasi selama tahun 2022.

g) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dari Target retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp500.000.000,00, terealisasi Penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp336.625.000,00 atau 67,33% mengalami **kenaikan** dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp136.727.900,00 atau 40,62% karena upaya penagihan ke pihak vendor lebih intens dibandingkan tahun sebelumnya.

h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut pada Tahun 2021 berupa Pemakaian Rumah Dinas, Pemakaian Gedung Auditorium dan Gedung Pertemuan di Kecamatan, Sewa ATM, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan Sewa Alat Berat. Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.119.808.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 637.558.500,00 atau 56,93% terdapat pada 16 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi 2022	%	
1	Dinas Pendidikan	45.750.000,00	63.058.000,00	137,83	76.815.000,00
2	Dinas Kesehatan	58.680.000,00	48.046.000,00	81,88	65.959.000,00
3	RSUD Sungai Dareh	10.000.000,00	14.400.000,00	144,00	31.789.303,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	190.690.000,00	31,78	134.740.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	205.278.400,00	227.509.200,00	110,83	231.904.400,00
6	Dinas Pangan dan Perikanan	160.000.000,00	32.800.000,00	20,50	0,00
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	12.739.700,00	91,13	16.391.634,00
8	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	27.700.000,00	277,00	11.500.000,00
9	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	5.000.000,00	166,67	4.250.000,00
10	Kecamatan Sitiung	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00	1.500.000,00
11	Kecamatan Koto Baru	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2.100.000,00
12	Kecamatan Sungai Rumbai	3.500.000,00	4.685.600,00	133,87	1.730.000,00
13	Kecamatan Sembilan Koto	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	250.000,00
14	Kecamatan Timpeh	1.660.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	250.000,00
16	Kecamatan Tiumang	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.119.808.400,00	632.338.500,00	56,47	579.429.337,00

Penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp632.338.500,00 atau 56,93%. Walaupun mengalami **kenaikan** realisasi sebesar Rp52.909.163,00 atau 9,13% dibandingkan tahun lalu, tetapi realisasinya belum optimal karena pengelolaan alat berat yang ada di UPT Peralatan dan Kelengkapan pada Dinas Pekerjaan Umum banyak dalam keadaan rusak berat dan pengelolaan alat berat pada Dinas Pangan dan Perikanan baru beroperasi beberapa bulan terakhir setelah dilakukan perbaikan.

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp632.338.500,00 berasal dari :

- 1) Penerimaan Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp627.112.500,00.
- 2) Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2017 s.d. 2019 sebesar Rp5.226.000,00 dari Pemakaian Rumah Dinas pada Dinas Pendidikan.

i) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2022 dengan target sebesar Rp32.500.000,00 terealisasi sebesar Rp12.400.800,00 atau 38,16%. Terdapat pada RSUD Sungai Dareh target sebesar Rp2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp2.500.800,00 atau 100,03%, Dinas Perhubungan target sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp9.900.000,00 atau 33%. Secara keseluruhan terjadi **penurunan** sebesar Rp8.732.095,00 atau -70,42% dari tahun sebelumnya, karena belum maksimalnya pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan RSUD Sungai Dareh.

j) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Target retribusi pada Dinas Pertanian sebesar Rp3.500.000,00 pada Tahun 2022 penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp3.520.000,00 atau 100,57%, dengan nilai realisasi yang sama pada tahun sebelumnya.

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Target Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp825.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp421.510.500,00 atau 69,08%. Penerimaan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 mengalami **penurunan** sebesar Rp165.654.600,00 atau -39,3%.

Target dan realisasi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2022 terdapat pada :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah berupa Pengelolaan Air Minum berada pada Unit Pelaksana Teknis Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan target sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp302.748.000,00 atau 43,25%.
- 2) Dinas Pangan dan Perikanan target sebesar Rp105.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.750.000,00 atau 94,05% adalah berupa penjualan bibit ikan.
- 3) Dinas Pertanian target sebesar Rp20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.012.500,00 atau 100,06% adalah berupa penjualan anak ayam, telur, dan kambing persediaan.

I) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Target Penerimaan Retribusi IMB pada tahun 2022 berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp622.887.700,00. Penerimaan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 mengalami **kenaikan** sebesar Rp433.239.350,00 atau 69,55%.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836,00	3.524.570.411,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1.6
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Deviden Bank Nagari Tahun 2021	4.307.836.826,00	4.307.836.826,00	100	3.515.054.721,00
2	Deviden PT. Balairung CitrajayaTahun 2021	5.944.180,00	5.944.180,00	100	0,00
3	Deviden BPR Pulau Punjung Tahun 2021	10.284.830,00	10.284.830,00	100	9.515.690,00
	Jumlah	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	100	3.524.570.411,00

Pada akhir Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki investasi permanen penyertaan modal sebesar Rp27.452.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal pada PT BPD Sumatera Barat/Bank Nagari sebesar Rp25.852.000.000,00, PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp1.500.000.000,00 dan PT. BPR Pulau Punjung sebesar Rp100.000.000,00.

Dari penyertaan modal tersebut, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan penerimaan sebesar Rp4.324.065.836,00 dengan realisasi sebesar Rp4.324.065.836,00 atau 100% yang berasal dari penerimaan deviden Bank Nagari Tahun 2021 sebesar Rp4.307.836.826,00, penerimaan deviden PT Balairung Citrajaya Tahun 2021 sebesar Rp5.944.180,00, penerimaan deviden PT BPR Pulau Punjung Tahun 2021 sebesar Rp10.284.830,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp3.524.570.411,00 penerimaan untuk Tahun 2022 mengalami **kenaikan** sebesar Rp799.495.425,00 atau 22,68%.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.a.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.292.868.316,34	56.397.892.339,62

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp74.440.779.485,00 dengan realisasi Rp79.292.868.316,34 atau 106,52%. Terdapat kenaikan pendapatan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp22.889.755.976,72 atau 40,59% dari penerimaan Tahun 2021.

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1.7
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	1.270.730.485,00	1.130.369.548,00	88,95%	495.864.100,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00	102.704.000,00	102,70%	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	1.220.000.000,00	1.452.036.694,00	119,02%	1.284.039.855,00
4	Tuntutan Ganti kerugian Daerah	2.900.000.000,00	3.047.851.066,94	105,10%	486.674.700,67
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.740.000.000,00	3.181.107.944,40	182,82%	1.230.702.038,12
6	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	160.000.000,00	10.622.160,00	6,64%	209.701.248,16
7	Pendapatan Dari Pengembalian	370.000.000,00	384.895.171,00	104,03%	2.560.115.416,00
8	Pendapatan BLUD	59.526.063.000,00	62.787.950.607,00	105,48%	43.221.909.781,67
9	Dana Kapitasi	7.153.986.000,00	7.195.331.125,00	100,58%	6.908.885.200,00
JUMLAH		74.440.779.485,00	79.292.868.316,34	106,52%	56.397.892.339,62

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 terdiri dari sembilan obyek penerimaan. Adapun perbedaan dengan Tahun 2021 yaitu bertambahnya satu obyek penerimaan atas Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD yang sebelumnya adalah Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Berdasarkan realisasi penerimaan dari **sembilan** obyek penerimaan terdapat **enam** obyek penerimaan mengalami **kenaikan** penerimaan dan **dua** obyek penerimaan mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Aset Lainnya Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.270.730.485,00 terealisasi sebesar Rp1.130.369.548,00 atau 88,95%. Terdiri dari penerimaan atas penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional dan alat berat yang dilakukan dengan pelelangan umum sebanyak dua kali melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan realisasi sebesar Rp560.822.100,00 dan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp377.997.098,00, penjualan atas kendaraan dinas mantan Wakil Bupati Dharmasraya periode 2016-2020 sebesar Rp102.285.600,00, penerimaan atas hasil pengelolaan kebun karet milik pemda sebesar Rp8.400.000,00 dan pengelolaan sawit pada Dinas Pertanian sebesar Rp80.864.750,00.

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp634.505.448,00 atau 127,96%. Disebabkan karena pelelangan umum melalui (KPKNL) atas penjualan beberapa aset daerah yang menambah ke Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022.

2. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2022 adalah pengalihan dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atas pemanfaatan sewa kios pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp102.704.000,00 atau 102,7%, terdiri dari penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp100.404.000,00 dan penerimaan piutang retribusi pelayanan pasar Tahun 2021 yang dialihkan pencatatannya ke Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar Rp2.300.000,00.

3. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.452.036.694,00 atau 119,02%. Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp1.289.885.522,00 dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp162.151.172,00. Terjadi **kenaikan** penerimaan sebesar Rp167.996.839,00 atau 13,08% dibandingkan penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp1.284.039.855,00. Hal ini disebabkan karena perputaran uang keluar digiro SKPD tidak terlalu tinggi sehingga dana yang mengendap di Kas Daerah memberikan dampak kenaikan penerimaan jasa giro Tahun 2022.

4. Penerimaan Kerugian Daerah

Penerimaan Kerugian Daerah berasal dari pengembalian ke Kas Daerah atas temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang telah dilakukan penetapan keputusan kerugian daerahnya berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Penerimaan Kerugian Daerah yang masuk ke kasda Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.047.851.066,94. Terdiri dari penerimaan TGR atas penetapan SKP2KS Tahun 2022 sebesar Rp2.890.900.759,32, piutang TGR tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp151.593.811,60 dan pembulatan penyetoran piutang ke kas daerah sebesar Rp5.262,02.

Pejabat Penyelesaian Kerugian daerah (PPKD) telah menetapkan SKP2KS selama Tahun 2022 sebanyak 2 berkas SKP2KS dari empat temuan LHP BPK atas LKPD Tahun 2021, 1 berkas SKP2K dan SKTJM sebanyak 43 berkas. Penerbitan Surat Keterangan Pelunasan (SKL) atas pembebanan kerugian daerah pada Tahun 2022 sebanyak 79 berkas.

5. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terdiri dari penerimaan penutupan rekening yang tidak aktif, penerimaan bunga deposito berasal dari penempatan deposito selama Tahun 2022 dan penerimaan denda piutang pajak dan pendapatan lainnya, dapat diuraikan sebagai berikut.

Target Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.740.000.000,00 dengan penerimaan sebesar Rp3.181.107.944,40 atau 182,82%. Terdapat kenaikan pendapatan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp1.950.405.906,28 atau 158,48%. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2022 terdiri dari penerimaan bunga deposito sebesar Rp3.134.534.056,00, denda keterlambatan PPJ Non PLN sebesar Rp2.832.731,40, penerimaan denda PBB-P2 sebesar Rp36.040.442,00, denda keterlambatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perkimtan sebesar Rp5.220.000,00 dan penerimaan lain-lain sebesar Rp2.480.715,00.

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berupa penerimaan dari penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penerimaan denda keterlambatan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.622.160,00 atau 6,64%. Mengalami penurunan sebesar Rp199.079.088,16 atau -94,93% dibandingkan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp122.754.673,81 atau 70,73%. Berkurangnya penerimaan pendapatan karena penyelesaian pekerjaan dari penyedia barang/jasa mengikuti waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

7. Pendapatan Dari Pengembalian

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian LHP dan Pendapatan dari Pengembalian Belanja. Pendapatan dari Pengembalian LHP yaitu Pengembalian Temuan pada saat NHP/LHP APIP yang tidak tercantum dalam kerugian daerah karena penyeterannya pada saat NHP atau LHP terbit sehingga tidak ditetapkan dalam Buku Pemantauan Kerugian Daerah dari BPK RI sedangkan Pendapatan dari Pengembalian Belanja berupa pengembalian belanja pada tahun berikutnya atas belanja pegawai.

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp384.895.171,00 atau 104,03%.

8. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2022 memiliki 16 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai dan 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas, uraian sejarah singkat mengenai pembentukan BLUD di Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh

BLUD RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksanaan unit BLUD RSUD Sungai Dareh mulai berjalan pada 1 Januari 2015.

2. Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai

Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memiliki UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya (*holding*) pada Dinas Kesehatan. UPT Puskesmas membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi Perubahan Struktur Organisasi UPT Puskesmas melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 April 2018.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap dengan uraian sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/148/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/149/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru.
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/150/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/151/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/152/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/153/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/154/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/155/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I.
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/156/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/157/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh dan Beringin Sakti.
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/158/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/159/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/160/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada akhir Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya telah menambah 2 unit BLUD yaitu UPT RSUD Sungai Rumbai dan UPT Puskesmas Beringin Sakti yang mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2020, dengan dasar penetapan sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Beringi Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang tidak membagi BLUD dalam status “Bertahap” atau “Penuh, maka Keputusan Bupati Tahun 2018 tentang penetapan UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Bertahap dicabut, digantikan dengan Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumbang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan Jasa Layanan BLUD selama Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp59.526.063.000,00 terealisasi sebesar Rp62.787.950.607,00 atau 105,48%. Mengalami **kenaikan** sebesar Rp19.566.040.825,33 atau 45,27% dibandingkan penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp43.221.909.781,67

Data Pendapatan Jasa Layanan BLUD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.8
Pendapatan Jasa Layanan BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Jasa Layanan BLUD	59.526.063.000,00	62.787.950.607,00	105,48%	40.938.653.558,00
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	50.000.000.000,00	54.300.704.363,00	108,60%	40.344.182.650,67
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	6.600.000.000,00	6.011.990.434,00	91,09%	555.941.071,00
3	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	330.000.000,00	251.704.500,00	76,27%	256.987.000,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Limau	220.640.000,00	152.805.000,00	69,26%	139.363.000,00
5	BLUD Puskesmas Sitiung II	104.692.500,00	125.866.000,00	120,22%	140.544.000,00
6	BLUD Puskesmas Padang Laweh	231.000.000,00	157.634.000,00	68,24%	137.888.000,00
7	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	167.232.000,00	109.301.000,00	65,36%	84.847.000,00
8	BLUD Puskesmas Silago	245.570.400,00	228.980.000,00	93,24%	266.863.000,00
9	BLUD Puskesmas Gunung Medan	121.000.000,00	97.397.760,00	80,49%	73.330.200,00
10	BLUD Puskesmas Sitiung I	495.955.100,00	369.794.000,00	74,56%	270.991.000,00
11	BLUD Puskesmas Koto Baru	478.178.000,00	494.131.000,00	103,34%	556.740.500,00
12	BLUD Puskesmas Timpeh	196.380.000,00	193.834.000,00	98,70%	155.037.000,00
13	BLUD Puskesmas Sialang	75.500.000,00	38.152.000,00	50,53%	27.168.000,00
14	BLUD Puskesmas Tiumbang	76.335.000,00	98.277.000,00	128,74%	64.907.100,00
15	BLUD Puskesmas Koto Besar	140.080.000,00	105.360.550,00	75,21%	114.465.260,00
16	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	43.500.000,00	52.019.000,00	119,58%	32.655.000,00
	JUMLAH	59.526.063.000,00	62.787.950.607,00	105,48%	43.221.909.781,67

Uraian realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas dapat dijelaskan di **Lampiran 1** pada Laporan Keuangan ini.

9. Pendapatan Kapitasi Puskesmas

Penganggaran Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD sedangkan rencana belanja Kapitasi dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

Anggaran Pendapatan Kapitasi Puskesmas dianggarkan pada DPA Badan Keuangan Daerah sebesar Rp7.153.986.000,00 terealisasi sebesar Rp7.195.331.125,00 atau 100,58% mengalami **kenaikan** sebesar Rp286.445.925,00 atau 4,15% dibandingkan Tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.9

Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	535.947.000,00	537.535.500,00	100,30	544.526.700,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	349.100.000,00	231.165.000,00	66,22	271.457.500,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	592.828.000,00	593.683.500,00	100,14	612.832.500,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	216.000.000,00	227.994.000,00	105,55	214.387.000,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.176.502.000,00	1.305.311.200,00	110,95	1.135.577.700,00
6	BLUD Puskesmas Silago	517.457.000,00	484.669.800,00	93,66	486.156.300,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	521.000.000,00	445.920.525,00	85,59	451.726.800,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	549.402.200,00	643.857.300,00	117,19	618.071.700,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	957.267.000,00	876.218.100,00	91,53	844.845.000,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	380.860.000,00	377.129.700,00	99,02	342.786.300,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	346.909.000,00	394.493.100,00	113,72	365.627.700,00
12	BLUD Puskesmas Tiumbang	262.193.800,00	313.241.500,00	119,47	225.421.300,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	573.295.000,00	600.302.400,00	104,71	623.348.700,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	175.225.000,00	163.809.500,00	93,49	172.120.000,00
JUMLAH		7.153.986.000,00	7.195.331.125,00	100,58	6.908.885.200,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.b. Pendapatan Transfer	786.486.021.026,00	838.657.002.069,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.

Pendapatan Transfer Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp797.437.653.184,00 dengan realisasi Rp786.486.021.026,00 atau sebesar 98,91%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp838.657.002.069,00, Pendapatan Transfer Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp52.170.981.043,00 atau -6,22%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.b.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	673.570.378.483,00	713.844.105.329,00

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya penyesuaian anggaran dan belanja Negara Tahun 2022 dalam rangka penanganan darurat, maka dilakukanlah perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan pada APBD Awal Tahun 2022 sebesar Rp682.282.210.00,00 dengan realisasi sebesar Rp673.570.378.483,00 atau 98,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp713.844.105.329,00, Pendapatan Transfer Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp40.273.726.846,00 atau -5,64% disebabkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan penyesuaian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.1.10
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil Pajak	17.815.048.000,00	23.514.204.916,00	131,99	30.199.842.269,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	4.490.028.000,00	5.871.006.918,00	130,76	3.462.713.300,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.606.168.000,00	472.528.368.549,00	99,98	472.416.143.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	187.370.966.000,00	171.656.798.100,00	91,61	207.765.406.760,00
JUMLAH		682.282.210.000,00	673.570.378.483,00	98,72	713.844.105.329,00

Rincian Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.b.1.a Bagi Hasil Pajak	23.514.204.916,00	30.199.842.269,00

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil antara lain :

1. DBH Pajak, meliputi:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)
 - b. DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh)

- c. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
- 2. DBH Sumber Daya Alam, meliputi:
 - a. DBH Kehutanan
 - b. DBH Mineral dan Batu Bara
 - c. DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi
 - d. DBH Penguasaan Panas Bumi
 - e. DBH Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp17.815.048.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.514.204.916,00 atau sebesar 131,99%. Penerimaan Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan sebesar Rp6.685.637.353,00 atau -22,14% dibandingkan penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp30.199.842.269,00. Penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
	Bagi Hasil Pajak				
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	5.091.252.000,00	5.410.170.368,00	106,26	5.912.817.200,00
a	DBH PPh Pasal 21	5.091.252.000,00	4.928.901.686,00	-	5.743.226.800,00
b	DBH PPh Pasal 25/29 OP	-	481.268.682,00	-	169.590.400,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	12.685.563.000,00	18.062.466.915,00	142,39	24.222.822.758,00
a	- DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota		12.588.440.924,00	-	17.613.459.614,00
b	- DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota		505.354.423,00	-	716.684.205,00
c	- DBH PBB Bagi Rata		4.968.671.568,00	-	5.892.678.939,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	38.233.000,00	41.567.633,00	108,72	64.202.311,00
a	DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota	38.233.000,00	41.567.633,00	108,72	64.202.311,00
JUMLAH		17.815.048.000,00	23.514.204.916,00	131,99	30.199.842.269,00

Penerimaan bruto Bagi Hasil Pajak pada penyaluran transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022 dari data Simtrada Kementerian Keuangan sebesar Rp26.064.128.819,00, terdapat pemotongan sebesar Rp2.549.923.903,00 yang diantaranya sebesar Rp2.203.891.055,00 adalah penyaluran non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF), penerimaan netto yang masuk ke kas daerah adalah sebesar Rp23.514.204.916,00. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan

untuk menyimpan uang di Bank Indonesia sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023. Pemotongan DBH dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.12
Pemotongan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022

No	Uraian	Penerimaan Bruto	Pemotongan		Penerimaan Netto
			Pemotongan	TDF	
1	2	3	4	5	6=3-4-5
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	6.362.348.678,00	322.390.853,00	629.787.457,00	5.410.170.368,00
	- DBH PPh Pasal 21	5.851.889.413,00	322.390.853,00	600.596.874,00	4.928.901.686,00
	- DBH PPh Pasal 25/29 OP	510.459.265,00	0,00	29.190.583,00	481.268.682,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	19.655.312.013,00	23.641.995,00	1.569.203.103,00	18.062.466.915,00
	- DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	13.666.886.346,00	23.641.995,00	1.054.803.427,00	12.588.440.924,00
	- DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	547.148.294,00	0,00	41.793.871,00	505.354.423,00
	- DBH PBB Bagi Rata	5.441.277.373,00	0,00	472.605.805,00	4.968.671.568,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	46.468.128,00	0,00	4.900.495,00	41.567.633,00
	- DBH Cukai Hasil Tembakau	46.468.128,00	0,00	4.900.495,00	41.567.633,00
	Jumlah	26.064.128.819,00	346.032.848	2.203.891.055 ,00	23.514.204.916,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.b.1.b Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.871.006.918,00	3.462.713.300,00

Pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp4.490.028.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.871.006.918,00 atau 130,76%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.408.293.618,00 atau 69,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.462.713.300,00. Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.13
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	4.490.028.000,00	5.871.006.918,00	130,76	3.462.713.300,00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi		-		516.000,00
b.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.649.363.000,00	3.023.146.816,00	183,29	923.209.025,00
c.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	625.805.000,00	851.066.752,00	136,00	681.801.615,00
d.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	256.549.000,00	38.482.350,00	15,00	499.567.510,00
e.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
JUMLAH		4.490.028.000,00	5.871.006.918,00	130,76	3.462.713.300,00

Penerimaan bruto Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada penyaluran transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022 dari data Simtrada Kementerian Keuangan sebesar Rp6.356.516.032,00, terdapat pemotongan sebesar Rp485.509.114,00 yang merupakan penyaluran non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sehingga penerimaan menjadi sebesar Rp5.871.006.918,00, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.14
Pemotongan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2022

No	Uraian	Penerimaan Bruto	Pemotongan TDF	Penerimaan Netto
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	3.201.493.314,00	178.346.498,00	3.023.146.816,00
	- DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	274.824.868,00	15.857.991,00	258.966.877,00
	- DBH SDA Minerba - Royalti	2.926.668.446,00	162.488.507,00	2.764.179.939,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	918.735.378,00	67.668.626,00	851.066.752,00
	- DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	82.745.021,00	5.876.461,00	76.868.560,00
	- DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	835.990.357,00	61.792.165,00	774.198.192,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	66.223.129,00	27.740.779,00	38.482.350,00
	- DBH SDA Kehutanan - PSDH	66.223.129,00	27.740.779,00	38.482.350,00
4	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	2.170.064.211,00	211.753.211,00	1.958.311.000,00
	- DBH SDA Perikanan	2.170.064.211,00	211.753.211,00	1.958.311.000,00
	Jumlah	6.356.516.032,00	485.509.114,00	5.871.006.918,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.b.1.c. Dana Alokasi Umum	472.528.368.549,00	472.416.143.000,00

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp472.606.168.000,00. Terealisasi masuk ke kas daerah sebesar Rp472.358.368.549,00 dan pengakuan penerimaan DAU secara jurnal memorial sebesar Rp170.000.000,00 atas pemotongan DAU dalam rangka penggantian dana APBN, sehingga Penerimaan DAU Tahun 2022 tercatat sebesar Rp472.528.368.549,00 atau 99,98%. Penerimaan DAU Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp112.225.549,00 atau 0,02% dibandingkan penerimaan DAU Tahun 2021 sebesar RpRp472.416.143.000,00.

Pemotongan DAU pada aplikasi SIMTRADA sebesar Rp247.799.451,00 terdiri dari pemotongan penyaluran DAU bulan Januari Tahun 2022 sebesar Rp170.000.000,00 merupakan pemotongan DAU dalam rangka penggantian dana APBN untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi oleh TNI/Polri sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 94/PMK.07/2021. Pemotongan penyaluran dimaksud ditetapkan dalam KMK Nomor 34/KM.7/2021. Pemotongan DAU bulan Mei 2022 sebesar Rp67.799.451,00 diatur dalam PMK Nomor 119/PMK.07/2021 yang merupakan bentuk pengembalian Dana Alokasi Khusus Fisik, terdapat pada sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) Tahun 2020 sebesar Rp1.549.451,00, sisa Dana BOP PAUD s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp10.500.000,00 dan sisa Dana BOP Kesetaraan s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp55.750.000,00. Pemotongan penyaluran dimaksud ditetapkan dalam KMK Nomor 10/KM.7/2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus	171.656.798.100,00	207.765.406.760,00

Pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp187.370.966.000,00 dan terealisasi Rp171.656.798.100,00 atau sebesar 91,61%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp36.108.608.660,00 atau -17,38% dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 sebesar Rp207.765.406.760,00. Jika Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada setiap daerah, maka Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya diberikan kepada daerah yang memiliki kegiatan khusus yang memiliki prioritas nasional tinggi dan memenuhi kriteria tertentu.

Tabel 5.1.15
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 dan 2021

o	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	68.322.925.000,00	64.465.577.604,00	94,35%	121.883.946.598,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	119.048.041.000,00	107.191.220.496,00	90,04%	85.881.460.162,00
JUMLAH		187.370.966.000,00	171.656.798.100,00	91,61%	207.765.406.760,00

1) **Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)**

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri dari DAK reguler, afirmasi dan penugasan.

Penerimaan DAK Fisik Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.16
Realisasi DAK Fisik Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.531.364.000,00	12.528.475.800,00	99,98	27.591.845.085,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.434.439.000,00	4.432.504.000,00	99,96	9.772.440.883,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.166.991.000,00	2.164.965.000,00	99,91	1.127.612.970,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.051.085.000,00	1.921.564.581,00	93,69	2.153.958.065,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.347.137.000,00	592.166.750,00	43,96	3.917.991.998,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	26.055.541.000,00	24.817.852.547,00	95,25	16.510.920.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.828.144.000,00	6.987.084.000,00	89,26	5.387.463.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	5.387.463.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.355.020.000,00	1.143.689.500,00	84,40	-
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.531.137.000,00	1.506.779.126,00	98,41	-
11	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.047.095.000,00	945.000.000,00	90,25	-
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-PeningkatanKesiapan Sistem Kesehatan	4.073.991.000,00	3.833.303.800,00	94,09	-
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	297.546.000,00	-	-	-
14	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan Intervensi Stunting	853.435.000,00	842.192.500,00	-	-
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	8.861.255.581,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	36.349.073.516,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	-	-	-	1.130.952.000,00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
18	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	-	-	-	482.906.600,00
19	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	3.038.367.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	-	-	-	1.249.168.900,00
21	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	-	5.387.463.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	-	-	2.105.225.000,00
23	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	-	-	2.204.766.000,00
JUMLAH		68.322.925.000,00	64.465.577.604,00	94,35	132.658.872.598,00

2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-Non Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.17
Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.797.000.000,00	4.797.000.000,00	100,00	4.530.000.000,00
2	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	811.300.000,00	811.300.000,00	100,00	857.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	57.898.181.000,00	51.563.357.260,00	89,06	60.448.236.000,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.278.756.000,00	549.446.192,00	24,11	989.569.000,00
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	738.000.000,00	738.000.000,00	100,00	381.000.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.861.192.000,00	1.805.103.260,00	96,99	11.945.633.492,00
7	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	371.278.250,00	91,86	926.745.650,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	420.134.000,00	401.918.600,00	95,66	447.302.000,00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	9.371.407.000,00	7.549.047.249,00	80,55	697.578.000,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	263.077.000,00	131.538.500,00	50,00	915.517.650,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.092.678.000,00	3.066.911.900,00	99,17	2.422.624.361,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	-
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	360.216.000,00	352.019.448,00	97,72	-
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	888.100.000,00	887.952.000,00	99,98	-
15	DAK Non Fisik-BOS Reguler	34.412.000.000,00	32.954.547.837,00	95,76	-
16	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.000.000.000,00	760.000.000,00	76,00	-
17	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	-	-	-	326.122.000,00
18	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	993.632.009,00
JUMLAH		119.048.041.000,00	107.191.220.496,00	90,04	85.881.460.162,00

Penerimaan bruto DAK Non Fisik Tahun 2022 pada penyaluran transfer ke daerah dan dana Tahun 2023 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp109.584.001.289,00 terdapat pemotongan sebesar Rp2.392.780.793,00 dengan penerimaan bersih sebesar Rp107.191.220.496,00. Pemotongan dilakukan berdasarkan sisa DAK yang dialokasikan Tahun 2021 tidak terealisasi dan dikompensasikan terhadap penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2022. Pemotongan terdapat pada :

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp2.351.514.491,00.
2. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan sebesar Rp32.921.750,00.
3. Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp8.196.552,00.
4. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp148.000,00.

V.A.1.b.2.Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Dana Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya pada Tahun 2022 terdiri dari.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.b.2.a. Dana Penyesuaian	54.283.677.000,00	73.540.405.000,00

Pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp54.283.677.000,00 terealisasi 100%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Dana Penyesuaian Tahun 2021 sebesar Rp19.256.728.000,00 atau -26,19%. Penerimaan Dana Penyesuaian dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.18
Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Desa	47.755.788.000,00	47.755.788.000,00	100%	56.540.066.000,00
2	Dana Insentif Daerah	6.527.889.000,00	6.527.889.000,00	100%	17.000.339.000,00
JUMLAH		54.283.677.000,00	54.283.677.000,00	100%	73.540.405.000,00

Untuk Penerimaan Transfer Dana Desa pada Tahun 2022 sebesar Rp47.755.788.000,00 tidak melalui RKUD, tetapi ditransfer dari KPPN ke Rekening Kas Desa. Sumber pencatatan Dana Desa di Laporan Realisasi Anggaran adalah Data dari Simtrada Kementerian Keuangan dan Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

V.A.1.b.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 terdiri dari.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.b.3.a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.631.965.543,00	51.272.491.740,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp60.871.766.184,00 dengan realisasi sebesar Rp58.631.965.543,00 atau sebesar 96,32%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp51.272.491.740,00 terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp7.359.473.803,00 atau 14,35%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp58.631.965.543,00 berasal dari penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp49.001.609.072,00 dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2021 sebesar Rp9.630.356.468,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.19
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Bagi Hasil	Anggaran	Penerimaan Tahun 2022		2022	%	2021
			2022	Piutang 2021			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.670.602.307,00	10.315.223.801,00	2.272.094.248,00	12.587.318.049,00	92,08	13.494.506.426,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.219.906.718,00	5.424.086.786,00	1.979.521.626,00	7.403.608.412,00	102,54	4.916.864.196,00

No	Jenis Bagi Hasil	Anggaran	Penerimaan Tahun 2022		2022	%	2021
			2022	Piutang 2021			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	26.809.987.872,00	18.652.650.572,00	5.368.133.877,00	24.020.784.449,00	89,60	20.419.916.155,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	135.647.912,00	93.798.138,00	10.606.717,00	104.404.855,00	76,97	118.878.377,00
5	Pajak Rokok	13.035.621.375,00	14.515.849.778,00	0	14.515.849.778,00	111,36	12.322.326.586,00
	Jumlah	60.871.766.184,00	49.001.609.075,00	9.630.356.468,00	58.631.965.543,00	96,32	51.272.491.740,00

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.1.c.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	16.580.071.607,00	57.434.253.512,00

Rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. Dengan adanya Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Bantuan Lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada rumah sakit Pemerintah Daerah TA 2022 yang didasari dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/8197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp15.524.620.000,00, maka dilakukan pergeseran setelah APBD Perubahan Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan penetapan tanggal 2 November 2022.

Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah pergeseran menjadi sebesar Rp15.624.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.580.071.607,00 atau 106,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp57.434.253.512,00 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp40.854.181.905,00 atau -71,13%.

Tahun 2022 Pemkab Dharmasraya kembali memperoleh hibah dari Kementerian Keuangan terkait dengan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-96/MK.7/2021 tanggal 28 Desember 2022 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA dengan nilai Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00. Penerimaan masuk ke kas daerah sebesar Rp998.000.000,00. Dana Hibah ini digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.541.607,00 dengan persentase 93,54%. Pemberi hibah adalah perusahaan sektor perkebunan yang ada di Dharmasraya dengan realisasi sebesar Rp83.861.705,00 dan sebesar Rp9.679.902,00 merupakan hibah dari perusahaan konstruksi yang melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Dharmasraya.

Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 dialihkan penganggarnya ke pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.20
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Pendapatan Hibah				
1	Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat	15.524.620.000,00	16.486.530.000,00	106,20	26.050.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	100.000.000,00	93.541.607,00	93,54	498.313.512,00
II	Pendapatan Lainnya				
1	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-	30.885.940.000,00
JUMLAH		15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	106,12	57.434.253.512,00

V.A.2. BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2022 anggaran belanja dan transfer direncanakan Rp988.760.523.928,00 dengan realisasi Rp939.371.337.181,35 atau sebesar 95,01%.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	725.688.993.576,00	696.160.075.415,49	95,93	638.706.924.536,16
Belanja Modal	151.905.233.451,00	132.791.374.992,86	87,42	166.252.751.216,49
Belanja Tak Terduga	450.000.000,00	369.162.297,00	82,04	164.439.330,00
Belanja Transfer	110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	99,47	111.924.041.243,00
JUMLAH	988.684.628.840,00	939.371.337.181,35	95,01	917.048.156.325,65

Adapun penjelasan Anggaran dan Realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.2.a. Belanja Operasi	696.160.075.415,49	638.706.924.536,16

Belanja Operasi TA 2022 direncanakan Rp725.688.993.576,00 dengan realisasi sebesar Rp696.160.075.415,49 atau sebesar 95,93%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp638.706.924.536,16 terjadi kenaikan sebesar Rp57.453.150.879,33 atau 9%.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 terdiri dari.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.2.a.1. Belanja Pegawai	380.048.882.570,44	380.289.821.307,81

Belanja Pegawai Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp393.543.166.479,00 dengan realisasi Rp380.048.882.570,44 atau 96,57%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp380.289.821.307,81 terjadi penurunan sebesar Rp240.938.737,37 atau -0,06%.

Belanja Pegawai Tahun 2022 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.21
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
A	Belanja Pegawai	393.543.166.479,00	380.048.882.570,44	96,57	380.289.821.307,81
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	237.476.503.972,00	233.684.985.584,00	98,40	241.475.377.325,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	52.184.420.751,00	49.761.115.698,00	95,36	45.783.786.049,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	69.143.762.940,00	62.864.403.465,00	90,92	63.034.119.555,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.412.243.000,00	11.139.769.705,00	97,61	12.273.970.318,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	500.944.876,00	421.250.373,00	84,09	478.985.416,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	493.330.000,00	484.210.000,00	98,15	490.716.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	22.331.960.940,00	21.693.147.745,44	97,14	16.752.866.644,81
JUMLAH		393.543.166.479,00	380.048.882.570,44	96,57	380.289.821.307,81

Adapun rincian belanja pegawai Tahun 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.22
Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
A	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	237.476.503.972,00	233.684.985.584,00	98,40	241.475.377.325,00
1	Belanja Gaji Pokok ASN	175.009.814.972,00	173.198.061.267,00	98,96	174.169.160.438,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.939.201.000,00	17.472.122.736,00	97,40	17.573.585.192,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.989.787.000,00	4.800.069.900,00	96,20	4.807.241.072,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.601.095.000,00	13.300.235.770,00	97,79	12.826.244.456,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.909.681.000,00	1.814.843.786,00	95,03	1.943.154.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.839.355.000,00	10.605.112.380,00	97,84	10.806.222.624,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	184.109.000,00	168.909.670,00	91,74	172.397.940,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.685.000,00	2.433.581,00	90,64	2.438.866,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.181.801.000,00	10.717.443.920,00	95,85	17.190.650.575,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	401.429.000,00	354.618.527,00	88,34	356.415.164,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.204.843.000,00	1.065.731.030,00	88,45	1.069.344.218,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	212.703.000,00	185.403.017,00	87,17	558.522.780,00
JUMLAH		237.476.503.972,00	233.684.985.584,00	98,40	241.475.377.325,00

Tabel 5.1.23
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dan Belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
A	Belanja Pegawai	143.660.144.631,00	134.318.666.908,44	93,50	125.570.772.248,81
1	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	52.184.420.751,00	49.761.115.698,00	95,36	45.783.786.049,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	52.184.420.751,00	49.761.115.698,00	95,36	45.783.786.049,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.143.762.940,00	62.864.403.465,00	90,92	63.034.119.555,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	858.982.048,00	769.148.316,00	89,54	609.187.066,00
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	126.553.294,00	28.437.269,00	22,47	38.534.349,00
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.980.951.298,00	54.918.583.545,00	93,11	55.703.865.340,00
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.593.566.300,00	2.125.369.335,00	59,14	2.304.382.800,00
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	838.000.000,00	796.500.000,00	95,05	552.750.000,00
	Belanja Honorarium	4.031.560.000,00	3.587.465.000,00	88,98	3.825.400.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	714.150.000,00	638.900.000,00	89,46	0,00
3	Belanja Pegawai BLUD	22.331.960.940,00	21.693.147.745,44	97,14	16.752.866.644,81
JUMLAH		143.660.144.631,00	134.318.666.908,44	93,50	125.570.772.248,81

Tabel 5.1.24

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH	12.406.517.876,00	12.045.230.078,00	97,09	13.243.671.734,00
1)	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.412.243.000,00	11.139.769.705,00	97,61	12.273.970.318,00
a	Belanja Uang Representasi DPRD	673.486.000,00	665.490.000,00	98,81	670.110.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	68.838.000,00	67.624.200,00	98,24	69.182.400,00
c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	78.955.000,00	77.344.560,00	97,96	72.057.900,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
d	Belanja Uang Paket DPRD	58.781.000,00	57.582.000,00	97,96	57.414.000,00
e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	982.355.000,00	964.960.500,00	98,23	971.659.500,00
f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.943.000,00	96.937.575,00	97,97	97.394.325,00
g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	23.118.000,00	22.944.075,00	99,25	29.551.725,00
h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.315.250.000,00	2.268.000.000,00	97,96	2.261.700.000,00
i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	570.000.000,00	567.000.000,00	99,47	548.100.000,00
j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	273.000,00	267.902,00	98,13	240.468,00
k	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	41.239.000,00	40.365.674,00	97,88	73.600.000,00
l	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.180.000,00	2.134.764,00	97,92	-
m	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.725.000,00	2.668.455,00	97,92	-
n	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.414.975.000,00	2.377.950.000,00	98,47	3.207.600.000,00
o	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.006.125.000,00	3.928.500.000,00	98,06	4.212.000.000,00
p	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	75.000.000,00	-	-	3.360.000,00
2)	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	500.944.876,00	421.250.373,00	84,09	478.985.416,00
3)	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	493.330.000,00	484.210.000,00	98,15	490.716.000,00
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.000.000,00	110.880.000,00		90.720.000,00
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	373.330.000,00	373.330.000,00		399.996.000,00
JUMLAH		12.406.517.876,00	12.045.230.078,00	97,09	13.243.671.734,00

V.A.2.a.2.

Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2022 (Rp)
304.834.151.224,05

Tahun 2021 (Rp)
246.612.992.141,35

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pembelian barang maupun jasa yang digunakan untuk memperlancar operasional seluruh kegiatan yang akhirnya dapat memperlancar tugas-tugas pemerintahan.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp320.595.136.217,00 terealisasi sebesar Rp304.834.151.224,05 atau 95,08%. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp58.221.159.082,70 atau 23,61%.

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian 2021	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	81.728.831.828,00	78.697.438.239,62	96,29	53.777.751.874,83
2	Belanja Jasa Kantor	67.573.831.547,00	63.649.158.487,52	94,19	62.299.085.139,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.342.008.950,00	10.968.689.905,00	96,71	10.657.347.927,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.323.011.000,00	1.303.011.400,00	98,49	1.249.063.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.957.199.000,00	2.845.976.795,00	96,24	1.123.640.000,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	170.000.000,00	167.530.000,00	98,55	0,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	25.200.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.215.970.000,00	3.074.390.100,00	95,60	2.421.756.520,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	135.930.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.616.035.100,00	2.457.796.547,00	93,95	3.148.394.482,00
11	Belanja Pemeliharaan Tanah	150.000.000,00	149.670.000,00	99,78	200.243.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.086.710.000,00	6.757.443.306,00	95,35	5.380.525.167,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.903.889.568,00	4.896.649.928,05	99,85	831.851.102,00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.782.500.000,00	2.769.241.900,00	99,52	2.993.930.000,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.735.785.700,00	58.509.195.388,00	94,77	45.812.331.501,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	199.991.000,00	0,00	0,00
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.470.400.000,00	1.454.600.000,00	98,93	407.500.000,00

No	Uraian 2021	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	342.500.000,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.094.623.052,00	25.467.844.661,00	94,00	25.409.016.269,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.086.340.472,00	41.307.523.566,86	93,70	30.396.926.159,52
Jumlah		320.595.136.217,00	304.834.151.224,05	95,08	246.612.992.141,35

Realisasi Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp304.834.151.224,05 dapat dilihat pada **Lampiran 4a** Laporan Keuangan ini.

a. **Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp 78.697.438.239,62** terdiri dari.

Tabel 5.1.26
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	179.500.000,00	179.500.000,00	100,00	184.077.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.000.000,00	9.987.740,00	99,88	427.702.725,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.729.738.400,00	5.274.657.561,00	92,06	3.906.922.408,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.650.200.000,00	2.650.200.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	141.980.000,00	134.480.000,00	94,72	296.666.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	48.604.000,00	36.562.700,00	75,23	24.082.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	183.250.000,00	181.850.000,00	99,24	299.930.100,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	125.667.000,00	125.626.840,00	99,97	673.261.750,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	166.004.500,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	557.708.000,00	399.207.252,00	71,58	1.432.141.060,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	150.188.000,00	149.371.210,00	99,46	224.588.273,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	161.872.000,00	148.232.400,00	91,57	193.738.500,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	879.000,00	879.000,00	100,00	1.930.500,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.559.000,00	14.559.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.606.109.646,00	2.500.483.175,00	95,95	2.964.737.969,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	890.574.750,00	881.191.380,00	98,95	543.346.001,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.050.626.200,00	2.022.940.102,00	98,65	1.159.038.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	204.901.000,00	204.540.000,00	99,82	202.963.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	944.488.000,00	938.855.800,00	99,40	947.334.108,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	817.731.095,00	810.846.685,00	99,16	548.177.301,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	336.253.521,00	335.102.411,00	99,66	425.427.607,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	35.440.000,00	35.390.000,00	99,86	129.493.200,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	305.435.000,00	300.430.000,00	98,36	0,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	97.304.000,00	95.474.000,00	98,12	44.800.000,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.484.555.233,00	1.329.225.956,00	89,54	4.488.889.574,00
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.405.343.597,00	1.640.677.244,00	68,21	0,00
28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	46.628.799.386,00	45.923.094.997,70	98,49	26.232.219.048,83
29	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	399.600.000,00	363.328.188,92	90,92	0,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.122.801.000,00	1.118.124.000,00	99,58	3.901.098.250,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	143.350.000,00	143.320.000,00	99,98	0,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.354.387.000,00	5.884.869.919,00	92,61	3.414.253.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.687.179.000,00	2.674.189.450,00	99,52	43.913.000,00
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	24.000.000,00	7.850.000,00	32,71	55.615.000,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	45.400.000,00	22.040.000,00	48,55	0,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	79.828.000,00	74.314.000,00	93,09	104.502.000,00
37	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	407.500.000,00	407.488.200,00	100,00	57.500.000,00
38	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	96.000.000,00	95.238.000,00	99,21	0,00
39	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	120.000.000,00	119.547.000,00	99,62	0,00
40	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.000.000,00	44.955.000,00	99,90	0,00
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	55.500.000,00	55.278.000,00	99,60	0,00
42	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	174.900.000,00	169.125.000,00	96,70	0,00
43	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	674.400.000,00
44	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	211.000.000,00	196.866.152,00	93,30	6.000.000,00
45	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	35.750.000,00	35.750.000,00	100,00	0,00
46	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	5.000.000,00	2.997.000,00	59,94	0,00
47	Belanja Pakaian Adat Daerah	32.700.000,00	32.700.000,00	100,00	0,00
48	Belanja Pakaian Batik Tradisional	585.500.000,00	585.499.500,00	100,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
49	Belanja Pakaian Olahraga	96.880.000,00	96.880.000,00	100,00	0,00
50	Belanja Pakaian Paskibraka	244.850.000,00	243.713.376,00	99,54	0,00
JUMLAH		81.728.831.828,00	78.697.438.239,62	96,29	53.777.751.874,83

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp45.923.094.997,70 dapat dilihat pada **Lampiran 4b** Laporan Keuangan ini.

b. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 63.649.158.487,52 terdiri dari.

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.284.050.000,00	1.022.863.300,00	79,66	513.350.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.841.010.000,00	2.653.790.000,00	93,41	1.631.960.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	86.400.000,00	86.400.000,00	100,00	125.800.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	100.500.000,00	100.500.000,00	100,00	81.500.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	4.750.000,00	65,97	1.120.100.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00	0,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	15 .800.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	651.600.000,00	619.200.000,00	95,03	635.400.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.046.380.000,00	4.038.280.000,00	99,80	4.352.150.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.907.209.500,00	2.768.006.787,52	95,21	4.914.101.403,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	135.710.000,00	93.112.992,00	68,61	30.924.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.500.000.000,00	4.485.360.000,00	99,67	5.570.840.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.193.000.000,00	2.001.600.000,00	91,27	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	96.800.000,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
16	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	783.400.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	3.300.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	308.200.000,00	308.200.000,00	100,00	25.975.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.113.395.000,00	15.335.900.000,00	95,17	12.172.530.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	407.200.000,00	304.600.000,00	74,80	885.273.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Ahli	524.912.000,00	510.657.950,00	97,28	321.364.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.902.100.000,00	3.710.630.000,00	95,09	3.598.192.777,00
23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.913.530.000,00	3.833.910.000,00	97,97	2.640.470.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.468.280.000,00	2.432.255.000,00	98,54	2.056.970.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	400.600.000,00	400.600.000,00	100,00	13.750.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	86.570.000,00	80.570.000,00	93,07	23.260.000,00
27	Belanja Jasa Tata Rias	616.800.000,00	615.095.650,00	99,72	180.736.825,00
28	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
29	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	90.000.000,00	89.358.500,00	99,29	0,00
30	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	144.585.000,00	143.735.000,00	99,41	128.180.000,00
31	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
32	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	58.300.000,00	57.800.000,00	99,14	27.500.000,00
33	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	13.750.000,00
34	Belanja Jasa Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	212.746.000,00
35	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	73.220.000,00	71.899.272,00	98,20	18.512.280,00
36	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	0,00
37	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	15.000.000,00	10.835.500,00	72,24	58.435.060,00
38	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.395.000.000,00	1.359.165.200,00	97,43	1.321.382.000,00
39	Belanja Tagihan Telepon	1.116.296.131,00	1.076.158.167,00	96,40	469.089.870,00
40	Belanja Tagihan Air	71.157.000,00	57.123.200,00	80,28	40.766.600,00
41	Belanja Tagihan Listrik	4.004.139.542,00	3.755.232.847,00	93,78	2.968.290.734,00
42	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	54.500.000,00	51.520.000,00	94,53	219.870.000,00
43	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	939.899.984,00	927.811.946,00	98,71	923.075.316,00
44	Belanja Paket/Pengiriman	3.800.000,00	1.212.372,00	31,90	1.832.650,00
45	Belanja Penambahan Daya	20.000.000,00	11.420.000,00	57,10	6.350.000,00
46	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	385.825.390,00	256.962.100,00	66,60	275.001.550,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
47	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.500.000.000,00	5.371.547.647,00	97,66	4.966.194.346,00
48	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Lembur	833.907.000,00	819.150.000,00	98,23	781.083.000,00
50	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
51	Belanja Insentif Tenaga Keseatan Vaksinator	640.640.000,00	633.000.000,00	98,81	0,00
52	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	4.410.265.000,00	3.237.595.057,00	73,41	7.865.178.728,00
JUMLAH		67.573.831.547,00	63.649.158.487,52	94,19	62.299.085.139,00

c. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp 10.968.689.905,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	960.000.000,00	839.643.840,00	87,46	344.922.240,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PB	0,00	0,00	0,00	638.812.075,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.996.803.200,00	8.844.301.200,00	98,30	8.969.083.200,00
4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	445.435.200,00	413.800.800,00	92,90	355.546.400,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	257.713.200,00	227.492.639,00	88,27	-
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	322.057.350,00	284.365.801,00	88,30	-
7	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	360.000.000,00	359.085.625,00	99,75	344.734.012,00
JUMLAH		11.342.008.950,00	10.968.689.905,00	96,71	10.653.097.927,00

d. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.303.011.400,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.29
Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Excavator	4.750.000,00	3.800.000,00	80,00	-
2	Belanja Sewa Alat Pengangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	8.400.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	308.000.000,00	290.495.000,00	94,32	143.500.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	225.500.000,00	225.500.000,00	100,00	27.750.000,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	97.150.000,00	96.150.000,00	98,97	-
6	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	374.788.000,00
7	Belanja Sewa Mebel	386.511.000,00	386.501.400,00	100,00	567.650.000,00
8	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	230.000.000,00	229.465.000,00	99,77	-
9	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	70.275.000,00
10	Belanja Sewa Komputer Jaringan	56.700.000,00	56.700.000,00	100,00	56.700.000,00
JUMLAH		1.323.011.000,00	1.303.011.400,00	98,49	1.249.063.000,00

e. **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.845.976.795,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.30
Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	327.150.000,00	321.470.000,00	98,26	1.009.050.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	347.100.000,00	259.926.295,00	74,89	29.840.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	185.000.000,00	185.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	1.941.320.000,00	1.925.460.500,00	99,18	84.750.000,00
6	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	103.629.000,00	101.120.000,00	97,58	0,00
JUMLAH		2.957.199.000,00	2.845.976.795,00	96,24	1.123.640.000,00

- f. **Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 167.530.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.31

Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	170.000.000,00	167.530.000,00	98,55	0,00
JUMLAH		170.000.000,00	167.530.000,00	98,55	0,00

- g. **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 8.000.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.32

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100	25.200.000,00
JUMLAH		8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	25.200.000,00

- h. **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.074.390.100,00** terdiri dari

i. **Tabel 5.1.33**

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00	14.510.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	272.582.200,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	85.650.000,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.220.000.000,00	2.215.879.500,00	99,81	1.172.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	20.000.000,00	14.966.000,00	74,83	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	288.813.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	379.000.000,00	373.300.000,00	98,50	571.433.800,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	375.000.000,00	268.686.600,00	71,65	16.767.520,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	190.000.000,00	189.588.000,00	99,78	0,00
JUMLAH		3.215.970.000,00	3.074.390.100,00	95,60	2.421.756.520,00

j. **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp 150.000.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	150.000.000,00	150.000.000,00	100	61.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	74.930.000,00
JUMLAH		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	135.930.000,00

k. **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.457.796.547,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	457.085.000,00	409.759.400,00	89,65	743.208.300,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	1.408.450.000,00	1.345.263.125,00	95,51	2.405.186.182,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	750.500.100,00	702.774.022,00	93,64	0,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
JUMLAH		2.616.035.100,00	2.457.796.547,00	93,95	3.148.394.482,00

l. Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp 149.670.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.36

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	100.000.000,00	99.770.000,00	99,77	193.343.000,00
JUMLAH		150.000.000,00	149.670.000,00	99,78	200.243.000,00

m. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.757.443.306,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.37

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.077.040.000,00	1.074.072.700,00	99,72	776.262.040,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	102.460.000,00	96.795.500,00	94,47	108.800.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	325.000.000,00	288.466.200,00	88,76	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainny	55.000.000,00	11.610.600,00	21,11	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.480.350.000,00	1.375.538.537,00	92,92	1.663.836.913,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.711.500.000,00	1.636.707.384,00	95,63	958.444.164,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	110.000.000,00	98.152.345,00	89,23	0,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	559.250.000,00	524.377.962,00	93,76	398.409.350,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8.750.000,00	8.746.700,00	99,96	9.915.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	315.000.000,00	309.599.228,00	98,29	181.465.980,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	117.500.000,00	115.811.000,00	98,56	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	57.005.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	370.560.000,00	366.632.150,00	98,94	289.616.100,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	165.000.000,00	164.210.000,00	99,52	20.000.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	203.200.000,00	203.031.000,00	99,92	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	100.000.000,00	98.950.000,00	98,95	11.775.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	248.000.000,00	246.883.000,00	99,55	262.069.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	51.500.000,00	51.500.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.600.000,00	2.425.000,00	93,27	0,00
32	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	7.000.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	46.000.000,00	45.934.000,00	99,86	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	118.193.000,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	19.706.620,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.140.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.945.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	0,00	0,00	364.950.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	4.992.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
JUMLAH		7.086.710.000,00	6.757.443.306,00	95,35	5.380.525.167,00

n. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.896.649.928,05 terdiri dari.

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.432.521.268,00	1.425.285.857,99	99,49	752.014.102,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.802.853.000,00	2.802.852.402,42	100,00	0,00
3	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	598.515.300,00	598.511.667,64	100,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	79.837.000,00
JUMLAH		4.903.889.568,00	4.896.649.928,05	99,85	831.851.102,00

o. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.769.241.900,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Penyeberangan	1.150.000.000,00	1.139.650.000,00	99,10	1.324.680.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- Bangunan Penampung Sampah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	115.000.000,00	112.091.900,00	97,47	164.300.000,00
JUMLAH		2.782.500.000,00	2.769.241.900,00	99,52	2.993.930.000,00

p. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp58.709.186.388,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.012.211.000,00	45.958.001.438,00	95,72	32.664.925.303,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.060.624.700,00	11.974.483.950,00	91,68	12.787.825.250,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	246.150.000,00	192.600.000,00	78,24	220.420.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	416.800.000,00	384.110.000,00	92,16	139.160.948,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	200.000.000,00	199.991.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		61.935.785.700,00	58.709.186.388,00	94,79	45.812.331.501,00

q. Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.454.600.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.470.400.000,00	1.454.600.000,00	98,93	407.500.000,00
a.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.470.400.000,00	1.454.600.000,00	98,93	0,00
b.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
c.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	342.500.000,00
JUMLAH		1.470.400.000,00	1.454.600.000,00	98,93	750.000.000,00

r. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp25.467.844.661,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.094.623.052,00	25.467.844.661,00	94,00	25.406.516.269,00
JUMLAH		27.094.623.052,00	25.467.844.661,00	94,00	25.406.516.269,00

Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun 2022 untuk Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 /P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 /P/ 2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/P/2022 Tentang Besaran Alokasi Dan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022.

Penerimaan BOP PAUD, Dana BOS Reguler dan Kinerja, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2022 dianggarkan pada Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 yang ditransfer langsung ke rekening sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik dan terdapat mekanisme penyalurannya dan tahapan penyalurannya.

Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.43
Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Saldo Awal	154.484.863,00	154.484.863,00	100	639.921.020,00
2	Pendapatan	41.020.300.000,00	39.322.847.837,00	95,86	30.885.940.000,00
	BOS Reguler	34.412.000.000,00	32.954.547.837,00	95,76	30.885.940.000,00
	BOS Kinerja	1.000.000.000,00	760.000.000,00	76,00	-
	BOP PAUD	4.797.000.000,00	4.797.000.000,00	100,00	-
	BOP Pendidikan Kesetaraan	811.300.000,00	811.300.000,00	100,00	-
3	Total Penerimaan	41.174.784.863,00	39.477.332.700,00	95,88	31.525.861.020,00
4	Belanja Barang dan Jasa Sekolah Negeri	27.094.623.052,00	25.467.844.661,00	94,00	25.409.016.269,00
	Barang dan Jasa- SD Reguler	17.549.991.958,00	16.670.206.868,00	94,99	-
	Barang dan Jasa- SD Kinerja	250.344.135,00	233.445.335,00	93,25	
	Barang dan Jasa - SMP Reguler	8.143.779.381,00	7.627.284.880,00	93,66	-
	Barang dan Jasa - SMP Kinerja	134.619.714,00	134.619.714,00	100,00	
	Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	166.200.000,00	166.200.000,00	100,00	-
	Barang dan Jasa BOP PAUD	849.687.864,00	636.087.864,00	74,86	-
5	Belanja Modal Sekolah Negeri	6.112.661.811,00	6.101.342.827,00	99,81	5.962.359.888,00
	Belanja Peralatan dan Mesin BOS	4.224.959.435,00	4.215.140.451,00	99,77	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.887.702.376,00	1.886.202.376,00	99,92	-
6	Belanja Hibah Sekolah Swasta	8.077.300.000,00	7.856.036.472,00	97,26	-

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	3.238.000.000,00	3.152.936.472,00	97,37	-
	Belanja Hibah SD Swasta	2.714.400.000,00	2.649.047.212,00	97,59	-
	Belanja Hibah SMP Swasta	523.600.000,00	503.889.260,00	96,24	-
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.839.300.000,00	4.703.100.000,00	97,19	-
	Belanja Hibah PAUD Swasta	4.251.600.000,00	4.115.400.000,00	96,80	-
	Belanja Hibah Kesetaraan Swasta	587.700.000,00	587.700.000,00	100,00	-
7	Total Belanja	41.284.584.863,00	39.425.223.960,00	95,50	31.371.376.157,00
	Surplus / Defisit	(109.800.000,00)	52.108.740,00		154.484.863,00

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 realisasi pendapatan BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2022 sebesar Rp39.477.332.700,00 berasal dari saldo awal sebesar Rp154.484.863,00, penerimaan Tahun 2022 atas satuan pendidikan sebesar Rp39.322.847.837,00. Belanja untuk Sekolah Negeri Tahun 2022 terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar Rp25.513.356.797,00 dan belanja modal sebesar Rp6.055.830.691,00. Belanja Hibah untuk Sekolah Swasta terealisasi sebesar Rp7.856.036.472,00 dengan Saldo akhir dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp52.108.740,00.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3** pada Laporan Keuangan ini.

s. **Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp 41.307.523.566,86** terdiri dari.

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
I	BLUD RSUD	38.147.104.453,00	35.953.590.541,00	94,25	24.722.656.226,00
	BLUD RSUD Sungai Dareh	32.692.140.056,00	31.074.812.894,00	95,05	24.355.495.573,00
	RSUD Sungai Rumbai	5.454.964.397,00	4.878.777.647,00	89,44	367.160.653,00
II	BLUD Puskesmas	5.939.236.019,00	5.353.933.025,86	90,15	5.674.269.933,52
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	444.313.627,00	374.917.333,00	84,38	361.366.960,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	397.337.868,00	276.787.592,00	69,66	293.270.328,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	447.085.636,00	437.187.166,91	97,79	696.259.750,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	282.929.196,00	234.690.625,00	82,95	216.054.838,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	618.305.258,00	592.661.843,00	95,85	576.330.145,00
6	BLUD Puskesmas Silago	383.516.687,00	370.111.088,00	96,50	349.355.670,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	337.502.665,00	259.234.217,00	76,81	481.113.761,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	636.515.925,00	628.279.742,00	98,71	536.623.317,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.026.303.126,00	955.539.001,00	93,10	787.476.068,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	358.376.236,00	358.248.809,00	99,96	379.352.851,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	164.710.103,00	163.008.149,00	98,97	207.595.710,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	183.082.625,00	182.904.800,00	99,90	230.651.543,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	515.776.939,00	424.810.020,94	82,36	466.476.692,51
14	Puskesmas Beringin Sakti	143.480.128,00	95.552.639,01	66,60	92.342.300,01
JUMLAH		44.086.340.472,00	41.307.523.566,86	98,80	30.396.926.159,52

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp44.086.340.472,00 terealisasi sebesar Rp41.307.523.566,86 atau 98,8%. Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2022 dapat dilihat di **Lampiran 1** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.2.a.3. Hibah	11.277.041.621,00	11.804.111.087,00

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp11.550.690.880,00 dengan realisasi Rp11.277.041.621,00 atau 97,63%. Belanja Hibah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp527.069.466,00 atau -4,47% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp11.804.111.087,00.

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.514.300.000,00	7.327.214.269,00	97,51	11.042.548.467,00
	a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000.000,00	1.199.891.869,00	99,99	6.134.550.000,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
	Belanja Hibah Uang	1.200.000.000,00	1.199.891.869,00	99,99	675.000.000,00
	Belanja Hibah Barang	-	-	-	5.459.550.000,00
	b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.919.300.000,00	4.783.100.000,00	97,23	349.795.417,00
	Belanja Hibah Uang	4.919.300.000,00	4.783.100.000,00	97,23	349.795.417,00
	c Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.395.000.000,00	1.344.222.400,00	96,36	4.558.203.050,00
	Belanja Hibah Uang	1.395.000.000,00	1.344.222.400,00	96,36	1.819.732.000,00
	Belanja Hibah Barang	-	-	-	2.738.471.050,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	3.238.000.000,00	3.152.936.472,00	97,37	-
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.238.000.000,00	3.152.936.472,00	97,37	-
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.390.880,00	796.890.880,00	99,81	761.562.620,00
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.390.880,00	796.890.880,00	99,81	761.562.620,00
JUMLAH		11.550.690.880,00	11.277.041.621,00	97,63	11.804.111.087,00

Rincian Belanja Hibah Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.2.b. Belanja Modal	132.791.374.992,86	166.252.751.216,49

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp151.905.233.451,00 dengan realisasi sebesar Rp132.791.374.992,86 atau 87,42%.

Realisasi Belanja Modal terinci pada akun-akun aset berikut ini.

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Realiasi 2021

		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.984.934.923,00	48.052.940.621,00	96,13	51.541.549.729,92
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.484.719.732,00	15.750.482.106,12	73,31	85.986.356.136,57
4	Belanja Modal Jalan Irigasi. dan Jaringan	77.611.351.420,00	66.363.505.690,74	85,51	22.155.213.262,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.824.227.376,00	2.624.446.575,00	92,93	6.569.632.088,00
JUMLAH		151.905.233.451,00	132.791.374.992,86	87,42	166.252.751.216,49

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.2.b.1 Belanja Tanah	0,00	0,00

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada Tahun 2022 dan Tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.2.b.2 Belanja Peralatan dan Mesin	48.052.940.621,00	51.541.549.729,92

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp49.984.934.923,00 dengan realisasi sebesar Rp48.052.940.621,00 atau 96,13%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp3.488.609.108,92 atau -6,77%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 5.1.47
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Besar	1.165.000,00	1.165.000,00	100,00	448.696.500,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.568.490.000,00	5.450.384.050,00	97,88	4.718.363.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00	9.761.900,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.415.245.293	6.179.564.985	83,34	5.103.236.709,00

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.690.670.000	2.589.154.500	96,23	528.387.450,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.738.528.515	18.367.629.167	98,02	26.970.791.174,92
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.045.061.850	3.010.803.526	98,87	11.549.997.972,00
8	Belanja Modal Komputer	8.232.666.350	8.171.230.462	99,25	2.119.778.524,00
9	Belanja Modal Rambu-Rambu	37.048.480,00	36.768.480,00	99,24	41.123.000,00
10	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.224.959.435,00	4.215.140.451,00	99,77	-
12	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	7.665.900,00
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	34.900.000,00
14	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	3.097.600,00
15	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	5.750.000,00
JUMLAH		49.984.934.923,00	48.052.940.621,00	96,13	51.541.549.729,92

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.2.b.3 Belanja Gedung dan Bangunan	15.750.482.106,12	85.986.356.136,57

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp21.484.719.732,00 dengan realisasi sebesar Rp15.750.482.106,12 atau 73,31%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp70.235.874.030,45 atau -81,68%.

Tabel 5.1.48
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	21.366.519.732,00	15.643.204.545,96	73,21	85.981.423.636,57

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Belanja Modal Monumen	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti	117.500.000,00	107.277.560,16	91,30	4.932.500,00
JUMLAH		21.484.719.732,00	15.750.482.106,12	73,31	85.986.356.136,57

Tahun 2022 (Rp)

Tahun 2021 (Rp)

V.A.2.b.4 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi

66.363.505.690,74

22.155.213.262,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp77.611.351.420,00 dengan realisasi sebesar Rp66.363.505.690,74 atau 85,51%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp44.208.292.428,74 atau 199,54%.

Tabel 5.1.49

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	58.279.512.720,00	54.594.950.240,74	93,68	18.031.012.662,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	17.687.408.700,00	11.071.116.350,00	62,59	2.713.857.700,00
3	Belanja Modal Instalasi	473.220.000,00	465.389.100,00	98,35	1.062.842.900,00
4	Belanja Modal Jaringan	1.171.210.000,00	232.050.000,00	19,81	347.500.000,00
JUMLAH		77.611.351.420,00	66.363.505.690,74	85,51	22.155.213.262,00

Tahun 2022 (Rp)

Tahun 2021 (Rp)

V.A.2.b.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

2.624.446.575,00

6.569.632.088,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.824.227.376,00 dengan realisasi sebesar Rp2.624.446.575,00 atau 92,93%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp3.945.185.513,00 atau -60,05%.

Tabel 5.1.50
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	324.718.600
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	336.525.000,00	331.739.000,00	98,58	-
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.887.702.376,00	1.886.202.376,00	99,92	-
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	585.000.000,00	391.505.199,00	66,92	-
5	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	400.000
6	Belanja Modal Biota Perairan	-	-	-	77.250.000
7	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	3.500.000
8	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	22.550.000
9	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	178.853.600
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	5.962.359.888
JUMLAH		2.824.227.376,00	2.624.446.575,00	92,93	6.569.632.088,00

Rincian Belanja Modal masing-masing SKPD Tahun 2022 terdapat pada **Lampiran 6** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.2.c.	Belanja Tak Terduga	369.162.297,00	164.439.330,00

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp450.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp369.162.297,00 atau sebesar 82,04%.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 yang dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat di **Lampiran 7** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.3	Transfer/ Bagi Hasil ke Desa	110.050.724.476,00	111.924.041.243,00

Belanja Transfer /Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2022 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya. Realisasi Transfer dianggarkan sebesar Rp110.640.401.813,00 dan terealisasi sebesar Rp110.050.724.476,00 atau 99,47% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.51
Realisasi Transfer Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
I.	Transfer/ Bagi Hasil ke Desa	3.249.217.813,00	2.659.549.476,00	81,85	1.861.178.243,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.825.328.297,00	2.384.214.550,00	84,39	1.658.321.536,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	423.889.516,00	275.334.926,00	64,95	202.856.707,00
II.	Transfer Bantuan Keuangan	107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	100,00	110.062.863.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
4	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	107.191.184.000,00	107.191.175.000,00	100,00	110.062.863.000,00
JUMLAH		110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	99,47	111.924.041.243,00

Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp2.825.328.297,00 dan terealisasi sebesar Rp2.384.214.550,00 atau 84,39%.

Bagi Hasil Retribusi Tahun 2022 berupa Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp423.889.516,00 terealisasi sebesar Rp275.334.926,00 atau 64,95%. Uraian selengkapnya mengenai Transfer Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8** dan Transfer Bagi Hasil Retribusi pada **Lampiran 9** di Laporan Keuangan ini.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp107.191.184.000,00 dan terealisasi sebesar Rp107.191.175.000,00 atau 100% yang diperuntukkan untuk 52 nagari. Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN sebesar Rp47.755.788.000,00 dengan realisasi 100%. Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp59.435.387.000,00 dan terealisasi 100%.

Penyaluran Dana Desa dari APBN dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dicatat di Laporan Realisasi Anggaran sebesar penyaluran ke Desa berdasarkan Laporan pada Aplikasi Simtrada dan OMSPAN Kementerian Keuangan. Rincian Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN dan Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) pada **Lampiran 10** di Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.4	Surplus/(Defisit)	(28.294.453.902,55)	61.872.560.776,22

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah (Defisit) sebesar Rp28.294.453.902,55 sedangkan pada Tahun 2021 Surplus sebesar Rp61.872.560.776,22.

V.A.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.5.a.	Penerimaan Pembiayaan	70.206.985.982,71	8.334.425.206,49

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Rp70.206.985.982,00 terealisasi sebesar Rp 70.206.985.982,71 atau 100%.

V.A.5.a.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 ini merupakan penerimaan SiLPA Tahun 2021. Secara rinci nilai penerimaan SiLPA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	66.539.152.597,42
b.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	2.799.551.440,67
c.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai	Rp	700.746.329,62
d.	Saldo Akhir Dana BOS	Rp	154.484.863,00
e.	Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	13.050.752,00
Jumlah		Rp	70.206.985.982,71

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.5.b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	41.912.532.080,16	70.206.985.982,71

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp41.912.532.080,17 sedangkan SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp70.206.985.982,71. Bila dibandingkan SILPA Tahun 2022 dengan Tahun 2021 terjadi penurunan SILPA sebesar Rp 28.294.453.902,55 atau -40,3%.

Secara rinci Nilai SILPA Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	34.291.745.810,17
b.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	6.858.499.201,67
c.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai	Rp	710.178.328,32
d.	Saldo Akhir Dana BOS	Rp	52.108.740,00
Jumlah		Rp	41.912.532.080,16

Uraian Perhitungan SILPA Tahun 2022 sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	(28.294.453.902,55)
Pembiayaan Netto	Rp	70.206.985.982,71
SILPA LRA Sebelum Koreksi	Rp	41.912.532.080,16
Koreksi SILPA	Rp	0,00
SILPA LRA Setelah Koreksi	Rp	41.912.532.080,16

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menggambarkan perubahan atas Saldo Anggaran Lebih dimana pada akhir Tahun 2021 terdapat Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp70.206.985.982,71 dan terjadi penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 sebesar Rp28.294.453.902,55 sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 menjadi Rp41.912.532.080,16.

Rincian perhitungan LPSAL sebagai berikut.

Surplus/ (Defisit LRA)	Rp	(28.294.453.902,55)
Pembiayaan Netto	Rp	<u>70.206.985.982,71</u>
SILPA LRA sebelum koreksi	Rp	41.912.532.080,16
Koreksi SILPA:	Rp	0,00
Jumlah Koreksi	Rp	0,00
SILPA LRA setelah koreksi	Rp	<u>41.912.532.080,16</u>

V.C. NERACA

V.C.1. ASET

Neraca Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca yang ketujuh belas kali disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Kabupaten Dharmasraya menggambarkan posisi keuangan Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2021.

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2022 memiliki Aset sebesar Rp2.474.613.185.317,86, Kewajiban sebesar Rp16.553.933.658,25 dan Ekuitas sebesar Rp2.458.059.251.659,61.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.474.613.185.317,86 turun sebesar Rp31.502.304.592,57 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.506.115.489.910,43 atau -1,26%. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a. Aset Lancar	115.968.534.062,14	145.872.214.439,45

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp115.968.534.062,14 mengalami penurunan sebesar Rp29.903.680.377,31 atau -20,5% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp145.872.214.439,45. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

Aset Lancar		Tahun 2022	Tahun 2021
a.	Kas di Kas Daerah	34.291.745.810,17	66.539.152.597,42
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
d.	Kas di BLUD	7.568.677.529,99	3.500.297.770,29
e.	Kas di BOS	52.108.740,00	154.484.863,00
f.	Kas Lainnya	123.263.561,00	312.184.107,27
g.	Setara Kas	-	-

Aset Lancar		Tahun 2022	Tahun 2021
h.	Investasi Jangka Pendek	-	-
i.	Piutang Pajak	38.486.798.355,00	36.232.224.028,00
j.	Penyisihan Piutang Pajak	(28.707.658.256,28)	(26.498.466.733,38)
k.	Piutang Retribusi	946.831.911,00	767.327.811,00
l.	Penyisihan Piutang Retribusi	(647.241.325,00)	(486.855.897,00)
m.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.032.841,00	10.284.830,00
n.	Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(60.164,21)	(51.424,15)
o.	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	11.378.150.461,63	18.281.799.828,37
p.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(3.046.534.023,19)	(2.215.645.745,10)
q.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
r.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.186.486.845,00	9.630.356.468,00
s.	Belanja Dibayar Dimuka	276.672.526,15	1.558.223.934,04
t.	Piutang Lainnya	-	13.050.752,00
u.	Penyisihan Piutang Lainnya	-	(13.050.752,00)
v.	Persediaan	46.047.259.249,88	38.086.898.001,69
Jumlah		115.968.534.062,14	145.872.214.439,45

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.1 Kas di Kas Daerah	34.291.745.810,17	66.539.152.597,42

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Dharmasraya adalah Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening nomor 1403.0101.00075-4, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang

Pulau Punjung Nomor 900/796/BKD-2021 dan Nomor PKS/03/PL/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Untuk mempermudah penerimaan pendapatan, pada tahun 2020 Bendahara Umum Daerah membuka rekening kas daerah pada BRI Kantor Cabang Dharmasraya dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pengelolaan Keuangan Nomor 900/733/BKD-2020 tanggal 1 September 2020 dengan nomor rekening 0616.01-000699-30-5.

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp34.291.745.810,17 sedangkan saldo rekening koran pada BRI Kantor Cabang Dharmasraya adalah Rp0,00.

Kas di Kas Daerah merupakan SILPA Tahun 2022 termasuk di dalamnya sisa dana terikat yang peruntukannya telah ditentukan seperti DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Hibah Rekonstruksi, pendapatan dan lain-lain yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.2
Rincian Kas Di Kas Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	DAK Fisik	4.562.752.109,00
2	DAK Non Fisik	2.464.044.877,00
3	Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD	6.406.974.390,00
4	Lain-lain	20.857.974.434,17
	Jumlah	34.291.745.810,17

Rincian mengenai realisasi DAK Fisik Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 13a** dan DAK Non Fisik pada **Lampiran 13b** di Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 dan 2021 adalah Rp0,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 dan 2021 adalah Rp0,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.4 Kas di Kas BLUD	7.568.677.529,99	3.500.297.770,29

Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2022 memiliki 16 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Rumbai ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPT Puskesmas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya dengan uraian sebagai berikut.

1. SK Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. SK Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. SK Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. SK Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. SK Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. SK Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. SK Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. SK Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. SK Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. SK Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. SK Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. SK Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
14. SK Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Beringi Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Adapun rincian saldo yang ada direkening BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Saldo Kas di BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2022			Jumlah	2021
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1	RSUD Sungai Dareh	6.858.499.201,67			6.858.499.201,67	2.799.551.440,67
2	RSUD Sungai Rumbai	2.066.142,00			2.066.142,00	0,00
3	Puskesmas Sungai Rumbai	13.147.941,00			13.147.941,00	5.073.003,00
4	Puskesmas Sungai Limau	1.201.245,70			1.201.245,70	997.867,70
5	Puskesmas Sitiung II	31.927.469,09			31.927.469,09	59.746.200,00
6	Puskesmas Padang Laweh	161.858,00			161.858,00	2.929.196,00
7	Puskesmas Sungai Dareh	141.418.103,00			141.418.103,00	253.014,00
8	Puskesmas Silago	21.283.208,00			21.283.208,00	7.689.287,00
9	Puskesmas Gunung Medan	2.534,00			2.534,00	2.665,00
10	Puskesmas Sitiung I	20.335.463,62			20.335.463,62	176.858.624,62
11	Puskesmas Koto Baru	159.532.143,00	863.000,00		160.395.143,00	362.454.241,00

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2022			Jumlah	2021
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
12	Puskesmas Timpeh	39.316.718,00			39.316.718,00	2.900.236,00
13	Puskesmas Sialang	53.288.754,00			53.288.754,00	11.101.103,00
14	Puskesmas Tiumang	73.732.525,00			73.732.525,00	8.753.825,00
15	Puskesmas Koto Besar	101.000.105,48			101.000.105,48	57.431.939,41
16	Puskesmas Beringin Sakti	50.901.118,43			50.901.118,43	4.555.127,89
	JUMLAH	7.567.814.529,99	863.000,00	-	7.568.677.529,99	3.500.297.770,29

Saldo di BLUD Tahun 2022 sebesar Rp7.568.677.529,99 terdiri atas Saldo Kas di Bank sebesar Rp7.567.814.529,99 dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp863.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.5 Kas di BOS	52.108.740,00	154.484.863,00

Kas di BOS adalah saldo Kas Dana BOS di sekolah negeri pada saat tanggal neraca. Sekolah negeri pengelola Dana BOS Tahun 2022 terdiri dari 147 SD Negeri dan 33 SMP Negeri. Saldo Kas di BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.108.740,00 terdiri dari kas dibank sebesar Rp45.242.924,00, kas tunai di bendahara pengeluaran sebesar Rp6.865.816,00. Nilai saldo kas di BOS Tahun 2021 sebesar Rp154.484.863,00.

Rincian Dana BOS Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3b** Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.6 Kas Lainnya	123.263.561,00	312.184.107,27

Kas Lainnya adalah berupa berupa pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah atau pihak terkait.

Kas Lainnya sebesar Rp123.263.561,00 terdiri dari Pajak Negara Tahun 2022 sebesar Rp122.816.437,00 yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan atas kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh kelompok masyarakat yaitu PPN sebesar Rp97.973.601,00 dan PPh 22 sebesar Rp24.842.836,00. Pendapatan Jasa Giro Dana BOS yang belum disetor ke kas daerah Tahun 2022 sebesar Rp447.124,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.7 Setara Kas	0,00	0,00

Nilai saldo Setara Kas Tahun 2022 sebesar Rp0,00 karena nilai untuk saldo Dana BOS di reklas pencatatannya pada tahun 2021 menjadi Kas di BOS.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.8 Piutang Pajak	38.486.798.355,00	36.232.224.028,00

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Piutang Pajak Hotel, dan Piutang Pajak Restoran. Piutang Pajak Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022	2021
1	PBB-P2	37.196.190.042,00	35.163.427.868,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.094.177.313,00	1.067.255.885,00
3	Pajak Restoran	-	1.540.275,00
4	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	196.431.000,00	-
		38.486.798.355,00	36.232.224.028,00

1. Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 sebagian besar merupakan piutang sewaktu pelimpahan dari Pemerintah Pusat (KPP Pratama Solok) kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-47/WPJ.27/KP.06/2014 pada tanggal 27 Februari 2014.

Penagihan Piutang PBB-P2 masih bersifat pasif dengan pola penagihan piutang dilakukan apabila ada yang mengurus BPHTB untuk diminta membayar seluruh tagihan PBB yang ada pada daftar piutang dan aplikasi SIMPBB.

Banyaknya nilai piutang PBB-P2 yang belum tertagih tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya melakukan verifikasi dan validasi data piutang ke lapangan semenjak pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Verifikasi dan validasi data piutang dimaksud agar data-data piutang PBB-P2 tersebut diyakini kebenarannya dan objek pajaknya memang ada.

Surat Penetapan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp4.504.215.953,00 dengan penerimaan pokok PBB-P2 Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.471.453.779,00. Nilai piutang yang timbul atas penerbitan dan penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 per-31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.196.190.042,00.

Nilai piutang PBB-P2 dari Tahun 1996 sampai dengan 2022 per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.163.427.868,00 ditambah dengan SKP Tahun 2021 sebesar Rp4.504.215.953,00 dikurangi penerimaan Pokok PBB P2 sebesar Rp2.471.453.779,00, maka saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.196.190.042,00. Piutang PBB-P2 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.4
Piutang PBB-P2 Tahun 2022 dan 2021

No	Tahun Pajak	Piutang Per 31 Desember 2021	Ketetapan Tahun 2022	Penerimaan Pokok Piutang PBB-P2	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	2022		4.504.215.953,00	2.236.566.070,00	2.267.649.883,00
2	2021	2.278.295.876,00		149.321.373,00	2.128.974.503,00
3	2020	2.342.722.332,00		33.045.277,00	2.309.677.055,00
4	2019	2.107.082.969,00		17.058.052,00	2.090.024.917,00
5	2018	2.278.081.579,00	-	16.061.599,00	2.262.019.980,00
6	2017	1.993.105.991,00	-	9.635.661,00	1.983.470.330,00
7	2016	2.211.630.701,00	-	9.765.747,00	2.201.864.954,00
8	2015	2.297.655.636,00	-		2.297.655.636,00
9	2014	2.787.324.493,00	-	-	2.787.324.493,00
10	1996 s.d. 2013	16.867.528.291,00	-	-	16.867.528.291,00
	Jumlah	35.163.427.868,00	4.504.215.953,00	2.471.453.779,00	37.196.190.042,00

Penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 pada LRA tercatat sebesar Rp2.475.105.302,00 terdiri dari **pokok penerimaan PBB** sebesar Rp2.471.453.779,00 dan penerimaan PBB lain-lain sebesar Rp3.651.523,00 terdiri dari penerimaan PBB melalui transaksi online tercatat dobel sebesar Rp555.965,00, penerimaan PBB melalui QRIS belum ada NOPnya sebesar Rp1.980.000,00 dan penerimaan pendapatan selisih bayar atas perbaikan data PBB sebesar Rp1.115.397,00.

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang PPJ per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.094.177.313,00 berasal dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN), dan penerimaan piutang tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.5
Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang 2022			Piutang 2021		
	Perusahaan	Nilai	Tgl Setor	Perusahaan	Nilai	Tgl Setor
1	PT PLN (Persero)	1.094.177.313,00	13/01/2023	PT PLN (Persero)	1.019.037.641,00	13/01/2022
2				PT SMP	6.750.544,00	05/01/2022
3				PT AWB	6.871.500,00	05/01/2022
4				PT Incasi Raya Pangian	7.370.641,00	11/01/2022
5				PT DSL	6.816.863,00	21/01/2022
6				PT SAK	6.778.289,00	26/01/2022
7				PT DSL	7.516.884,00	26/01/2022
8				PT AWB	6.113.523,00	27/01/2022
	Jumlah	1.094.177.313,00		Jumlah	1.067.255.885,00	

2. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 adalah Rp0,00 dan penerimaan piutang tahun 2021 pada tahun 2022 sebesar Rp1.540.275,00 terdiri dari penagihan Bulan Desember 2021 pada Restoran Pempek Dovin sebesar Rp100.000,00 dan Restoran Dbesto sebesar Rp1.440.275,00.

3. Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2022 sebesar Rp196.431.000,00 yang merupakan piutang dari PT Nindya Karya atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung (Multy Years) Kabupaten Dharmasraya dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp785.724.000,00 sesuai dengan tarif sebesar 25% yang disampaikan melalui SPTPD yang diterbitkan tanggal 01 Oktober 2021 yang sampai pada Laporan Keuangan ini disusun belum melakukan pembayaran.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(28.707.658.256,28)	(26.498.466.733,38)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.707.658.256,28 terdiri dari.

	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2022	2021
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	28.701.205.214,72	26.493.122.752,58
2	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.470.886,57	5.336.279,42
3	Penyisihan Piutang Restoran	0.00	7.701,38
4	Penyisihan Mineral Bukan Logam dan Batuan	982.155,00	
	Jumlah	28.707.658.256,28	26.498.466.733,38

Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2022 sebesar Rp28.707.658.256,28 dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.2.6
Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Cad.	Jumlah Penyisihan
1	Tahun Pajak 2022	2.267.649.883	< 1	Lancar	0,5	11.338.249,42
2	Tahun Pajak 2021	2.128.974.503	1 s.d 2	Kurang Lancar	10	212.897.450,30
3	Tahun Pajak 2020	2.309.677.055	2 s.d 5	Diragukan	50	1.154.838.527,50
4	Tahun Pajak 2019	2.090.024.917,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.045.012.458,50
5	Tahun Pajak 2018	2.262.019.980,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.131.009.990,00
6	Tahun Pajak 2017	1.983.470.330,00	2 s.d 5	Diragukan	50	991.735.165,00
7	Tahun Pajak 2016	2.201.864.954,00	> 5	Macet	100	2.201.864.954,00
8	Tahun Pajak 2015	2.297.655.636,00	> 5	Macet	100	2.297.655.636,00
9	Tahun Pajak 2014	2.787.324.493,00	> 5	Macet	100	2.787.324.493,00
10	Pajak 1996 s.d 2013	16.867.528.291,00	> 5	Macet	100	16.867.528.291,00
	Jumlah	37.196.190.042,00				28.701.205.214,72

Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp5.470.886,57 dan piutang pajak mineral bukan logam tahun 2022 sebesar Rp982.155,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.9 Piutang Retribusi	946.831.911,00	767.327.811,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp946.720.349,71 terdiri dari:

Uraian	2022	2021
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	2.300.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	217.799.261,00	240.299.261,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.445.800,00	53.067.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	644.533.850,00	471.661.550,00
Retribusi Sampah	11.678.000,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	24.375.000,00	0,00
Jumlah	946.831.911,00	767.327.811,00

a. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Pada tahun 2022 Retribusi Pasar tidak masuk lagi dalam objek Retribusi melainkan pindah ke Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Retribusi Pelayanan Pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Retribusi bersumber dari MoU Pengurus pasar yang diketahui Wali Nagari dan Dinas terkait untuk memungut retribusi pelayanan pasar. Adapun Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021 yang berasal dari Pasar Pulau Punjung sebesar Rp2.300.000,00 sudah dibayarkan pada tahun 2022.

b. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022 sebesar Rp217.799.261,00. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.7
Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022 dan 2021

No	Perusahaan	Piutang Tahun					
		2015	2017	2019	2020	2021	2022
1	PT. CMI					13.750.000,00	-
2	PT. Daya Mitra Telekomunikasi				6.050.000,00	6.050.000,00	12.100.000,00
3	PT. Telkomsel		5.500.000,00			77.550.000,00	83.050.000,00
4	PT. Indosat	12.301.040,00			20.075.000,00	20.075.000,00	61.526.040,00
5	Protelindo					-	-
6	PT. Era Bangun Towerindo				4.500.000,00	2.900,00	4.502.900,00
7	Solusi Tunas Pratama (STP)					39.600.000,00	13.250.000,00
8	Tower Bersama Group	8.995.321,00	550.000,00			11.275.000,00	9.545.321,00
9	PT. Excellindo Pratama (XL)				11.275.000,00		33.825.000,00
	Jumlah	21.296.361,00	6.050.000,00	-	41.900.000,00	168.302.900,00	217.799.261,00

c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp48.445.800,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.8
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Piutang 2022	Piutang 2021
1	Dinas Pendidikan	47.841.000,00	53.067.000,00
	Rumah Dinas	47.841.000,00	53.067.000,00
2	Dinas Perkimtan	604.800,00	0,00
	Sewa Rusunawa	604.800,00	0,00
Jumlah		48.445.800,00	53.067.000,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp48.445.800,00 merupakan Retribusi pemakaian rumah dinas di Dinas Pendidikan sebesar Rp47.841.000,00 dan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp604.800,00.

d. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2022 merupakan Piutang Air Minum UPT SPAM pada Dinas PUPR sebesar Rp 644.533.850,00 berasal dari piutang Tahun 2022 sebesar Rp209.885.400,00 dan piutang-piutang tahun sebelumnya sebesar Rp434.648.450,00. Piutang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.9
Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2022

Tahun Tunggakan	Nilai Piutang per 31 Desember 2021	Piutang tertagih di tahun 2022	Nilai Piutang per 31 Desember 2021
Tahun 2012	13.130.300,00	-	13.130.300,00
Tahun 2013	2.667.800,00	-	2.667.800,00
Tahun 2014	22.578.050,00	-	22.578.050,00
Tahun 2015	10.933.900,00	-	10.933.900,00
Tahun 2016	3.523.500,00	-	3.523.500,00
Tahun 2017	32.487.600,00	-	32.487.600,00
Tahun 2018	35.428.500,00	-	35.428.500,00
Tahun 2019	79.116.500,00	256.600,00	78.859.900,00
Tahun 2020	111.043.000,00	1.505.600,00	109.537.400,00
Tahun 2021	160.752.400,00	35.250.900,00	125.501.500,00
Jan- Agust 2022	-	-	100.993.100,00
Sept- Nov 2022	-	-	66.250.900,00
Desember 2022	-	-	42.641.400,00
Jumlah	471.661.550,00	37.013.100,00	644.533.850,00

e. Piutang Retribusi Sampah

Piutang retribusi sampah berasal dari pemungutan sampah yang belum dibayarkan selama tahun 2022 sebesar Rp11.678.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.10
Piutang Retribusi Sampah Tahun 2022

No	No. SKRD	Tanggal Penerbitan SKRD	Uraian	Nilai Piutang tahun 2022
1	421/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi Sampah Hotel Sakato Jaya Bulan Agustus - Desember 2022	1.250.000,00
2	422/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi Sampah SMA Unggul Dharmasraya bulan Agustus - Desember 2022	750.000,00
3	423/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi sampah RSUD Lama bulan Oktober 2022	2.500.000,00
4	424/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi sampah RSUD Lama bulan November 2022	2.000.000,00
5	425/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi sampah RSUD Lama bulan Desember 2022	2.500.000,00
6	426/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi sampah RSUD Baru bulan Oktober - Desember 2022	750.000,00
7	427/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi sampah Toko Gribrane shoes bulan Agustus - Desember 2022	20.000,00
8	428/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi sampah Perumahan Taratak Indah bulan September - Desember 2022	1.008.000,00
9	429/SKRD/DLH/2022	30 Desember 2022	Retribusi sampah pondok ikan rawang bulan Juli - Desember 2022	900.000,00
Jumlah				11.678.000,00

f. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) sebesar Rp24.375.000,00. Piutang ini berasal dari PT Jaya Giri Sarana dengan Nilai IMB pada Tahun 2022 sebesar Rp48.750.000,00, dengan pembayaran sebesar Rp24.375.000,00 pada tahun 2022 sehingga terdapat sisa pembayaran sebesar Rp24.375.000,00. Hingga laporan ini disusun belum ada pembayaran dari sisa piutang tersebut.

Penyisihan Piutang Retribusi

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(647.241.325,00)	(486.855.897,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 merupakan Penyisihan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Permukiman, Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Piutang SPAM pada Dinas PUPR , Penyisihan Piutang Retribusi Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bnagunan Pada Dinas PMPTSP dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.11
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Piutang 2015	21.296.361,00	Macet	100%	21.296.361,00
Piutang 2017	6.050.000,00	Macet	100%	6.050.000,00
Piutang 2018	0,00	Macet	100%	0,00
Piutang 2019	0,00	Macet	100%	0,00
Piutang 2020	41.900.000,00	Macet	100%	41.900.000,00
Piutang 2021	37.402.900,00	Macet	100%	37.402.900,00
Piutang 2022	111.150.000,00	Lancar	0,50%	555.750,00
Jumlah	217.799.261,00			107.205.011,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Dinas Pendidikan				
Tahun 2017	7.927.000,00	Macet	100%	7.927.000,00
Tahun 2018	26.131.000,00	Macet	100%	26.131.000,00
Tahun 2019	13.783.000,00	Macet	100%	13.783.000,00
Jumlah	47.841.000,00			47.841.000,00
Dinas Perumahan dan Permukiman				
Sept-Nov 2022	332.400,00	Lancar	10,00%	30.240,00
Des 2022	332.400,00	Kurang Lancar	0,50%	1.512,00
Jumlah	604.800,00			31.752,00
Tahun 2012	13.130.300,00	Macet	100%	13.130.300,00
Tahun 2013	2.667.800,00	Macet	100%	2.667.800,00
Tahun 2014	22.578.050,00	Macet	100%	22.578.050,00
Tahun 2015	10.933.900,00	Macet	100%	10.933.900,00
Tahun 2016	3.523.500,00	Macet	100%	3.523.500,00
Tahun 2017	32.487.600,00	Macet	100%	32.487.600,00

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tahun 2018	35.428.500,00	Macet	100%	35.428.500,00
Tahun 2019	78.859.900,00	Macet	100%	78.859.900,00
Tahun 2020	109.537.400,00	Macet	100%	109.537.400,00
Tahun 2021	125.501.500,00	Macet	100%	125.501.500,00
Jan- Agust 2022	100.993.100,00	Diragukan	50,00%	50.496.550,00
Sept- Nov 2022	66.250.900,00	Kurang Lancar	10,00%	6.625.090,00
Desember 2022	42.641.400,00	Lancar	0,50%	213.207,00
Jumlah	644.533.850,00			491.983.297,00
Retribusi Sampah				
Desember 2022	11.678.000,00	Lancar	0,50%	58.390,00
Jumlah	11.678.000,00			58.390,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
Desember 2022	24.375.000,00	Lancar	0,50%	121.875,00
Jumlah	24.375.000,00			121.875,00
Total	946.831.911,00			647.241.325,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.032.841,00	10.284.830,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang deviden yang akan diterima dari penempatan modal pada Bank Nagari, PT. Balairung Citrajaya dan PT.BPR Pulau Punjung. Untuk tahun 2022 terdapat piutang hasil deviden sebesar Rp12.032.841,00 yang berasal dari Deviden PT BPR Pulau Punjung berdasarkan RUPS Tahun Buku 2022.

Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 sebesar sebesar Rp10.284.830,00 atas piutang deviden PT. BPR Pulau Punjung Tahun 2021, sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 17 Maret 2022 .

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.164,21	51.424,15

Nilai Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.164,21.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	11.378.150.461,63	18.281.799.828,37

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.378.150.461,63 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.12
 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Piutang BLUD	6.240.168.020,00	13.310.387.523,00
	- BLUD Puskesmas	405.544.865,00	1.248.862.100,00
	- BLUD RSUD Sungai Dareh	5.834.623.155,00	12.061.525.423,00
2	Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
3	Piutang TGR	4.577.242.510,31	4.410.484.635,37
4	Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	5.129.991,00
5	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah	0,00	900.000,00
6	Piutang Remunerasi DBH Treasury Deposit Facility (TDF)	652.261,32	0.00
7	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	60.000,00	0.00
	Jumlah	11.378.150.461,63	18.281.799.828,37

a. Piutang BLUD

Piutang BLUD pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.240.168.020,00 terdiri dari piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp405.544.865,00 dan Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp5.834.623.155,00.

Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp405.544.865,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.13

Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2022

No	SKPD/Unit Kerja	Piutang 2018 dan 2019	Piutang 2022	Jumlah Piutang 2022 (Rp)	Total Penerimaan sebelum LKPD terbit	Sisa Piutang 2022 yang belum diterima sebelum LKPD terbit	Tanggal Pembayaran oleh BPJS
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7=5-6	8
1	RSUD Sungai Rumbai	-	275.110.665,00	275.110.665,00	0,00	275.110.665,00	
2	Sungai Rumbai	-	11.357.000,00	11.357.000,00	11.357.000,00	0,00	- 72.000 tgl 16 Januari 2023 - 5.340.000 tgl 26 Januari 2023 - 5.945.000 tgl 30 Januari 2023
3	Koto Besar	-	7.811.000,00	7.811.000,00	7.739.000,00	72.000,00	- 4.183.000 tgl 12 Januari 2023 - 3.556.000 tgl 30 Januari 2023 - 5.945.000 tgl 30 Januari 2023
4	Sungai Limau	-	8.930.000,00	8.930.000,00	8.924.000,00	6.000,00	- 8.924.000 tgl 12 Januari 2023
5	Koto Baru	-	26.479.800,00	26.479.800,00	0,00	26.479.800,00	
6	Tiumang	-	2.242.000,00	2.242.000,00	132.000,00	2.110.000,00	- 132.000 tgl 16 Januari 2023
7	Padang Laweh	-	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00	7.644.000,00	
8	Sitiung I	-	21.609.000,00	21.609.000,00	21.609.000,00	0,00	- 21.525.000 tgl 30 Januari 2023 - 84.000 tgl 17 Januari 2023
9	Timpeh	-	9.912.000,00	9.912.000,00	9.810.000,00	102.000,00	- 9.810.000 tgl 30 Januari 2023
10	Gunung Medan	-	4.958.000,00	4.958.000,00	1.836.000,00	3.122.000,00	- 1.836.000 tgl 9 Januari 2023
11	Sitiung II	-	113.400,00	113.400,00	0,00	113.400,00	
12	Beringin Sakti	-	158.000,00	158.000,00	125.000,00	33.000,00	- 25.000 tgl 12 Januari 2023 - 100.000 tgl 12 Januari 2023
13	Silago	-	15.717.000,00	15.717.000,00	0,00	15.717.000,00	
14	Sungai Dareh	-	2.580.000,00	2.580.000,00	2.400.000,00	180.000,00	- 2.400.000 tgl 30 Januari 2023
15	Sialang	3.625.000,00	7.298.000,00	10.923.000,00	0,00	10.923.000,00	
Jumlah		3.625.000,00	401.919.865,00	405.544.865,00	63.932.000,00	341.612.865,00	

Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp405.544.865,00 telah diterima sebagian piutangnya pada saat penyusunan LKPD 2022 sebesar Rp63.932.000,00 sehingga masih ada sisa piutang yang belum diterima sebesar Rp341.612.865,00.

Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2022 sebesar Rp5.834.623.155,00 terdiri dari:

Tabel 5.2.14
Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Piutang Klaim suku anak dalam bulan Des 2019	5.784.900,00
2	Klaim Obat Kronis bulan Oktober 2022	142.727.752,00
3	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2022	12.015.373,00
4	Klaim In Health bulan Desember II Tahun 2022	183.030,00
5	Klaim JKN bulan Nopember 2022	2.799.744.700,00
6	Klaim JKN bulan Desember 2022	2.874.167.400,00
Jumlah		5.834.623.155,00

Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp5.834.623.155,00 belum diterima per 31 Desember 2022 dan masih terdapat piutang tahun 2019 sebesar Rp5.784.900,00 yang masih belum dibayarkan.

b. Piutang Dana Bergulir

Dana Bergulir pada Kabupaten Dharmasraya merupakan Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2010 dengan Berita Acara Serah Terima Asset Tahap Kedua dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 900/898/B.A/2010 tanggal 27 Desember 2010 berupa Kredit Penguatan Modal/Dana Bergulir UMKM (Pokok + Bunga + Denda) sebesar Rp834.993.485,00. Berdasarkan BAST tersebut, penyerahan kredit penguatan modal ke masyarakat direalisasikan pada Tahun 2002 dan 2004 oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung.

Tidak dilakukannya penagihan atas Piutang Dana Bergulir disebabkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan serta tidak adanya piutang yang dapat ditagih dari debitur. Hal lain tidak bisanya dilakukan penagihan disebabkan alamat yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu.

Hingga saat ini nilai Piutang Dana Bergulir Tahun 2022 adalah sebesar Rp554.897.679,00 tidak ada perubahan nilai piutang dari Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Dharmasraya berupaya untuk melakukan penyelesaian piutang melalui konsultasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Padang terkait penyelesaian piutang, dan disarankan untuk melengkapi dokumen yang sesuai ketentuan terkait penghapusan piutang Negara/Daerah.

Adapun rincian Piutang Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021 terdapat di **Lampiran 14** pada Laporan Keuangan ini.

c. Piutang Air Minum UPT SPAM

Piutang Air Minum UPT SPAM per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 karena nilai piutang telah direklas ke Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

d. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Piutang TGR tahun 2022 tercatat sebesar Rp4.577.242.510,31 yang berasal dari piutang tahun 2021 sebesar Rp 4.410.484.635,37. Penambahan nilai piutang selama Tahun 2022 sebesar Rp3.209.252.445,86. Pengurangan piutang sebesar Rp3.042.494.570,92 terdiri dari penyetoran penetapan SKP2KS sebelum Tahun 2022 sebesar Rp151.593.811,60 dan penyetoran penetapan SKP2KS Tahun 2022 sebesar Rp2.890.900.759,32 sehingga nilai Piutang TGR Per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp4.577.242.510,31. Dapat dijelaskan pada perhitungan sebagai berikut.

Piutang Tahun 2021	Rp	4.410.484.635,37
Penambahan Piutang 2022	Rp	3.209.252.445,86
Pengurangan Piutang		
Penyetoran penetapan SKP2KS sebelum Tahun 2022	Rp	(151.593.811,60)
Penyetoran penetapan SKP2KS Tahun 2022	Rp	(2.890.900.759,32)
Nilai Piutang Per 31 Desember 2022	Rp	4.577.242.510,31

Adapun rincian mengenai Piutang TGR Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 15** pada laporan keuangan ini.

e. Piutang Pengembalian Belanja

Piutang pengembalian Belanja Tahun 2022 adalah piutang belanja bantuan kepada partai politik Tahun 2019 sebesar Rp5.129.991,00.

Piutang tersebut timbul sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 09.I/LHP/XVIII.PDG/03/2020 atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai

Persatuan Pembangunan, terdapat kelebihan pembayaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik periode Agustus 2019 pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.129.991,00.

f. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah

Piutang hasil penjualan aset daerah pada Tahun 2022 bernilai sebesar Rp0,00. Piutang tahun 2021 sebesar Rp900.000,0 yang merupakan penjualan bongkaran atap gedung sekolah SDN 04 Sungai Rumbai pada pada Tahun 2021 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp900.000,00.

g. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Terdapat Piutang Remunerasi DBH tahun 2022 melalui mekanisme TDF sebesar Rp652.621,32.

Piutang Renumerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) ini berasal dari kompensasi penyimpanan dana DBH yang tidak ditentukan penggunaannya diatur pada PMK Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

h. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain tahun 2022 bernilai sebesar Rp60.000,00. Piutang ini berasal dari denda retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa sewa rusunawa pada dinas Perkimtan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(3.046.534.023,19)	(2.215.645.745,10)

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp3.046.534.023,19 per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 5.2.15
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
a.	Penyisihan Piutang BLUD	329.144.807,65	1.216.003.727,80
b.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
c.	Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM	0,00	0,00

No	Uraian	2022	2021
d.	Penyisihan Piutang Bunga Deposito	0,00	0,00
e.	Penyisihan Piutang TGR	2.157.361.545,54	439.524.347,30
f.	Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	5.129.991,00
g	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan	0,00	90.000,00
Jumlah		3.046.534.023,19	2.215.645.745,10

a) Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp329.144.807,65 terdapat pada penyisihan piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp18.745.783,00 dan penyisihan piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp310.399.024,65 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.16
Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2022

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Jasa Layanan BLUD Puskesmas				
	Tahun 2018	2.125.000,00	Kurang lancar	10,00%	212.500,00
	Tahun 2019	1.500.000,00	Kurang lancar	10,00%	150.000,00
	November 2022	172.354.565,00	Kurang lancar	10,00%	17.235.456,50
	Desember 2022	229.565.300,00	Lancar	0,50%	1.147.826,50
	Jumlah	405.544.865,00			18.745.783,00
2	Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Dareh				
	Tahun 2019	5.784.900,00	Kurang lancar	10,00%	578.490,00
	Klaim Obat Kronis bulan Oktober 2022	142.727.752,00	Kurang lancar	10,00%	14.272.775,20
	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2022	12.015.373,00	Kurang lancar	10,00%	1.201.537,30
	Klaim JKN bulan Nopember 2022	2.799.744.700,00	Kurang lancar	10,00%	279.974.470,00
	Klaim JKN bulan Desember 2022	2.874.167.400,00	Lancar	0,50%	14.370.837,00
	Klaim In Health bulan Desember II Tahun 2022	183.030,00	Lancar	0,50%	915,15
	Jumlah	5.834.623.155,00			310.399.024,65
	Total 1 + 2	6.240.168.020,00			329.144.807,65

- b) Penyisihan Piutang Dana Bergulir
 Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022 masih sama dengan penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp554.897.679,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.17
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2022

No	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
1	Kec. Pulau Punjung	Macet	122.349.281,00	100%	122.349.281,00
2	Kec. Sitiung	Macet	42.186.005,00	100%	42.186.005,00
3	Kec. Koto Baru	Macet	339.304.897,00	100%	339.304.897,00
4	Kec. Sungai Rumbai	Macet	51.057.496,00	100%	51.057.496,00
	Jumlah		554.897.679,00		554.897.679,00

- c) Penyisihan Piutang TGR sebesar Rp 2.157.361.547,54 diperoleh dari perhitungan :

Tabel 5.2.18
Penyisihan Piutang TGR Tahun 2022

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Piutang TGR 2021	4.258.890.823,77	diragukan	50%	2.129.445.411,88
2	Piutang TGR 2022 SKP2KS belum jatuh tempo (lebih dari 90 hari)	277.098.686,54	kurang lancar	10%	27.709.868,65
3	Piutang TGR 2022 SKP2KS belum jatuh tempo (kurang dari 90 hari)	41.253.000,00	Lancar	0,50%	206.265,00
	Jumlah	4.577.242.510,31			2.157.361.545,54

- d) Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja sebesar Rp5.129.991,00 dari perhitungan (100%xRp5.129.991,00).

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pada Tahun 2022 adalah Rp0,00,

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.13 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.186.486.845,00	9.630.356.468,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan tersebut, Kabupaten Dharmasraya memiliki alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp58.188.095.920,00 dengan penerimaan pajak tahun 2022 yang telah masuk ke kas daerah sebesar Rp49.001.609.075,00 sehingga terdapat kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp9.186.486.845,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.19
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Bagi Hasil	Definitif 2022	Penerimaan Tahun 2021		Penerimaan LRA 2022	Piutang DBH 2022
			Salur 2022	Piutang 2021		
1	2	3	4	5	6	7=3-4
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.747.523.680,00	10.315.223.801,00	2.272.094.248,00	12.587.318.049,00	2.432.299.879,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.579.250.346,00	5.424.086.786,00	1.979.521.626,00	7.403.608.412,00	1.155.163.560,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	24.233.271.757,00	18.652.650.572,00	5.368.133.877,00	24.020.784.449,00	5.580.621.185,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	112.200.359,00	93.798.138,00	10.606.717,00	104.404.855,00	18.402.221,00
5	Pajak Rokok	14.515.849.778,00	14.515.849.778,00	-	14.515.849.778,00	0,00
	Jumlah	58.188.095.920,00	49.001.609.075,00	9.630.356.468,00	58.631.965.543,00	9.186.486.845,00

Penerimaan Dana Bagi hasil Provinsi yang telah diterima di Kas Daerah selama Tahun 2022 adalah sebesar sebesar Rp58.631.965.543,00 berasal dari penerimaan tahun 2022 sebesar Rp49.001.609.075,00 dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2021 sebesar Rp9.630.356.468,00. Piutang kurang salur Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.186.486.845,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.14 Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	13.050.752,00

Piutang Pendapatan Lainnya untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

Untuk piutang tahun 2021 sebesar Rp13.050.752,00 telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 25 Februari 2022. Piutang ini Berdasarkan Berita Acara Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017 tanggal 31 Oktober 2017 atas Pekerjaan Turap/Penahan Tebing Ampang Kuranji dengan Nomor Kontrak 610.2/21-PU-PR/PPk-AIR/PJI-PTAK/APBD/VIII-2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp398.773.000,00 telah disetor ke rekening kontraktor sebanyak uang muka 30% yaitu sebesar Rp119.631.900,00 (termasuk PPN dan PPh), pihak kontraktor atas nama CV.Artha Mandiri bersedia mengembalikan uang muka pelaksanaan pekerjaan dengan SPP No.931.DPU-PR/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp106.581.148,00 diluar PPN dan PPh sebesar Rp13.050.752,00.

CV. Artha Mandiri telah mengembalikan uang muka sebesar Rp106.581.148,00 ke Kas Daerah dengan dua kali penyetoran yaitu tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp90.000.000,00 dan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.581.148,00. Masih terdapat sisa piutang sebesar Rp13.050.752,00 yang merupakan kompensasi pajak untuk penggantian pembayaran pajak yang telah terlanjur disetor ke Kas Negara untuk dikompensasi dengan penyetoran ke Kas Daerah oleh CV Artha Mandiri.

Pada Bulan Desember 2018, sesuai pernyataan dari Direktur CV. Lubuk Karya yang menyatakan bahwa menyetujui untuk mengalihkan kompensasi pembayaran pajak negara sebesar Rp13.050.752,00 dari CV. Artha mandiri ke CV. Lubuk Karya Disebabkan karena adanya kegiatan kontrak pembangunan gedung kantor dengan nomor kontrak 640/020/036-PL/PGK-APBD/CK-DPUPR/2018 dilaksanakan oleh CV. Lubuk Karya dan penyetoran PPN yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara dilakukan kompensasi untuk disetorkan ke kas daerah. Setelah uang pembayaran kegiatan 100% masuk ke rekening CV. Lubuk Karya pada tanggal 29 Desember 2018, Direktur Lubuk Karya belum menyetorkan kompensasi pajak ke daerah sebesar Rp13.050.752,00 sampai saat ini.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.15 Belanja Dibayar Dimuka	276.672.526,15	1.558.223.934,04

Belanja Dibayar Dimuka pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari.

	2022	2021
a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka	241.755.325,15	223.112.084,04
b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Dibayar Dimuka	34.917.201,00	1.335.111.850,00
Jumlah	276.672.526,15	1.558.223.934,04

a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp241.755.325,15

Beban Jasa Dibayar Dimuka pada Tahun 2022 sebesar Rp241.755.325,15 merupakan pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp163.874.098,85 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp77.881.226,30.

Tabel 5.2.20
Belanja Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2022

No	SKPD	Asuransi Dibayar Dimuka 2022			Beban Asuransi
		total kontrak	TMT Kontrak	Asuransi dbyr dimuka	
I	Sekretariat Daerah				
1		6.319.500,00	31 Januari 2022 s.d 31 Januari 2023	536.724,66	5.782.775,34
2		6.935.500,00	15 Febuari 2022 s.d 15 Febuari 2023	874.063,01	6.061.436,99
3		4.299.000,00	28 Febuari 2022 s.d 28 Febuari 2023	694.906,85	3.604.093,15
4		27.691.880,00	2 April 2022 s.d 2 April 2023	6.979.871,12	20.712.008,88
5		6.010.180,00	7 April 2022 s.d 7 April 2023	1.597.225,92	4.412.954,08
6		12.288.232,00	30 Mei 2022 s.d 30 Mei 2023	5.049.958,36	7.238.273,64
7		21.934.408,00	11 Juli 2022 s.d 11 Juli 2023	11.538.099,55	10.396.308,45
8		10.718.000,00	27 Agustus 2022 s.d 27 Agustus 2023	7.018.087,67	3.699.912,33
9		138.705.525,00	7 Desember 2022 s.d 7 Desember 2023	129.585.161,71	9.120.363,29
Jumlah		234.902.225,00		163.874.098,85	71.028.126,15
II	Sekretariat DPRD				
1		49.391.400,00	4 April 2022 s.d 4 April 2023	12.719.976,99	36.671.423,01
2		74.792.000,00	14 November 2022 s.d 14 November 2023	65.161.249,32	9.630.750,68
Jumlah		124.183.400,00		77.881.226,30	46.302.173,70
Total I + II		359.085.625,00		241.755.325,15	117.330.299,85

b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Dibayar Dimuka sebesar Rp34.917.201,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Dibayar Dimuka sebesar Rp34.917.201,00 merupakan sisa kelebihan iuran 4% selama tahun 2022. Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2022 Nomor 900/1240/BKD-2022 tanggal 30 Desember 2022 antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan Cabang Solok.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.a.16 Persediaan	46.047.259.249,88	38.086.898.001,69

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan/atau dijual /diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.2.21
Persediaan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Persediaan Bahan habis pakai		45.336.316.109,86	32.935.792.576,69
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.656.858.363,50	4.861.619.447,00
2	Bahan Kimia	106.253.746,00	111.963.419,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	90.874.999,99	58.260.190,60
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	33.915.150,00	-
5	Bahan/Bibit Tanaman	-	141.437.500,00
6	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	122.820.000,00	-
7	Bahan Lainnya	-	353.913.915,00
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	3.781.026.855,33	3.829.289.361,60
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	310.084.455,04	193.477.868,42
10	Alat Tulis Kantor	59.952.010,00	109.123.836,00
11	Kertas dan Cover	8.332.000,00	4.031.654,41
12	Bahan Cetak	156.418.100,00	172.872.400,00
13	Benda Pos	1.960.000,00	1.020.000,00
14	Bahan Komputer	102.029.850,00	911.000,00
15	Perabot Kantor	45.976.650,00	48.364.850,00
16	Alat Listrik	9.185.600,00	2.351.000,00
17	Obatan-Obat	4.586.497.289,36	4.368.904.654,83
18	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.489.526.410,00	
19	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.338.387.941,72	18.653.213.979,83
20	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak ketiga	427.445.188,92	
21	Material makanan		25.037.500,00
22	Natura dan Pakan-Natura	8.771.500,00	

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Persediaan lainnya		710.943.140,00	5.151.105.425,00
1	Persediaan barang yg berasal Belanja Modal yang akan diberikan pada masyarakat/ pihak ketiga		1.762.731.600,00
2	Persediaan barang yg berasal Belanja Modal		783.098.550,00
3	Pers. Brg yg akan diberikan kepada masyarakat	505.818.070,00	752.416.805,00
4	Pers. Brg yg akan diberikan pd pihak ke- 3		353.838.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		1.153.895.000,00
6	Persediaan Sumbangan dari Pihak ketiga	205.125.070,00	345.125.470,00
Jumlah		46.047.259.249,86	38.086.898.001,69

Dengan rincian persediaan per SKPD Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.2.22
Persediaan per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan lainnya	Total Persediaan
1	2	3	4	5=3+4
1	Dinas Pendidikan	2.532.000,00		2.532.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.432.209.853,11		4.432.209.853,11
3	BLUD Puskesmas	3.089.464.954,39	23.948.300,00	3.113.413.254,39
4	RSUD Sungai Dareh	99.097.138,20		99.097.138,20
5	BLUD RSUD Sungai Dareh	2.598.593.602,95		2.598.593.602,95
6	Dinas PUPR	25.584.826.157,49		25.584.826.157,49
7	Dinas Perkimtan	8.860.917.057,72		8.860.917.057,72
8	Dinas Satpol Pp & Damkar	0,00		0,00
9	BPBD	250.000,00	57.145.500,00	57.395.500,00
10	DINSOSP3APPKB	13.508.000,00	505.818.070,00	519.326.070,00
11	Dinas Pangan dan Perikanan	88.220.000,00		88.220.000,00

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan lainnya	Total Persediaan
1	2	3	4	5=3+4
12	Dinas Lingkungan Hidup	15.692.946,00		15.692.946,00
13	Disdukcapil	215.197.850,00		215.197.850,00
14	Dinas PMD	506.000,00		506.000,00
15	Dinas Perhubungan	3.217.250,00		3.217.250,00
16	Dinas Kominfo	0		0,00
17	Diskumperdag	477.000,00		477.000,00
18	Dinas PMPTSP	2.153.300,00		2.153.300,00
19	Dinas Budparpora	926.000,00		926.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	130.000,00		130.000,00
21	Dinas Pertanian	277.596.000,00		277.596.000,00
22	Dinas Transnaker	856.000,00		856.000,00
23	Sekretariat Daerah	1.954.000,00		1.954.000,00
24	Sekretariat DPRD	1.602.000,00		1.602.000,00
25	Bappeda	569.202,00		569.202,00
26	BKD	41.808.598,00	124.031.270,00	165.839.868,00
27	BKPSDM	0		0,00
28	Inspektorat	922.000,00		922.000,00
29	Kecamatan Pulau Punjung	100.000,00		100.000,00
30	Kecamatan Sitiung	510.000,00		510.000,00
31	Kecamatan Koto Baru	284.000,00		284.000,00
32	Kecamatan Sungai Rumbai	242.000,00		242.000,00
33	Kecamatan IX Koto	492.000,00		492.000,00
34	Kecamatan Timpeh	207.500,00		207.500,00
35	Kecamatan Koto Salak	220.000,00		220.000,00
36	Kecamatan Asam Jujuhan	270.000,00		270.000,00
37	Kecamatan Koto Besar	321.000,00		321.000,00

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan lainnya	Total Persediaan
1	2	3	4	5=3+4
38	Kecamatan Padang Laweh	100.000,00		100.000,00
39	Kecamatan Tiumang	0		0,00
40	Kesbangpol	342.700,00		342.700,00
	JUMLAH	45.336.316.109,86	710.943.140,00	46.047.259.249,86

Nilai Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp46.048.259.249,88 mengalami kenaikan sebesar Rp7.249.418.108,19 atau 19,03% dibandingkan Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp38.086.898.001,69. Kenaikan ini terjadi pada persediaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena adanya barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp25.584.826.157,49.

Sementara itu, berdasarkan dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan terdapat beberapa item yang sudah kadaluarsa sebesar Rp197.655.586,96 yang terdiri dari persediaan obat sebesar Rp131.155.586,96 dan Persediaan habis pakai sebesar Rp66.500.000,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.23
Persediaan Kadaluarsa Tahun 2022

No	SKPD	Uraian			
		Obat	Bahan Labor	Habis Pakai	Bahan Makanan
1	Dinas Kesehatan	63.398.402,80	-	66.500.000,00	-
2	BLUD Puskesmas	67.757.184,16	-	-	-
	Jumlah	131.155.586,96	0,00	66.500.000,00	0,00

Adapun penjelasan lebih terinci terkait Persediaan per SKPD Tahun 2022 dapat di lihat pada **Lampiran 16** Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.1.b.1. Investasi Jangka Panjang	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.452.000.000,00 merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari), PT Balairung Citrajaya Sumbar, dan BPR Pulau Punjung. Adapun perkembangan penyertaan modal pada ketiga *investee* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	25.852.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2022	Rp	25.852.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari tersebut terdiri dari.

- a) Tahun 2007 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000013 dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00;
- b) Tahun 2009 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000033 dengan nilai nominal Rp322.000.000,00;
- c) Tahun 2010 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000052 dengan nilai nominal Rp9.678.000.000,00;
- d) Tahun 2012 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000088 dengan nilai nominal Rp3.200.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000102 dengan nilai nominal Rp36.000.000,00;
- e) Tahun 2013 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000118 dengan nilai nominal Rp5.369.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000131 dengan nilai nominal Rp31.000.000,00.
- f) Tahun 2017 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.1427724-1431444 dengan nilai nominal Rp3.716.000.000,00.
- g) Tahun 2019 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000232 dengan nilai nominal Rp2.500.000.000,00

Sampai dengan 31 Desember 2022 Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Bank Nagari sebesar Rp25.852.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 1,48%, dengan penerimaan deviden pada tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	1.500.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2022	Rp	1.500.000.000,00

Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada PT Balairung Citra Jaya Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp1.500.000.000,00 dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990.000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,91% . Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menanamkan investasi pada pembangunan Balairung Sumatera Barat. Investasi ini didasarkan pada Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat nomor 030-424.1-2007.

PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak pada bidang usaha Hotel, Restoran, dan fasilitas pendukung

lainnya. Penyertaan modal pada PT Balairung Citrajaya Sumbar sesuai dengan Surat Saham Gabungan Nomor 012 dengan nilai nominal Rp1.500.000.000,00.

Jumlah lembar saham sebanyak 600.900 lembar terdiri dari :

- a. Saham seri A sebanyak : 900 lembar/ no.seri 55.296 s.d. 56.195
- b. Saham seri B sebanyak 600.000 lembar/ no.seri 36.864.299 s.d. 464.298

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada Balairung, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 0,91% dari ekuitas Balairung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	100.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2022	Rp	100.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR Pulau Punjung pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Saham Biasa Nomor Seri B 0542 dengan nilai nominal Rp100.000.000,00.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada BPR Pulau Punjung. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 1,92% dari ekuitas PT BPR Pulau Punjung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

V.C. ASET TETAP

Aset Tetap Adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, termasuk yang dipakai/ dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian perkebunan, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Atas nilai tanah diungkapkan beberapa hal berikut :
 - a. Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut :
 - mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
 - biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal,
 - tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
 - diperoleh dengan maksud untuk digunakan.Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.
 - b. Tanah tidak mempunyai nilai kapitalisasi minimum.
 - c. Tanah dicatat sebesar nilai perolehan berupa :
 - Harga fisik tanah
 - Biaya lainnya dalam rangka memperoleh aset tanah tersebut (Biaya Perencanaan, Perijinan, *Appraisal*, *sertifikat*, Ukur dan lain-lain).
2. Peralatan dan Mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya kapitalisasi dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu $\geq$ Rp1.000.000,00 Jika Perolehan aset tetap peralatan dan mesin dibawah satuan minimum kapitalisasi maka aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Disajikan terpisah sebagai aset tetap ekstra komptabel, tidak dilakukan penyusutan, dan dihapuskan jika tidak lagi memberikan manfaat/ rusak. Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monument/bangunan bersejarah, gudang dan gedung museum Gedung dan Bangunan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan. Jalan, Irigasi dan jaringan tidak ada diatur mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi. berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi dan disajikan berdasarkan nilai perolehan.
5. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milikdalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset TetapRenovasi.Akun Aset Tetap Renovasi terjadi karena melakukan renovasi aset tetap milik Kementrian/Lembaga, Instansi Pemerintah lainnya, Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai AsetTetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan,atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan (dari kontraktor kepada Kepala OPD), makaakan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisiaset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.473.059.798.013,90 dan saldo per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp3.328.997.992.524,58 Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2022 seperti digambarkan dalam tabel berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021 (Audited)	Kenaikan/ penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
ASET TETAP	3.473.059.798.013,90	3.328.997.992.524,58	144.061.805.489,32	4,15%
a. Tanah	642.128.841.182,00	667.421.012.047,00	-25.292.170.865,00	-3,94%
b. Peralatan dan Mesin	409.319.889.897,76	365.830.496.579,36	43.489.393.318,40	10,62%
c. Gedung dan Bangunan	881.692.577.852,98	828.611.661.247,80	53.080.916.605,18	6,02%
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.417.084.539.911,16	1.347.104.392.370,42	69.980.147.540,74	4,94%
e. Aset Tetap Lainnya	110.099.518.896,00	108.279.890.823,00	1.819.628.073,00	1,65%
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.734.430.274,00	11.750.539.457,00	983.890.817,00	7,73%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.190.948.112.056,18	-1.055.277.207.905,60	-135.670.904.150,58	11,39%
Nilai Buku Aset Tetap	2.282.111.685.957,72	2.273.720.784.618,98	8.390.901.338,74	0,37%

Dari tabel diatas jika dibandingkan nilai Aset Tetap audited 2021 dengan 31 Desember 2022 terjadi kenaikan sebesar

Adapun rincian Analitis Aset Tetap per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.24
Analitis Aset Tetap

Uraian/Aset	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap
Saldo 31 Desember 2021 Audited	667.421.012.047,00	365.830.496.579,36	828.611.661.247,80	1.347.104.392.370,42	108.279.890.823,00	11.750.539.457,00	3.328.997.992.524,58
Belanja Modal 2022	-	48.052.940.621,00	15.750.482.106,12	66.363.505.690,74	2.624.446.575,00	-	132.791.374.992,86
Saldo 31 Desember 2021 + Belanja Modal	667.421.012.047,00	413.883.437.200,36	844.362.143.353,92	1.413.467.898.061,16	110.904.337.398,00	11.750.539.457,00	3.461.789.367.517,44
Saldo 31 Desember 2022 Neraca	642.128.841.182,00	409.319.889.897,76	881.692.577.852,98	1.417.084.539.911,16	110.099.518.896,00	12.734.430.274,00	3.473.059.798.013,90
Selisih Awal	25.292.170.865,00	4.563.547.302,60	(37.330.434.499,06)	(3.616.641.850,00)	804.818.502,00	(983.890.817,00)	(11.270.430.496,46)
							-
Mutasi Tambah Selain BM							-
Reklas dari Peralatan dan Mesin			563.580.385,00	73.561.900,00	1.800.000,00		638.942.285,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan		49.125.000,00			9.916.720,00	79.913.600,00	138.955.320,00
Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan		620.000,00			49.940.000,00	12.794.906.483,00	12.845.466.483,00
Reklas dari Aset Tetap Lainnya		410.826.842,00					410.826.842,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	-	502.237.097,00	4.351.709.107,06	3.997.500,00	8.984.820,00	-	4.866.928.524,06
Kapitalisasi Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	-	25.605.000,00	-	416.208.450,00	-	-	441.813.450,00
Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	-	-	7.620.000,00	47.160.000,00	-	6.360.000,00	61.140.000,00
Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	-	2.736.893.755,00	25.245.593.724,00	11.344.024.075,00	-	-	39.326.511.554,00
Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset	-	1.371.000.000,00	-	-	-	-	1.371.000.000,00
Penambahan Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset	-	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	13.958.000,00	-	-	-	-	-	13.958.000,00

Uraian/Aset	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap
Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	-	2.500.000,00	857.650.000,00	-	-	-	860.150.000,00
Penambahan Mutasi Antar OPD	360.688.832,00	6.369.065.326,00	630.275.057,00	26.633.922.824,00	-	-	33.993.952.039,00
Penambahan Mutasi Honor Pokja	-	-	3.060.000,00	47.160.000,00	-	6.360.000,00	56.580.000,00
Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ ekstrakomptabel	-	1.421.499.914,00	-	-	-	-	1.421.499.914,00
Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ ekstrakomptabel	-	1.500.000,00	7.117.457.858,00	4.700.631.408,00	-	-	11.819.589.266,00
Mutasi Kurang							-
Reklas ke Aset Peralatan Mesin			49.125.000,00	620.000,00	410.826.842,00		460.571.842,00
Reklas ke Aset Gedung Bangunan		563.580.385,00					563.580.385,00
Reklas ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan		73.561.900,00					73.561.900,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya		1.800.000,00	9.916.720,00	49.940.000,00			61.656.720,00
Reklas ke Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan			79.913.600,00	12.794.906.483,00			12.874.820.083,00
Reklas ke Aset Tak berwujud					331.739.000,00		331.739.000,00
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel		1.581.816.578,00	21.850.000,00		54.660.000,00		1.658.326.578,00
Reklas ke Barang Habis Pakai		649.609.457,00			15.000.000,00		664.609.457,00
Reklas ke persediaan				103.785.000,00			103.785.000,00
Reklas ke Barang yang diserahkan ke masyarakat		63.637.790,00					63.637.790,00
Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/ Ekstrakomptabel	-	-	-	-	1.500.000,00	11.818.089.266,00	11.819.589.266,00
Pengurangan Mutasi Antar OPD	360.688.832,00	6.369.065.326,00	630.275.057,00	26.633.922.824,00			33.993.952.039,00
Pengurangan Mutasi Honor Pokja	-	-	3.060.000,00	47.160.000,00	-	6.360.000,00	56.580.000,00
Pengurangan Koreksi	1.429.750.000,00	-	-	-	-	79.200.000,00	1.508.950.000,00
Pengurangan Hibah	23.876.378.865,00						23.876.378.865,00
Pengurangan Reklas	-	8.154.348.800,60	652.371.255,00	19.690.000,00	61.734.200,00	-	8.888.144.255,60

Uraian/Aset	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap
Tetap/Lainnya/ Ekstrakompatibel							
Penghapusan							-
Jumlah Mutasi Selain Belanja Modal	(25.292.170.865,00)	(4.563.547.302,60)	37.330.434.499,06	3.616.641.850,00	(804.818.502,00)	983.890.817,00	11.270.430.496,46
Selisih Akhir	-	-	-	-	-	-	-

Pagu Anggaran untuk Belanja Modal Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp151.905.233.451 dan realisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp132.791.374.992,00 atau 87,41 % dari alokasi Belanja Modal pada TA 2022 yang dianggarkan. Dari Realisasi Belanja Modal sebesar Rp132.791.374.992,86 dikapitalisasi pada aset tetap sebesar Rp.129.969.277.167,86 dan aset lainnya Rp.331.739.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dikapitalisasi pada tanah Rp. 0
2. Dikapitalisasi pada peralatan dan mesin Rp.45.579.506.353,00
3. Dikapitalisasi pada gedung dan bangunan Rp.16.153.257.171,12
4. Dikapitalisasi pada jalan irigasi dan jaringan Rp.53.487.816.107,74
5. Dikapitalisasi pada aset tetap lainnya Rp.1.873.877.453,00
6. Dikapitalisasi pada kontruksi dalam pengerjaan Rp.12.874.820.083,00
7. Dikapitalisasi pada aset tak berwujud Rp.331.739.000

Dengan rincian penambahan dan pengurangan Pada OPD sebagai berikut:

1. Daftar Rincian Belanja Barang Dan Jasa Yang Menjadi Aset pada Lampiran 17
2. Daftar Rincian Penambahan Hibah menjadi Aset pada Lampiran 18
3. Daftar Rincian Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset pada Lampiran 19
4. Daftar Rincian Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset pada Lampiran 20
5. Daftar Rincian Pengurangan Hibah 2022 pada Lampiran 21
6. Daftar Rincian Pengurangan Koreksi Pencatatan 2022 pada Lampiran 22
7. Daftar Rincian Aset Yang Direklas Ke Aset Lainnya pada Lampiran 23
8. Daftar Rincian Mutasi Aset Antar Opd pada Lampiran 24

Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.25

Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Berdasarkan Jenis Aset Tetap

KIB/Sub KIB	Saldo Aset Tetap 2021 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset 2022	Jumlah Pengurangan Aset 2022	Saldo Aset 2022
ASET TETAP	3.328.997.992.524,58	224.205.399.914,92	80.143.594.425,60	3.473.059.798.013,90
Tanah	667.421.012.047,00	374.646.832,00	25.666.817.697,00	642.128.841.182,00
Tanah	667.421.012.047,00	374.646.832,00	25.666.817.697,00	642.128.841.182,00
Peralatan dan Mesin	365.830.496.579,36	58.012.807.445,00	14.523.414.126,60	409.319.889.897,76
Alat Besar	27.547.118.825,00	1.735.479.765,00	2.025.963.000,00	27.256.635.590,00
Alat Angkutan	76.534.054.624,00	13.887.080.695,00	9.285.911.806,00	81.135.223.513,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.347.483.855,00	136.260.000,00	12.748.600,00	8.470.995.255,00
Alat Pertanian	1.933.184.139,00	93.747.270,00	119.909.312,00	1.907.022.097,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	64.741.093.455,35	9.706.167.733,00	606.012.440,00	73.841.248.748,35
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	21.726.463.915,00	2.906.070.083,00	58.645.612,00	24.573.888.386,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	83.481.798.368,50	16.240.868.481,00	1.586.538.348,60	98.136.128.500,90
Alat Laboratorium	28.342.785.100,36	3.311.776.695,00	57.990.600,00	31.596.571.195,36
Alat Persenjataan	135.980.340,00	23.797.300,00	-	159.777.640,00
Komputer	50.039.084.783,15	9.866.985.493,00	769.694.408,00	59.136.375.868,15
Alat Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	34.900.000,00	-	-	34.900.000,00
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Keselamatan Kerja	704.900.712,00	55.255.450,00	-	760.156.162,00
Alat Peraga	-	-	-	-
Peralatan Proses/Produksi	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
Rambu - Rambu	1.722.751.150,00	36.768.480,00	-	1.759.519.630,00
Peralatan Olah Raga	526.897.312,00	12.550.000,00	-	539.447.312,00
Gedung dan Bangunan	828.611.661.247,80	54.366.622.917,18	1.285.706.312,00	881.692.577.852,98
Bangunan Gedung	796.148.956.234,78	54.358.089.117,18	1.285.706.312,00	849.221.339.039,96

KIB/Sub KIB	Saldo Aset Tetap 2021 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset 2022	Jumlah Pengurangan Aset 2022	Saldo Aset 2022
Monumen	6.442.214.368,00	-	-	6.442.214.368,00
Bangunan Menara	3.102.481.906,00	-	-	3.102.481.906,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.918.008.739,02	8.533.800,00	-	22.926.542.539,02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.347.104.392.370,42	96.680.920.364,74	26.700.772.824,00	1.417.084.539.911,16
Jalan Dan Jembatan	1.078.025.352.609,83	77.330.701.403,74	24.935.749.705,00	1.130.420.304.308,57
Bangunan Air	195.287.434.274,66	7.476.762.536,00	1.745.333.119,00	201.018.863.691,66
Instalasi	38.608.326.979,00	217.306.000,00	-	38.825.632.979,00
Jaringan	35.183.278.506,93	11.656.150.425,00	19.690.000,00	46.819.738.931,93
Aset Tetap Lainnya	108.279.890.823,00	1.882.862.273,00	63.234.200,00	110.099.518.896,00
Bahan Perpustakaan	36.763.076.549,00	1.882.862.273,00	305.000,00	38.645.633.822,00
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	2.719.874.878,00	-	-	2.719.874.878,00
Hewan	123.746.000,00	-	61.429.200,00	62.316.800,00
Biota Perairan	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00
Tanaman	65.552.000,00	-	-	65.552.000,00
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	68.565.641.396,00	-	1.500.000,00	68.564.141.396,00
KDP	11.750.539.457,00	12.887.540.083,00	11.903.649.266,00	12.734.430.274,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.750.539.457,00	12.887.540.083,00	11.903.649.266,00	12.734.430.274,00
Penyusutan Aset Tetap	(1.055.277.207.905,60)	(152.427.709.382,18)	(16.756.805.231,60)	(1.190.948.112.056,18)
Nilai Buku	2.273.720.784.618,98	71.777.690.532,74	63.386.789.194,00	2.282.111.685.957,72

Dengan rincian penambahan dan pengurangan Pada OPD sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Penatausahaan Aset 2022 Dapat Dilihat Pada Lampiran 25
2. Saldo Aset 2021 Audited Dapat Dilihat Pada Lampiran 26
3. Penambahan Aset 2022 Dapat Dilihat Pada Lampiran 27
4. Pengurangan Aset 2022 Dapat Dilihat Pada Lampiran 28
5. Saldo Aset 2022 Dapat Dilihat Pada Lampiran 29

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

5.2.26

Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Berdasarkan Perolehan

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2021 (Audited)		3.328.997.992.524,58
Penambahan 2022		224.205.399.914,92
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	120.511.234.925,86
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	4.691.418.003,00
3	Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset	355.473.151,00
4	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	4.311.088.952,00
5	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	4.866.928.524,06
6	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	441.813.450,00
7	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	61.140.000,00
8	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	39.326.511.554,00
9	Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset	1.371.000.000,00
10	Penambahan Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset	3.000.000,00
11	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	13.958.000,00
12	Penambahan BOSDA/BOP PAUD Menjadi Aset	100.062.136,00
13	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	860.150.000,00
14	Penambahan Mutasi Antar OPD	33.993.952.039,00
15	Penambahan Mutasi Honor Pokja	56.580.000,00
16	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ekstrakompatibel	1.421.499.914,00
17	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ekstrakompatibel	11.819.589.266,00
Pengurangan 2022		80.143.594.425,60
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	11.819.589.266,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	33.993.952.039,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	56.580.000,00
4	Pengurangan Koreksi	1.508.950.000,00
5	Pengurangan Hibah	23.876.378.865,00
6	Pengurangan Reklas Tetap/Lainnya/ Ekstrakompabel	8.888.144.255,60
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2022		3.473.059.798.013,90

V.C.1. Tanah

Pada saat ini tanah yang tercatat sebagai aset tetap tanah sejumlah 723 persil tanah, yang sudah bersertifikat sebanyak 245 sertifikat. Adapun rincian tanah yang sudah bersertifikat tersebut pada Lampiran 30

Adapun saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (audited) sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
	Rp.	Rp.		%
Tanah	642.128.841.182,00	667.421.012.047,00	(25.292.170.865,00)	-3,94%
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
Nilai Buku	642.128.841.182,00	667.421.012.047,00	(25.292.170.865,00)	-3,94%

Pada tahun 2022 tidak ada dianggarkan belanja modal pengadaan tanah, adapun penambahan aset tetap tanah selama tahun 2022 berasal dari penilaian aset tetap tanah yang belum tercatat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.958.000,00.

Penambahan aset tetap tanah yang mempengaruhi saldo aset tetap tanah berasal dari kurang catat senilai Rp13.958.000,00 merupakan tanah poskesri sebanyak 4 persil.

Pengurangan aset tetap tanah yang mempengaruhi saldo aset tetap tanah yang signifikan sebesar Rp16.569.188.865,00 karena ada hibah dan karena ada koreksi pencatatan aset tetap tanah senilai Rp1.429.750.000,00.

Adapun daftar tanah yang telah dihibahkan senilai Rp16.569.188.865,00 adalah sebagai berikut:

- a. Hibah ke Yayasan Tarbiyatul Atfal senilai Rp428.152.155,00
- b. Hibah ke Yayasan Irsyadul Ummah senilai Rp528.556,00
- c. Hibah ke Polres Dharmasraya untuk lokasi pembangunan Kantor Polsek Timpeh senilai Rp100.200.000,00 dan lokasi pembangunan Polsek Koto Salak.
- d. Hibah ke Korem 032/wirabraja Dharmasraya untuk lokasi pembangunan Kantor Kodim Dharmasraya senilai Rp15.972.000,00 lokasi pembangunan kantor koramil Sitiung Rp155.697,00 dan Kantor koramil TimpehRp25.847.457,00
- e. Hibah ke Provinsi Sumatera Barat untuk lokasi pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggul Dharmasraya Senilai Rp7.307.190.000,00

Dan koreksi pencatatan aset tetap tanah terjadi karena pencatatan ganda pada Sekretariat Daerah dengan beberapa unit sekolah senilai Rp1.429.750.000,00 dengan rician sebagai berikut:

- a. Tanah Bangunan Pendidikan pada SDN 01 Timpeh senilai Rp100.000.000,00
- b. Tanah Bangunan Pendidikan SLTA Tiumang yang telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp689.750.000,00
- c. Tanah Bangunan Pendidikan SLTA Koto Besar yang telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp300.000.000,00
- d. Tanah Bangunan Pendidikan SLTA Koto Besar yang telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp200.000.000,00
- e. Tanah Bangunan Pendidikan SDN 11 Pulau Punjung senilai Rp126.000.000,00
- f. Tanah Bangunan Pendidikan TKN 01 Pulau Punjung senilai Rp14.000.000,00

Adapun Rincian Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2021(Audited) dan 31 Desember 2022 Per OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.27 Rincian Saldo Aset Tetap Tanah Per OPD					
No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021(Audited)	Saldo 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trand
1	Sekretariat DPRD	3.908.068.740,00	4.084.234.572,00	176.165.832,00	4,31%
2	Sekretariat Daerah	428.365.987.755,00	402.901.867.600,00	(25.464.120.155,00)	-6,32%
3	Kec. Pulau Punjung	987.500.000,00	987.500.000,00	-	0,00%
4	Kec. Sitiung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00%
5	Kec. Koto Baru	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00	-	0,00%
6	Kec. Sungai Rumbai	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	-	0,00%
7	Kec. IX Koto	17.875.000,00	17.875.000,00	-	0,00%
8	Kec. Timpeh	400.000.000,00	374.152.543,00	(25.847.457,00)	-6,91%
9	Kec. Padang Laweh	20.020.000,00	20.020.000,00	-	0,00%
10	Kec Tiumang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	0,00%
11	Kec Koto Besar	461.087.771,00	461.087.771,00	-	0,00%

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021(Audited)	Saldo 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trand
12	Kec Koto Salak	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00%
13	Kec. Asam Jujuhan	71.500.000,00	71.500.000,00	-	0,00%
14	Dinas PUPR	162.034.716.389,00	161.858.550.557,00	(176.165.832,00)	-0,11%
15	Dinas PERKIMTAN	1.174.185.160,00	1.174.185.160,00	-	0,00%
16	Dinas Perhubungan	5.961.400.000,00	5.961.400.000,00	-	0,00%
17	Dinas Kesehatan	3.252.271.030,00	3.450.752.030,00	198.481.000,00	5,75%
18	RSUD	10.683.462.500,00	10.683.462.500,00	-	0,00%
19	Dinas Pendidikan	24.762.612.974,00	24.762.612.974,00	-	0,00%
20	Dinas BUDPARPORA	1.115.335.010,00	1.115.335.010,00	-	0,00%
21	Dinas TRANSNAKER	2.121.000.000,00	2.121.000.000,00	-	0,00%
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00%
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	11.564.778.836,00	11.564.094.583,00	(684.253,00)	-0,01%
26	Dinas Pangan dan Perikanan	1.281.870.882,00	1.281.870.882,00	-	0,00%
27	Dinas KUMPERDAG	1.301.340.000,00	1.301.340.000,00	-	0,00%
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	4.028.000.000,00	4.028.000.000,00	-	0,00%
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021(Audited)	Saldo 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trand
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-
Jumlah		667.421.012.047,00	642.128.841.182,00	(25.292.170.865,00)	-3,94%

V.C.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Audited) adalah sebagai berikut :

**Rekapitulasi Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Per 31 Desember 2020 Audited Dan 31 Desember 2021**

31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
Rp.	Rp.	Rp.	%
409.319.889.897,76	365.830.496.579,36	43.489.393.318,40	10,62%
(262.020.590.598,50)	(223.157.499.047,60)	(38.863.091.550,90)	14,83%
147.299.299.299,26	142.672.997.531,76	4.626.301.767,50	3,14%

Jumlah Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2022 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2021 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp42.489.393.318,40 atau naik sebesar 10,62 % dari Rp365.830.496.579,36 meningkat menjadi Rp409.319.889.897,76

Tabel 5.2.28
Rekapitulasi Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Per 31 Desember 2020 Audited Dan 31 Desember 2021 Diurai Per Sub KIB

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Alat Besar	27.256.635.590,00	27.547.118.825,00	(290.483.235,00)	-1,07%

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
Alat Angkutan	81.135.223.513,00	76.534.054.624,00	4.601.168.889,00	5,67%
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.470.995.255,00	8.347.483.855,00	123.511.400,00	1,46%
Alat Pertanian	1.907.022.097,00	1.933.184.139,00	(26.162.042,00)	-1,37%
Alat Kantor dan Rumah Tangga	73.841.248.748,35	64.741.093.455,35	9.100.155.293,00	12,32%
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	24.573.888.386,00	21.726.463.915,00	2.847.424.471,00	11,59%
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	98.136.128.500,90	83.481.798.368,50	14.654.330.132,40	14,93%
Alat Laboratorium	31.596.571.195,36	28.342.785.100,36	3.253.786.095,00	10,30%
Alat Persenjataan	159.777.640,00	135.980.340,00	23.797.300,00	14,89%
Komputer	59.136.375.868,15	50.039.084.783,15	9.097.291.085,00	15,38%
Alat Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	34.900.000,00	34.900.000,00	-	0,00%
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	0,00%
Alat Keselamatan Kerja	760.156.162,00	704.900.712,00	55.255.450,00	7,27%
Alat Peraga	-	-	-	-
Peralatan Proses/Produksi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00%
Rambu - Rambu	1.759.519.630,00	1.722.751.150,00	36.768.480,00	2,09%
Peralatan Olah Raga	539.447.312,00	526.897.312,00	12.550.000,00	2,33%
Akumulasi Penyusutan	(262.020.590.598,50)	(223.157.499.047,60)	(38.863.091.550,90)	14,83%
Nilai Buku	147.299.299.299,26	142.672.997.531,76	4.626.301.767,50	3,14%

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin terbesar terdapat pada penambahan Komputer yang meningkat sebesar Rp9.097.291.085,00 atau meningkat sebesar 15,38 % diikuti oleh Alat Persenjataan sebesar 14,89% dan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 14,93%

Adapun Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 (Audited) dan 31 Desember 2022 Per OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.29
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo 31 desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trand
1	Sekretariat DPRD	12.817.616.228,00	12.225.792.698,00	(591.823.530,00)	-4,84%
2	Sekretariat Daerah	31.875.623.483,00	38.839.211.513,00	6.963.588.030,00	17,93%
3	Kec. Pulau Punjung	577.707.825,00	446.117.825,00	(131.590.000,00)	-29,50%
4	Kec. Sitiung	488.299.765,00	484.569.285,00	(3.730.480,00)	-0,77%
5	Kec. Koto Baru	570.597.744,00	590.597.744,00	20.000.000,00	3,39%
6	Kec. Sungai Rumbai	565.272.375,00	565.272.375,00	-	0,00%
7	Kec. IX Koto	579.782.803,00	567.067.803,00	(12.715.000,00)	-2,24%
8	Kec. Timpeh	383.896.475,00	358.676.600,00	(25.219.875,00)	-7,03%
9	Kec. Padang Laweh	390.936.210,00	371.390.210,00	(19.546.000,00)	-5,26%
10	Kec Tiumang	441.232.425,00	383.532.425,00	(57.700.000,00)	-15,04%
11	Kec Koto Besar	481.956.531,00	454.456.531,00	(27.500.000,00)	-6,05%
12	Kec Koto Salak	517.287.125,00	625.537.125,00	108.250.000,00	17,31%
13	Kec. Asam Jujuhan	561.753.625,00	524.439.825,00	(37.313.800,00)	-7,11%
14	Dinas PUPR	35.135.053.388,00	34.158.243.388,00	(976.810.000,00)	-2,86%
15	Dinas PERKIMTAN	1.227.631.200,00	2.984.241.530,00	1.756.610.330,00	58,86%
16	Dinas Perhubungan	5.060.545.876,00	5.179.434.356,00	118.888.480,00	2,30%
17	Dinas Kesehatan	70.790.380.856,14	76.592.667.087,14	5.802.286.231,00	7,58%
18	RSUD	70.363.303.613,52	85.750.737.268,92	15.387.433.655,40	17,94%
19	Dinas Pendidikan	63.163.576.855,00	72.877.754.543,00	9.714.177.688,00	13,33%
20	Dinas BUDPARPORA	1.311.847.001,00	1.429.150.159,00	117.303.158,00	8,21%
21	Dinas TRANSSNAKER	752.613.642,00	905.936.642,00	153.323.000,00	16,92%
22	DSP3KB	4.143.630.830,00	4.346.966.461,00	203.335.631,00	4,68%
23	DISDUKCAPIL	3.346.173.042,00	3.714.199.792,00	368.026.750,00	9,91%
24	Dinas PMD	1.113.793.300,00	1.450.743.300,00	336.950.000,00	23,23%
25	Dinas Pertanian	7.928.637.691,00	8.704.516.116,00	775.878.425,00	8,91%
26	Dinas Pangan dan Perikanan	4.976.960.447,50	6.667.710.447,50	1.690.750.000,00	25,36%

No.	Nama OPD	Saldo 31 desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trand
27	Dinas KUMPERDAG	15.213.722.589,20	14.939.949.989,20	(273.772.600,00)	-1,83%
28	BKD	5.074.819.510,00	5.362.110.350,00	287.290.840,00	5,36%
29	DPMPTSP	1.315.976.091,00	1.610.786.929,00	294.810.838,00	18,30%
30	Inspektorat Kabupaten	1.526.814.977,00	2.075.746.886,00	548.931.909,00	26,45%
31	BAPPPEDA	1.647.524.942,00	1.842.796.492,00	195.271.550,00	10,60%
32	DLH	5.190.796.713,00	5.049.062.801,00	(141.733.912,00)	-2,81%
33	Kantor KESBANGPOL	258.218.000,00	287.653.000,00	29.435.000,00	10,23%
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.539.510.096,00	6.540.510.096,00	1.000.000,00	0,02%
35	BPBD	2.372.877.350,00	2.427.047.350,00	54.170.000,00	2,23%
36	BKPSDM	1.170.870.131,00	1.305.670.131,00	134.800.000,00	10,32%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.608.948.705,00	2.695.784.705,00	86.836.000,00	3,22%
38	Dinas KOMINFO	3.344.307.119,00	3.983.808.119,00	639.501.000,00	16,05%
Jumlah		365.830.496.579,36	409.319.889.897,76	43.489.393.318,40	10,62%

V.C.3. Gedung dan Bangunan

Saldo per tanggal 31 Desember 2022 dan Saldo 31 Desember 2021 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Gedung dan Bangunan	881.692.577.852,98	828.611.661.247,80	53.080.916.605,18	6,02%
Akumulasi Penyusutan	(122.356.241.851,00)	(104.370.108.762,00)	(17.986.133.089,00)	14,70%
Nilai Buku	759.336.336.001,98	724.241.552.485,80	35.094.783.516,18	4,62%

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Audited 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp53.080.916.605,18 atau sebesar 6,02%.

Adapun Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan sub KIB adalah sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Bangunan Gedung	849.221.339.039,96	796.148.956.234,78	53.072.382.805,18	6,25%
Monumen	6.442.214.368,00	6.442.214.368,00	-	0,00%
Bangunan Menara	3.102.481.906,00	3.102.481.906,00	-	0,00%
Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.926.542.539,02	22.918.008.739,02	8.533.800,00	0,04%
Akumulasi Penyusutan	(122.356.241.851,00)	(104.370.108.762,00)	(17.986.133.089,00)	14,70%
Nilai Buku	759.336.336.001,98	724.241.552.485,80	35.094.783.516,18	4,62%

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan Pembangunan Masjid Kabupaten yang bernama Masjid Agung Dharmasraya. Proses Pembangunan dilaksanakan atas beberapa tahapan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Manajemen Konstruksi
 - a) Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Masjid Agung ini telah dilaksanakan tahun 2017 dengan konsultan perencana PT. Yodya Karya (Persero) dengan nilai Pagu Anggaran Rp750.000.000 dan nilai Kontrak Perencanaan Rp630.250.000 yang bersumber dari APBD kab. Dharmasraya.
 - b) Untuk Manajemen Konstruksi
Masjid Agung dilaksanakan oleh Kosultan manajemen konstruksi PT. Aria Graha dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan nilai kontrak Rp998.833.000,00 yang bersumber dari APBD kab. Dharmasraya.
 - c) Perencanaan Landscape Masjid Agung
Perencanaan landscape masjid agung dilaksanakan oleh PT. Gatra Consultant dengan Pagu Anggaran Rp100.000.000,00 dengan nilai kontrak Rp99.750.000,00 yang bersumber dari APBD kab. Dharmasraya.
2. Sumber Pendanaan pembangunan Masjid Agung adalah bersumber dari APBD kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan secara tahun jamak tahun 2019-2020 dengan alokasi Anggaran Rp103.000.000.000,00. yang penganggaran terbagi pada tahun 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan tahun 2020 Rp53.000.000.000,00.

3. Untuk pembangunan landscape dan pagar keliling masjid agung dilaksanakan menggunakan dana APBN tahun 2021 dan belum dilakukan serah terima aset pembangunannya ke pada pemerintah kabupaten Dharmasraya.

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021(Audited) dan 31 Desember 2022 Per OPD

Tabel 5.2.30
Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Tren
1	Sekretariat DPRD	41.297.291.530,00	41.297.291.530,00	-	0,00%
2	Sekretariat Daerah	40.643.429.147,00	45.006.228.274,06	4.362.799.127,06	9,69%
3	Kec. Pulau Punjung	971.999.720,00	971.999.720,00	-	0,00%
4	Kec. Sitiung	506.918.100,00	506.918.100,00	-	0,00%
5	Kec. Koto Baru	1.247.767.942,00	1.367.471.942,00	119.704.000,00	8,75%
6	Kec. Sungai Rumbai	1.391.380.178,00	1.391.380.178,00	-	0,00%
7	Kec. IX Koto	89.790.000,00	89.790.000,00	-	0,00%
8	Kec. Timpeh	2.046.610.796,00	2.046.610.796,00	-	0,00%
9	Kec. Padang Laweh	1.421.972.473,00	1.421.972.473,00	-	0,00%
10	Kec Tiumang	2.417.904.859,00	2.417.904.859,00	-	0,00%
11	Kec Koto Besar	2.187.494.750,00	2.187.494.750,00	-	0,00%
12	Kec Koto Salak	1.972.819.099,00	1.972.819.099,00	-	0,00%
13	Kec. Asam Jujuhan	2.840.508.500,00	2.840.508.500,00	-	0,00%
14	Dinas PUPR	124.619.266.686,00	125.537.754.366,00	918.487.680,00	0,73%
15	Dinas PERKIMTAN	6.680.764.250,00	27.328.030.400,00	20.647.266.150,00	75,55%
16	Dinas Perhubungan	3.505.815.491,00	3.505.815.491,00	-	0,00%
17	Dinas Kesehatan	91.254.234.370,49	100.870.328.435,49	9.616.094.065,00	9,53%
18	RSUD	13.438.870.918,00	13.438.870.918,00	-	0,00%
19	Dinas Pendidikan	289.478.306.048,49	304.996.419.176,42	15.518.113.127,93	5,09%
20	Dinas BUDPARPORA	103.150.354.741,85	103.190.518.521,85	40.163.780,00	0,04%
21	Dinas TRANSTAKER	3.359.217.439,00	3.359.217.439,00	-	0,00%

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Tren
22	DSP3KB	2.858.959.768,00	3.901.901.893,19	1.042.942.125,19	26,73%
23	DISDUKCAPIL	965.792.280,00	1.115.464.280,00	149.672.000,00	13,42%
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	18.368.176.181,30	18.901.558.181,30	533.382.000,00	2,82%
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8.958.676.647,00	8.958.676.647,00	-	0,00%
27	Dinas KUMPERDAG	50.616.685.035,67	50.616.685.035,67	-	0,00%
28	BKD	5.594.474.000,00	5.594.474.000,00	-	0,00%
29	DPMPTSP	810.939.000,00	812.889.000,00	1.950.000,00	0,24%
30	Inspektorat Kabupaten	1.535.427.000,00	1.665.769.550,00	130.342.550,00	7,82%
31	BAPPPEDA	-	-	-	0,00%
32	DLH	2.135.752.292,00	2.135.752.292,00	-	0,00%
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	937.677.005,00	937.677.005,00	-	0,00%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.306.385.000,00	1.306.385.000,00	-	0,00%
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-
Jumlah		828.611.661.247,80	881.692.577.852,98	53.080.916.605,18	6,02%

V.C.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Audited) adalah sebagai berikut :

	Saldo Aset Tetap 2022	Saldo Aset Tetap 2021 (Audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.417.084.539.911,16	1.347.104.392.370,42	69.980.147.540,74	4,94%
Akumulasi Penyusutan	(806.469.929.606,68)	(727.648.250.096,00)	(78.821.679.510,68)	9,77%
Nilai Buku	610.614.610.304,48	619.456.142.274,42	(8.841.531.969,94)	-1,45%

Rincian Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021(Audited) dan 31 Desember 2022 Per OPD:

Tabel 5.2.31
Rincian Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Tren
1	Sekretariat DPRD	5.976.240.066,00	5.976.240.066,00	-	0,00%
2	Sekretariat Daerah	4.636.454.940,00	4.636.454.940,00	-	0,00%
3	Kec. Pulau Punjung	7.700.000,00	7.700.000,00	-	0,00%
4	Kec. Sitiung	9.100.000,00	9.100.000,00	-	0,00%
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	13.483.500,00	13.483.500,00	-	0,00%
7	Kec. IX Koto	16.778.576,00	16.778.576,00	-	0,00%
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	700.000,00	700.000,00	-	0,00%
11	Kec Koto Besar	18.400.000,00	18.400.000,00	-	0,00%
12	Kec Koto Salak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00%
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	1.274.398.156.604,49	1.357.608.375.011,81	83.210.218.407,32	6,13%
15	Dinas PERKIMTAN	21.790.494.100,00	21.790.494.100,00	-	0,00%
16	Dinas Perhubungan	395.986.519,00	395.986.519,00	-	0,00%
17	Dinas Kesehatan	2.680.079.287,00	3.198.272.431,37	518.193.144,37	16,20%
18	RSUD	932.508.000,00	1.348.716.450,00	416.208.450,00	30,86%
19	Dinas Pendidikan	1.759.456.488,00	1.833.018.388,00	73.561.900,00	4,01%
20	Dinas BUDPARPORA	157.269.000,00	159.775.000,00	2.506.000,00	1,57%
21	Dinas TRANSNAKER	461.741.500,00	461.741.500,00	-	0,00%
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	34.853.500,00	52.103.500,00	17.250.000,00	33,11%

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Tren
24	Dinas PMD	26.390.000,00	26.390.000,00	-	0,00%
25	Dinas Pertanian	1.345.100.007,00	1.371.418.922,05	26.318.915,05	1,92%
26	Dinas Pangan dan Perikanan	3.569.008.975,00	3.569.008.975,00	-	0,00%
27	Dinas KUMPERDAG	14.227.909.931,93	14.227.909.931,93	-	0,00%
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPTSP	14.330.500,00	14.330.500,00	-	0,00%
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	48.453.000,00	48.453.000,00	-	0,00%
32	DLH	122.253.800,00	122.253.800,00	-	0,00%
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	11.717.000,00	11.717.000,00	-	0,00%
35	BPBD	14.264.419.276,00	-	(14.264.419.276,00)	0,00%
36	BKPSDM	6.995.000,00	6.995.000,00	-	0,00%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.690.000,00	-	(19.690.000,00)	0,00%
38	Dinas KOMINFO	157.222.800,00	157.222.800,00	-	0,00%
Jumlah		1.347.104.392.370,42	1.417.084.539.911,16	69.980.147.540,74	4,94%

V.C.5. Aset Tetap Lainnya

Adapun saldo Aset Tetap Lainnya kondisi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Audited) adalah sebagai berikut :

	Saldo Aset Tetap 2022	Saldo Aset Tetap 2021 (audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Aset Tetap Lainnya	110.099.518.896,00	108.279.890.823,00	1.819.628.073,00	1,65%
Akumulasi Penyusutan	(101.350.000,00)	(101.350.000,00)	-	0,00%
Nilai Buku	109.998.168.896,00	108.178.540.823,00	1.819.628.073,00	1,65%

Apabila dibandingkan saldo audited 2021 dengan 31 Desember 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp1.819.628.073,00.

Pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung RSUD Sungai Dareh yang di biayai dengan dana APBN sebesar Rp84.790.641.100,00. Sampai saat ini Bangunan tersebut masih tercatat pada Kementerian Kesehatan, selain dari dana APBN pembangunan tersebut didukung dari dana APBD sebesar Rp67.853.481.396,00. Pada saat ini dicatat pada Aset Tetap Lainnya sebagai Aset Renovasi dengan tahapan proses pembangunan sebagai berikut:

1. Tahun 2009 sumber dana yang berasal dari DIPA Dana Stimulus pada Kemenkes RI Nomor: 0757.0/999-06.1/-/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.460.137.850,- dengan Pekerjaan :
 - a. Land Clearing pembersihan lahan
 - b. Cuty & Fill Pembentukan kontur
 - c. Pondasi Panang Spun Pile
2. Tahun 2010 tambahan dana dari Dana TP DIPA No.0855/024-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan pagu sebesar Rp45.610.787.500,00 dengan pekerjaan:
 - a. Pondasi
 - b. Struktur Atas
 - c. Lantai 1
 - d. Lantai 2
 - e. Lantai 3
 - f. Lantai 4
 - g. Lantai atap dan
 - h. Atap bagian tengah
3. Tahun 2011 tambahan dana TP DIPA No. 1040/024-04.4.01/2011 sebesar Rp17.262.178.275,00 dengan pekerjaan
 - a. Pembangunan dinding bagian luar dari lantai 1 sampai dengan lantai 4
 - b. Pembangunan atap bagian kiri dan kanan lantai 4 dan pemasangan kaca bagian depan
4. Tahun 2013 tambahan dana TP pekerjaan tidak terselesaikan dengan anggaran sebesar Rp2.457.537.475,00
5. Tahun 2017 sumber dana DAK sebesar Rp. 19.132.918.107,00 terdiri dari Pekerjaan ruangan UGD, Ruang rawat jalan, dan Ruang radiologi.
6. Tahun 2018 dana DAK sebesar Rp10.310.804.564,00 terdiri dari Pembangunan ruang laboratorium dan instalasi farmasi
7. Tahun 2019 dana DAK sebesar Rp9.552.401.225,00 terdiri dari pembangunan ruang ICU, NICU, PICU, ICCU, CSSD
8. Tahun 2020 dana DAK sebesar Rp28.857.357.500,00 untuk Pembangunan ruang rawat inap

Adapun Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 (Audited) dan 31 Desember 2022 Per OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.32
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Tren
1	Sekretariat DPRD	43.091.000,00	43.091.000,00	-	0,00%
2	Sekretariat Daerah	101.800.000,00	101.800.000,00	-	0,00%
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	1.425.000,00	1.425.000,00	-	0,00%
7	Kec. IX Koto	104.050.000,00	104.050.000,00	-	0,00%
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	183.828.000,00	233.768.000,00	49.940.000,00	21,36%
15	Dinas PERKIMTAN	10.660.000,00	10.660.000,00	-	0,00%
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	0,00%
17	Dinas Kesehatan	1.500.000,00	9.916.720,00	8.416.720,00	84,87%
18	RSUD	67.897.129.396,00	67.897.129.396,00	-	0,00%
19	Dinas Pendidikan	37.707.636.414,00	39.530.336.967,00	1.822.700.553,00	4,61%
20	Dinas BUDPARPORA	68.250.000,00	68.250.000,00	-	0,00%
21	Dinas TRANSTAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	1.774.000,00	1.774.000,00	-	0,00%
24	Dinas PMD	288.520.000,00	288.520.000,00	-	0,00%

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Tren
25	Dinas Pertanian	427.653.000,00	366.223.800,00	(61.429.200,00)	-16,77%
26	Dinas Pangan dan Perikanan	12.114.000,00	12.114.000,00	-	0,00%
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPTSP	6.019.850,00	6.019.850,00	-	0,00%
30	Inspektorat Kabupaten	6.131.710,00	6.131.710,00	-	0,00%
31	BAPPPEDA	1.827.500,00	1.827.500,00	-	0,00%
32	DLH	56.123.400,00	56.123.400,00	-	0,00%
33	Kantor KESBANGPOL	36.500,00	36.500,00	-	0,00%
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.104.055.428,00	1.104.055.428,00	-	0,00%
38	Dinas KOMINFO	256.265.625,00	256.265.625,00	-	0,00%
Jumlah		108.279.890.823,00	110.099.518.896,00	1.819.628.073,00	1,65%

V.C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Audited) adalah sebagai berikut :

	Saldo Aset Tetap 2022	Saldo Aset Tetap 2021 (audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.734.430.274,00	11.750.539.457,00	983.890.817,00	7,73%
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	-	-
Nilai Buku	12.734.430.274,00	11.750.539.457,00	983.890.817,00	7,73%

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 bertambah sebesar Rp983.890.817,00.

Rincian Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 (Audited) dan 31 Desember 2022 Per OPD :

Tabel 5.2.33
Rincian Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trand
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
1	Dinas PUPR	2.935.383.067,00	5.231.689.680,00	2.296.306.613,00	43,89%
2	Dinas PERKIMTAN	239.520.000,00	239.520.000,00	-	0,00%
3	Dinas Kesehatan	7.037.737.858,00	-	(7.037.737.858,00)	0,00%
4	Dinas KUMPERDAG	332.915.000,00	332.915.000,00	-	0,00%
5	BPBD	368.216.182,00	6.093.538.244,00	5.725.322.062,00	93,96%
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	836.767.350,00	836.767.350,00	-	0,00%
	Jumlah	11.750.539.457,00	12.734.430.274,00	983.890.817,00	7,73%

V.C.7 Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap. Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Dharmasraya disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya, aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut;

- Metode penyusutan garis lurus (straight line).
- Dalam menghitung penyusutan, tidak menghitung nilai sisa.
- Aset tetap disusutkan bulanan dan disajikan semesteran.

Aset Tetap Renovasi dilakukan penyusutan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.

Akumulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2021(Audited) dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Trend
	Rp.	Rp.	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	262.020.590.598,50	223.157.499.047,60	14,83%
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	122.356.241.851,00	104.370.108.762,00	14,70%
Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	806.469.929.606,68	727.648.250.096,00	9,77%
Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya	101.350.000,00	101.350.000,00	0,00%
Jumlah	1.190.948.112.056,18	1.055.277.207.905,60	11,39%

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.34
Penambahan Dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2021 (Audited)		1.055.277.207.905,60
Penambahan Penyusutan 2022		152.427.709.382,18
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	8.676.317.076,00
2	Penambahan Penyusutan Reklas	1.269.735.199,00
3	Penyusutan Semester I	60.326.976.674,00
4	Penyusutan Semester II	82.154.680.433,18
Pengurangan Penyusutan 2022		16.756.805.231,60
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	8.676.317.076,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	8.080.488.155,60
Akumulasi PenyusutanAset Tetap 31 Desember 2022		1.190.948.112.056,18
Nilai Buku Aset Tetap 31 Desember 2022		2.282.111.685.957,72

Tabel 5.2.35
Rincian Akumulasi Penyusutan Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021(Audited)	Saldo 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Tren
1	Sekretariat DPRD	18.016.001.039,00	18.364.483.198,00	348.482.159,00	1,90%
2	Sekretariat Daerah	30.350.591.724,00	35.365.154.794,00	5.014.563.070,00	14,18%
3	Kec. Pulau Punjung	833.314.889,00	746.581.782,00	(86.733.107,00)	-11,62%
4	Kec. Sitiung	441.517.266,00	472.254.658,00	30.737.392,00	6,51%
5	Kec. Koto Baru	603.559.022,00	701.310.980,00	97.751.958,00	13,94%
6	Kec. Sungai Rumbai	811.883.781,00	888.016.309,00	76.132.528,00	8,57%
7	Kec. IX Koto	553.627.600,00	546.301.174,00	(7.326.426,00)	-1,34%
8	Kec. Timpeh	731.337.377,00	740.020.435,00	8.683.058,00	1,17%
9	Kec. Padang Laweh	618.816.512,00	637.395.600,00	18.579.088,00	2,91%
10	Kec Tiumang	693.553.620,00	705.024.523,00	11.470.903,00	1,63%
11	Kec Koto Besar	737.871.395,00	798.873.911,00	61.002.516,00	7,64%
12	Kec Koto Salak	778.880.878,00	697.806.645,00	(81.074.233,00)	-11,62%
13	Kec. Asam Jujuhan	1.041.016.918,00	1.041.433.712,00	416.794,00	0,04%
14	Dinas PUPR	735.302.138.968,00	816.614.499.608,68	81.312.360.640,68	9,96%
15	Dinas PERKIMTAN	15.260.091.991,00	17.903.732.045,00	2.643.640.054,00	14,77%
16	Dinas Perhubungan	4.684.396.187,00	5.213.085.384,00	528.689.197,00	10,14%
17	Dinas Kesehatan	49.833.499.803,00	60.069.726.421,00	10.236.226.618,00	17,04%
18	RSUD	36.081.650.553,60	45.203.925.115,00	9.122.274.561,40	20,18%
19	Dinas Pendidikan	72.999.933.465,50	90.241.381.551,00	17.241.448.085,50	19,11%
20	Dinas BUDPARPORA	15.000.602.689,00	17.161.898.370,00	2.161.295.681,00	12,59%
21	Dinas TRANSTAKER	2.001.763.644,00	2.216.067.589,00	214.303.945,00	9,67%
22	DSP3KB	3.118.211.117,00	3.588.300.895,00	470.089.778,00	0,00%
23	DISDUKCAPIL	2.736.782.847,00	3.012.724.199,00	275.941.352,00	9,16%
24	Dinas PMD	1.075.053.841,00	1.407.042.340,00	331.988.499,00	0,00%
25	Dinas Pertanian	10.306.744.948,00	11.982.179.616,00	1.675.434.668,00	13,98%
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8.286.667.671,50	10.291.521.477,50	2.004.853.806,00	19,48%

No.	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021(Audited)	Saldo 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Tren
27	Dinas KUMPERDAG	11.775.730.773,00	15.153.603.313,00	3.377.872.540,00	22,29%
28	BKD	4.696.491.875,00	4.987.466.742,00	290.974.867,00	0,00%
29	DPMPTSP	1.339.209.059,00	1.563.175.117,00	223.966.058,00	0,00%
30	Inspektorat Kabupaten	1.548.494.981,00	1.647.280.877,00	98.785.896,00	0,00%
31	BAPPPEDA	1.501.175.701,00	1.503.639.008,00	2.463.307,00	0,00%
32	DLH	4.704.726.991,00	4.830.026.409,00	125.299.418,00	2,59%
33	Kantor KESBANGPOL	251.005.500,00	255.239.563,00	4.234.063,00	0,00%
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	5.601.238.450,00	6.081.184.483,00	479.946.033,00	0,00%
35	BPBD	5.817.341.384,00	2.277.174.801,00	(3.540.166.583,00)	0,00%
36	BKPSDM	1.295.220.443,00	1.351.661.634,00	56.441.191,00	0,00%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.864.147.008,00	2.173.710.704,00	309.563.696,00	0,00%
38	Dinas KOMINFO	1.982.915.994,00	2.513.207.073,00	530.291.079,00	0,00%
Jumlah		1.055.277.207.905,60	1.190.948.112.056,18	135.670.904.150,58	11,39%

Daftar lampiran Penyusutan dapat dilihat pada :

1. Akumulasi Penyusutan 2021 Audited Dapat Dilihat Pada Lampiran 31
2. Akumulasi Penyusutan 2022 Dapat Dilihat Pada Lampiran 32
3. Nilai Buku 2022 Dapat Dilihat Pada Lampiran 33

V.C. 8. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya nilai Aset Lainnya mengalami pengaruh atau perubahan terkait implementasi dari Permendagri Nomor 108 tahun 2016 khususnya pada Aset Lain-lain , adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.2.36
Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 (Audited) dan 31 Desember 2022

Aset Lainnya	Saldo Aset Lainnya 2022	Saldo Aset Lainnya 2021 (Audited)	Kenaikan/penurunan	Tren
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Tuntutan Ganti Rugi	287.907.729,00	293.258.963,00	(5.351.234,00)	-1,86%
Aset Tidak Berwujud	4.345.006.277,00	4.013.267.277,00	331.739.000,00	7,63%
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	(2.233.315.887,00)	(1.906.478.687,00)	(326.837.200,00)	14,63%
Aset Lain-Lain	201.056.181.109,44	205.255.939.395,84	(4.199.758.286,40)	-2,09%
Penyusutan Aset Lain-lain	(157.064.214.099,44)	(148.585.496.096,84)	(8.478.718.002,60)	5,40%
Kas yang Dibatasi Penggunaannya			-	-
Jumlah	46.391.565.129,00	59.070.490.852,00	(12.678.925.723,00)	-27,33%

Adapun rincian Analitis Aset Tetap per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.37
Analitis Aset Lainnya

Uraian/Aset	Aset Tak Berwujud	Aset Lain-lain	Aset Lainnya
Saldo 31 Desember 2021 Audited	4.013.267.277,00	205.255.939.395,84	209.269.206.672,84
Belanja Modal 2022	-	-	-
Saldo 31 Desember 2022 + Belanja Modal	4.013.267.277,00	205.255.939.395,84	209.269.206.672,84
Saldo 31 Desember 2022 Neraca	4.345.006.277,00	201.056.181.109,44	205.401.187.386,44
Selisih Awal	(331.739.000,00)	4.199.758.286,40	3.868.019.286,40
			-
Mutasi Tambah Selain Belanja Modal			-
Reklas dari Peralatan dan Mesin			-
Reklas dari Gedung dan Bangunan			-
Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan			-
Reklas dari Aset Tetap Lainnya	331.739.000,00		331.739.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset			-

Uraian/Aset	Aset Tak Berwujud	Aset Lain-lain	Aset Lainnya
Kapitalisasi Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset			-
Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset			-
Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset			-
Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset			-
Penambahan Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset			-
Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset		285.390.000,00	285.390.000,00
Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset			-
Penambahan Mutasi Antar OPD		78.426.000,00	78.426.000,00
Penambahan Mutasi Honor Pokja			-
Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ ekstrakomptabel		8.888.144.255,60	8.888.144.255,60
Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ ekstrakomptabel		380.049.000,00	380.049.000,00
Mutasi Kurang			-
Reklas ke Aset Peralatan Mesin			-
Reklas ke Aset Gedung Bangunan			-
Reklas ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan			-
Reklas ke Aset Tetap Lainnya			-
Reklas ke Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan			-
Reklas ke Aset Tak berwujud			-
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel			-
Reklas ke Barang Habis Pakai			-
Reklas ke persediaan			-
Reklas ke Barang yang diserahkan ke masyarakat			-
Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel		380.049.000,00	380.049.000,00
Pengurangan Mutasi Antar OPD		78.426.000,00	78.426.000,00
Pengurangan Mutasi Honor Pokja			-
Pengurangan Koreksi		40.350.000,00	40.350.000,00
Pengurangan Hibah		128.250.000,00	128.250.000,00

Uraian/Aset	Aset Tak Berwujud	Aset Lain-lain	Aset Lainnya
Pengurangan Reklas Tetap/Lainnya/ Ekstrakompatibel		1.421.499.914,00	1.421.499.914,00
Penghapusan		11.783.192.628,00	11.783.192.628,00
Jumlah Mutasi Selain Belanja Modal	331.739.000,00	(4.199.758.286,40)	(3.868.019.286,40)
Selisih Akhir	-	-	-

Daftar rincian penghapusan Asset lainnya Tahun 2022 terdapat pada Lampiran Nomor 34 pada Laporan Keuangan ini.

Rincian Pengurangan Penghapusan Aset Lainnya 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.38
Penambahan/Pengurangan Aset Lainnya 2022

Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2021 (Audited)		209.269.206.672,84
Penambahan 2022		9.963.748.255,60
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	331.739.000,00
2	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	285.390.000,00
3	Penambahan Mutasi Antar OPD	78.426.000,00
4	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ekstrakompatibel	8.888.144.255,60
5	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	380.049.000,00
Pengurangan 2022		13.831.767.542,00
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	380.049.000,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	78.426.000,00
3	Pengurangan Koreksi	40.350.000,00
4	Penghapusan	11.783.192.628,00
5	Pengurangan Hibah	128.250.000,00
6	Pengurangan ReklasTetap/Lainnya/ Ekstrakompabel	1.421.499.914,00
Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2022		205.401.187.386,44

Tabel 5.2.39
Penambahan/Pengurangan Penyusutan Aset Lainnya 2022

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2021 (Audited)		150.491.974.783,84
Penambahan Penyusutan 2022		19.773.197.539,60
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	78.426.000,00
2	Penambahan Penyusutan Reklas	8.460.537.155,60
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	1.282.997.310,00
4	Penyusutan Semester I	5.167.237.200,00
5	Penyusutan Semester II	4.783.999.874,00
Pengurangan Penyusutan 2022		10.967.642.337,00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	78.426.000,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	1.649.784.199,00
3	Pengurangan Penyusutan Penghapusan	9.198.120.158,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	41.311.980,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2022		159.297.529.986,44
Nilai Buku Aset Lainnya 31 Desember 2022		46.103.657.400,00

Tabel 5.2.40
Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 2022

KIB/Sub KIB	Saldo Lainnya 2021 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset Lainnya 2022	Jumlah Pengurangan Aset Lainnya 2022	Saldo Aset Lainnya 2022
Aset Lainnya	209.269.206.672,84	9.963.748.255,60	13.831.767.542,00	205.401.187.386,44
ASET LAIN-LAIN	205.255.939.395,84	9.632.009.255,60	13.831.767.542,00	201.056.181.109,44
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/ Lainnya	61.201.975.473,84	9.265.666.255,60	10.039.697.456,00	60.427.944.273,44
Aset yang dipinjam-pakaikan	8.955.959.094,00	366.343.000,00	1.375.134.414,00	7.947.167.680,00
Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	135.098.004.828,00	-	2.416.935.672,00	132.681.069.156,00
Aset Tidak Berwujud	4.013.267.277,00	331.739.000,00	-	4.345.006.277,00

KIB/Sub KIB	Saldo Lainnya 2021 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset Lainnya 2022	Jumlah Pengurangan Aset Lainnya 2022	Saldo Aset Lainnya 2022
Aset Tidak Berwujud	4.013.267.277,00	331.739.000,00	-	4.345.006.277,00
Penyusutan Aset Lainnya	(150.491.974.783,84)	(19.773.197.539,60)	(10.967.642.337,00)	(159.297.529.986,44)
Nilai Buku	58.777.231.889,00	(9.809.449.284,00)	2.864.125.205,00	46.103.657.400,00

V.C.8.a. Tuntutan Ganti Rugi

Pada Tahun 2022 saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah sebesar Rp287.907.729,00. Adapun rincian Aset Lainnya berupa TGR per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Tuntutan Ganti Rugi	287.907.729,00	293.258.963,00	100,00%

Selama Tahun 2022 terdapat pengurangan TGR sebesar Rp5.351.234,00 yang merupakan penyetoran temuan yang telah diterbitkan SKTJM atas Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat. Nilai TGR Tahun 2022 sebesar Rp287.907.729,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.41
Rincian Aset Tuntutan Ganti Rugi

No	Nomor SKTJM	Nomor LHP	Nama / NIP / Unit Kerja	Uraian Temuan	31-Des-22	31-Des-21
1	Surat Keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPC tentang pencatatan kerugian Negara tanggal 23 Jan 2017	LHP BPK RI No.212/S/XVIII.PDG/11/2009	Neneng Elis Herlina, S.Si 19691026 200604 2 001 Bendahara Badan Lingkungan Hidup	Ketekoran Kas pada kas di bendahara pengeluaran SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 berada pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran.	287.907.729,00	287.907.729,00

No	Nomor SKTJM	Nomor LHP	Nama / NIP / Unit Kerja	Uraian Temuan	31-Des-22	31-Des-21
2.	961/002/SKTJM-2016 TGI 18 Januari 2016	LAP-24/R/Inspektorat-2011	Ir. Armiyusar 19640517 199303 1 007 Dinas Peternakan	Kekurangan fisik pembangunan rumah kompos	-	5.351.234,00
JUMLAH					287.907.729,00	293.258.963,00

V.C.8.b. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa software komputer. Software komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain, adapun nilai aset tidak berwujud, terkait penerapan Permendagri Nomor 108 tahun 2016 saldo aset tak berwujud tidak mengalami perubahan, adapun saldo aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Kenaikan /penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Aset Tidak Berwujud	4.345.006.277,00	4.013.267.277,00	331.739.000,00	7,63%
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	(2.233.315.887,00)	(1.906.478.687,00)	(326.837.200,00)	14,63%
Nilai Buku	2.111.690.390,00	2.106.788.590,00	4.901.800,00	0,23%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 adalah sejumlah Rp4.345.006.277,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan (Amortisasi) sebesar Rp2.233.315.887,00. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 menjadi Rp2.111.690.390,00.

Tabel 5.2.42
Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2021 (audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	145.750.000,00	145.750.000,00	-	0,00%
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	-	-	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	197.100.000,00	333.519.000,00	136.419.000,00	40,90%
17	Dinas Kesehatan	144.650.000,00	144.650.000,00	-	0,00%
18	RSUD	223.334.000,00	223.334.000,00	-	0,00%
19	Dinas Pendidikan	925.382.392,00	925.382.392,00	-	0,00%
20	Dinas BUDPARPORA	117.746.541,00	117.746.541,00	-	0,00%
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	141.179.569,00	142.679.569,00	1.500.000,00	1,05%
24	Dinas PMD	52.675.000,00	52.675.000,00	-	0,00%
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2021 (audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Trend
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-
28	BKD	1.437.630.400,00	1.623.950.400,00	186.320.000,00	11,47%
29	DPMPTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	-	-	-	-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
35	BPBD	-	-	-	0,00%
36	BKPSDM	142.000.000,00	142.000.000,00	-	0,00%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	0,00%
38	Dinas KOMINFO	485.819.375,00	485.819.375,00	-	0,00%
Jumlah		4.013.267.277,00	4.345.006.277,00	331.739.000,00	7,63%

V.C.8.c. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) dan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada pihak lain. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif. Saldo aset lain-lain 31 desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021(Audited)	Kenaikan/penurunan	Trend
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Aset Lain-Lain	201.056.181.109,44	205.255.939.395,84	(4.199.758.286,40)	-2,09%

Penyusutan Aset Lain-lain	(157.064.214.099,44)	(148.585.496.096,84)	(8.478.718.002,60)	5,40%
Nilai Buku	43.991.967.010,00	56.670.443.299,00	(12.678.476.289,00)	-28,82%

Dari daftar Aset Lain-lain yang sedang proses pemanfaatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdapat beberapa Aset kendaraan bermotor yang dipinjam-pakaikan kepihak lainnya terdiri dari Instansi-intansi Vertikal dan Pemerintahan Nagari dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 5.2.43
Daftar Aset Pinjam Pakai

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
Kecamatan Sembilan Koto					
1	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/ NF 100 SL	2006	Randi Elwarman/ Wali Nagaru Banai	Baik
2	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2011	Marti Ajis/ Wali Nagari Lubuk Karak	
3	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2012	Marti Ajis/ Wali Nagari Lubuk Karak	
4	Sepeda Motor	Honda / NF 100 SL	2006	Marti Ajis/ Wali Nagari Lubuk Karak	
5	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/ NF 100 SF (PGM-F1)	2006	Marti Ajis/ Wali Nagari Lubuk Karak	
6	Sepeda Motor	Honda	2006	Marti Ajis/ Wali Nagari Lubuk Karak	
7	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2011	Marti Ajis/ Wali Nagari Lubuk Karak	
8	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD	2009	Aidil Fitri/ Wali Nagari Koto Nan IV	
9	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2011	Aidil Fitri/ Wali Nagari Koto Nan IV	
10	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	Firdaus DT. Koto Panjang/ Wali Nagari Silago	
11	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2011	Firdaus DT. Koto Panjang/ Wali Nagari Silago	
12	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2012	Firdaus DT. Koto Panjang/ Wali Nagari Silago	
13	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2012	Firdaus DT. Koto Panjang/ Wali Nagari Silago	
Kecamatan Koto Baru					
1	Sepeda Motor	Honda	2006	Suparman Hadi/ Wali Nagari	Baik
2	Sepeda Motor	Suzuki	2012	Suparman Hadi/ Wali Nagari	Baik
3	Sepeda Motor	Suzuki	2012	Suparman Hadi/ Wali Nagari	Kurang Baik

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
4	Sepeda Motor	Suzuki	2006	Suparman Hadi/ Wali Nagari	Baik
5	Sepeda Motor	Suzuki	2006	Suparman Hadi/ Wali Nagari	Kurang Baik
6	Sepeda Motor	Axelo	2012	Sahrial/ Wali Nagari Sialang Gaung	
7	Sepeda Motor	Axelo	2011	Sahrial/ Wali Nagari Sialang Gaung	
8	Sepeda Motor	Axelo	2011	Sahrial/ Wali Nagari Sialang Gaung	
9	Sepeda Motor	Axelo	2011	Sahrial/ Wali Nagari Sialang Gaung	
10	Sepeda Motor	Axelo	2012	Sahrial/ Wali Nagari Sialang Gaung	
11	Sepeda Motor	Axelo	2011	Sahrial/ Wali Nagari Sialang Gaung	
12	Sepeda Motor	Axelo	2012	Sahrial/ Wali Nagari Sialang Gaung	
13	Sepeda Motor	Axelo	2012	Sahrial/ Wali Nagari Sialang Gaung	
14	Sepeda Motor	Honda GL-Max 145/ Honda gl	2002	Hasnul Hadi, SE/ PJ Wali Nagari Ampang Kuranji	
15	Sepeda Motor	Honda Supra X 125/ Supra X	2006	Hasnul Hadi, SE/ PJ Wali Nagari Ampang Kuranji	
16	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/ Supra Fit	2006	Hasnul Hadi, SE/ PJ Wali Nagari Ampang Kuranji	
17	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/ Supra Fit	2006	Hasnul Hadi, SE/ PJ Wali Nagari Ampang Kuranji	
18	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/ Supra Fit	2006	Hasnul Hadi, SE/ PJ Wali Nagari Ampang Kuranji	
19	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/ Supra Fit	2006	Hasnul Hadi, SE/ PJ Wali Nagari Ampang Kuranji	
20	Sepeda Motor	Honda GL-Max 145	2002	Z. Lubis, s.Pd/ Wali Nagari	
21	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2006	Z. Lubis, s.Pd/ Wali Nagari	
22	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	Z. Lubis, s.Pd/ Wali Nagari	
23	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	Z. Lubis, s.Pd/ Wali Nagari	
24	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	Z. Lubis, s.Pd/ Wali Nagari	
25	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	Z. Lubis, s.Pd/ Wali Nagari	
Kecamatan Sungai Rumbai					
1	Sepeda Motor	Honda/ Supra X 125	2014	Helly Andri, M.T/ Sek. Nagari	
2	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Budi Sutomo/ KA. JR. Laras Muda	
3	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Yatin Harnoko Budi/ KA. JR. Koto Mudik	

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
4	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2014	Yuli Wahyudi, S.Pd/ KA. JR Koto Bakti	
5	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Ahmad Sholehan/ KA. JR. Mulia Bakti	
6	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Mabrur Al Amin/ KA. JR. Cahya Koto	
7	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Leksono , S.Pd.I/ KA. JR. Ranah Minang	
8	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2014	Eka Nofrizal AS/ KA.JR. Batas Minang	
9	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Sarono/ KA. JR. Koto Ranah	
10	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Januar Efendi/ KA. JR. Kambang Baru	
11	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Syamsul Bahri/ KA. JR. Bukit Berbunga	
12	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125	2014	Fikri Yandi/ KA. JR. Balai Timur	
13	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125	2014	Ramli Marbun/ KA. JR. Kampung Baru	
14	Sepeda Motor	Honda/ Supra X 125	2014	Arisman, S.Sos/ WN. SEI. Rumbai Timur	
15	Sepeda Motor	Honda/ Supra X 125	2006	H. Rasul Hamidi DT. Saridano/ WN. Sei Rumbai	
16	Sepeda Motor	Honda/ Supra X 125	2006	Indra Kesuma/ KA. JR. Sei Kemuning	
17	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Buyung Jasmal/ KA. JR. Sungai Baye	
18	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125	2014	Sutan Efendi/ KA. JR. Balai Tengah	
19	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125	2014	Novi Idral, SH/ KA. JR. Tanah Abang	
20	Sepeda Motor	Honda/ Supra X 125	2006	Marzuki/ Kasi. Pemerintahan	
21	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Masnora/ KA. JR. Taufik	
22	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Indra Mardi/ KA. JR Inayah	
23	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Sarji/ KA. JR. Rahmat	
24	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Agus Aryo Bimo/ KA. JR Tawakal	
25	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Wilujeng/ KA. JR. Iradat	
26	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2014	Iskandar/ KA. JR. Khasanah	
27	Sepeda Motor	Honda/ Supra X 125	2006	Syafrizal/ KA. JR. Koto Indah	
28	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2014	Susardi/ KA. JR. Hidayah	
Kecamatan Tiumang					
1	Sepeda Motor	Honda/ Supra X	2006	Narin Imam/ WN Sungai Langkok	Baik
2	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Narin Imam/ WN Sungai Langkok	Baik
3	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Narin Imam/ WN Sungai Langkok	Rusak Berat

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
4	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Narin Imam/ WN Sungai Langkok	Baik
5	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2011	Narin Imam/ WN Sungai Langkok	Baik
6	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2001	Narin Imam/ WN Sungai Langkok	Baik
7	Sepeda Motor	Honda/ GL Max	2004	Narin Imam/ WN Sungai Langkok	Baik
8	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2012	Arif Gumensa ST. Sinarno, S.Pd/ WN Sipangkur	
9	Sepeda Motor	Honda/ Supra X	2010	Arif Gumensa ST. Sinarno, S.Pd/ WN Sipangkur	
10	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2010	Arif Gumensa ST. Sinarno, S.Pd/ WN Sipangkur	
11	Sepeda Motor	Suzuki/ Axelo	2011	Arif Gumensa ST. Sinarno, S.Pd/ WN Sipangkur	
12	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2010	Arif Gumensa ST. Sinarno, S.Pd/ WN Sipangkur	
13	Kendaraan Roda 2	Honda/ NF 125 TD	2010	Suherman, SH/ WN Koto Beringin	
14	Kendaraan Roda 3	Suzuki/ FL 125 RTD	2012	Suherman, SH/ WN Koto Beringin	
15	Kendaraan Roda 4	Suzuki/ FL 125 RTD	2012	Suherman, SH/ WN Koto Beringin	
16	Kendaraan Roda 5	Honda/ FL 100 SL	2006	Suherman, SH/ WN Koto Beringin	
17	Kendaraan Roda 6	Honda/ FL 100 SL	2006	Suherman, SH/ WN Koto Beringin	
18	Sepeda Motor	Honda/ GL Max 145	2002	Safrizal, SH/ WN Tiumang	
19	Sepeda Motor	Honda/ Supra X 125	2006	Safrizal, SH/ WN Tiumang	
20	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit 100	2006	Safrizal, SH/ WN Tiumang	
21	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Safrizal, SH/ WN Tiumang	
22	Sepeda Motor	Honda/ Supra Fit	2006	Safrizal, SH/ WN Tiumang	
23	Sepeda Motor	Suzuki Shogun 125	2012	Safrizal, SH/ WN Tiumang	
Kecamatan Padang Laweh					
1	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2011	Ari Asmanto, S.Psi/ WN Muaro Sapan	Baik
2	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2011	Ari Asmanto, S.Psi/ WN Muaro Sapan	Baik
3	Sepeda Motor	Suzuki/ Shougun AXELO	2012	Ari Asmanto, S.Psi/ WN Muaro Sapan	Baik
4	Sepeda Motor	Suzuki/ Shougun AXELO	2012	Ari Asmanto, S.Psi/ WN Muaro Sapan	Baik
5	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD	2009	Burhanuddin/ WN Batu Rijal	
6	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2011	Burhanuddin/ WN Batu Rijal	
7	Sepeda Motor	Suzuki/ Shougun AXELO	2012	Burhanuddin/ WN Batu Rijal	
8	Sepeda Motor	Suzuki/ Shougun AXELO	2012	Burhanuddin/ WN Batu Rijal	

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
9	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SF	2006	H. Syahrul/ WN Padang Laweh	
10	Sepeda Motor	Suzuki/ Shougun AXELO	2012	H. Syahrul/ WN Padang Laweh	
11	Sepeda Motor	Suzuki/ Shougun AXELO	2012	ST. Riza Arianda, S.TP/ WN Sopan Jaya	
12	Sepeda Motor	Suzuki/ Shougun AXELO	2012	ST. Riza Arianda, S.TP/ WN Sopan Jaya	
Kecamatan Sitiung					
1	Sepeda Motor		2007	Hardi Suharto	
2	Sepeda Motor		2007	Mutahar	
3	Sepeda Motor		2007	Heriyanto	
4	Sepeda Motor		2007	Syamsiatun	
5	Sepeda Motor		2011	Idris Sardi	
6	Sepeda Motor		2011	Hasanuddin	
7	Sepeda Motor		2012	Fauzi	
8	Sepeda Motor		2012	Fauzul Azim	
9	Sepeda Motor		2012	Jhon Afrizal	
10	Sepeda Motor		2009	M. Syawal	
11	Sepeda Motor		2011	Katino Hadi	
12	Sepeda Motor		2011	Harmizen	
13	Sepeda Motor		2010	Didik Susanto	
14	Sepeda Motor		2012	Mulyoto	
15	Sepeda Motor		2006	Tri Giyanto	
16	Sepeda Motor		2012	Sukasmin	
17	Sepeda Motor		2012	Fitrawedi	
18	Sepeda Motor		2006	Anggi Prahara	
Kecamatan Koto Besar					
1	Sepeda Motor	Suzuki	2012	Arman	Baik
2	Sepeda Motor	Suzuki	2012	Rono Paslah	Baik
3	Sepeda Motor	Suzuki	2011	Sutan Jamarin	Rusak Ringan
4	Sepeda Motor	Honda GL-Max	2002	Wahyu Tri Cahyadi	Rusak Ringan
5	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	Eko Noris, SH (Wali Nagari)	Rusak Ringan

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
6	Sepeda Motor	Suzuki Shogun	2012	Dona Abdullah	Baik
7	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCD	2011	Adi Asgiawan	Baik
8	Sepeda Motor	Suzuki Shogun	2006 (2012)	Soderi	Baik
9	Sepeda Motor	Honda Supra	2006	Iqbal (Wali Nagari)	Rusak Ringan
10	Sepeda Motor	Shogun Axelo	2011	Lulut Sugiarto KA. JR. Sungai Nabuhan	Baik
11	Sepeda Motor	Suzuki Fit Z	2006	Solihin KA. Karang Taruna	Rusak Berat
12	Sepeda Motor	Suzuki Fit Z	2006	Wardoyo KA. JR. Tanjung Paku Alam	Baik
13	Sepeda Motor	Shogun Axelo	2012	Sukardianto KA. JR. Taratak Baru	Baik
14	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	2008	Supriono Ket. Linmas	Rusak Ringan
15	Sepeda Motor	Shogun Axelo	2011	Dirinto Kaur Perencanaan	Baik
16	Sepeda Motor	GL-Max	2002	Lukman Fauzi, S.Kom	Rusak Ringan
17	Sepeda Motor	Honda NF 100 SL	2006	Mustaqim	Rusak Ringan
18	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 RCD	2011	Sarmadi	Rusak Ringan
19	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 RCD	2011	Zainal Afrizal	Baik
20	Sepeda Motor	Honda NF 100 SL	2006	Wardoyo KA. JR. Tanjung Paku Alam	Rusak Ringan
21	Sepeda Motor	Honda Supra X	2006	BRE. Yunanda, M.Pd	Rusak Ringan
Kecamatan Pulau Punjung					
1	Sepeda Motor	Honda/ NF 125 SF (FGM-FI)	2006	Nawirman (Seknag T.Tinggi)	
2	Sepeda Motor	Honda / Supra	2006	Erianto Ka Jorong PLP (Nag. 4 koto PLP) dan BA Sebelumnya Diketahui Karena STNK Hilang	
3	Sepeda Motor	Honda / Supra	2006	Isman Rizaldi (Staf Nag. gunung selasih)	
4	Sepeda Motor	Honda / Supra	2006	Khairul Amri Ka Jorong Kt. Lamo Ateh (Nag. sungai kambut)	
5	Sepeda Motor	Honda / Supra	2006	Asril (Staf Nag. sungai kambut)	
6	Sepeda Motor	Honda / Supra	2006	Irfadri Ka. Jorong Lbk. Bulang (Nag. Gunung Selasih) dan STNK Hilang	
7	Sepeda Motor	Honda / Supra	2006	Riva Davia (Staf Nag. 4 Koto PLP) dan STNK Hilang	
8	Sepeda Motor	Honda / Supra	2006	Harmendi Ka. Jorong Pdg. Duri (Nag. 4 koto PLP)	
9	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD	2009	Tomi Andesra (SekNag. Sungai Kambut)	

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
10	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Japrial Ka. Jorong Kp. Surau (Nag. gunung selasih)	
11	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Nasrul Efendi Ka. Jorong Koto Lamo (Nag. sungai kambut)	
12	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Misyadi Ka. Jorong Pdg. Sari (Nag. tebing tinggi)	
13	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Meliza (Staf Nag. Sikabau)	
14	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Aulia Rahman Ka. Jorong Koto Sikabau (Nag. Sikabau)	
15	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Esiswanto Ka. Jorong Lambau (Nag. sungai kambut)	
16	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Marlis Ka. Jorong Sialang (Nag. gunung selasih)	
17	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Amiruddin Ka. Jorong S.Belit (Nag. gunung selasih)	
18	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 RCD	2011	Syafriyon Ka. Jorong Btg Tabek (Nag. Tebing Tinggi)	
19	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Parid Wahyudi Ka. Jorong Kbg. Gajah (Nag. 4 koto pulau PLP)	
20	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Rifdal Fadli Ka. Jorong Pasar PLP (Nag. 4 koto pulau PLP)	
21	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Roni Maike (Naga. tebing tinggi)	
22	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Devis Mendrison, S.Kep (Nag. tebing tinggi)	
23	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Yuliar (Nag. Sikabau)	
24	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Frans Daromes (nag. Sikabau)	
25	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Ns. Hendra, S.Kep (Nag. Sikabau)	
26	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Vingki (Nag. sungai kambut)	
27	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun Exelo	2012	Lendra Arliwanto (Nag. sungai kambut)	
Dinas Lingkungan Hidup					
1	Sepeda Motor	Happy MotorCycle	2016/2017	Hormor Daniel	
2	Dump Truck	Isuzu	2018	Rendi Febrianto, SH/ Sek Nag. Sungai Rumbai	Baik
3	Becak Motor Roda 3	Kaisar/ Triseda	2013	Harianto/ Pimpinan Karang Taruna	Rusak Ringan
4	Becak Motor Roda 3	Kaisar/ Triseda RX	2013	Zamribel	Baik
5	Becak Motor Roda 4	Kaisar/ Triseda RX	2013	Slamet	Baik

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
6	Sepeda Motor	Happy MotorCycle	2016/2017	Supriyanto	
7	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lainnya		2016	Jamaris	Baik
8	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lainnya		2013	Hermon Daniel	
9	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lainnya		2013	Hermon Daniel	
10	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lainnya	In-Da	2016	Ngalimin	Baik
11	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Happy MotorCycle Perkasa	2018	Dwi Cakhyo Aji Waluyo, S.Pd	Baik
12	Mesin Pencacah Organik/ Kompos		2012	Dwi Cakhyo Aji Waluyo, S.Pd	Baik
13	Alat Penghancur Kertas		2007	Dwi Cakhyo Aji Waluyo, S.Pd	Baik
14	Becak Motor Roda 3	Happy MotorCycle Perkasa	2018	Randi Febrianto, SH	Baik
15	Becak Motor	Kaisar Triseda RX	2015	BRE. Yunanda, M.Pd/ Plt. WN Koto Tinggi	Rusak Ringan
16	Alat Kantor Lainnya	ADK-1500	2007	Faisal Mufti Muhtarom	Baik
17	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lainnya	Dong Feng	2016	Faisal Mufti Muhtarom	
Sekretariat Daerah					
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Suzuki Katana	2005	Kodim	
2	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	2022	Kodim	
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi Kuda	2004	POLRES Kab. Dharmasraya	
4	Kendaraan Dinas Roda 4	Nissan X- Trail	2014	POLRES Kab. Dharmasraya	
5	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	2022	POLRES Kab. Dharmasraya	
6	Kendaraan Dinas Roda 4	Suzuki Katana	2005	MUI Kab. Dharmasraya	
7	Kendaraan Dinas Roda 4	Kijang LGX	2005	BAZNAS Kabupaten Dharmasraya	
8	Kendaraan Dinas Roda 4	Kijang Innova	2010	SAMSAT Kab. Dharmasraya	
9	Kendaraan Dinas Roda 2	Suzuki Shogun Axelo 125	2012	SAMSAT Kab. Dharmasraya	
10	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Innova	2016	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	
11	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Innova	2019	Pengadilan Agama	
12	Kendaraan Dinas Roda 4	Nissan X- Trail	2010	BAWASLU	

NO	Nama Barang	Merk/ Tipe	Tahun Perolehan	Nama Penanggungjawab	Keterangan
13	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda Supra X	2006	BAWASLU	
14	Kendaraan Dinas Roda 4	Kijang Innova	2015	KEMENAG	
15	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Panther	2006	KAMPUS III UNAND di Dharmasraya	
16	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi Kuda	2004	LKAAM Kabupaten Dharmasraya	
17	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Hilux	2016	BATALYON C PELOPOR SATBRIMOB POLDA SUMBAR	
18	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda Supra X	2009	KORPRI KAB. DHARMASRAYA	
19	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	2022	KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA	
20	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Rush	2019	LAPAS KLAS III Dharmasraya	
21	Kendaraan Dinas Roda 4	Nissan X- Trail	2013	KEJAKSAAN NEGERI Kab. Dharmasraya	
22	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	2022	KEJAKSAAN NEGERI Kab. Dharmasraya	
23	Kendaraan Dinas Roda 2	Suzuki Thunder	2008	KEJAKSAAN NEGERI Kab. Dharmasraya	

Rincian Saldo Aset Lain-Lain pada masing-masing SKPD pada tahun 2022 sebesar Rp201.056.181.109,44 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.44
Rincian Saldo Aset Lain-Lain

No.	Nama OPD	Saldo Aset Lain-lain 2021 (audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trend
1	Sekretariat DPRD	413.144.500,00	413.818.500,00	674.000,00	0,16%
2	Sekretariat Daerah	7.450.581.529,00	6.932.522.391,00	(518.059.138,00)	-7,47%
3	Kec. Pulau Punjung	437.179.000,00	548.169.000,00	110.990.000,00	20,25%
4	Kec. Sitiung	243.500.000,00	273.200.000,00	29.700.000,00	10,87%
5	Kec. Koto Baru	402.111.800,00	376.736.800,00	(25.375.000,00)	-6,74%
6	Kec. Sngai Rumbai	446.698.000,00	446.698.000,00	-	0,00%
7	Kec. IX Koto	316.133.000,00	257.873.000,00	(58.260.000,00)	-22,59%

No.	Nama OPD	Saldo Aset Lain-lain 2021 (audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trend
8	Kec. Timpeh	367.441.950,00	367.441.950,00	-	0,00%
9	Kec. Padang Laweh	280.393.000,00	236.969.000,00	(43.424.000,00)	-18,32%
10	Kec Tiumbang	331.166.000,00	388.866.000,00	57.700.000,00	14,84%
11	Kec Koto Besar	520.163.334,00	547.663.334,00	27.500.000,00	5,02%
12	Kec Koto Salak	790.437.000,00	755.937.000,00	(34.500.000,00)	-4,56%
13	Kec. Asam Jujuhan	314.795.000,00	346.898.800,00	32.103.800,00	9,25%
14	Dinas PUPR	126.002.286.022,00	123.409.098.022,00	(2.593.188.000,00)	-2,10%
15	Dinas PERKIMTAN	2.563.320.722,00	146.385.050,00	(2.416.935.672,00)	-1651,08%
16	Dinas Perhubungan	1.367.606.530,00	1.046.606.530,00	(321.000.000,00)	-30,67%
17	Dinas Kesehatan	9.903.366.009,00	9.881.352.386,00	(22.013.623,00)	-0,22%
18	RSUD	9.681.105.196,00	11.351.830.157,60	1.670.724.961,60	14,72%
19	Dinas Pendidikan	17.817.400.766,84	17.882.502.518,84	65.101.752,00	0,36%
20	Dinas BUDPARPORA	55.844.311,00	78.344.311,00	22.500.000,00	28,72%
21	Dinas TRANSNAKER	412.148.858,00	410.366.858,00	(1.782.000,00)	-0,43%
22	DSP3KB	1.587.630.663,00	1.513.877.032,00	(73.753.631,00)	-4,87%
23	DISDUKCAPIL	330.748.300,00	426.977.550,00	96.229.250,00	22,54%
24	Dinas PMD	512.614.593,00	229.320.455,00	(283.294.138,00)	-123,54%
25	Dinas Pertanian	14.691.326.778,00	14.691.326.778,00	-	0,00%
26	Dinas Pangan dan Perikanan	966.902.800,00	990.152.800,00	23.250.000,00	2,35%
27	Dinas KUMPERDAG	142.153.833,00	161.676.433,00	19.522.600,00	12,08%
28	BKD	1.292.709.972,00	1.395.248.612,00	102.538.640,00	7,35%
29	DPMPSTP	128.073.400,00	134.823.400,00	6.750.000,00	5,01%
30	Inspektorat Kabupaten	81.720.490,00	99.336.490,00	17.616.000,00	17,73%
31	BAPPPEDA	435.769.795,00	435.769.795,00	-	0,00%
32	DLH	2.869.418.016,00	3.158.033.928,00	288.615.912,00	9,14%
33	Kantor KESBANGPOL	156.131.700,00	156.131.700,00	-	0,00%
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	284.242.598,00	284.242.598,00	-	0,00%
35	BPBD	1.327.312.000,00	914.237.000,00	(413.075.000,00)	-45,18%

No.	Nama OPD	Saldo Aset Lain-lain 2021 (audited)	Saldo 31Aset Tetap Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Trend
36	BKPSDM	178.329.400,00	178.329.400,00	-	0,00%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77.672.580,00	111.057.580,00	33.385.000,00	30,06%
38	Dinas KOMINFO	76.359.950,00	76.359.950,00	-	0,00%
Jumlah		205.255.939.395,84	201.056.181.109,44	(4.199.758.286,40)	-2,09%

V.C.8.d. *Treasury Deposit Facility (TDF)*

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU) secara non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Nilai TDF per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.689.400.169,00.

V.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.553.933.658,25 mengalami penurunan sebesar Rp1.491.746.691,13 atau -8,27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.045.680.349,38. Jumlah tersebut terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.2.a	Kewajiban Jangka Pendek	16.553.933.658,25	18.045.680.349,38

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga) utang bunga maupun utang perhitungan pihak ketiga (PFK).

Utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.2.a.1	Utang kepada Pihak Ketiga (PFK)	257.846.811,27	765.399.544,27

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp257.846.811,27 berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah Antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, dan BPJS Kesehatan Triwulan IV Tahun 2022 Nomor 900/1240/BKD-2022 tanggal 30 Desember 2022, dengan rinciannya sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan
Utang PFK pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp122.816.437,00 atas Utang PFK atas Pajak Negara yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2022 pada Belanja Modal kegiatan swakelola dari kelompok masyarakat.
2. Dinas Kesehatan
Utang PFK pada Dinas kesehatan sebesar Rp1.318.730,27 terdiri dari selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - Jasa Pelayanan Puskesmas sebesar Rp1.156.120,27 dan selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - Gaji Dinas Kesehatan sebesar Rp162.610,00.
3. RSUD Sungai Dareh
Utang PFK Pada RSUD Sungai Dareh Sebesar Rp133.711.644,00,00 merupakan sisa utang tahun 2021 sebesar Rp.70.595.394,00 dan adanya penambahan utang tahun 2022 sebesar Rp63.116.250,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2021 sebesar Rp765.399.544,27 terdiri dari.

1. Utang sebesar Rp491.715.681,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan Triwulan Tahun 2021 Nomor 900/2208A/BKD-2021 dan 537/BA/II-06/1221 tanggal 28 Desember 2021, telah dibayarkan pada tahun 2022.
2. Utang sebesar Rp273.683.863,27 adalah Pajak Negara yang dipungut Bendahara BOS yang telah disetor ke Kas Negara pada Tahun 2022

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.2.a.2 Pendapatan Diterima Dimuka	83.144.415,10	102.623.340,64

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp83.144.415,10 tersebut terdiri atas pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD, sewa untuk tanah dan bangunan, sewa tanah menara telekomunikasi, sewa Rusunawa dan lebih salur klaim BPJS BLUD Dinas Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.45
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2022
1	Dinas Kesehatan				
	ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru	PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Ummum-Dinkes/XII/2021	01/01/2022 s.d. 31/12/2022		2.996.715,93
		20 Juni 2016 sd 20 Juni 2021	01/01/2023 s.d. 31/12/2023	2.996.715,93	
		5 Tahun	01/01/2024 s.d. 31/12/2024	3.004.926,11	
		Rp15.000.000,00	01/01/2025 s.d. 31/12/2025	2.996.715,93	
		1827 hari	01/01/2026 s.d. 20/06/2026	1.403.940,88	
	Jumlah			10.402.298,85	2.996.715,93
2	BLUD Puskesmas				
	Pendapatan diterima dimuka dana Kapitasi			3.165.000,00	
	Lebih salur Non Kapitasi			0,00	
	Jumlah			3.165.000,00	0
3	RSUD Sungai Dareh				
a.	Payment Point dan ATM Bank Nagari	445/789/RSUD-2016			
		01/02/2017 s.d 01/02/2022	01/01/2022 s.d. 01/02/2022		618.992,86
		5 Tahun Rp35.340.624,00			

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2022
		1827 hari	Jumlah	0,00	618.992,86
b.	Payment Point dan ATM Bank Nagari	445/29/RSUD-2021	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	0,00	9.139.740,74
		16 /11/2021 s.d 16/12/ 2024	01/01/2023 s.d. 31/12/2023	9.139.740,74	
		3 Tahun	01/01/2024 s.d. 31/12/2024	8.037.963,78	
		Rp27.469.303,00			
		1097 hari	Jumlah	17.177.704,52	9.139.740,74
	Jumlah			17.177.704,52	9.758.733,60
4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
	Pendapatan Diterima dimuka dari Rusunawa			11.558.064,52	
	Jumlah			11.558.064,52	0
5	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu pintu				
	Pendapatan Diterima dimuka IMB			18.300.000,00	
	Jumlah			18.300.000,00	0
6	Badan Keuangan Daerah				
a.	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi	Nomor:415.4/14/BUP-2018	01/01/2022 s.d. 31/12/2022		6.296.549,84
		Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018	01/01/2023 s.d. 16/06/2023	2.880.887,19	
		17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023			
		5 Tahun Rp31.500.000,00			
b.	ATM Bank Nagari	Nomor:030/654/BKD-XII/2017	01/01/2022 s.d. 30/11/2022		5.597.152,25
		17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023			
		5 Tahun Rp31.500.000,00			
	Jumlah			2.880.887,19	11.893.702,09
7	Sekretariat Daerah				
	ATM Bank BRI	Nomor:B.13 2-KC.III/LOG/)/2021			
		2/01/2021 s.d 2/01/2022	01/01/2022 s.d. 02/01/2022		21.917,81
		1 Tahun Rp4.000.000,-			
		365 Hari			
	ATM Bank Nagari Kantor Bupati	PKS/129/PL/12-2022	01/12/2020 s.d. 31/12/2022		339.539,98
		01/12/2022 s.d 01/01/2027	01/01/2023 s.d. 31/12/2023	3.997.809,42	
		5 Tahun	01/01/2024 s.d. 31/12/2024	4008762,32	

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2022
		Rp20.000.000,00	01/01/2025 s.d. 31/12/2025	3997809,42	
		1.826 Hari	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	3997809,42	
			01/01/2027 s.d. 30/11/2027	3658269,44	
	Jumlah			19.660.460,02	361.457,78
	Total			83.144.415,10	25.010.609,41

Pendapatan diterima dimuka pada BLUD Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp3.165.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka Dana Kapitasi pada klaim BPJS tahun 2018 dan 2019 pada Puskesmas Timpeh.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.2.a.3 Utang Belanja	11.321.739.731,88	12.286.454.764,47

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.321.739.731,88 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2.46
Utang Belanja Tahun 2022

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
a.	Belanja Pegawai		
1	BLUD Puskesmas	Utang Pegawai (Jasa Pelayanan ASN)	295.395.698,00
		Jumlah	295.395.698,00
2	BKD	Utang Insentif Pemungutan Pajak daerah	372.139.323,00
		Utang Insentif Pemungutan Retribusi daerah	94.258.277,00
		Jumlah	466.397.600,00
I	Jumlah		761.793.298,00
b.	Belanja Barang Jasa		
1	BLUD Puskesmas	Utang Jasa Layanan	421.887.323,00
		Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	108.761.056,55

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
		Belanja Bahan Obat	225.890.147,45
		Oprasional Ambulance	2.046.800,00
	Jumlah		758.585.327,00
2	BLUD RSUD Sungai Dareh	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.826.691.532,00
		Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	2.279.847.183,00
		Belanja Bahan Obat	1.844.662.763,00
		Belanja Bahan Laboratorium	660.680.683,00
		Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	120.108.645,00
		Tim Verifikasi (PAK) dan Tim Penilai (PAK)	21.700.000,00
	Jumlah		9.753.690.806,00
3	Dinas Perhubungan	Utang Tagihan Listrik	12.737.800,88
II	Jumlah		10.525.013.933,88
c.	Belanja Modal		
1	Dinas PUPR	Utang Belanja Modal	34.932.500,00
III	Jumlah		34.932.500,00
JUMLAH (I + II + III)			11.321.739.731,88

	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Utang Belanja Pegawai	761.793.298,00	91.169.999,00

Utang Belanja Pegawai Tahun 2022

Utang Belanja Pegawai 2022 sebesar Rp761.793.298,00 terdiri dari :

1. Utang jasa pelayanan pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp295.395.698,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.2.47
Utang Belanja Belanja Pegawai BLUD Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Puskesmas	Utang Belanja Pegawai
1	RSUD Sungai Rumbai	-
2	Sungai Rumbai	7.049.800,00
3	Koto Besar	37.504.543,00

No	Puskesmas	Utang Belanja Pegawai
4	Sungai Limau	-
5	Koto Baru	23.324.739,00
6	Tiumang	45.767.084,00
7	Padang Laweh	2.276.097,00
8	Sitiung I	15.893.518,00
9	Timpeh	22.782.001,00
10	Gunung Medan	-
11	Sitiung II	2.265.250,00
12	Beringin Sakti	21.535.542,00
13	Silago	34.605.384,00
14	Sungai Dareh	54.898.440,00
15	Sialang	27.493.300,00
Jumlah		295.395.698,00

2. Utang Insentif Pemungutan PBB dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp466.397.600,00.

Utang insentif ditetapkan dengan SK Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/58/KPTS-BKD/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut /Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dan SK Nomor 862.1/59/KPTS-BKD/2023 tanggal 20 Februari 2022 tentang Besaran Alokasi Kekurangan Dana Bagi Hasil Pajak Nagari dan Retribusi Daerah kepada Nagari se-Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

Utang Belanja Pegawai 2021

Utang Belanja Pegawai 2021 sebesar Rp91.169.999,00 merupakan utang Insentif Pemungutan PBB pada Badan Keuangan Daerah Sesuai Dengan SK Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/50/KPTS-BKD/2022 tanggal 25 Februari tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut / Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2021 yang telah dibayarkan pada tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
b. Utang Belanja Barang dan Jasa	10.525.013.933,88	11.262.445.452,47

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp10.525.013.933,88 terdiri dari sebagai berikut :

1. Utang belanja barang dan jasa pada BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp758.585.327,00 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai atas utang klaim BPJS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.48
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Puskesmas	Utang Belanja Barang dan Jasa
1	RSUD Sungai Rumbai	554.740.786,00
2	Sungai Rumbai	5.067.300,00
3	Koto Besar	36.459.971,00
4	Sungai Limau	5.354.400,00
5	Koto Baru	13.139.261,00
6	Tiumang	24.624.539,00
7	Padang Laweh	2.310.303,00
8	Sitiung I	8.758.082,00
9	Timpeh	30.366.119,00
10	Gunung Medan	4.377.200,00
11	Sitiung II	2.913.750,00
12	Beringin Sakti	80.940,00
13	Silago	11.487.816,00
14	Sungai Dareh	22.910.760,00
15	Sialang	35.994.100,00
Jumlah		758.585.327,00

2. Utang Belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp9.753.690.806,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.49
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2022

No	Uraian	Sisa Utang Tahun 2021	Utang Tahun 2022	Total Utang BLUD Tahun 2022
1	2	3	4	5=3+4
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	45.598.998,00	4.781.092.534,00	4.826.691.532,00
2	Belanja Bahan Pakai Habis/Kedokteran bahan lainnya	43.700.725,00	2.236.146.458,00	2.279.847.183,00
3	Belanja Bahan Obat	36.342.342,00	1.808.320.421,00	1.844.662.763,00
4	Belanja Bahan Laboratorium/kimia	125.909.299,00	534.771.384,00	660.680.683,00
5	Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	0,00	120.108.645,00	120.108.645,00
6	Honorarium Tim Verifikasi (PAK) dan Tim Penilai (PAK)	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00
TOTAL		251.551.364,00	9.502.139.442,00	9.753.690.806,00

3. Utang belanja jasa pada Dinas Perhubungan sebesar Rp12.737.800,88 merupakan utang belanja listrik Bulan Desember 2022

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 terdiri dari.

1. Utang belanja pada BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp1.234.071.892,47 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai atas utang klaim yang telah dibayarkan pada tahun 2022.
2. Utang Belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp10.021.219.509,00 telah dibayarkan sebesar Rp9.679.419.005,00 serta adanya koreksi penambahan sebesar Rp192.739.414,25 dan pengurangan pencatatan sebesar Rp251.974.943 dari BPJS sehingga masih tersisa utang tahun 2021 sebesar Rp282.564.975,25,00, terdapat koreksi Sisa utang tahun 2021 sebesar Rp.31.013.611,00 sehingga sisa utang tahun 2021 yang belum dibayarkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.251.551.364,00.
3. Utang belanja jasa pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp7.154.051,00 yang telah dibayarkan ditahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	34.932.500,00	34.932.500,00
Utang Belanja Modal Tahun 2022 merupakan utang belanja modal tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp34.932.500,00 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:		
1. Sisa pembayaran dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Paket IV Nomor Kontrak 620.04/PRC/PEMB-JLN/DAK/BM-DPUPR/IX-2020 oleh perusahaan konsultan CV. Diazka Konsultan sebesar Rp99.850.000,00 yang fisiknya belum selesai dikerjakan pada Tahun 2020 pembayaran pekerjaan baru dibayarkan sebesar Rp79.880.000,00 (85%) pada tahun 2021, sehingga masih ada sisa pembayaran sebesar Rp19.970.000,00. 2. Sisa pembayaran termyn final 100% kegiatan pembangunan gedung kantor pekerjaan review perencanaan pembangunan Landscape Mesjid Agung Dharmasraya Nomor Kontrak 640/09/014-SL/PRC/PGK-APBD/CK-DPUPR/2020 oleh CV Gatra Consultant dengan jumlah Rp99.750.000,00 yang dibayarkan pada Tahun 2021 sebesar Rp84.787.500,00 (85%) sehingga masih ada sisa utang sebesar Rp14.962.500,00.		

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
d. Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	864.906.813,00

Utang Belanja bantuan Keuangan 2022 Rp. 0,00.

Utang Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021

Utang Belanja bantuan Keuangan 2021 merupakan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD) Triwulan IV Tahun 2021 untuk 52 Nagari di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/49/KPTS-BUP/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Triwulan 4 Tahun 2021 sebesar Rp.864.906.813,00 telah dibayar pada tahun 2022

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
e. Utang Belanja Tak Terduga	0,00	33.000.000,00

Utang Belanja Tak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Utang belanja Tak Terduga tahun 2021

Utang Belanja Tak Terduga sebesar Rp33.000.000,00 terdiri dari belanja tak terduga untuk bantuan bencana kebakaran di Sungai Duo sebesar Rp28.000.000,00 dan bencana kebakaran di Sialang Gaung sebesar Rp5.000.000,00 yang telah dibayarkan pada tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.2.a.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	4.891.202.700,00

Utang jangka pendek lainnya tahun 2022 berupa utang retensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada PT Nindya Karya atas Pembangunan Masjid Agung yang muncul karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar Rp4.891.202.700,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dibayarkan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.2.b Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.C.3 EKUITAS	2.458.059.251.659,61	2.488.069.809.561,05

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.458.059.251.659,61 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp2.488.069.809.561,05 ditambah defisit laporan operasional sebesar Rp(5.337.014.025,51) ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp(24.673.543.875,93).

Ekuitas Awal	2.488.069.809.561,05
Surplus/Defisit LO	(5.337.014.025,51)
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(24.673.543.875,93)
Ekuitas Akhir	<u><u>2.458.059.251.659,61</u></u>

V.D. Laporan Operasional

V.D.1. Pendapatan – LO

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
5.	PENDAPATAN	950.705.159.058,95	1.051.385.580.493,23	100.680.421.434

Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp950.705.159.058,95 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.051.385.580.493,23, terdapat penurunan sebesar Rp100.680.421.434,02 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1
Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan 2021

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.	PENDAPATAN	950.705.159.058,95	1.051.385.580.493,23	(100.680.421.434,28)
8.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.380.281.349,72	93.834.740.104,23	5.545.541.245,49
8.2.	Pendapatan Transfer	788.731.551.572,00	835.428.784.613,00	(46.697.233.041,00)
8.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	62.593.326.137,23	122.122.055.776,00	(59.528.729.638,77)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Asli Daerah	99.380.281.349,72	93.834.740.104,23	5.545.541.245,49

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp5.545.541.245,49.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.380.281.349,72	93.834.740.104,23	5.545.541.245,49
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	23.850.796.763,46	22.455.754.207,25	1.395.042.556,21
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.947.679.575,54	2.499.784.055,43	447.895.520,11
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.325.813.847,00	10.284.830,00	4.315.529.017,00
8.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	68.255.991.163,72	68.868.917.011,55	(612.925.847,83)

a.1. Pendapatan Pajak Daerah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	23.850.796.763,46	22.455.754.207,25	1.395.042.556,21

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp1.395.042.556,21.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.3
Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2022

	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Pajak Daerah	21.634.156.143,46	23.850.796.763,46	2.216.640.620,00
Pajak Hotel	193.432.436,00	193.432.436,00	-
Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.721.533.518,00	1.682.059.536,00	(39.473.982,00)
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	4.129.250,00	4.129.250,00	-
Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	260.438.054,00	260.438.054,00	-
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	533.175.982,46	533.175.982,46	
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.693.464.035,00	12.720.385.463,00	26.921.428,00
Pajak Parkir	6.427.883,00	6.427.883,00	-

	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pajak Air Tanah	16.611.667,00	16.611.667,00	-
Pajak Sarang Burung Walet	10.100.000,00	10.100.000,00	-
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	371.121.511,00	567.552.511,00	196.431.000,00
PBBP2	2.475.105.302,00	4.507.867.476,00	2.032.762.174,00
BPHTB-Pemindahan Hak	3.348.616.505,00	3.348.616.505,00	-

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO jumlah sebesar Rp2.216.640.620,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.4
Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2022

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Penerimaan piutang pajak restoran tahun 2021	1.540.275,00		(1.540.275,00)
Kas Lainnya di Bendahara BOS Tahun atas penerimaan pajak restoran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2021 pada SDN dan SMP	37.933.707,00		(37.933.707,00)
Penerimaan piutang pajak penerangan jalan sumber lain Tahun 2021 (debet) dan penambahan piutang Tahun 2022 (kredit)	1.067.255.885,00	1.094.177.313,00	26.921.428,00
Penambahan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya		196.431.000,00	196.431.000,00
Penerimaan piutang PBB P2 tahun sebelumnya (debet) dan penambahan Piutang PBB P2 (kredit)	234.887.709,00	2.267.649.883,00	2.032.762.174,00
JUMLAH	1.341.617.576,00	3.558.258.196,00	2.216.640.620,00

Penjelasan selisih tabel diatas diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan piutang pajak restoran Tahun 2021 sebesar Rp1.540.275,00
- Penerimaan pajak restoran sebesar Rp37.933.707,00 yang tercatat pada Kas Lainnya di Bendahara BOS pada SDN dan SMP Tahun 2021.
- Penerimaan piutang pajak penerangan jalan sumber lain Tahun 2021 yang diterima Tahun 2022 sebesar Rp1.067.255.885.,00 dan penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp1.094.177.313,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp26.921.428,00
- Adanya penambahan piutang tahun 2022 atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp196.431.000,00
- Adanya penambahan piutang PBB pada awal tahun 2022 sesuai dengan SKP sebesar Rp4.504.215.953,00 dan penerimaan piutang selama tahun 2022 sebesar Rp2.471.453.779,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.032.762.174,00

a.2. Pendapatan Retribusi Daerah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.947.679.575,54	2.499.784.055,43	447.895.520,11

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp447.895.520,11.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.5
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	2.759.700.350,00	2.947.679.575,54	187.979.225,54
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	252.522.850,00	252.522.850,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	156.483.000,00	168.161.000,00	11.678.000,00
Retribusi Kios	8.020.000,00	8.020.000,00	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	234.152.000,00	234.152.000,00	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	33.300.000,00	33.300.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	45.940.000,00	45.940.000,00	-
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	336.625.000,00	321.421.549,84	(15.203.450,16)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	408.848.500,00	403.105.875,70	(5.742.624,30)
Retribusi Pemakaian Alat	223.490.000,00	223.490.000,00	-
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	12.400.800,00	12.400.800,00	-
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.520.000,00	3.520.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	98.750.000,00	98.750.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	322.760.500,00	495.632.800,00	172.872.300,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	622.887.700,00	647.262.700,00	24.375.000,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO jumlah sebesar Rp187.979.225,54 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.6
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2022

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Piutang retribusi sampah - Dinas DLH	-	11.678.000,00	11.678.000,00
Piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi - Dinas Kominfo	133.650.000,00	112.150.000,00	(21.500.000,00)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan :			-
BKD - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa tanah menara telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Kontrak Nomor:415.4/14/BUP-2018 Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018, jangka waktu 17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023	-	6.296.549,85	6.296.549,85
BKD - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka ATM Bank Nagari dengan Nomor Kontrak 030/654/BKD-XII/2017, jangka waktu 20 Juni 2016 s.d 30 Nov 2022		5.597.152,25	5.597.152,25
Dinas Pendidikan - Penerimaan Piutang Sewa Rumah Dinas	5.226.000,00		(5.226.000,00)
Dinas Kesehatan - Pendapatan Sewa ATM		2.996.715,93	2.996.715,93
RSUD Sungai Dareh-Sewa ATM		9.758.733,60	9.758.733,60
Dinas Perkimtan - Sewa Rusunawa	11.558.064,52	12.327.380,65	769.316,13
Sekretariat Daerah - Sewa ATM	19.660.460,02	21.917,80	(19.638.542,22)
Dinas PUPR - Piutang SPAM	37.013.100,00	209.885.400,00	172.872.300,00
Dinas PM-PTSP - Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan		24.375.000,00	24.375.000,00
JUMLAH	207.107.624,54	395.086.850,08	187.979.225,54

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp187.867.664,25 pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.678.000,00 merupakan penambahan piutang retribusi sampah tahun 2022 yang sampai laporan keuangan ini disusun belum diterima.
- 2) Adanya pengurangan pendapatan LO sebesar Rp21.500.000,00 pada Dinas Kominfo yang berasal dari:
 - Penerimaan piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2019 sebesar Rp2.750.000,00, tahun 2021 sebesar Rp130.000.000,00 dengan total penerimaan piutang selama tahun 2022 sebesar Rp133.650.000,00
 - Penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp111.150.000,00 dan kompensasi kelebihan bayar pembayaran keterlanjuran dari Perusahaan Protelindo pada tahun 2021 sebesar Rp1.000.000 sehingga total penambahan piutang di tahun 2022 sebesar Rp112.150.000,00

3) Adanya pengurangan retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang terdapat pada SKPD:

- Pada BKD adanya penambahan pendapatan retribusi sebesar Rp6.296.549,85 yang merupakan Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka sewa tanah Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Kontrak Nomor:415.4/14/BUP-2018 Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018, jangka waktu 17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023
 - BKD sebesar Rp5.597.152,25 berasal dari penambahan Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka ATM Bank Nagari dengan Nomor Kontrak 030/654/BKD-XII/2017, jangka waktu 20 Juni 2016 s.d 30 Nov 2022.
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp5.226.000,00 berasal dari penerimaan piutang sewa rumah dinas tahun 2021 yang telah dibayarkan pada tahun 2022.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp2.996.715,93, berasal dari penambahan sewa ATM oleh Bank Nagari dengan Nomor Kontrak PKS/007/KB/12-2021,jangka waktu 20 Juni 2021 s.d 20 Juni 2026.
 - RSUD Sungai Dareh sebesar Rp9.758.733,60 yang berasal dari penerimaan sisa sewa ATM Payment Point Bank Nagari sebesar Rp618.992,86 yang masa kontraknya berakhir 01 Februari 2022 dan penambahan sewa ATM Payment Point tahun 2021 sebesar Rp9.139.740,74
 - Dinas Perkimtan terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp769.316,13 yang berasal dari penambahan pendapatan atas piutang tahun 2022 sebesar Rp604.800,00, penambahan pendapatan atas pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp11.722.580,65.
Selain itu, terdapat pengurangan pendapatan sebesar Rp11.588.064,52 yang berasal dari pendapatan diterima dimuka tahun 2022.
 - Sekretariat Daerah terdapat penambahan pendapatan dari penerimaan sewa ATM sebesar Rp21.917,81 tahun 2021 dan pengurangan pendapatan atas sewa ATM tahun 2022 sebesar Rp19.660.460,00.
- 4) Pada Dinas PUPR terdapat penerimaan piutang SPAM tahun sebelumnya sebesar Rp37.013.100,00 di tahun 2022 dan adanya penambahan piutang di tahun 2022 sebesar Rp209.885.400,00.
- 5) Dinas PMPTSP terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp24.375.000,00 yang berasal dari penambahan pendapatan atas piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.313.781.006,00	10.284.830,00	4.303.496.176,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp4.303.496.176,00.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara LRA dan LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.324.065.836,00	4.325.813.847,00	1.748.011,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	4.324.065.836,00	4.325.813.847,00	1.748.011,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LO jumlah sebesar Rp1.748.011,00 merupakan selisih penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di tahun 2021 sebesar Rp10.284.830,00.dan penerimaan piutang deviden atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung tahun 2022 sebesar Rp12.032.841,00.

a.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.1	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	65.790.319.444,28	68.868.917.011,55	612.925.847,83

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp612.925.847,83

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya -LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.8
Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	79.292.868.316,34	68.255.991.163,72	(11.036.877.152,62)
Hasil Penjualan Tanaman	-	-	-
Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-
Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.130.369.548,00	184.081.417,00	(946.288.131,00)
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	102.704.000,00	100.404.000,00	(2.300.000,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.289.885.522,00	1.289.885.522,00	-
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	162.151.172,00	162.031.759,00	(119.413,00)
Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	-	652.261,32	652.261,32
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.047.851.066,94	-	(3.047.851.066,94)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.181.107.944,40	3.181.167.944,40	60.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.622.160,00	10.622.160,00	-
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	75.563.294,00	75.563.294,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	309.331.877,00	309.331.877,00	-
Pendapatan BLUD	62.787.950.607,00	55.719.713.304,00	(7.068.237.303,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.195.331.125,00	7.222.537.625,00	27.206.500,00

Penjelasan perbedaan Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO jumlah sebesar Rp11.036.877.152,62 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.9
 Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2022

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penjualan aset daerah yang dipisahkan	946.288.131,00		(946.288.131,00)
Penerimaan pendapatan atas piutang pelayan pasar tahun 2021	2.300.000,00		(2.300.000,00)
koreksi penerimaan jasa giro kas di BOS yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2021 pada 5 Sekolah, sudah disetor ke kasda di tahun 2022	566.537,00	447.124,00	(119.413,00)
Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)		652.261,32	652.261,32
Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (TGR) sesuai SKP2KS selama tahun 2022		3.209.252.445,86	3.209.252.445,86

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penerimaan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (TGR) tahun 2022	3.042.494.570,92		(3.042.494.570,92)
Koreksi TGR sebesar Rp 3.209.267.707,88 dan Aset Lainnya Rp5.351.234,00	3.214.608.941,88		(3.214.608.941,88)
Penambahan piutang lain-lain PAD atas denda retribusi pada Perkimtan		60.000,00	60.000,00
Pendapatan Jasa Layanan BLUD	13.299.429.523,00	6.231.192.220,00	(7.068.237.303,00)
Pendapatan Kapitasi	1.548.100,00	28.754.600,00	27.206.500,00
JUMLAH	20.507.235.803,80	9.470.358.651,18	(11.036.877.152,62)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp13.497.328.872,06 pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pada Badan Keuangan Daerah terdapat selisih sebesar Rp946.288.131,00 yang terdiri dari:

- Penerimaan Penjualan bongkaran aset tetap gedung sekolah SDN 04 Sungai Rumbai tahun 2021 yang disetor ke kasda tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp900.000,00.
- Reklasifikasi Penerimaan atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan-LO atas lelang aset tercatat di surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp900.000,00.
- Pelelangan aset tahun 2022 sebanyak dua kali kegiatan dengan nilai buku nol sebesar Rp938.819.198,00
- penjualan lelang mobil wakil bupati sebesar Rp5.668.933,00 dengan nilai Buku Rp96.616.667,00 terjual Rp102.285.600,00

2) Pada Dinas Kumperdag sebesar Rp2.300.000,00 merupakan penerimaan piutang pelayanan pasar tahun 2021.

3) Pada Badan Keuangan Daerah terdapat :

- pengurangan pendapatan sebesar Rp119.413,00 yang berasal selisih koreksi penerimaan jasa giro kas di BOS yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2021 pada 5 Sekolah, sudah disetor ke kasda di tahun 2022.
- penambahan pendapatan sebesar Rp3.047.851.066,94 yang berasal dari penambahan piutang TGR tahun 2022 sebesar Rp3.209.252.444,86, Penerimaan piutang TGR tahun 2021 sebesar Rp3.042.494.570,92, dan koreksi TGR sebesar Rp 3.209.267.707,88 dan Aset Lainnya Rp5.351.234,00
- Adanya penambahan lain-lain PAD pada penerimaan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp60.000,00 atas denda retribusi sewa rusunawa pada dinas Perkimtan.

4) Pada Pendapatan Jasa Layanan BLUD terdapat selisih sebesar Rp12.742.585.703,00 yang berasal dari :

- BLUD Puskesmas sebesar Rp841.771.335,00 yang berasal dari selisih piutang tahun 2021 sebesar Rp1.243.689.000,00 dengan penambahan piutang tahun 2022 yang berasal dari lebih salur kon kapitasi Puskesmas Koto Besar Tahun 2021 sebesar Rp1.100.000,00 dan penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp400.817.665,00

- BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp11.900.814.368,00 yang berasal dari selisih penerimaan piutang tahun 2021 sebesar Rp12.055.740.523,00 dengan penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp154.926.155,00.
- 5) Pada Pendapatan Kapitasi Puskesmas terdapat selisih sebesar Rp27.206.500,00 yang berasal dari selisih penambahan piutang kapitasi tahun 2022 sebesar Rp1.102.200,00, lebih salur Tahun 2021 sebesar Rp12.203.800, pemotongan kapitasi karena temuan BPK RI tahun 2021 sebesar Rp6.138.100,00 dan Kelebihan bayar tahun 2021 sebesar Rp9.310.500,00 dengan penerimaan piutang kapitasi tahun 2021 sebesar Rp1.548.100,00.

b. Pendapatan Transfer

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Transfer	788.731.551.572,00	835.428.784.613,00	(46.697.233.041,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp46.697.233.041,00.

Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3.10
Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2022

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
8.2.	Pendapatan Transfer	786.316.021.026,00	788.731.551.572,00	2.415.530.546,00
8.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	673.400.378.483,00	676.259.778.652,00	2.859.400.169,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	23.514.204.916,00	26.203.605.085,00	2.689.400.169,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	5.871.006.918,00	5.871.006.918,00	-
	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.358.368.549,00	472.528.368.549,00	170.000.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	171.656.798.100,00	171.656.798.100,00	-
8.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	54.283.677.000,00	54.283.677.000,00	-
	Dana Penyesuaian	54.283.677.000,00	54.283.677.000,00	-
8.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	58.631.965.543,00	58.188.095.920,00	(443.869.623,00)
	Pendapatan bagi Hasil Pajak	58.631.965.543,00	58.188.095.920,00	(443.869.623,00)
	Pendapatan bagi Hasil Lainnya	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO jumlah sebesar Rp2.415.530.546,00 berasal dari :

- Pendapatan transfer dana DBH melalui mekanisme TDF sebesar Rp2.689.400.169,00
- Pemotongan DAU untuk penggantian dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sesuai KMK Nomor 34/KM.7/2021 sebesar Rp170.000.000,00
- selisih penerimaan piutang DBH Propinsi sebesar Rp443.869.623,00 yang berasal dari piutang tahun 2021 sebesar Rp9.630.356.468,00 dan penambahan piutang DBH Propinsi Tahun 2022 sebesar Rp9.186.486.845,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Hibah	62.593.326.137,23	122.122.055.776,00	59.528.729.638,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp59.528.729.638,77.

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3.11
Perbedaan Lain-lain Pendapatan yang sah antara LRA dan LO Tahun 2022

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
8.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	16.580.071.607,00	62.593.326.137,23	46.013.254.530,23
	Pendapatan Hibah	16.580.071.607,00	62.593.326.137,23	46.013.254.530,23
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA	16.486.530.000,00	62.496.784.530,23	46.010.254.530,23
	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri – LRA	93.541.607,00	96.541.607,00	3.000.000,00

Penjelasan perbedaan Lain-lain Pendapatan yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang sah - LO jumlah sebesar Rp46.298.852.306,23 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp46.010.254.530,23 terdiri dari :
 - a. Penambahan pendapatan dari hibah persediaan sebesar Rp5.312.742.976,23, terdiri dari

- Dinas Kesehatan sebesar Rp4.395.929.674,23
 - BLUD Puskesmas sebesar Rp31.197.000,00
 - Dinas Sosial sebesar Rp413.290.802,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp472.325.500,00
- b. Penambahan pendapatan dari hibah aset sebesar Rp40.697.511.554,00 terdiri dari :
- Dinas Pendidikan sebesar Rp4.201.667.724,00 berupa Gedung dan Bangunan.
 - BLUD RSUD sebesar Rp213.345.000,00 berupa peralatan mesin
 - Dinas PUPR sebesar Rp11.344.024.075,00 berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Perkintan sebesar Rp22.127.064.330,00 berupa peralatan mesin sebesar Rp1.616.520.300,00 dan gedung bangunan sebesar Rp20.510.544.000,00
 - Dinas Sosial sebesar Rp271.700.000,00,00 berupa peralatan mesin
 - Dinas Dispackan sebesar Rp1.371.000.000,00 berupa peralatan mesin
 - Dinas Pertanian sebesar Rp1.168.710.425,00 berupa peralatan mesin sebesar Rp635.328.425,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp533.382.000,00
2. Penambahan pendapatan hibah dari badan lembaga/organisasi swasta dalam Negeri sebesar Rp3.000.000,00 berasal dari hibah tanah pada dinas pendidikan.

V.D.2. Beban

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	BEBAN	956.651.404.718,46	923.556.448.119,09	33.094.956.599,37

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban transfer. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp33.094.956.599,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.12
Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	BEBAN	956.651.404.718,46	923.556.448.119,09	33.094.956.599,37
9.1.1.	Beban Pegawai	380.917.803.230,71	382.354.718.195,46	(1.436.914.964,75)
9.1.2	Beban Persediaan	108.439.121.892,65	72.600.984.126,33	35.838.137.766,32
9.1.2	Beban Jasa	110.592.860.111,88	98.084.318.217,81	12.508.541.894,07
9.1.2	Beban Sewa	4.396.584.495,00	2.509.976.767,12	1.886.607.727,88
9.1.2	Beban Pemeliharaan	12.208.329.617,99	11.196.376.603,00	1.011.953.014,99

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	60.814.621.826,00	47.517.031.727,00	13.297.590.099,00
9.1.5	Beban Hibah	12.430.936.621,00	21.567.610.832,00	(9.136.674.211,00)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
9.1.7	Beban Penyusutan Aset tetap	142.485.894.523,18	156.458.476.461,00	(13.972.581.937,82)
9.1.7	Beban Penyusutan Aset lain-lailalailainlain	9.620.162.458,00	11.678.665.931,90	(2.058.503.473,90)
9.1.7	Beban Amortisasi	326.837.200,00	336.657.078,83	(9.819.878,83)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	3.187.423.217,05	3.573.789.229,02	(386.366.011,97)
9.1.9	Beban Transfer	109.572.502.947,00	112.110.404.801,00	(2.537.901.854,00)
9.1.9	Beban Transfer	1.658.326.578,00	3.567.438.148,62	(1.909.111.570,62)

a. Beban Pegawai

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1.	Beban Pegawai	380.917.803.230,71	382.354.718.195,46	(1.436.914.964,75)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp1.436.914.964,75 yang dipengaruhi antara lain berkurangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja dan honor pengelola keuangan dibayarkan 11 (sebelas) bulan.

Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Beban Pegawai BLUD, Beban Pegawai Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.13
Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
9.1.1	Beban Pegawai	380.917.803.230,71	382.354.718.195,46	(1.436.914.964,75)
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	234.565.378.676,27	240.631.981.156,00	(6.066.602.479,73)
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	49.761.115.698,00	45.783.786.049,00	3.977.329.649,00
9.1.1.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.580.155.782,00	62.836.372.488,00	(256.216.706,00)
9.1.1.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.139.769.705,00	12.273.970.318,00	(1.134.200.613,00)
9.1.1.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	421.250.373,00	478.985.416,00	(57.735.043,00)
9.1.1.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	484.210.000,00	490.716.000,00	(6.506.000,00)
9.1.1.07.	Uang Lembur - LO	-	-	-

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
9.1.1.08.	Honorarium PNS LO	-	-	-
9.1.1.09.	Honorarium Non PNS LO	-	-	-
9.1.1.10.	Beban Pegawai BLUD	21.965.922.996,44	19.858.906.768,46	2.107.016.227,98

Saldo Beban Pegawai tersebut adalah jumlah *netto* setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama Tahun 2022.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.14
Perbedaan Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LO (Rp)	Selisih +/- (Rp)
Beban Pegawai	380.048.882.570,44	380.917.803.230,71	(868.920.660,27)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	233.684.985.584,00	234.565.378.676,27	(880.393.092,27)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	49.761.115.698,00	49.761.115.698,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.864.403.465,00	62.580.155.782,00	284.247.683,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.139.769.705,00	11.139.769.705,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	421.250.373,00	421.250.373,00	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	484.210.000,00	484.210.000,00	-
Beban Pegawai BLUD	21.693.147.745,44	21.965.922.996,44	(272.775.251,00)

Penjelasan perbedaan belanja pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO jumlah sebesar Rp868.920.660,27 dapat dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.336.031.984,27	455.638.892,00	(880.393.092,27)
Utang belanja pegawai	375.451.401,00	114.133.833,00	(261.317.568,00)
Beban pegawai menambah nilai persediaan		211.650.000,00	211.650.000,00
Beban pegawai menambah nilai aset		61.140.000,00	61.140.000,00
JUMLAH	1.711.483.385,27	842.562.725,00	(868.920.660,27)

Penjelasan Selisih

a. Penyesuaian atas Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp880.393.092,27, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.15
Penjelasan Selisih Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) antara LRA dan LO Tahun 2022

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.336.031.984,27	455.638.892,00	(880.393.092,27)
Belanja dibayar dimuka Tahun 2021 atas kelebihan bayar iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) 1% dari TPP sebesar Rp207.710.735,00 dan 4% dari Gaji Induk/TPP/TPG - Dinas Pendidikan	1.335.111.850,00	34.917.201,00	
utang PFK atas adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pada :	920.134,27	420.721.691,00	
Dinas Pendidikan		278.061.440,00	
Dinas Kesehatan :			
- Jasa Medis RSUD Sungai Rumbai		856.970,00	
- Jasa Pelayanan Puskesmas	757.524,27	108.461.804,00	
- Gaji Dinas Kesehatan	162.610,00		
RSUD Sungai Dareh		33.341.477,00	

Penjelasan selisih utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai berikut :

- Belanja dibayar dimuka Tahun 2021 atas kelebihan bayar iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) 1% dari TPP sebesar Rp207.710.735,00 dan 4% dari Gaji Induk/TPP/TPG sebesar Rp1.127.401.115,00, merupakan beban pegawai Tahun 2022.
 - Penambahan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesarRp920.134,27, merupakan utang atas Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan. Utang tersebut dikarenakan adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). terdiri dari Jasa Pelayanan Puskesmas sebesar Rp757.524,27 dan Gaji Dinas Kesehatan sebesar Rp162.610,00.
 - Belanja dibayar dimuka Tahun 2022 atas kelebihan bayar iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) 4% dari Gaji Induk/TPP/TPG sebesar Rp34.917.201,00.
 - Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp420.721.691,00 merupakan utang atas Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan. Utang tersebut dikarenakan adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
- b. Penyesuaian atas utang belanja pegawai sebesar Rp256.007.811,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.16

Penjelasan Selisih Utang Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2022

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.055.703,00	91.513.386,00	11.457.683,00
BKD - Utang Insentif Pemungutan Pajak daerah	47.663.953,00	91.169.999,00	-
BKD - Utang Insentif Pemungutan Retribusi daerah	32.048.363,00	-	-
Beban Pegawai BLUD	295.395.698,00	22.620.447,00	(272.775.251,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas	295.395.698,00	22.620.447,00	-
Jumlah	375.451.401,00	114.133.833,00	(261.317.568,00)

Penjelasan selisih utang belanja pegawai sebagai berikut :

- Penambahan utang belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan merupakan utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak daerah sebesar Rp47.663.953,00, terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp31.726.453,00 dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp15.937.500,00.
- Penambahan utang belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan merupakan utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi daerah sebesar Rp32.048.363,00, dengan rincian sebagai berikut:

1)	retribusi parkir	125.000,00
2)	retribusi IMB	30.000.000,00
3)	Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	400.000,00
4)	Retribusi Penyedotan Kakus	1.500.000,00
5)	Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan	23.363,00
	Jumlah	32.048.363,00

- Penambahan Utang Belanja Jasa Layanan pada Puskesmas sebesar Rp295.395.698,00, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Puskesmas Sungai Rumbai	7.049.800,00
2)	Puskesmas Koto Besar	37.504.543,00
3)	Puskesmas Koto Baru	23.324.739,00
4)	Puskesmas Tiumbang	45.767.084,00
5)	Puskesmas Padang Laweh	2.276.097,00
6)	Puskesmas Sitiung I	15.893.518,00
7)	Puskesmas Timpeh	22.782.001,00
8)	Puskesmas Sitiung II	2.265.250,00
9)	Puskesmas Beringin Sakti	21.535.542,00
10)	Puskesmas Silago	34.605.384,00

11)	Puskesmas Sungai Dareh	54.898.440,00
12)	Puskesmas Sialang	<u>27.493.300,00</u>
	Jumlah	295.395.698,00

- Pembayaran utang belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan utang Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp91.169.999,00 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 862.1/50/KPTS-BKD/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut / Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2021 di Kabupaten Dharmasraya.

Pengurangan belanja pegawai

- Pembayaran Utang Belanja Jasa Layanan sebesar Rp22.620.447,00 pada Puskesmas Sungai Rumbai sebesar Rp3.865.338,00, Puskesmas Koto Besar sebesar Rp17.022.000,00 dan Puskesmas Padang Laweh sebesar Rp1.733.109,00.
- c. Penyesuaian untuk mengakui beban pegawai menambah nilai persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp211.650.000,00.
- d. Penyesuaian pengurangan untuk mengakui beban pegawai menambah nilai aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp61.140.000,00.

b. Beban Persediaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
9.1.2.b	Beban Persediaan	108.439.121.892,65	72.600.984.126,33	35.838.137.766,32

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan dalam Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp35.838.137.766,32.

Beban Persediaan ini terdiri dari beban pakai habis, beban bahan material, beban cetak dan penggandaan serta beban persediaan BLUD dan beban persediaan BOS, yaitu :

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.17
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun2022

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan	110.964.505.897,62	108.439.121.892,65	2.525.384.004,97
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	179.500.000,00	488.046.083,50	(308.546.083,50)
Beban Bahan-Bahan Kimia	9.987.740,00	15.697.413,00	(5.709.673,00)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.274.657.561,00	5.217.586.301,61	57.071.259,39
Beban Bahan-Bahan Baku	2.650.200.000,00	200.000,00	2.650.000.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	134.480.000,00	134.480.000,00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	36.562.700,00	36.562.700,00	-
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	181.850.000,00	200.467.500,00	(18.617.500,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	125.626.840,00	192.826.840,00	(67.200.000,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	399.207.252,00	834.359.308,30	(435.152.056,30)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	149.371.210,00	798.980.667,00	(649.609.457,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	148.232.400,00	148.232.400,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	879.000,00	879.000,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.559.000,00	14.559.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.483.175,00	2.565.786.081,00	(65.302.906,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	881.191.380,00	866.187.534,41	15.003.845,59
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.022.940.102,00	2.047.755.102,00	(24.815.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	204.540.000,00	203.700.000,00	840.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	938.855.800,00	834.316.950,00	104.538.850,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	810.846.685,00	812.155.435,00	(1.308.750,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	335.102.411,00	487.142.811,00	(152.040.400,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	35.390.000,00	35.390.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	300.430.000,00	300.430.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	95.474.000,00	95.474.000,00	-
Beban Obat-Obatan-Obat	1.329.225.956,00	974.268.339,79	354.957.616,21
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.640.677.244,00	505.064.749,00	1.135.612.495,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.923.094.997,70	41.708.040.458,81	4.215.054.538,89
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	363.328.188,92	1.169.435.540,00	(806.107.351,08)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Ketiga/Pihak Lain			
Beban Natura dan Pakan-Natura	1.118.124.000,00	1.134.390.000,00	(16.266.000,00)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	143.320.000,00	143.320.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.884.869.919,00	5.867.049.919,00	17.820.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.674.189.450,00	2.674.189.450,00	-
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.850.000,00	7.850.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	22.040.000,00	22.040.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	74.314.000,00	74.314.000,00	-
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	407.488.200,00	407.488.200,00	-
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	95.238.000,00	95.238.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	119.547.000,00	119.547.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.955.000,00	44.955.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	196.866.152,00	196.866.152,00	-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	55.278.000,00	55.278.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	169.125.000,00	169.125.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	35.750.000,00	35.750.000,00	-
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	2.997.000,00	2.997.000,00	-
Beban Pakaian Adat Daerah	32.700.000,00	32.700.000,00	-
Beban Pakaian Batik Tradisional	585.499.500,00	585.499.500,00	-
Beban Pakaian Olahraga	96.880.000,00	96.880.000,00	-
Beban Pakaian Paskibraka	243.713.376,00	243.713.376,00	-
Beban Persediaan Dana BLUD - LO	21.305.173.927,00	24.869.920.068,24	(3.564.746.141,24)
Beban Persediaan Dana BOS - LO	10.961.893.731,00	10.871.987.013,00	89.906.718,00

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp2.525.384.004,97 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.18
Selisih Belanja Persediaan LRA dan LO Tahun 2022

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Saldo persediaan awal tahun	38.086.898.001,69		(38.086.898.001,69)
Saldo persediaan akhir tahun		46.047.259.249,88	46.047.259.249,88
Utang belanja persediaan tahun 2021		5.889.651.668,20	5.889.651.668,20
utang belanja persediaan tahun 2022	4.913.889.467,00		(4.913.889.467,00)
Penyesuaian belanja Persediaan berasal dari belanja modal	832.032.247,00		(832.032.247,00)
Penyesuaian belanja Persediaan berasal dari hibah	5.312.742.976,23	-	(5.312.742.976,23)
Penyesuaian belanja Persediaan menambah nilai aset		109.406.718,00	109.406.718,00
Koreksi Penambahan Persediaan	10.370.317,20		(10.370.317,20)
Penambahan persediaan reklas dari beban pegawai, beban jasa dan beban perjalanan dinas	1.518.895.622,00		(1.518.895.622,00)
Reklas Persediaan telah diserahkan kepada masyarakat berasal dari Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021		1.153.895.000,00	1.153.895.000,00
JUMLAH	50.674.828.631,12	53.200.212.636,08	2.525.384.004,97

Penjelasan selisih :

1. Penyesuaian persediaan yang terpakai pada Tahun 2021 sebesar Rp38.086.898.001,69 dan yang masih menjadi persediaan (*stock*) pada Tahun 2022 sebesar Rp46.047.259.249,88 berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2022.
2. Penyesuaian utang belanja persediaan Tahun 2022 sebesar Rp4.913.889.467,00 didebet dan Tahun 2021 yang mengurangi beban persediaan sebesar Rp5.889.651.668,20 dikredit, dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel. 5.3.19
Penyesuaian utang belanja persediaan Tahun 2022

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
BLUD RSUD SUNGAI DAREH	-	-	-
Utang belanja bahan pakai habis/ kedokteran	2.236.146.458,00	3.008.883.560,00	772.737.102,00
Utang belanja bahan obat-obatan	1.808.320.421,00	2.123.091.982,00	314.771.561,00
Utang belanja bahan laboratorium	534.771.384,00	621.570.008,00	86.798.624,00
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI	-	-	-

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang bahan medis habis pakai/ suku cadang alat kedokteran	108.761.056,55	81.598.472,00	(27.162.584,55)
Utang obat dan bahan medis habis pakai pada Rsud Sungai Rumbai	225.890.147,45	48.510.396,20	(177.379.751,25)
BLUD PUSKESMAS KOTO BESAR		-	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5.802.250,00	5.802.250,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (oksigen)		195.000,00	195.000,00
JUMLAH	4.913.889.467,00	5.889.651.668,20	975.762.201,20

3. Penambahan persediaan berasal dari belanja modal sebesar Rp832.032.247,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.20
Penyesuaian belanja persediaan berasal dari belanja modal Tahun 2022

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DINAS PENDIDIKAN			-
Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	649.609.457,00		(649.609.457,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000.000,00		(15.000.000,00)
Belanja Modal Diserahkan kepada Masyarakat	1.558.800,00		(1.558.800,00)
Belanja Modal Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	62.078.990,00		(62.078.990,00)
DINAS PUPR	103.785.000,00		(103.785.000,00)
Jumlah	832.032.247,00	-	(832.032.247,00)

4. Penambahan persediaan non APBD sebesar Rp5.312.742.976,23, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3.21
Penambahan persediaan non APBD Tahun 2022

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan	4.395.929.674,23		(4.395.929.674,23)
BLUD RSUD Sungai Rumbai	31.197.000,00		(31.197.000,00)
Dinas Sosial	413.290.802,00		(413.290.802,00)
Dinas Pertanian	472.325.500,00		(472.325.500,00)
Jumlah	5.312.742.976,23	-	(5.312.742.976,23)

5. Penyesuaian beban persediaan menambah nilai aset peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp80.921.898,00, RSUD Sungai Dareh sebesar Rp19.500.000,00.
6. Penyesuaian beban persediaan menambah nilai aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.984.820,00.
7. Adanya koreksi penambahan nilai persediaan sebesar Rp10.370.317,20, merupakan persediaan obat-obatan pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp1.359.603,20 dan Dinas Sosial sebesar Rp9.010.714,00.
8. Penyesuaian penambahan persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.518.895.622,00, yang berasal dari reklas dari beban pegawai sebesar Rp211.650.000,- beban jasa sebesar Rp1.050.400.000,00 dan beban perjalanan dinas sebesar Rp256.845.622,00
9. Reklas Persediaan telah diserahkan kepada masyarakat berasal dari Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 ke Beban hibah sebesar Rp1.153.895.000,00.

c. Beban Jasa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.b	Beban Jasa	110.592.860.111,88	98.084.318.217,81	12.508.541.894,07

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp12.508.541.894,07.

Beban Jasa ini terdiri dari beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban jasa konsultasi dan beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta beban jasa BLUD dan beban jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.22
Perbedaan Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa	111.000.868.509,38	110.592.860.111,88	408.008.397,50
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.022.863.300,00	1.022.863.300,00	-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.653.790.000,00	2.652.740.000,00	1.050.000,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	86.400.000,00	86.400.000,00	-
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	100.500.000,00	100.500.000,00	-
Beban Honorarium Rohaniwan	4.750.000,00	4.750.000,00	-
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	120.000.000,00	120.000.000,00	-
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	9.250.000,00	9.250.000,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.900.000,00	4.900.000,00	-
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	619.200.000,00	619.200.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.038.280.000,00	4.038.280.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.768.006.787,52	2.768.006.787,52	-
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	93.112.992,00	93.112.992,00	-
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.485.360.000,00	4.485.360.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	-	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	-	-	-
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.001.600.000,00	2.001.600.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	-	-	-
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	-	-	-
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	308.200.000,00	308.200.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	15.335.900.000,00	14.914.700.000,00	421.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	304.600.000,00	304.600.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	510.657.950,00	510.657.950,00	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.710.630.000,00	3.710.630.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.833.910.000,00	3.833.910.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Supir	2.432.255.000,00	2.432.255.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	400.600.000,00	400.600.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	80.570.000,00	80.570.000,00	-
Beban Jasa Tata Rias	615.095.650,00	615.095.650,00	-
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	89.358.500,00	89.358.500,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	143.735.000,00	143.735.000,00	-
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	57.800.000,00	57.800.000,00	-
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	27.000.000,00	-
Beban Jasa Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-
Beban Jasa Pengolahan Sampah	71.899.272,00	71.899.272,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	31.200.000,00	31.200.000,00	-
Beban Jasa Pengukuran Tanah	10.835.500,00	10.835.500,00	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.359.165.200,00	1.359.165.200,00	-
Beban Tagihan Telepon	1.076.158.167,00	1.076.158.167,00	-
Beban Tagihan Air	57.123.200,00	56.538.200,00	585.000,00
Beban Tagihan Listrik	3.755.232.847,00	3.761.401.596,88	(6.168.749,88)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	51.520.000,00	51.520.000,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	927.811.946,00	927.811.946,00	-
Beban Paket/Pengiriman	1.212.372,00	1.212.372,00	-
Beban Penambahan Daya	11.420.000,00	11.420.000,00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	256.962.100,00	256.967.900,00	-
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	5.371.547.647,00	5.371.547.647,00	(5.800,00)
Beban Pengolahan Air Limbah	-	-	-
Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	-	-	-
Beban Lembur	819.150.000,00	819.150.000,00	-
Beban Medical Check Up	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Beban Insentif Tenaga Keseatan Vaksinator	473.000.000,00	473.000.000,00	-
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	3.227.595.057,00	3.227.595.057,00	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	839.643.840,00	839.643.840,00	-
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	-	-	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.844.301.200,00	8.844.301.200,00	-
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	413.800.800,00	413.800.800,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	227.492.639,00	227.492.639,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	284.365.801,00	284.365.801,00	-
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	359.085.625,00	340.442.383,89	18.643.241,11
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	11.970.000,00	11.970.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	-	-	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.215.879.500,00	1.840.279.500,00	375.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	14.966.000,00	14.966.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	373.300.000,00	119.700.000,00	253.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	268.686.600,00	268.686.600,00	-
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	189.588.000,00	189.588.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	-	-	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	409.759.400,00	409.759.400,00	-
Beban Sosialisasi	-	-	-
Beban Bimbingan Teknis	1.345.263.125,00	1.345.263.125,00	-
Beban Diklat Kepemimpinan	702.774.022,00	702.774.022,00	-
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.454.600.000,00	1.454.600.000,00	-
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	-	-
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-	-	-
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-
Beban Jasa dana BLUD - LO	17.116.182.113,86	17.772.677.407,59	(656.495.293,73)
Beban Jasa dana BOS - LO	12.130.051.356,00	12.130.051.356,00	-

Penjelasan perbedaan belanja jasa-LRA dengan jasa-LO sebesar Rp408.008.397,50 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.23
Selisih Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2022

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang belanja jasa	5.422.689.352,88	4.761.046.609,27	(661.642.743,61)

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Premi asuransi barang milik daerah	223.112.084,04	241.755.325,15	18.643.241,11
Belanja barang dan jasa menambah nilai persediaan		1.050.400.000,00	1.050.400.000,00
Belanja barang dan jasa menambah nilai aset		1.050.000,00	1.050.000,00
Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS RSUD Sungai Dareh yang terpotong biaya transfer pada RSUD Sungai Dareh	436.300,00	-	(436.300,00)
Pencatatan Pendapatan Penjualan Aset pelelangan melalui KPKNL yang terpotong biaya transfer pada Badan Keuangan Daerah	5.800,00	-	(5.800,00)
JUMLAH	5.646.243.536,92	6.054.251.934,42	408.008.397,50

Penjelasan selisih :

a.) Selisih penyesuaian utang belanja jasa sebesar Rp661.642.743,61, yaitu.

Tabel. 5.3.24
Penyesuaian utang belanja jasa Tahun 2022

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
BLUD RSUD SUNGAI DAREH	4.986.017.429,00	3.925.873.455,00	(1.060.143.974,00)
Utang Jasa Pelayanan Kesehatan	4.781.092.534,00	3.925.873.455,00	(855.219.079,00)
Utang Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	120.108.645,00		(120.108.645,00)
Utang belanja Tim Verifikasi (PAK) dan Tim Penilai (PAK)	21.700.000,00		(21.700.000,00)
Utang PFK atas adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)	63.116.250,00		(63.116.250,00)
RSUD SUNGAI RUMBAI	220.089.582,00	580.659.326,00	360.569.744,00
Pembayaran Utang 2021 :			
Jasa Pelayanan dan Jasa Pelayanan Covid		467.064.400,00	467.064.400,00
Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS Tahun		113.594.926,00	113.594.926,00
Penambahan utang 2022 :			
Utang Jasa Pelayanan Covid-19	12.786.400,00		(12.786.400,00)
Jasa Pelayanan Pasien BPJS	161.009.822,00		(161.009.822,00)
Jasa Pelayanan Pasien Umum	44.246.560,00		(44.246.560,00)
Operasional Ambulance	2.046.800,00		(2.046.800,00)
BLUD PUSKESMAS	201.421.685,00	247.359.777,27	45.938.092,27
Penerimaan Utang 2021 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS pada Puskesmas :		245.332.027,27	245.332.027,27

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Sungai Rumbai		1.187.262,00	
Koto Besar		57.076.954,27	
Sungai Limau		33.000,00	
Koto Baru		84.883.680,00	
Tiumang		17.359.060,00	
Padang Laweh		1.775.691,00	
Sitiung I		48.816.060,00	
Timpeh		22.027.380,00	
Gunung Medan		3.813.180,00	
Sitiung II		1.721.000,00	
Beringin Sakti		1.148.400,00	
Silago		5.205.360,00	
Sungai Dareh		285.000,00	
Penambahan Utang 2022 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS pada Puskesmas	203.844.541,00		(203.844.541,00)
Sungai Rumbai	5.067.300,00		
Koto Besar	36.459.971,00		
Sungai Limau	5.354.400,00		
Koto Baru	13.139.261,00		
Tiumang	24.624.539,00		
Padang Laweh	2.310.303,00		
Sitiung I	8.758.082,00		
Timpeh	30.366.119,00		
Gunung Medan	4.377.200,00		
Sitiung II	2.913.750,00		
Beringin Sakti	80.940,00		
Silago	11.487.816,00		
Sungai Dareh	22.910.760,00		
Sialang	35.994.100,00		
Utang tagihan listrik BLUD Puskesmas Koto Besar		202.750,00	202.750,00
Utang Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan BLUD Puskesmas Koto Besar		1.200.000,00	1.200.000,00
Utang Jasa Tenaga Ahli (pemeriksaan sampel air) BLUD Puskesmas Koto Besar		625.000,00	625.000,00
DPM-PTSP	-	7.154.051,00	7.154.051,00
DPM PTSP - Utang tagihan air 2021		585.000,00	585.000,00
DPM PTSP - Utang tagihan listrik 2021		6.569.051,00	6.569.051,00
DINAS PERHUBUNGAN	12.737.800,88	-	(12.737.800,88)
Dinas Perhubungan - Utang tagihan listrik 2022	12.737.800,88		(12.737.800,88)
JUMLAH	5.422.689.352,88	4.761.046.609,27	(661.642.743,61)

b.) Penyesuaian beban jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp18.643.241,11, sebagai berikut :

Tabel. 5.3.25
Penyesuaian beban jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2022

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah	138.298.412,40	163.874.098,85	25.575.686,45
Premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD	84.813.671,64	12.719.976,99	(72.093.694,65)
Premi asuransi Gedung pada Sekretariat DPRD		65.161.249,32	65.161.249,32
JUMLAH	223.112.084,04	241.755.325,15	18.643.241,11

Penjelasan selisih

- penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2021 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp138.298.412,40 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp84.813.671,64.
 - penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp163.874.098,85 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp12.719.976,99.
 - penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas gedung kantor Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp65.161.249,32.
- c.) Penyesuaian beban jasa menambah nilai persediaan merupakan biaya pendukung untuk perolehan persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.050.400.000,00.
- Beban Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp421.200.000,00
 - Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa sebesar Rp375.600.000,00
 - Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa sebesar Rp253.600.000,00
- d.) Penyesuaian beban jasa atas pengurangan dari beban jasa honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan menambah nilai aset gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.050.000,00.
- e.) Penyesuaian Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan atas Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS RSUD Sungai Dareh yang terpotong biaya transfer pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp436.300,00
- f.) Penyesuaian Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan atas Pencatatan Pendapatan Penjualan Aset pelelangan melalui KPKNL yang terpotong biaya transfer pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp5.800,00.

d. Beban Sewa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.c	Beban Sewa	4.396.584.495,00	2.509.976.767,12	1.886.607.727,88

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Sewa Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp1.886.607.727,88.

Beban sewa ini terdiri dari beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa sarana mobilitas, beban sewa alat berat dan beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor serta beban sewa BLUD dan beban jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Sewa-LRA dengan Beban Sewa-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.26
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Sewa) LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa	4.396.584.495,00	4.396.584.495,00	-
Beban Sewa Excavator	3.800.000,00	3.800.000,00	-
Beban Sewa Alat Pengangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-
Beban Sewa Electric Generating Set	-	-	-
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	290.495.000,00	290.495.000,00	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	225.500.000,00	225.500.000,00	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	96.150.000,00	96.150.000,00	-
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-
Beban Sewa Mebel	386.501.400,00	386.501.400,00	-
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	229.465.000,00	229.465.000,00	-
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-
Beban Sewa Komputer Jaringan	56.700.000,00	56.700.000,00	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	321.470.000,00	321.470.000,00	-
Beban Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	259.926.295,00	259.926.295,00	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	185.000.000,00	185.000.000,00	-
Beban Sewa Bangunan Terbuka	1.925.460.500,00	1.925.460.500,00	-
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	28.000.000,00	28.000.000,00	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	101.120.000,00	101.120.000,00	-
Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	167.530.000,00	167.530.000,00	-
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa dana BLUD - LO	2.250.000,00	2.250.000,00	-
Beban Sewa dana BOS - LO	69.816.300,00	69.816.300,00	-
Beban Sewa	4.396.584.495,00	4.396.584.495,00	-
Beban Sewa Excavator	3.800.000,00	3.800.000,00	-
Beban Sewa Alat Pengangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-
Beban Sewa Electric Generating Set	-	-	-
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	290.495.000,00	290.495.000,00	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	225.500.000,00	225.500.000,00	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	96.150.000,00	96.150.000,00	-

Tidak terdapat perbedaan belanja sewa-LRA dengan beban sewa-LO

e. Beban Pemeliharaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.d	Beban Pemeliharaan	12.208.329.617,99	11.196.376.603,00	1.011.953.014,99

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp1.011.953.014,99.

Beban pemeliharaan ini terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan Beban Pemeliharaan serta beban pemeliharaan BLUD dan beban pemeliharaan BOS.

Perbedaan jumlah Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.27
Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan	17.400.724.874,05	12.208.329.617,99	5.192.395.256,06
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	49.900.000,00	49.900.000,00	-
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah	-	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	99.770.000,00	99.770.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.074.072.700,00	731.072.700,00	343.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set		96.795.500,00	

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
	96.795.500,00		-
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	288.466.200,00	288.466.200,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	11.610.600,00	11.610.600,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.375.538.537,00	1.375.538.537,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.636.707.384,00	1.636.707.384,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	98.152.345,00	98.152.345,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	524.377.962,00	524.377.962,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8.746.700,00	8.746.700,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	309.599.228,00	309.599.228,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	115.811.000,00	115.811.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.500.000,00	2.500.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	366.632.150,00	366.632.150,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	164.210.000,00	164.210.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	203.031.000,00	203.031.000,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	-	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	98.950.000,00	98.950.000,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	246.883.000,00	246.883.000,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	51.500.000,00	51.500.000,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.425.000,00	2.425.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	45.934.000,00	45.934.000,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.425.285.857,99	409.673.121,99	1.015.612.736,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.802.852.402,42	-	2.802.852.402,42
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-	-
Beban Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	70.000.000,00	62.000.000,00	8.000.000,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	598.511.667,64	-	598.511.667,64
Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan	1.139.650.000,00	1.139.650.000,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	-	-	-
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	112.091.900,00	112.091.900,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan dana BLUD - LO	1.653.656.058,00	1.229.237.608,00	424.418.450,00
Beban Pemeliharaan dana BOS - LO	1.174.063.682,00	1.174.063.682,00	-

Penjelasan perbedaan belanja pemeliharaan-LRA dengan beban pemeliharaan-LO sebesar Rp5.192.395.256,06, yaitu :

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Pembayaran utang belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		2.105.000,00	2.105.000,00
Belanja barang dan jasa menambah nilai aset		5.190.290.256,06	5.190.290.256,06
JUMLAH	-	5.192.395.256,06	5.192.395.256,06

Penjelasan selisih :

- Pembayaran utang pemeliharaan ambulan pada Puskesmas Koto Besar sebesar Rp2.105.000,00

- Adanya Belanja Pemeliharaan menambah nilai aset tetap sebesar Rp5.190.290.256,06, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.28
Penyesuaian beban pemeliharaan menambah nilai aset tetap Tahun 2022

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
menambah nilai aset aset peralatan dan mesin :		427.420.199,00	427.420.199,00
Dinas Pangan dan Perikanan - Alat Besar Darat Lainnya		343.000.000,00	
Badan Keuangan Daerah - Bangunan Gedung Kantor		10.945.000,00	
Bappeda - Bangunan Gedung Kantor		30.970.199,00	
Setda - Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		28.400.000,00	
Kecamatan Pulau Punjung - Bangunan Penampung Sekam		8.000.000,00	
BLUD RSUD Sungai Dareh - Beban Pemeliharaan dana BLUD		6.105.000,00	
menambah nilai aset aset gedung dan bangunan :		4.293.141.607,06	4.293.141.607,06
Dinas Perkimtan - Bangunan Gedung Kantor		89.993.150,00	
Dinas Dukcapil - Bangunan Gedung Kantor		149.672.000,00	
Dinas Budparpora - Bangunan Gedung Kantor		40.163.780,00	
Sekretariat Daerah - Bangunan Gedung Kantor		355.000.000,00	
Bappeda - Bangunan Gedung Kantor		88.822.057,00	
Inspektorat - Bangunan Gedung Kantor		130.342.550,00	
Kecamatan Koto Baru - Bangunan Gedung Kantor		119.704.000,00	
Sekretariat Daerah - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		2.802.852.402,42	
Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		516.591.667,64	
menambah nilai aset aset Jalan, Irigasi dan Jaringan :		463.368.450,00	463.368.450,00
Setda - Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		47.160.000,00	
BLUD RSUD Sungai Dareh - Beban Pemeliharaan dana BLUD		416.208.450,00	
menambah nilai aset aset KDP :		6.360.000,00	6.360.000,00
Setda - Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		6.360.000,00	
JUMLAH	-	5.190.290.256,06	5.190.290.256,06

f. Beban Perjalanan Dinas

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	60.814.621.826,00	47.517.031.727,00	13.297.590.099,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp13.297.590.099,00.

Beban perjalanan dinas ini terdiri dari beban perjalanan dinas biasa, beban perjalanan dinas dalam Kota, beban perjanan dinas paket meeting dalam kota, beban perjanan dinas paket meeting luar kota, beban perjalanan dinas BLUD, dan beban perjalanan dinas dalam daerah BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.29
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Perjalanan Dinas)-LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Perjanan Dinas	61.071.467.448,00	60.814.621.826,00	256.845.622,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	45.958.001.438,00	45.794.375.816,00	163.625.622,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.974.483.950,00	11.887.863.950,00	86.620.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	192.600.000,00	186.000.000,00	6.600.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	384.110.000,00	384.110.000,00	
Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	199.991.000,00	199.991.000,00	
Beban Perjalanan Dinas dana BLUD - LO	1.230.261.468,00	1.230.261.468,00	-
Beban Perjalanan Dinas dana BOS - LO	1.132.019.592,00	1.132.019.592,00	-

Penjelasan perbedaan belanja perjalanan dinas-LRA dengan beban perjalanan dinas-LO sebesar Rp256.845.622,00, berupa penyesuaian beban jasa menambah nilai persediaan merupakan biaya pendukung untuk perolehan persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyakat/pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- Beban Beban Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) sebesar Rp163.625.622,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp86.620.000,00
- Beban Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Peningkatan Kapasitas TFL (DAK Air Minum TA.2022) sebesar Rp6.600.000,00

g. Beban Hibah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.5	Beban Hibah	12.430.936.621,00	21.567.610.832,00	(9.136.674.211,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp9.136.674.211,00.

Beban hibah ini terdiri dari :

Tabel 5.3.30
Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

PERKIRAAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	Kenaikan/Penurunan
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah	12.430.936.621,00	21.567.610.832,00	(9.136.674.211,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.199.891.869,00	3.167.600.000,00	(1.967.708.131,00)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.865.825.000,00	(5.865.825.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.783.100.000,00	349.795.417,00	4.433.304.583,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.344.222.400,00	1.819.732.000,00	(475.509.600,00)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.153.895.000,00	9.603.095.795,00	(8.449.200.795,00)
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	-	-
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.152.936.472,00	-	3.152.936.472,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	796.890.880,00	761.562.620,00	35.328.260,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp9.136.674.211,00.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.31
Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah	11.277.041.621,00	12.430.936.621,00	(1.153.895.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.199.891.869,00	1.199.891.869,00	-
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.783.100.000,00	4.783.100.000,00	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.344.222.400,00	1.344.222.400,00	-
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	1.153.895.000,00	(1.153.895.000,00)
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	-	-
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.152.936.472,00	3.152.936.472,00	-

Penjelasan perbedaan belanja hibah-LRA dengan beban hibah-LO sebesar Rp1.153.895.000,00, merupakan Penambahan Beban Hibah atas Persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat berasal dari Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022, yaitu :

Tabel. 5.3.32
Penjelasan Perbedaan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Dinas PUPR	1.153.895.000,00	-	(1.153.895.000,00)
Lanjutan Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai	199.420.000		
Lanjutan Pembangunan Mushalla Al Firdaus Jr. Pulau Sangiek Nagari Sei. Kambut Pl. Punjung (KDP 2020)	155.504.604		
Pagar Mushalla Al Ikhlas Sopan Jaya Padang Laweh	48.267.737		
Pembangunan MCK Spesifikasi : Pembangunan MCK Masjid Assa'id Sungai Rumbai	203.304.157		
Pembangunan MCK Mushalla Assalam Ampang Kuranji	72.011.451		
Rehab Masjid Koto Lamo	77.651.977		
Rehab mesjid Al Ikhlas Jorong Karyatama Nag. Gunung Medan Kec. Sitiung	145.694.995		

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Rehab Mesjid Al Zikra Ranah Tibarau Nagari IV Koto Pulau Punjung (KDP 2020)	155.616.077		
Rehab Mushola Nurul Ikhlas jalan Padang Candi	96.424.002		
Total	1.153.895.000,00	-	(1.153.895.000,00)

h. Beban Bantuan Sosial

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-

Tidak terdapat saldo beban bantuan sosial Tahun 2022.

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	152.432.894.181,18	168.473.799.471,73	(16.040.905.290,55)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp16.040.905.290,55.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari.

PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	152.432.894.181,18	168.473.799.471,73	(16.040.905.290,55)
Beban Penyusutan Aset Tetap	142.485.894.523,18	156.458.476.461,00	(13.972.581.937,82)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	9.620.162.458,00	11.678.665.931,90	(2.058.503.473,90)
Beban Penyusutan Amorisasi Aset Tak Berwujud	326.837.200,00	336.657.078,83	(9.819.878,83)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015.

j. Beban Penyisihan Piutang

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	3.187.423.217,05	3.573.789.229,02	(386.366.011,97)

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp386.366.011,97.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari beban penyisihan piutang pajak, beban penyisihan piutang retribusi, beban penyisihan piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, beban penyisihan piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, beban penyisihan piutang transfer dan beban penyisihan piutang lainnya.

Saldo Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. 5.3.33
Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021

PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyisihan Piutang	3.187.423.217,05	3.573.789.229,02	(386.366.011,97)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.209.191.522,90	2.138.225.254,46	70.966.268,44
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	160.385.428,00	92.328.636,00	68.056.792,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	8.740,06	51.424,15	(42.684,09)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	830.888.278,09	1.331.438.237,61	(500.549.959,52)
Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah pusat	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-

Beban Penyisihan untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-Lain PAD dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 35 pada laporan keuangan ini.

k. Beban Transfer

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.2.	Beban Transfer	109.572.502.947,00	112.110.404.801,00	(2.537.901.854,00)

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer dalam Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp2.537.901.854,00.

Beban Transfer terdiri dari.

Tabel. 5.3.34
Perbedaan Belanja Transfer-LRA dan Beban Transfer LO Tahun 2022

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.3.	Beban Transfer	109.572.502.947,00	112.110.404.801,00	(2.537.901.854,00)
8.3.1.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.942.902.673,00	1.831.842.298,00	111.060.375,00
8.3.1.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	238.425.274,00	215.699.503,00	22.725.771,00
8.3.2.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	-	200.000.000,00
8.3.2.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	107.191.175.000,00	110.062.863.000,00	(2.871.688.000,00)
8.3.2.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-

Untuk perbedaan jumlah Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.3.35
Perbedaan Belanja Transfer antara LRA dan LO Tahun 2022

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Transfer	110.050.724.476,00	109.572.502.947,00	478.221.529,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.384.214.550,00	1.942.902.673,00	441.311.877,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	275.334.926,00	238.425.274,00	36.909.652,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	107.191.175.000,00	107.191.175.000,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-

Penjelasan selisih sebesar Rp478.221.529,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
BKD - Utang DBH Pajak	340.412.870,00	781.724.747,00	441.311.877,00
BKD - Utang DBH Retribusi	46.272.414,00	83.182.066,00	36.909.652,00
	386.685.284,00	864.906.813,00	478.221.529,00

Penjelasan :

- Penambahan utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Triwulan IV kepada 52 Nagari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp340.412.870,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya No:862.1/59/KPTS-BKD/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- Pembayaran utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Triwulan IV kepada 52 Nagari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp781.724.747,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya No: No:862.1/49/KPTS-BUP/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- Penambahan utang belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Triwulan IV kepada 52 Nagari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.272.414,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya No:862.1/59/KPTS-BKD/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- Pembayaran utang belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Triwulan IV kepada 52 Nagari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp83.182.066,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya No: 862.1/49/KPTS-BUP/2022 tanggal 25 Februari 2022.

I. Beban Lain-lain

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.2.	Beban Lain-lain	1.658.326.578,00	3.567.438.148,62	(1.909.111.570,62)

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain dalam Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp1.909.111.570,62.

Beban Lain-lain tersebut merupakan aset ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal 2022 tidak menjadi aset tetap karena dibawah nilai kapitalisasi. Rincian beban lain-lain terdapat pada beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5.3.36
Rincian Beban Lain-lain

No	Nama SKPD	Beban Lain-Lain
1	Dinas Pendidikan	1.272.857.912,00
2	Dinas Kesehatan	138.490.986,00
3	BLUD Puskesmas	111.485.480,00
4	BLUD RSUD	86.640.200,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.997.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertahanan	4.100.000,00
7	Dinas Pangan dan Perikanan	900.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.800.000,00
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.850.000,00
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	3.770.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.500.000,00
12	Dinas Pertanian	645.000,00
13	Sekretariat Daerah	3.900.000,00
14	Kecamatan Timpeh	390.000,00
	JUMLAH	1.658.326.578,00

V.D.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp(5.946.245.659,51) merupakan defisit dari Pendapatan sebesar Rp950.705.159.058,95 dikurangi Beban Operasi sebesar Rp956.651.404.718,46.

V.D.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp945.393.931,00 merupakan reklasifikasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan atas penjualan Aset Lain-lain pada Tahun 2022 ke Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Terdiri dari penerimaan atas penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan dengan pelelangan umum sebanyak dua kali melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan realisasi sebesar Rp560.825.000,00 dan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp377.999.998,00, penjualan atas sisa bongkaran atap gedung sekolah SDN 04 Sungai Rumbai tahun 2021 disetor ke kasda tanggal 20 Januari 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp900.000,00 dan penjualan langsung kendaraan dinas untuk mantan Pejabat Negara (Wakil Bupati Dharmasraya periode 2016-2021) dengan nilai Buku Rp96.616.667,00 terjual Rp102.285.600,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp5.668.933,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan aset yang tidak ada nilai buku pada per 31 Desember 2022.

V.D.5. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp336.162.297,00, merupakan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 sebesar Rp369.162.297,00 dan pengurangan sebesar Rp33.000.000,00 atas pembayaran utang tahun 2021, belanja tidak terduga yang terealisasi untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang direklasifikasi ke beban luar biasa pada Laporan Operasional.

V.D.6. Surplus/ Defisit LO

Defisit Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.337.014.025,51 merupakan penjumlahan dari Defisit dari Operasi sebesar Rp5.946.245.659,51 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp945.393.931,00 setelah Pengurangan beban transfer atas reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban Tak Terduga ke Beban Luar Biasa sebesar Rp336.162.297,00.

Defisit Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp5.337.014.025,51 mengalami penurunan sebesar Rp133.331.999.169,65 bila dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun 2021 surplus sebesar Rp127.994.985.144,14.

V.E PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan arus kas keluar (*Cash Out Flow*) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 sebagai berikut.

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Posisi selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.E.1.a Arus Masuk Kas	910.034.878.480,80	978.557.425.001,87

Arus Masuk Kas merupakan pendapatan operasi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.1
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	21.634.156.143,46	20.495.633.388,25
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.759.700.350,00	2.411.365.382,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836,00	3.524.570.411,00
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	78.250.863.518,34	56.034.600.239,62
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	23.514.204.916,00	30.199.842.269,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.871.006.918,00	3.462.713.300,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	472.528.368.549,00	472.416.143.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	171.656.798.100,00	207.765.406.760,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	54.283.677.000,00	73.540.405.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.631.965.543,00	51.272.491.740,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
13	Penerimaan Hibah	16.580.071.607,00	26.548.313.512,00
14	Penerimaan Dana Darurat	-	-
15	Penerimaan Lainnya	-	30.885.940.000,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	910.034.878.480,80	978.557.425.001,87

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.E.1.b Arus Keluar Kas	806.579.962.188,49	750.795.405.109,16

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Pada Tahun 2022 pengeluaran kas untuk aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.2
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	380.048.882.570,44	380.289.821.307,81
2	Pembayaran Barang	304.834.151.224,05	246.612.992.141,35
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Subsidi	-	-
5	Pembayaran Hibah	11.277.041.621,00	11.804.111.087,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	-	-
7	Pembayaran Tak Terduga	369.162.297,00	164.439.330,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.384.214.550,00	1.708.764.771,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	275.334.926,00	152.413.472,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
11	Pembayaran Transfer bantuan Keuangan ke Desa	107.391.175.000,00	110.062.863.000,00
12	Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	806.579.962.188,49	750.795.405.109,16

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	103.454.916.292,31	227.762.019.892,71

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas operasi sebesar Rp103.454.916.292,31.

Arus Masuk Kas	Rp 910.034.878.480,80
Arus Keluar Kas	<u>(Rp 806.579.962.188,49)</u>
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp 103.454.916.292,31

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.E.2.a Arus Masuk Kas	1.042.004.798,00	363.292.100,00

Pada Tahun 2022 terdapat penerimaan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp1.042.004.798,00 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas untuk Pejabat Negara (Wakil Bupati Dharmasraya Periode 2016-2021)	102.285.600,00
2	Penjualan BMD secara lelang tanggal 12 Oktober 2022	560.822.100,00
3	Penjualan BMD secara lelang tanggal 30 November 2022	377.997.098,00
4	Penjualan atas gedung dan bangunan (penjualan atas sisa bongkaran atap sekolah lama pada SDN 04 Sungai Rumbai)	900.000,00
	Jumlah	1.042.004.798,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.E.2.b Arus Keluar Kas	132.791.374.992,86	166.252.751.216,49

Pada Tahun 2022 terdapat pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar Rp132.791.374.992,86 Pengeluaran kas dimaksud ditujukan untuk perolehan aset tetap sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Perolehan Tanah	-	-
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	48.052.940.621,00	51.541.549.729,92
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	15.750.482.106,12	85.986.356.136,57
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.363.505.690,74	22.155.213.262,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.624.446.575,00	6.569.632.088,00
6	Perolehan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	132.791.374.992,86	166.252.751.216,49

Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (131.749.370.194,86) (165.889.459.116,49)

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Pada Tahun 2022 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(131.749.370.194,86).

Arus Masuk Kas	Rp	1.042.004.798,00
Arus Keluar Kas	Rp	<u>(132.791.374.992,86)</u>
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	(131.749.370.194,86)

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Posisi selama Tahun 2022 arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan adalah.

Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)

V.E.3.a Arus Masuk Kas 0,00 0,00

Pada Tahun 2022 tidak terdapat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang diterima kembali.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.E.3.b Arus Keluar Kas	0,00	0,00

Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan yang akan diterima kembali dan atau dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Tahun 2022 arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat arus kas keluar selama Tahun Anggaran 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.E.4.a Arus Masuk Kas	60.527.830.568,54	62.160.558.243,27

Arus masuk kas selama Tahun 2022 sebesar Rp60.529.389.368,54 yang berasal dari.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penerimaan PFK	60.514.332.692,54	62.122.057.999,27
Penerimaan kas	13.497.876,00	38.500.244,00
Jumlah	60.527.830.568,54	62.160.558.243,27

Rincian penerimaan PFK Tahun 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.4
Penerimaan PFK Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan IWP	2.857.604.948,00	2.739.119.685,00
2	Penerimaan TASPEN	12.794.210.198,00	12.822.474.981,00
3	Penerimaan Tapera	898.349.624,00	2.719.054.451,00
4	Penerimaan BPJS 4%	12.689.377.414,00	12.354.283.452,00
5	Penerimaan JKK	343.339.240,00	349.447.303,00
6	Penerimaan JKM	1.030.003.923,00	1.048.342.812,00
7	Penerimaan PPN	15.579.104.165,65	14.520.254.635,27
8	Penerimaan PPh Psl 21	11.106.960.279,00	10.946.681.889,00
9	Penerimaan PPh Psl 22	647.333.537,89	885.499.710,00
10	Penerimaan PPh Psl 23	132.028.334,00	174.347.400,00
11	Penerimaan PPh Psl 26	9.394.000,00	1.452.654,00
12	Penerimaan PPh Psl 4	2.217.383.737,00	2.958.996.324,00
13	Penerimaan Tapera Pegawai PPPK	23.650.695,00	42.104.108,00
14	Penerimaan Tapera Pemberi kerja	180.862.344,00	550.028.643,00
15	Penerimaan Tapera Pemberi kerja PPPK	4.730.253,00	9.969.952,00
	Jumlah	60.514.332.692,54	62.122.057.999,27

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 merupakan penerimaan dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Penerimaan PFK sebesar Rp60.514.332.692,54 terdiri dari penerimaan PFK yang telah disetor pada tahun 2022 sebesar Rp60.391.506.255,54 dan sebesar Rp122.816.437,00 adalah PPN dan PPh 22 yang belum disetorkan ke kas Negara pada kegiatan Kelompok Masyarakat di Dinas Pendidikan.

Penerimaan kas sebesar Rp13.497.876,00 terdiri dari Rp13.050.752,00 adalah pengembalian kompensasi pajak Negara ke daerah atas pengembalian uang muka CV.Artha Mandiri Tahun 2017 dan saldo jasa giro dana BOS Tahun 2022 yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp447.124,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.E.4.b Arus Keluar Kas	60.703.700.362,81	61.855.171.336,00

Arus keluar kas selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.703.700.362,81 yang berasal dari:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penyetoran PFK	60.665.200.118,81	61.853.274.136,00
Pengeluaran Kas	38.500.244,00	1.897.200,00
Jumlah	60.703.700.362,81	61.855.171.336,00

Tabel 5.5.5
Penyetoran PFK Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penyetoran IWP	2.857.604.948,00	2.739.119.685,00
2	Penyetoran TASPEN	12.794.210.198,00	12.822.474.981,00
3	Penyetoran Tapera	898.349.624,00	2.719.054.451,00
4	Penyetoran BPJS 4%	12.689.377.414,00	12.354.283.452,00
5	Penyetoran JKK	343.339.240,00	349.447.303,00
6	Penyetoran JKM	1.030.003.923,00	1.048.342.812,00
7	Penyetoran PPN	15.673.676.572,92	14.330.758.132,00
8	Penyetoran PPh Psl 21	11.106.960.279,00	10.872.177.922,00
9	Penyetoran PPh Psl 22	703.628.556,89	880.993.517,00
10	Penyetoran PPh Psl 23	132.028.334,00	174.070.200,00
11	Penyetoran PPh Psl 26	9.394.000,00	1.452.654,00
12	Penyetoran PPh Psl 4	2.217.383.737,00	2.958.996.324,00
13	Penyetoran Tapera Pegawai PPPK	23.650.695,00	42.104.108,00
14	Penyetoran Tapera Pemberi kerja	180.862.344,00	550.028.643,00
15	Penyetoran Tapera Pemberi kerja PPPK	4.730.253,00	9.969.952,00
	Jumlah	60.665.200.118,81	61.853.274.136,00

Penyetoran PFK Tahun 2022 sebesar Rp60.665.200.118,81 merupakan utang PFK Tahun 2021 yang disetor ke Kas Negara Tahun 2022 sebesar Rp273.683.863,27 terdiri dari PPN sebesar Rp193.305.603,27 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp80.378.260,00 pada belanja dana BOS Dinas Pendidikan Tahun 2021 dan penyetoran PFK Tahun 2022 sebesar Rp60.391.516.255,54.

Penyetoran kas sebesar Rp38.500.244,00 adalah penyetoran kas lainnya ke kas daerah pada Tahun 2022 pada Bendahara BOS Dinas Pendidikan berupa pungutan pajak restoran yang belum disetor pada tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(175.869.794,27)	(305.386.907,27)

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2022 arus kas bersih (arus masuk kas – arus keluar kas) dari aktivitas transitoris sebesar Rp(174.310.994,27).

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	(28.470.323.696,82)	62.177.947.683,49

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) sebesar Rp(28.468.764.896,82).

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	(28.470.323.696,82)	62.177.947.683,49
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas	66.539.152.597,42	6.155.879.601,54
Saldo Awal Kas di Kas BLUD	3.500.297.770,29	1.526.712.732,95
Saldo Awal Kas di Dana BOS	154.484.863,00	645.579.320,00
Saldo Awal Kas Lainnya	312.184.107,27	
Jumlah Saldo Awal Kas	70.506.119.337,98	8.328.171.654,49
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	34.291.745.810,17	66.539.152.597,42
Saldo Akhir Kas di BLUD	7.568.677.529,99	3.500.297.770,29
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir pada Dana BOS	52.108.740,00	154.484.863,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	123.263.561,00	312.184.107,27
Saldo Akhir Kas	42.035.795.641,16	70.506.119.337,98

Perbedaan komponen yang terdapat pada Saldo Akhir Kas di LAK dan SILPA di LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo akhir kas di LAK sebesar Rp42.035.795.641,16 sedangkan SILPA menurut LRA sebesar Rp41.912.532.080,16 sehingga terdapat selisih sebesar Rp123.263.561,00. Selisih tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Uraian	Rp
1.	SILPA LRA	41.912.532.080,16
2.	Saldo Arus Kas	42.035.795.641,16
	Selisih	(123.263.561,00)
Rincian Selisih		
a.	Kas Lainnya atas jasa giro dana BOS belum setor ke Kas Daerah	(447.124,00)
b.	Kas Lainnya atas penerimaan PFK yang belum disetor ke Kas Negera pada Dinas Pendidikan	(122.816.437,00)
	Selisih	(123.263.561,00)

VF. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
V.F. Ekuitas	2.458.059.251.659,61	2.488.069.809.561,05

Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.458.059.251.659,61 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.488.069.809.561,05.

Uraian dan rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

Saldo awal ekuitas	Rp	2.488.069.809.561,05
Surplus/Defisit LO	Rp	(5.337.014.025,51)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar		
a. Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan	Rp	0,00
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Rp	(24.673.543.875,93)
Saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas	Rp	2.458.059.251.659,61

BAB VI

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

VI.A Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, mempunyai visi yaitu.

“Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya”

Definisi kalimat Visi RPJMD :

Maju :

Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Mandiri :

Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal.

Berbudaya :

Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa.

Misi

Berdasarkan VISI di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai enam Misi, yaitu.

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.

- 4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
- 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
- 6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Letak dan Luas Wilayah

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah ± 2.961,13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi 0⁰ 47'07" Lintang Selatan dan 1⁰ 41' 56" Lintang Selatan dan,101⁰ 09' 21",BT -- 101⁰ 54' 27" Bujur Timur.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan, luas wilayah menurut per kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	47,63
2	Koto Besar	Koto Besar	488,19
3	Asam Jujuhan	Sungai Limau	257,72
4	Koto Baru	Koto Baru	251,35
5	Koto Salak	Koto Salak	464,39
6	Tiumang	Tiumang	129,18
7	Padang Laweh	Padang Laweh	59,76
8	Sitiung	Sitiung	87,68
9	Timpeh	Tabek	237,93
10	Pulau Punjung	Sungai Dareh	482,50
11	Sembilan Koto	Sembilan Koto	454,80
	Luas Dharmasraya		2.961,13

Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2022

Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan.

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Dharmasraya, penduduk kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2020 berjumlah 228.591 jiwa, dengan kepadatan penduduk 77 jiwa/km2. Tingkat pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 meningkat 3,09 % dengan kepadatan 64,64 jiwa/km². dan merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3.407 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri 1.101 PNS Laki-Laki dan 2.306 orang PNS Perempuan. Selain itu terdapat juga Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Instansi Vertikal sebanyak 321 orang terdiri dari129 PNS perempuan dan 192 PNS laki-laki.

Tabel 6.2

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin per Desember 2021

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sampai dengan SD	5	1	6
2	SMP/ Sederat	4	3	7
3	SMA/ Sederajat	138	81	219
4	Diploma I,II/ Akta I, II	47	340	387
5	Diploma III/ Akta III / Sarjana Muda	63	162	225
6	Tingkat Sarjana/Doktor	844	1719	2563
	Total	1101	2306	3407

Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2022

VI.B Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi mengalami pergeseran dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya. Secara lebih rinci Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam tiga tipe,yaitu.

1. Perangkat Daerah Tipe A, yaitu.

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Inspektorat
- 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 4) Badan Keuangan Daerah
- 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 7) Dinas Pertanian
- 8) Kecamatan Asam Jujuhan
- 9) Kecamatan Koto Baru
- 10) Kecamatan Koto Besar
- 11) Kecamatan Koto Salak
- 12) Kecamatan Pulau Punjung
- 13) Kecamatan Sembilan Koto
- 14) Kecamatan Sitiung
- 15) Kecamatan Sungai Rumbai
- 16) Kecamatan Timpeh
- 17) Kecamatan Tiumang

2. Perangkat Daerah Tipe B, yaitu.

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika,
- 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 8) Dinas Lingkungan Hidup

- 9) Kecamatan Padang Laweh
- 10) Dinas Pangan dan Perikanan

3. Perangkat Daerah Tipe C, yaitu.

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
- 5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 6) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dan
- 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 8) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 3 SKPD yang masih tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Tahun 2010 yakni RSUD Sungai Dareh, BPBD, dan Kantor Kesbangpol. Ketiga SKPD tersebut tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukannya ditetapkan. Peraturan Daerah dimaksud di atas terdiri dari.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Berikut rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan/urusan penunjang, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.3
SKPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Urusan Penunjang

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
1	Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan
2	Kebudayaan	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Kepemudaan dan Olahraga		
4	Pariwisata		
5	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan
6	Sosial	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP)		
13	Penanaman Modal	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
15	Perindustrian		
16	Perdagangan		
17	Energi dan Sumber Daya Mineral		-
18	Transmigrasi	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Tenaga Kerja		
20	Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Statistik		
22	Persandian		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25	Pertanahan		
26	Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
27	Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
28	Kehutanan		-
29	Pangan	16	Dinas Pangan dan Perikanan
30	Pertanian	17	Dinas Pertanian
31	Kelautan dan Perikanan		
32	Perpustakaan	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Kearsipan		
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	Penelitian dan Pengembangan		
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Pemilu Legislatif pada tanggal 17 April 2019 dan pelantikan terhadap 30 orang anggota DPRD terpilih untuk periode 2019 s.d. 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya definitif dilantik pada tanggal 20 November 2019.

Tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) pada tanggal 9 Desember 2020. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih untuk periode 2021 s.d. 2024 dilaksanakan tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat.

Berikut Nama Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih dari tahun 2005 s.d. sekarang.

Tabel 6.4
Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Terpilih

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan
1	H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE	Ir. Tugimin	2005-2010
2	Ir. H. Adi Gunawan, MM	Drs. H. Syafruddin R (almarhum)	2010-2015
3	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos	2015-2020
4	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	Drs. Dasril Panin Dt. Labuan (almarhum)	2020-2024

Secara umum Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya periode 2020-2024, yaitu.

- 1) Bupati : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E. .
- 2) Ketua DPRD : Pariyanto, S.H.
- 3) Sekretaris Daerah : H. Adlisman, S.Sos, M.Si.

VI.C Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910-1867-SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Bupati Dharmasraya meneruskan dengan Instruksi Bupati Bupati Dharmasraya Nomor 188.55/1/INST-BUP/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai tanggal 28 Desember 2017. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Transaksi pembayaran melalui mekanisme non tunai dilakukan untuk pembayaran sebagai berikut.

- 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- 3. Belanja Makanan dan Minuman
- 4. Belanja Honorarium dan lembur PNS dan Non PNS
- 5. Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor, Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas
- 6. Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai habis, Seminar Kit, Belanja Cetak dan Penggandaan

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pembayaran secara non tunai sebelum ditetapkanya Pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara nasional untuk pembayaran Belanja Pegawai.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
 Nomor : 3 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
1	Badan Keuangan Daerah	Piutang Pajak	36.232.224.028,00	5.794.824.266,00	3.540.249.939,00	38.486.798.355,00
		- Pajak PBB-P2	35.163.427.868,00	4.504.215.953,00	2.471.453.779,00	37.196.190.042,00
		- Pajak Penerangan Jalan	1.067.255.885,00	1.094.177.313,00	1.067.255.885,00	1.094.177.313,00
		- Pajak Restoran	1.540.275,00		1540275,00	-
		- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	196.431.000,00		196.431.000,00
2		Piutang Retribusi	767.327.811,00	405.534.200,00	226.030.100,00	946.831.911,00
		- Retribusi Pelayanan Pasar	2.300.000,00		2.300.000,00	-
		- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	240.299.261,00	111.150.000,00	133.650.000	217.799.261,00
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53.067.000,00	48.445.800,00	53.067.000,00	48.445.800,00
		- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	471.661.550,00	209.885.400,00	37.013.100,00	644.533.850,00
		- Retribusi Retribusi Sampah		11.678.000,00		11.678.000,00
		- Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		24.375.000,00		24.375.000,00
3		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.284.830,00	12032841,00	10.284.830,00	12.032.841,00
4		Piutang Lain-lain PAD yang sah	18.280.899.828,37	9.450.132.727,18	16.352.882.093,92	11.378.150.461,63
		- Piutang BLUD	13.310.387.523,00	6.240.168.020,00	13.310.387.523,00	6.240.168.020,00
		- Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00			554.897.679,00
		- Piutang Bunga Deposito	-			-
		- Piutang Air Minum UPT SPAM	-			-
		- Piutang TGR	4.410.484.635,37	3.209.252.445,86	3.042.494.570,92	4.577.242.510,31
		- Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00		0,00	5.129.991,00
		- Piutang Remunerasi DBH Treasury Deposit Facility (TDF)		652.261,32		652.261,32
		- Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain		60.000,00	0,00	60.000,00
5		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.630.356.468,00	9.186.486.845,00	9.630.356.468,00	9.186.486.845,00
		- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.272.094.248,00	2.432.299.879,00	2.272.094.248,00	2.432.299.879,00
		- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.979.521.626,00	1.155.163.560,00	1.979.521.626,00	1.155.163.560,00
		- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5.368.133.877,00	5.580.621.185,00	5.368.133.877,00	5.580.621.185,00
		- Pajak Air Permukaan (PAP)	10.606.717,00	18.402.221,00	10.606.717,00	18.402.221,00
		- Pajak Rokok	0,00			-
7		Piutang Lainnya	13.050.752,00	0,00	13050752,00	-
		Jumlah	64.934.143.717,37	24.849.010.879,18	29.772.854.182,92	60.010.300.413,63



Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
		NIHIL		
	JUMLAH			



Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya	554.897.679,00		-
			554.897.679,00	
	1. Kec. Pulau Punjung	122.349.281,00		-
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		-	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		-	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		122.349.281,00	-
				-
	2. Kec. Sitiung	42.186.005,00		-
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		-	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		-	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		42.186.005,00	-
				-
	3. Kec. Koto Baru	339.304.897,00		-
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		-	-

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		-	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		339.304.897,00	-
				-
4.	Kec. Sungai Rumbai	51.057.496,00		-
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		-	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		-	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		51.057.496,00	-
JUMLAH		554.897.679,00	554.897.679,00	-



Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertaka n	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 9-12
1	2006 dan 2007 2012 2013 2017	PT BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari	Perda No. 2 Tahun 2009 Perda No.8 Tahun 2017	11.000 lembar saham Seri A 3.236 lembar saham Seri A 5.400 lembar saham seri A 3.716 lembar saham seri A	25.852.000.000,00	25.852.000.000,00	-	25.852.000.000,00	-		-	25.852.000.000,00
				saham seri A.000232 Saham Nomor A.000232				-				
2	2010	PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	Surat Gubernur Sumbar	900 lembar saham Seri A 600.000 lembar Saham Seri B	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
3	2012	PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung		10.000 lembar saham Seri B	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-		100.000.000,00
JUMLAH					27.452.000.000,00	27.452.000.000,00	-	27.452.000.000,00	-	-	-	27.452.000.000,00



Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	OPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat DPRD	64.042.307.564,00	1.517.870.832,00	1.933.528.530,00	63.626.649.866,00
2	Sekretariat Daerah	505.623.295.325,00	14.949.606.295,06	29.087.339.293,00	491.485.562.327,06
3	Kec. Pulau Punjung	2.544.907.545,00	8.000.000,00	139.590.000,00	2.413.317.545,00
4	Kec. Sitiung	2.004.317.865,00	45.184.520,00	48.915.000,00	2.000.587.385,00
5	Kec. Koto Baru	3.306.365.686,00	139.704.000,00	-	3.446.069.686,00
6	Kec. Sungai Rumbai	3.091.561.053,00	-	-	3.091.561.053,00
7	Kec. IX Koto	808.276.379,00	14.000.000,00	26.715.000,00	795.561.379,00
8	Kec. Timpeh	2.830.507.271,00	148.680.125,00	199.747.457,00	2.779.439.939,00
9	Kec. Padang Laweh	1.832.928.683,00	-	19.546.000,00	1.813.382.683,00
10	Kec. Tiumang	2.934.837.284,00	-	57.700.000,00	2.877.137.284,00
11	Kec Koto Besar	3.148.939.052,00	-	27.500.000,00	3.121.439.052,00
12	Kec Koto Salak	2.516.606.224,00	266.200.000,00	157.950.000,00	2.624.856.224,00
13	Kec. Asam Jujuhan	3.473.762.125,00	24.150.000,00	61.463.800,00	3.436.448.325,00
14	Dinas PUPR	1.599.306.404.134,49	88.690.722.700,32	3.368.745.832,00	1.684.628.381.002,81
15	Dinas PERKIMTAN	31.123.254.710,00	22.696.726.480,00	292.850.000,00	53.527.131.190,00
16	Dinas Perhubungan	14.923.747.886,00	439.888.480,00	321.000.000,00	15.042.636.366,00
17	Dinas Kesehatan	175.016.203.401,63	16.663.496.160,37	7.557.762.858,00	184.121.936.704,00
18	RSUD	163.315.274.427,52	17.761.427.745,00	1.957.785.639,60	179.118.916.532,92
19	Dinas Pendidikan	416.871.588.779,49	27.904.099.475,93	775.546.207,00	444.000.142.048,42
20	Dinas BUDPARPORA	105.803.055.752,85	456.452.938,00	296.480.000,00	105.963.028.690,85
21	Dinas TRANSNAKER	6.694.572.581,00	153.323.000,00	-	6.847.895.581,00
22	DSP3KB	7.002.590.598,00	1.755.886.263,19	509.608.507,00	8.248.868.354,19
23	DISDUKCAPIL	4.548.592.822,00	631.178.000,00	96.229.250,00	5.083.541.572,00
24	Dinas PMD	1.428.703.300,00	620.244.138,00	283.294.138,00	1.765.653.300,00
25	Dinas Pertanian	39.634.345.715,30	1.335.579.340,05	62.113.453,00	40.907.811.602,35
26	Dinas Pangan dan Perikanan	18.798.630.951,50	1.714.000.000,00	23.250.000,00	20.489.380.951,50
27	Dinas KUMPERDAG	81.692.572.556,80	-	273.772.600,00	81.418.799.956,80
28	BKD	10.669.293.510,00	530.704.000,00	243.413.160,00	10.956.584.350,00
29	DPMPTSP	2.147.265.441,00	454.260.838,00	157.500.000,00	2.444.026.279,00
30	Inspektorat Kabupaten	3.068.373.687,00	736.978.459,00	57.704.000,00	3.747.648.146,00
31	BAPPPEDA	1.697.805.442,00	412.343.607,00	217.072.057,00	1.893.076.992,00
32	DLH	11.532.926.205,00	834.532.500,00	976.266.412,00	11.391.192.293,00
33	Kantor KESBANGPOL	258.254.500,00	29.435.000,00	-	287.689.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.551.227.096,00	1.000.000,00	-	6.552.227.096,00
35	BPBD	17.005.512.808,00	22.381.483.018,00	30.866.410.232,00	8.520.585.594,00
36	BKPSDM	2.115.542.136,00	148.210.000,00	13.410.000,00	2.250.342.136,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.875.846.483,00	100.531.000,00	33.385.000,00	5.942.992.483,00
38	Dinas KOMINFO	3.757.795.544,00	639.501.000,00	-	4.397.296.544,00
	JUMLAH	3.328.997.992.524,58	224.205.399.914,92	80.143.594.425,60	3.473.059.798.013,90



KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	OPD	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Sekretariat DPRD	64.042.307.564,00	1.517.870.832,00	1.933.528.530,00	63.626.649.866,00
2	Sekretariat Daerah	505.623.295.325,00	14.949.606.295,06	29.087.339.293,00	491.485.562.327,06
3	Kec. Pulau Punjung	2.544.907.545,00	8.000.000,00	139.590.000,00	2.413.317.545,00
4	Kec. Sitiung	2.004.317.865,00	45.184.520,00	48.915.000,00	2.000.587.385,00
5	Kec. Koto Baru	3.306.365.686,00	139.704.000,00	-	3.446.069.686,00
6	Kec. Sungai Rumbai	3.091.561.053,00	-	-	3.091.561.053,00
7	Kec. IX Koto	808.276.379,00	14.000.000,00	26.715.000,00	795.561.379,00
8	Kec. Timpeh	2.830.507.271,00	148.680.125,00	199.747.457,00	2.779.439.939,00
9	Kec. Padang Laweh	1.832.928.683,00	-	19.546.000,00	1.813.382.683,00
10	Kec Tiumang	2.934.837.284,00	-	57.700.000,00	2.877.137.284,00
11	Kec Koto Besar	3.148.939.052,00	-	27.500.000,00	3.121.439.052,00
12	Kec Koto Salak	2.516.606.224,00	266.200.000,00	157.950.000,00	2.624.856.224,00
13	Kec. Asam Jujuhan	3.473.762.125,00	24.150.000,00	61.463.800,00	3.436.448.325,00
14	Dinas PUPR	1.599.306.404.134,49	88.690.722.700,32	3.368.745.832,00	1.684.628.381.002,81
15	Dinas PERKIMTAN	31.123.254.710,00	22.696.726.480,00	292.850.000,00	53.527.131.190,00
16	Dinas Perhubungan	14.923.747.886,00	439.888.480,00	321.000.000,00	15.042.636.366,00
17	Dinas Kesehatan	175.016.203.401,63	16.663.496.160,37	7.557.762.858,00	184.121.936.704,00
18	RSUD	163.315.274.427,52	17.761.427.745,00	1.957.785.639,60	179.118.916.532,92
19	Dinas Pendidikan	416.871.588.779,49	27.904.099.475,93	775.546.207,00	444.000.142.048,42
20	Dinas BUDPARPORA	105.803.055.752,85	456.452.938,00	296.480.000,00	105.963.028.690,85
21	Dinas TRANSSAKER	6.694.572.581,00	153.323.000,00	-	6.847.895.581,00
22	DSP3KB	7.002.590.598,00	1.755.886.263,19	509.608.507,00	8.248.868.354,19
23	DISDUKCAPIL	4.548.592.822,00	631.178.000,00	96.229.250,00	5.083.541.572,00
24	Dinas PMD	1.428.703.300,00	620.244.138,00	283.294.138,00	1.765.653.300,00
25	Dinas Pertanian	39.634.345.715,30	1.335.579.340,05	62.113.453,00	40.907.811.602,35
26	Dinas Pangan dan Perikanan	18.798.630.951,50	1.714.000.000,00	23.250.000,00	20.489.380.951,50
27	Dinas KUMPERDAG	81.692.572.556,80	-	273.772.600,00	81.418.799.956,80
28	BKD	10.669.293.510,00	530.704.000,00	243.413.160,00	10.956.584.350,00
29	DPMPTSP	2.147.265.441,00	454.260.838,00	157.500.000,00	2.444.026.279,00
30	Inspektorat Kabupaten	3.068.373.687,00	736.978.459,00	57.704.000,00	3.747.648.146,00
31	BAPPPEDA	1.697.805.442,00	412.343.607,00	217.072.057,00	1.893.076.992,00
32	DLH	11.532.926.205,00	834.532.500,00	976.266.412,00	11.391.192.293,00
33	Kantor KESBANGPOL	258.254.500,00	29.435.000,00	-	287.689.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.551.227.096,00	1.000.000,00	-	6.552.227.096,00
35	BPBD	17.005.512.808,00	22.381.483.018,00	30.866.410.232,00	8.520.585.594,00
36	BKPSDM	2.115.542.136,00	148.210.000,00	13.410.000,00	2.250.342.136,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.875.846.483,00	100.531.000,00	33.385.000,00	5.942.992.483,00
38	Dinas KOMINFO	3.757.795.544,00	639.501.000,00	-	4.397.296.544,00
	JUMLAH	3.328.997.992.524,58	224.205.399.914,92	80.143.594.425,60	3.473.059.798.013,90

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	MUTASI								REKLASIFIKAS I/ PENGHAPUSA N	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			BERKURANG				BERTAMBAH					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATA N DAN MESIN		
1	Sekretariat Daerah			6.360.000,00				6.360.000,00			-	
2	Dinas PUPR	2.935.383.067,00		158.920.000,00	468.144.000,00			2.923.370.613,00			5.231.689.680,00	
3	Dinas PERKIMTAN	239.520.000,00									239.520.000,00	
4	Dinas Kesehatan	7.037.737.858,00		7.037.737.858,00							-	
5	DISKUMPERDAG	332.915.000,00									332.915.000,00	
6	BPBD	368.216.182,00			4.232.487.408,00			9.957.809.470,00			6.093.538.244,00	
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	836.767.350,00									836.767.350,00	
	JUMLAH	11.750.539.457,00	-	7.196.657.858,00	4.706.991.408,00	-	-	-	12.887.540.083,00	-	-	12.734.430.274,00

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Aset lain-lain	205.255.939.395,84	9.632.009.255,60	13.831.767.542,00	201.056.181.109,44
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	61.201.975.473,84	9.265.666.255,60	10.039.697.456,00	60.427.944.273,44
	Aset Yang Dipinjampaikan	8.955.959.094,00	366.343.000,00	1.375.134.414,00	7.947.167.680,00
	Aset Yang Akan Diserahkan Kemasyarakat	135.098.004.828,00	-	2.416.935.672,00	132.681.069.156,00
2	Aset Tidak Berwujud	4.013.267.277,00	331.739.000,00	-	4.345.006.277,00
	Aset Tidak Berwujud	4.013.267.277,00	331.739.000,00	-	4.345.006.277,00
	JUMLAH	209.269.206.672,84	9.963.748.255,60	13.831.767.542,00	205.401.187.386,44



Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

NIHIL



KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	765.399.544,27	257.846.811,27	765.399.544,27	257.846.811,27
2	Pendapatan Diterima Dimuka	102.623.340,64	83.144.415,10	102.623.340,64	83.144.415,10
3	Utang Belanja	12.286.454.764,47	11.321.739.731,88	12.286.454.764,47	11.321.739.731,88
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00			4.891.202.700,00
	JUMLAH	18.045.680.349,38	11.662.730.958,25	13.154.477.649,38	16.553.933.658,25



Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		
	JUMLAH	-	-	-	-

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR SUB KEGIATAN-SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN
DAN DIANGGARAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH DIANGGARKAN KEMBALI TADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONSTRUKS DALAM PEKERJAAN								
						-	-	
JUMLAH TOTAL								

NIHIL

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

KABUPATEN DHARMASRAYA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aset 8 = 5+6+7	Kewajiban Jangka pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban 11 = 9+10	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x18
								NIHIL										

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

KABUPATEN DHARMASRAYA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				NIHIL					

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA